



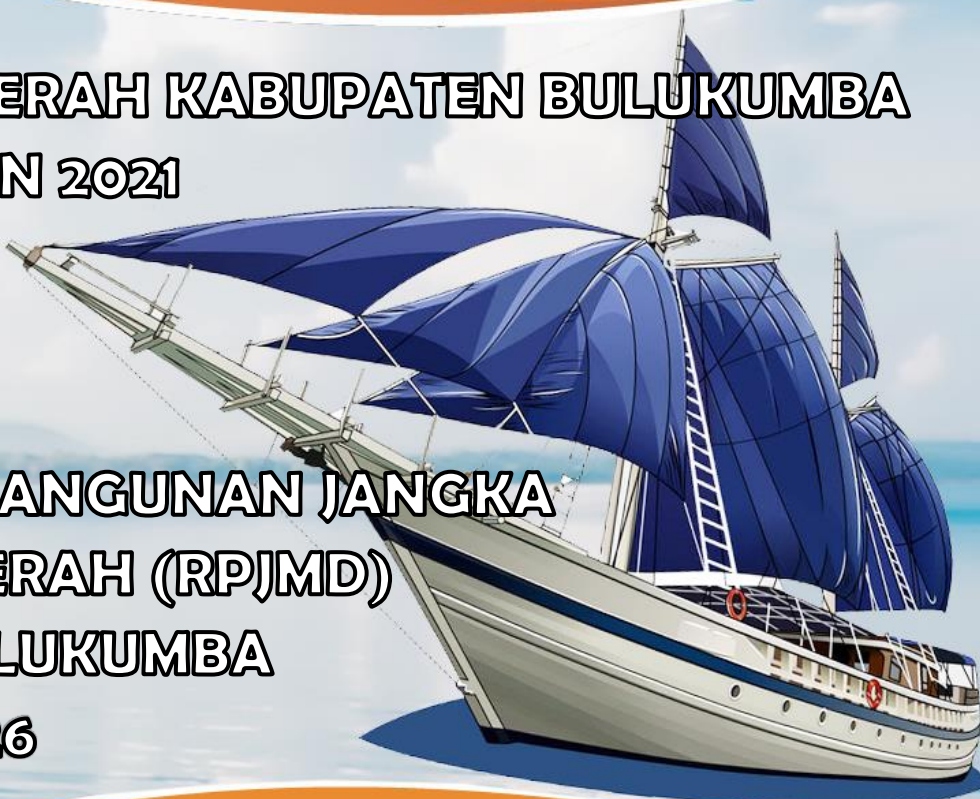
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

ಕರ್ವಣಾ ಏಕನ'ಱ ಸಸುಫಸ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026



RPJMD

MUCHTAR ALI YUSUF H.A.EDY MANAF,S.Sos

2021-2026



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bulukumba.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.



10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
17. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
18. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulukumba.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bulukumba.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja- PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
26. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Pokok-pokok pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses.
30. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

32. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup
- (4) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2021-2026;
- b. dasar penyusunan RKPD; dan
- c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui BAPPEDA.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan
- c. evaluasi terhadap hasil.



Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW Provinsi, serta memperhatikan RTRW dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPD).
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.
- (3) Evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJPD Tahun 2026-2046 dan RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

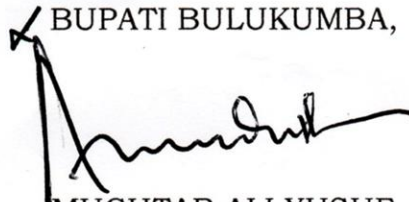
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

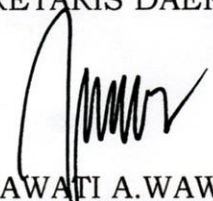
Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI BULUKUMBA,


MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,


MISBAWATI A. WAWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.04.090.21



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat maka disusun dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026.

Selanjutnya RPJMD akan memberi arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai visi dan misi Bupati sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba dengan memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMN, RTRW Kabupaten Bulukumba.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba setiap Tahun Anggaran dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Desa di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 4

L

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....I-1

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4

1.3 Hubungan antar Dokumen I-7

1.4 Maksud dan Tujuan..... I-9

1.5 Sistematika Penyusunan.....I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....II-1

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.....II-2

2.1.3 Topografi II-2

2.1.4 Geologi II-3

2.1.5 Hidrologi.....II-4

2.1.6 Klimatologi II-7

2.1.7 Penggunaan Lahan.....II-8

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana..... II-10

2.1.9 Aspek Demografi..... II-15

2.1.10 Pengembangan Wilayah..... II-19

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-24

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-24

2.2.2 Kesejahteraan Sosial II-32

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga..... II-39

2.3 Aspek Pelayanan Umum II-40

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... II-40

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-66

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II-115

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-124

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan..... II-126

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan..... II-138

2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum II-139

2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-140

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah II-140

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-141

2.4.3 Iklim Berinvestasi II-141

2.4.4 Sumberdaya Manusia II-142

2.5 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-143

2.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)..... II-145

2.7 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 II-164

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-2

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-3

3.1.2 Neraca Daerah..... III-17

3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-22
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-22
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-23
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-26
3.3.1	Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal.....	III-26
3.3.2	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-29
3.3.3	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-33
3.4	Dampak Pandemi terhadap pendapatan daerah tahun 2020.....	III-37
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH		IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1	Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.2	Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah).....	IV-5
4.2	Isu Strategis.....	IV-12
4.2.1	Isu Strategis Global	IV-12
4.2.2	Isu Kebijakan Nasional.....	IV-15
4.2.3	Isu Strategis Daerah	IV-16
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi.....	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V-5
5.4	Keterkaitan Dokumen Perencanaan	V-11
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....		VI-2
6.1.	Strategi	VI-2
6.2.	Arah Kebijakan	VI-3
6.3	Program Pembangunan Daerah.....	VI-9
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....		VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2	Program Perangkat Daerah.....	VII-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VIII-1
8.1	Indikator Kinerja Daerah.....	VIII-1
8.1.1	Indikator Makro Pembangunan	VIII-1
8.1.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-4
8.1.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VIII-7
8.2	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VIII-21
8.3	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	VIII-23
BAB IX PENUTUP		IX-1
9.1	Pedoman Transisi.....	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-1

Daftar Tabel

Tabel I-1 Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba I-8

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba.....II-1

Tabel II-2 Daftar Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Bulukumba II-2

Tabel II-3 Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) dan Jarak ke Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 II-3

Tabel II-4 Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bulukumba II-4

Tabel II-5 Sungai di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 II-6

Tabel II-6 Data Curah Hujan Bulanan menurut Pos Hujan.....II-7

Tabel II-7 Rincian Tata Guna Lahan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 II-9

Tabel II-8 Data Luas Resiko Ancaman Banjir Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020 II-11

Tabel II-9 Data Luas Resiko Ancaman Longsor Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020..... II-12

Tabel II-10 Data Luas Resiko Ancaman Abrasi Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020 II-13

Tabel II-11 Data Ruas dan Kondisi Kanal dalam Kota Bulukumba Tahun 2020..... II-14

Tabel II-12 Data Luas Resiko Ancaman Angin Kencang Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020 II-14

Tabel II-13 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan Tahun 2020..... II-15

Tabel II-14 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020..... II-16

Tabel II-15 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 II-17

Tabel II-16 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2020..... II-18

Tabel II-17 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 II-18

Tabel II-18 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2020 II-19

Tabel II-19 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan..II-25

Tabel II-20 PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-26

Tabel II-21 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 - 2020 ... II-28

Tabel II-22 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016-2020 II-30

Tabel II-23 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 II-30

Tabel II-24 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 II-31

Tabel II-25 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2020 II-32

Tabel II-26 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bulukumba 2016-2020 II-32

Tabel II-27 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Beberapa Wilayah di Sulawesi Selatan,.. II-33

Tabel II-28 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2016-2020 II-37

Tabel II-29 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba (Persen), tahun 2020..... II-38

Tabel II-30 Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 II-39

Tabel II-31 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Bulukumba 2016 – 2020 II-39

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel II-32 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016 - 2020..... II-41

Tabel II-33 Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-41

Tabel II-34 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) II-42

Tabel II-35 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016 – 2020..... II-43

Tabel II-36 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016 – 2020..... II-43

Tabel II-37 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020 II-44

Tabel II-38 Rasio Guru-Murid dan Sekolah Kabupaten Bulukumba,Tahun 2016 - 2020.II-44

Tabel II-39 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-45

Tabel II-40 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-45

Tabel II-41 Angka Kematian Balita (AKBa) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-45

Tabel II-42 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-46

Tabel II-43 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-46

Tabel II-44 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020.. II-47

Tabel II-45 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk II-47

Tabel II-46 Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik Per Satuan Penduduk II-48

Tabel II-47 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-48

Tabel II-48 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-49

Tabel II-49 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-49

Tabel II-50 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)..... II-50

Tabel II-51 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-50

Tabel II-52 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA II-50

Tabel II-53 Tingkat Prevalensi Tuberkolosis..... II-51

Tabel II-54 Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-51

Tabel II-55 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD II-52

Tabel II-56 Angka Kejadian Malaria Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-52

Tabel II-57 Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-53

Tabel II-58 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-53

Tabel II-59 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-54

Tabel II-60 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-55

Tabel II-61 Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-55

Tabel II-62 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-56

Tabel II-63 Kondisi Jalan dan Panjang Jalan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 II-56

Tabel II-64 Kondisi Jembatan berdasarkan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 II-56

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel II-65 Proporsi Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-57

Tabel II-66 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-57

Tabel II-67 Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-57

Tabel II-68 Rasio rumah layak huni Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-58

Tabel II-69 Persentase permukiman yang tertata Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-59

Tabel II-70 Persentase lingkungan permukiman kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-59

Tabel II-71 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-59

Tabel II-72 Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-59

Tabel II-73 Persentase penduduk berakses air minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-60

Tabel II-74 Persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020.. II-60

Tabel II-75 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-60

Tabel II-76 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-61

Tabel II-77 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-61

Tabel II-78 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-61

Tabel II-79 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-62

Tabel II-80 Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020. II-62

Tabel II-81 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di II-63

Tabel II-82 Sarana Panti Asuhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 II-63

Tabel II-83 Persentase Jumlah Korban Bencana yang Ditangani di..... II-64

Tabel II-84 Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di II-64

Tabel II-85 Perentase PMKS yang tertangani di II-64

Tabel II-86 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-65

Tabel II-87 Persentase Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-66

Tabel II-88 Angka sengketa pengusaha-pekerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-66

Tabel II-89 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-67

Tabel II-90 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-67

Tabel II-91 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-67

Tabel II-92 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-68

Tabel II-93 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-68

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel II-94 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-68

Tabel II-95 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-69

Tabel II-96 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar, mendapatkan Pelatihan dan ditempatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-69

Tabel II-97 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar, mendapatkan Pelatihan dan ditempatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-69

Tabel II-98 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar. mendapatkan Pelatihan dan ditempatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-70

Tabel II-99 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-70

Tabel II-100 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-71

Tabel II-101 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-71

Tabel II-102 Rasio KDRT Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-71

Tabel II-103 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-72

Tabel II-104 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-72

Tabel II-105 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-73

Tabel II-106 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 ... II-74

Tabel II-107 Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-74

Tabel II-108 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-75

Tabel II-109 Persentase Bersertifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-75

Tabel II-110 Penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-75

Tabel II-111 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020 II-76

Tabel II-112 Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020 II-76

Tabel II-113 Indeks kualitas Udara Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020..... II-76

Tabel II-114 Indeks kualitas Tutupan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020..... II-77

Tabel II-115 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020 II-77

Tabel II-116 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA II-77

Tabel II-117 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020..... II-78

Tabel II-118 Penetapan Hak MHA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020 II-78

Tabel II-119 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020 II-78

Tabel II-120 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020 II-79

Tabel II-121 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-79

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel II-122 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-79

Tabel II-123 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-79

Tabel II-124 Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-80

Tabel II-125 Persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-80

Tabel II-126 Tabel Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-81

Tabel II-127 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-81

Tabel II-128 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-81

Tabel II-129 Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-81

Tabel II-130 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-82

Tabel II-131 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-82

Tabel II-132 Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-82

Tabel II-133 Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-83

Tabel II-134 Rasio pasangan berakta nikah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 .II-83

Tabel II-135 Cakupan penerbitan KTP-el Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-83

Tabel II-136 Cakupan penerbitan akte kelahiran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-83

Tabel II-137 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-84

Tabel II-138 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-84

Tabel II-139 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-85

Tabel II-140 Persentase PKK aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-85

Tabel II-141 Persentase Posyandu aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-86

Tabel II-142 Persentase LSM aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-87

Tabel II-143 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-87

Tabel II-144 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-88

Tabel II-145 Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-88

Tabel II-146 Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Kabupaten Bulukumba 2016-2020..... II-89

Tabel II-147 Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-89

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel II-148 Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-89

Tabel II-149 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-90

Tabel II-150 Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-90

Tabel II-151 Ratio Akseptor KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-91

Tabel II-152 Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-91

Tabel II-153 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-91

Tabel II-154 Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-91

Tabel II-155 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-92

Tabel II-156 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-92

Tabel II-157 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-93

Tabel II-158 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-93

Tabel II-159 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-93

Tabel II-160 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-93

Tabel II-161 Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-94

Tabel II-162 Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-94

Tabel II-163 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-94

Tabel II-164 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020II-95

Tabel II-165 Rasio petugas pembantu pembina KB Desa PPKBD setiap Desa/ Kelurahan... II-95

Tabel II-166 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-95

Tabel II-167 Persentase Faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-95

Tabel II-168 Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-96

Tabel II-169 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-96

Tabel II-170 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-96

Tabel II-171 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-97

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel II-172 Rata-rata usia kawin pertama wanita Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-97

Tabel II-173 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-97

Tabel II-174 Jumlah arus penumpang angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020 II-98

Tabel II-175 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020 II-98

Tabel II-176 Persentase layanan angkutan darat Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-98

Tabel II-177 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020 II-99

Tabel II-178 Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020 II-99

Tabel II-179 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020 II-99

Tabel II-180 Rasio ijin trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020..... II-99

Tabel II-181 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-100

Tabel II-182 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-100

Tabel II-183 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-100

Tabel II-184 Proporsi rumah tangga dengan akses internet Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-100

Tabel II-185 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-101

Tabel II-186 Persentase koperasi aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-101

Tabel II-187 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-102

Tabel II-188 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020 II-103

Tabel II-189 Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020 II-103

Tabel II-190 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020 II-103

Tabel II-191 Persentase organisasi pemuda yang aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-104

Tabel II-192 Persentase wirausaha muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-105

Tabel II-193 Cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-106

Tabel II-194 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-107

Tabel II-195 Cakupan pembinaan atlet muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020. II-107

Tabel II-196 Jumlah atlet berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-108

Tabel II-197 Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-109

Tabel II-198 Buku "kabupaten dalam angka" Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 . II-109

Tabel II-199 Buku "PDRB" Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-109

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel II-200 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-110

Tabel II-201 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-110

Tabel II-202 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-110

Tabel II-203 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-111

Tabel II-204 Persentase jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-112

Tabel II-205 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-112

Tabel II-206 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-113

Tabel II-207 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-113

Tabel II-208 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-114

Tabel II-209 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki Sertifikat Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-114

Tabel II-210 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-115

Tabel II-211 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-115

Tabel II-212 Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-116

Tabel II-213 Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-116

Tabel II-214 Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-117

Tabel II-215 Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Tempat, Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-118

Tabel II-216 Cakupan bina kelompok tani mengalami penurunan sebesar Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-118

Tabel II-217 Kunjungan wisata Kabupaten Bulukumba 2016-2020 II-119

Tabel II-218 Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2016-2020 II-119

Tabel II-219 PAD sektor pariwisata Kabupaten Bulukumba 2016-2020 II-120

Tabel II-220 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-120

Tabel II-221 Cakupan bina kelompok tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-120

Tabel II-222 Jumlah populasi ternak Kabupaten Bulukumba II-121

Tabel II-223 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020..... II-122

Tabel II-224 Jumlah Pasar berdasarkan Kecamatan, Tipe serta Alamat Kabupaten Bulukumba tahun 2020 II-122

Tabel II-225 Produktivitas Sektor Industri di Kabupaten Bulukumba, 2016-2020..... II-124

Tabel II-226 Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026..... II-124

Tabel II-227 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kabupaten Bulukumba 2016-2020 II-125

Tabel II-228 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran

dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba 2016-2020 .. II-125

Tabel II-229 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Bulukumba 2016-2020..... II-126

Tabel II-230 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 -2020 II-126

Tabel II-231 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten BulukumbaTahun 2016 -2020..... II-127

Tabel II-232 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 -2020 II-127

Tabel II-233 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 -2020 II-128

Tabel II-234 Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020..... II-129

Tabel II-235 Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020 II-129

Tabel II-236 Persentase belanja pendidikan (20%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020..... II-130

Tabel II-237 Persentase belanja kesehatan (10%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020..... II-130

Tabel II-238 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak Langsung Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020 II-131

Tabel II-239 Penetapan APBD (tepat waktu/tidak) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020..... II-132

Tabel II-240 Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020..... II-133

Tabel II-241 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020..... II-134

Tabel II-242 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020 II-134

Tabel II-243 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020 II-135

Tabel II-244 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020 II-135

Tabel II-245 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-136

Tabel II-246 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020 II-136

Tabel II-247 Persentase implementasi rencana Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2016- 2020..... II-136

Tabel II-248 Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2016-2020 II-137

Tabel II-249 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Bulukumba 2016-2020..... II-137

Tabel II-250 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kabupaten Bulukumba 2016-2020 II-138

Tabel II-251 Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-138

Tabel II-252 Persentase pelanggaran Pegawai Kabupaten Bulukumba 2016-2020 II-138

Tabel II-253 Jumlah temuan BPK Kabupaten Bulukumba 2016-2020..... II-139

Tabel II-254 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bulukumba 2016-2020... II-139

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel II-255 Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah..... II-139

Tabel II-256 Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat..... II-139

Tabel II-257 Nilai Tukar Petani Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... II-141

Tabel II-258 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-141

Tabel II-259 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019-2020 II-143

Tabel II-260 Capaian Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-147

Tabel II-261 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba II-165

Tabel III-1 Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 III-5

Tabel III-2 Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah) III-9

Tabel III-3 Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020 14

Tabel III-4 Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020..... 16

Tabel III-5 Rata - Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... III-18

Tabel III-6 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016-2020..... III-21

Tabel III-7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 (Dalam Jutaan)..... III-23

Tabel III-8 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 III-23

Tabel III-9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... III-24

Tabel III-10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 III-25

Tabel III-11 Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2026..... III-27

Tabel III-12 Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2022 (dalam juta) III-28

Tabel III-13 Target Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026..... III-30

Tabel III-14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba III-35

Tabel III-15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba III-36

Tabel V-1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 V-1

Tabel V-2 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026..... V-3

Tabel V-3 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. V-4

Tabel V-4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba 2021-2026..... V-7

Tabel V-5 Hubungan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 terhadap RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 V-12

Tabel V-6. Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 V-17

Tabel V-7 Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba terhadap Program Prioritas Nasional..... V-19

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel V-8 Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023 dengan RPJMD
Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 V-1

Tabel VI-1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bulukumba VI-1

Tabel VI-2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Bulukumba 2021-2026 VI-5

Tabel VI-3 Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-
2026.....VI-10

Tabel VI-4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten
Bulukumba Tahun 2022-2026 VI-14

Tabel VII-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba , Tahun
2022- 2026.....VII-2

Tabel VII-2 Indikasi Rencana Program, Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 VII-4

Tabel VIII-1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026
..... VIII-1

Tabel VIII-2 Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba 2021-2026,
Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dan RPJMN 2020-2024 VIII-3

Tabel VIII-3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bulkukumba Tahun 2022-
2026..... VIII-5

Tabel VIII-4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026 VIII-8

Tabel VIII-5 Capaian dan Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Bulukumba 2022-
2026..... VIII-21

Tabel VIII-6 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-
2026..... VIII-25

Daftar Grafik

Grafik II-1 Piramida Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 II-16

Grafik II-2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulukumba per Tahun 2010–2020... II-17

Grafik II-3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pekerjaan Utama (%), tahun 2020..... II-19

Grafik II-4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020.. II-24

Grafik II-5 PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-26

Grafik II-6 PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-27

Grafik II-7 Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-27

Grafik II-8 Inflasi Kabupaten Bulukumba. 2016-2020 II-29

Grafik II-9 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Bulukumba, ... II-31

Grafik II-10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020..... II-33

Grafik II-11 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016-2020..... II-34

Grafik II-12 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016-2020 II-34

Grafik II-13 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020.. II-35

Grafik II-14 Pengeluaran Per Kapita Riil Kabupaten Bulukumba,Tahun 2016-2020 II-36

Grafik II-15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba (persen), tahun 2020 II-36

Grafik II-16 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 II-38

Grafik II-17 Cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Bulukumba 2016 – 2020 II-39

Grafik II-18 Jumlah rumah tidak layak huni Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020..... II-58

Grafik II-19 Komposisi Produksi Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-116

Grafik II-20 Komposisi Produksi 2020 Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-117

Grafik II-21 Jumlah Usaha Industri berdasarkan Kategori Kabupaten Bulukumba tahun 2020..... II-124

Grafik II-22 Rata-rata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Per Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-140

Grafik II-23 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Bulukumba 2016 – 2020..... II-140

Grafik II-24 Angka Kriminalitas Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 II-142

Grafik II-25 Rasio ketergantungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 II-142

Grafik III-1 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah) III-6

Grafik III-2 Postur Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 (Dalam Jutaan Rupiah) III-6

Grafik III-3 Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)..... III-7

Grafik III-4 Grafik Postur PAD Tahun Tahun 2016 – 2020..... III-7

Grafik III-5 Perkembangan Pajak Daerah Tahun Tahun 2016 – 2020 (Dalam Jutaan Rupiah) III-8

Grafik III-6 Postur Pajak Daerah berdasarkan Komponen Pendapatan Pajak Tahun 2016 – 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)..... III-8

Grafik III-7 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016- 2020 (Dalam Jutaan Rupiah) III-9

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Grafik III-8 Grafik Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah) III-10

Grafik III-9 Rincian Dana Perimbangan (dalam juta)..... III-10

Grafik III-10 Realisasi Dana Bagi Hasil/ bagi hasil bukan Pajak Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)..... III-10

Grafik III-11 Realisasi penerimaan DAU Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah) III-11

Grafik III-12 Realisasi Penerimaan DAK Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah) III-11

Grafik III-13 Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah) III-12

Grafik III-14 Realisasi Penerimaan Dana Desa Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah) .III-12

Grafik III-15 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah) III-12

Grafik III-16 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba, 2016-2020 15

Grafik III-17 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2016-2020 .. III-17

Grafik VI-1 Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Bulukumba VI-3

Daftar Gambar

Gambar I-1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Dalam Sistem perencanaan I-8

Gambar II-1 Peta Administratif Kabupaten Bulukumba.....II-1

Gambar II-2 Peta Topografi Bulukumba..... II-3

Gambar II-3 Peta Geologi Bulukumba II-4

Gambar II-4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba II-4

Gambar II-5 Peta Ancaman Banjir di Kabupaten Bulukumba..... II-11

Gambar II-6 Peta Kawasan Ancaman longsor di Kabupaten Bulukumba II-12

Gambar II-7 Peta Kawasan Bencana Abrasi Kabupaten Bulukumba..... II-13

Gambar II-8 Peta Kawasan Bencana Angin Kencang Kabupaten Bulukumba..... II-14

Gambar II-9 Rasio jenis kelamin (%) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 II-15

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas stuktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Dalam perspektif pembangunan, Kabupaten Bulukumba yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam memanfaatkan kekayaan alam di wilayahnya untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat Bulukumba, memberdayakan potensi perekonomian, sosial dan budaya yang dimiliki, termasuk didalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan empat pendekatan: (a) Teknokratik; (b) Partisipatif; (c) Politis; dan (d) Atas-Bawah dan Bawah-Atas. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten, mengarah pada percepatan pembangunan Daerah tertinggal, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Pada tahun 2020, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bulukumba telah menetapkan **Muchtar Ali Yusuf** sebagai **Bupati Bulukumba** dan **H. A. Edy Manaf** sebagai **Wakil Bupati Bulukumba** periode 2021-2026 dengan visi *“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”*. Sesuai amanat Pasal 14 Ayat (2)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 263 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2021-2026.

Dalam Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selain itu, Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Ayat (1) menyebutkan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda dan pada Ayat (4) menyebutkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan RPJMD dari Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 6 yang meliputi tahapan pelaksanaan yang terdiri atas: Persiapan Penyusunan RPJMD, Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan penetapan RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan tahap akhir atau keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang memuat target-target pembangunan periode tahun 2020-2025. Pembangunan jangka menengah tahap keempat (Periode 2021-2026) adalah periode untuk “Penguatan kelembagaan, penciptaan iklim keamanan yang kondusif dan secara aktif mendorong pengembangan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan yang berkelanjutan”.

Dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan secara Vertikal dan Horizontal dengan dokumen perencanaan dan anggaran lainnya. Secara Vertikal RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan secara Horizontal RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai acuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS, RENJA-PD tersebut dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selain itu, RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 sudah disesuaikan dengan dampak terjadinya Bencana Non-Alam yaitu Pandemi *COVID-19* yang memberi imbas negatif pada beberapa aspek kehidupan, meliputi: Pertama, aspek kesehatan,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Kedua, aspek ekonomi, perekonomian Kabupaten Bulukumba diperkirakan mengalami perlambatan khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, transportasi, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran. Ketiga, aspek sosial, berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bulukumba.

Sekaitan dengan hal di atas, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 tentunya sudah memuat tentang capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 sebesar 0,34 persen, tentunya capaian tersebut sangat jauh dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 yakni sebesar 8,5 persen. Pertumbuhan yang rendah disebabkan oleh penyebaran *COVID-19* yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Bulukumba terutama pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Selanjutnya, tingkat Inflasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 sebesar 2,30 persen, capaian tersebut masih berada pada kisaran yang ditargetkan pada RPJMD Periode sebelumnya (Tahun 2016-2021). Daya beli yang masih terbatas akibat *COVID-19* membuat tekanan permintaan diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meskipun inflasi cenderung terkendali namun pengaruh *COVID-19* tetap perlu diwaspadai. Terkait kondisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 sebesar 3,42 persen, mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2019 yang besarnya 3,31 persen, kondisi tersebut tentunya meleset dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Periode sebelumnya (Tahun 2016-2021). Meningkatnya tingkat pengangguran tersebut tidak terlepas dari rendahnya penyerapan tenaga kerja yang ada serta tingginya pangsa pekerja informal di Kabupaten Bulukumba sebesar 60% dari total pekerja (Sumber BPS Provinsi Sulawesi Selatan).

Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2020 sebesar 7,10 persen, turun sebesar 0,16 poin dari tahun 2019 yang sebesar 7,26 persen menjadi salah satu anomali. Penurunan kemiskinan tersebut diakibatkan oleh efektifnya skema penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat dan daerah dengan jalan melakukan pendistribusian bantuan-bantuan sosial baik berupa bahan makanan maupun uang tunai kepada masyarakat berkategori rentan dan miskin secara merata dan proporsional, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di masa pandemi.

RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 telah memperhatikan pencapaian indikator SDG's/TPB, dimana pada periode sebelumnya Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan 17 tujuan yang terbagi dalam 202 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Bulukumba, dengan gambaran sebagai berikut : a.79 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (39,11%); b.73 indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (36,14%);, c.17 indikator yang belum dilaksanakan (8,42%); dan d. 33 indikator yang belum atau tidak ada data (16,34%).

Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian indikator TPB adalah sebagai berikut ; beberapa data sedianya tersedia, namun tidak terdokumentasi dengan baik, beberapa Indikator SDGs pada periode sebelumnya tidak dilakukan pengumpulan data, beberapa indikator SDGs tidak terkait dengan indikator kinerja perangkat daerah, beberapa indikator SDGs adalah indikator baru, yang belum pernah dilaksanakan

perangkat daerah, pengumpulan dan pencapaian target SDGs belum menjadi perhatian sebagian perangkat daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi indikator TPB di Kabupaten Bulukumba, terdapat 30 perangkat daerah yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pencapaian indikator TPB.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Tehnis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 8)

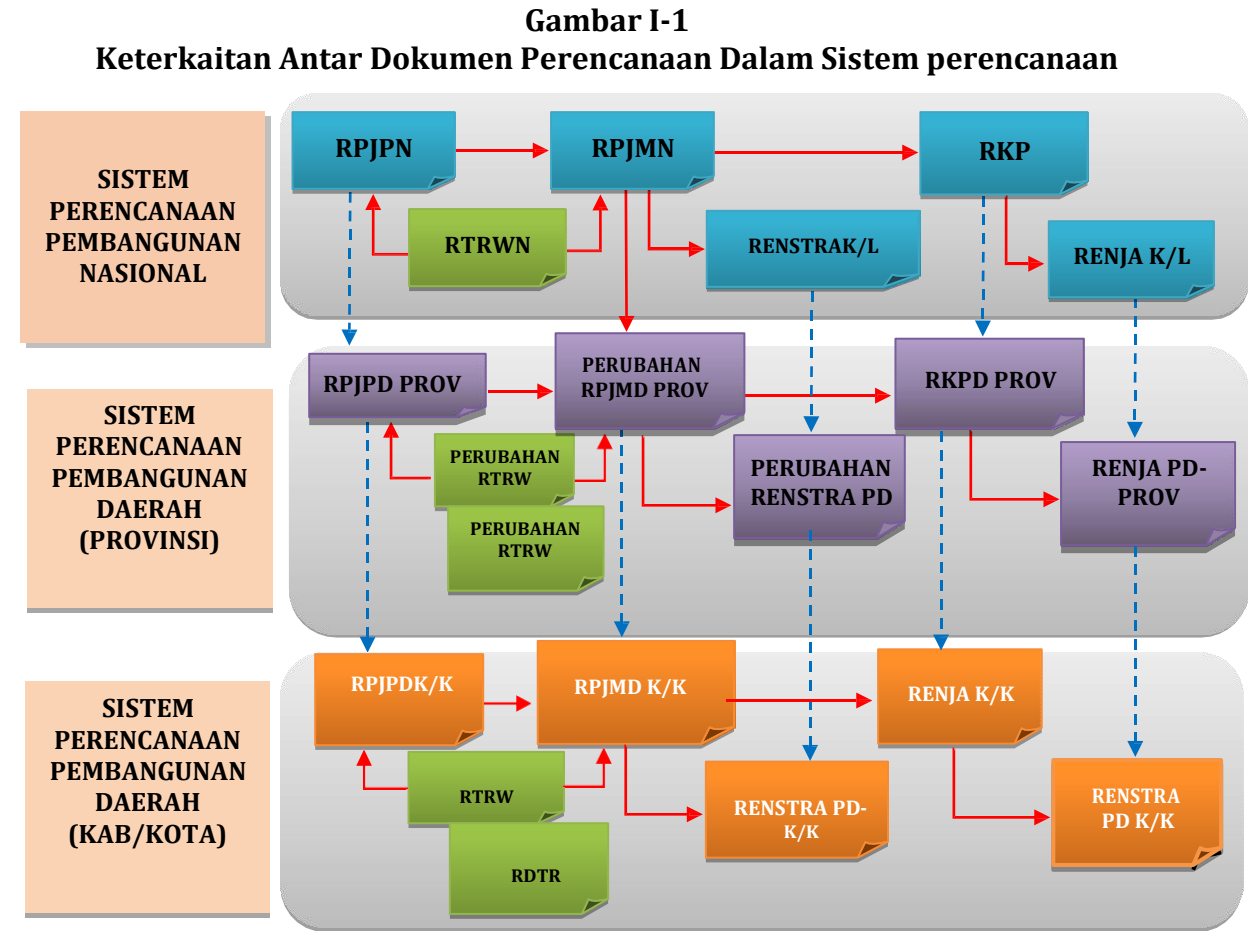
1.3 Hubungan antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan RPJPD, RPJMD termasuk Perubahan RPJMD, dan RKPD yang memiliki sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan dan anggaran lainnya baik secara vertikal maupun Horizontal. Secara Vertikal RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Sedangkan secara Horizontal RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai acuan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS, RENJA-PD tersebut dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Sumber : Perda Prov. Sulsel No. 1 Thn 2021 tentang perubahan Atas Perda No. 1 Thn 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023, diolah

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel I-1 Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026		
Visi RPJMN 2020-2024 : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”	Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 : “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”
MISI	MISI	MISI
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi Dan Beragama Dalam Masyarakat 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal 6. Meningkatkan Kualitas dan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Visi RPJMN 2020-2024 : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”	Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021- 2026 : “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”
MISI	MISI	MISI
		Layanan Kesehatan Masyarakat
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	3. Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor 4. Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional 7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara 9. Pembangunan dan Meningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	3. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10. Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan	4. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		2. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba.
4. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
5. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Bulukumba berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.
6. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini adalah bagian yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar- dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Bulukumba dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026, serta perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba hingga akhir periode RPJMD ini.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

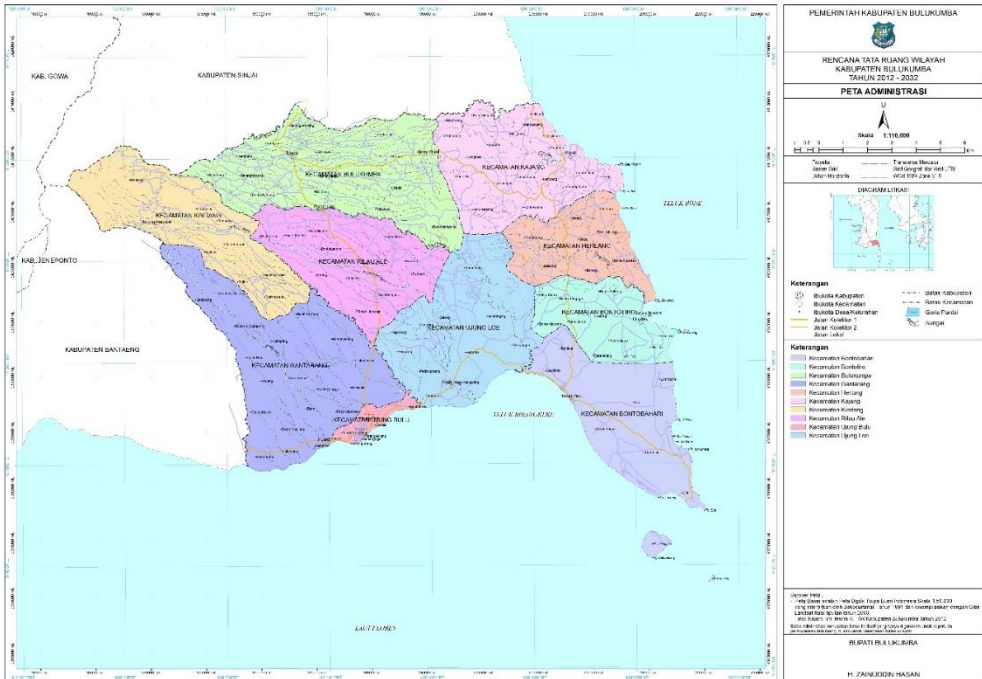
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154.58 km². Kabupaten Bulukumba secara administratif terdiri dari 10 kecamatan, 27 kelurahan dan 109 desa.

Adapun dengan batas -batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan selayar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Gambar II-1

Peta Administratif Kabupaten Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Kabupaten Bulukumba memiliki kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa, yang masing-masing seluas 173.51 km² dan 171.33 km² . Sementara, Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota memiliki luas wilayah terkecil hanya sekitar 14.44 km². Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel II-1 berikut.

Tabel II-1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (Km ²)	% Luas Kecamatan
1.	Gantarang	3	18	8	82	173,51	15,03
2.	Ujungbulu	9	0	31	-	14,44	1,25
3.	Ujung Loe	1	12	4	42	144,31	12,50
4.	Bontobahari	4	4	13	13	108,6	9,41
5.	Bontotiro	1	12	5	45	78,34	6,79
6.	Herlang	2	6	10	27	68,79	5,96
7.	Kajang	2	17	11	100	129,06	11,18

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (Km ²)	% Luas Kecamatan
8.	Bulukumpa	3	14	7	76	171,33	14,84
9.	Rilau Ale	1	14	5	58	117,53	10,18
10.	Kindang	1	12	4	46	148,67	12,88
Kabupaten Bulukumba		27	109	98	489	1.154,58	100.00

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Adapaun ibu kota per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-2
Daftar Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Bulukumba

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	Gantarang	Ponre
2	Ujung Bulu	Terang-Terang
3	Ujung Loe	Dannuang
4	Bontobahari	Tanah Lemo
5	Bontotiro	Hila hila
6	Herlang	Tanuntung
7	Kajang	Kassi
8	Bulukumpa	Tanete
9	Rilau Ale	Palampang
10	Kindang	Borong Rappoa

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bulukumba, 2021

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

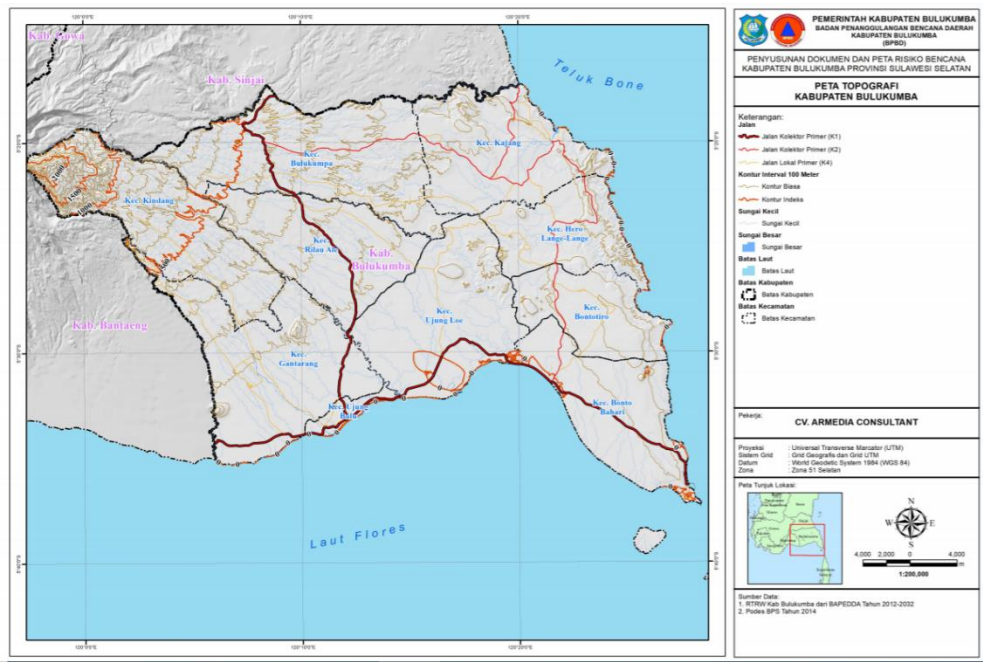
Secara Geografis, Kabupaten Bulukumba berada terletak diantara 05°20’-05°40’ Lintang Selatan (LS) dan 119°58’-120°28’ Bujur Timur (BT) dan secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

2.1.3 Topografi

Kabupaten Bulukumba memiliki daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Disamping itu, Kabupaten Bulukumba memiliki Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan juga terdapat Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang. Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang, Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50.28% maka dataran tinggi mencapai 49.72%. Untuk lebih jelasnya topografi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II-2
Peta Topografi Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95.4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter Di Atas Permukaan Laut (DPL) dengan tingkat kemiringan tanah 0-400. Sementara itu, untuk kecamatan dengan jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kajang sekitar 62 km. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-3
Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) dan Jarak ke Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Gantarang	25	5
2	Ujung Bulu	0	1
3	Ujung Loe	26	11
4	Bonto Bahari	26	27
5	Bontotiro	100	35
6	Herlang	80	42
7	Kajang	80	62
8	Bulukumpa	100	31
9	Rilau Ale	100	24
10	Kindang	500	33

Sumber : Bulukumba dalam Angka tahun 2021

2.1.4 Geologi

Keberadaan satuan batuan yang menyusun geomorfologi Bulukumba mempunyai dimensi yang berbeda-beda. Batuan tertua berumur Miosen tengah (Bedrock) berada pada pemekaran dasar laut Teluk Bone sementara batuan termuda berumur Plistosen berada pada sesar Walanae di daratan Bulukumba (Formasi Lompobattang). Hal ini menandakan sistem tektonik yang bekerja tidak selalu sama. Untuk lebih jelasnya geologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Daerah Aliran Sungai	Luas (Ha)
5	Bapalaikang	300,43
6	Laikang	597,12
7	Luraya	495,50
8	Tekona	766,43
9	Aparang	23.413,48
10	Kalumpang	749,95
11	Turungara	623,56
12	Selang	367,72
13	Bipalo He	739,00
14	Tanetang	603,16
15	Bara	653,64
16	Darubiah	959,10
17	Kampuang	342,06
18	Sapo	1.214,82
19	Tombo Loang	1.407,50
20	Tarampang	812,03
21	Kalukubodo	224,29
22	Doajang	3.295,00
23	Lo He	16.904,64
24	Bijawang	15.988,13
25	Kirasa	3.597,42
26	Tangambang	3.275,18
27	Gusunge	224,94
28	Borong Pelengge	953,89
29	Bunyutana	409,83
30	Lasang Lasang	378,88
31	Liukang Loe	420,34
32	Garacing	1.125,02
33	Balalohe	5.201,30
34	Ujung Loe	17.382,32
35	Bialo	7.623,19
36	Motti	1.084,52
	Jumlah	117.526,97

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 43 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 772,5 km dan yang terpanjang adalah sungai Balangbessi yakni 65.30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Balibo yakni 5 km, Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. Untuk lebih jelasnya hidrologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Berdasarkan data sungai yang terdapat di Kabupaten Bulukumba tahun 2020 terdapat Sungai yang rawan longsor abrasi diantaranya Sungai Bialo, Sungai Bijawang, Sungai Balangtieng, Sungai Anyorang, Sungai Balangbessi dan Sungai Lolisang karena merupakan sungai besar. Untuk lebih jelas terkait nama-nama sungai di Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-5
Sungai di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Debit (m /det)	Ket
1	Bialo	54.5	14.154	Sungai Besar
2	Maesa	10.3	0,230	Sungai Kecil
3	Biangkeke	19.2	1,296	Sungai Kecil
4	Balibo	5		Sungai Kecil
5	Borong Loe	11.5	0,096	Sungai Kecil
6	Laumang	7		Sungai Kecil
7	Kalamassang	11.5		Sungai Kecil
8	Bontosunggu	21	0,92	Sungai Kecil
9	Bijawang	49.2	7,527	Sungai Besar
10	Anruling	13.3		Sungai Kecil
11	Matilu	10.6		Sungai Kecil
12	Bilang Rea	15.5	0,349	Sungai Kecil
13	Bilang Parusu	12	0,157	Sungai Kecil
14	Palioi	11	0,885	Sungai Kecil
15	Kirasa	30.4	1,667	Sungai Kecil
16	Balikonrong	8.4		Sungai Kecil
17	Bintanaja	8	0,606	Sungai Kecil
18	Tuli	6.5		Sungai Kecil
19	Balangtieng	56	13,336	Sungai Besar
20	Kahaya	9.5		Sungai Kecil
21	Oddungen	6.9	0,080	Sungai Kecil
22	Hisang	12.9	0,790	Sungai Kecil
23	Latai	6.2		Sungai Kecil
24	Pasimbungan	7.5		Sungai Kecil
25	Illi	6.5	0,264	Sungai Kecil
26	Balangtikeke	10	0,869	Sungai Kecil
27	Sampeang	8		Sungai Kecil
28	Topanda	17.8	0,719	Sungai Kecil
29	Anyorang	56	6,478	Sungai Besar
30	Kambuno	9	0,304	Sungai Kecil
31	Oro/Ereminya	7	0,56	Sungai Kecil
32	Serre	6.5		Sungai Kecil
33	Balangebessi	65.3	2,931	Sungai Besar
34	Salo Dua	19	0,434	Sungai Kecil
35	Pakombong	20.3	1,014	Sungai Kecil
36	Bikatala	19.7	0,120	Sungai Kecil
37	Galonggo	17.2	0,567	Sungai Kecil
38	Ta'getung	7.5	0,500	Sungai Kecil
39	Lolisang	34.3	0,376	Sungai Besar
40	Bobo	12.5	0,152	Sungai Kecil
41	Raowa	18.5	0,144	Sungai Kecil
42	Jelepeng	20	0,144	Sungai Kecil
43	Sungai Kanaria	13.5		Sungai Kecil
	Jumlah	772,5	57,668	

Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

2.1.6 Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23.82 °C – 27.68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan. yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bonto Bahari, stasiun Bulobulo dan stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah.

Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bonto Bahari.
- Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro.
- Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun. meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang. sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.
- Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

Untuk lebih jelasnya data jumlah curah hujan menurut bulan di Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang dicatat oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV, Nomor : KL.01.00/037/KBB4/VIII/2021, terdapat 4 pos pengamatan curah hujan diantaranya Pos Hujan Bonto Bahari, Pos Hujan Bonto Macinna, Pos Hujan Tanah Kongkong dan Pos Hujan Tanah Jaya/Kajang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-6
Data Curah Hujan Bulanan menurut Pos Hujan
Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020

Pos Hujan/ Tahun	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Bonto Bahari												
2016	133	113	139	255	125	120	186	2	72	121	48	63
2017	82	87	34	106	425	524	215	-	47	12	194	-
2018	98	31	0	137	289	428	159	6	-	-	4	3
2019	172	150	56	360	126	205	3	-	-	23	-	144
2020	99	55	43	234	451	374	116	-	54	49	67	87
Bonto Macinna												
2016	164	365	96	213	206	231	265	13	54	251	65	174
2017	35	128	126	60	664	572	312	73	78	25	194	74
2018	83	88	121	108	535	224	213	15	-	1	90	112
2019	136	153	63	404	161	305	61	15	4	0	34	97
2020	228	247	75	306	413	351	279	5	95	76	79	111
Tanah Kongkong												
2016	148	250	129	213	99	106	177	38	62	385	22	44
2017	34	175	54	59	576	408	279	23	126	8	117	17

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Pos Hujan/ Tahun	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
2018	64	34	36	108	414	286	210	-	-	14	189	34
2019	107	123	37	303	245	276	86	6	1	-	3	75
2020	105	101	131	304	477	239	196	10	90	26	77	67
Tanaiaya/Kajang												
2016	75	214	128	450	155	203	280	141	92	309	73	94
2017	164	138	159	134	464	768	419	21	17	16	94	53
2018	91	183	148	119	368	591	158	20	20	-	134	235
2019	215	140	59	430	338	408	55	17	12	-	22	103
2020	90	114	148	273	738	437	135	2	74	104	182	123

Sumber : BMKG, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Wilayah IV, Tahun 2021

2.1.7 Penggunaan Lahan

Pola tata guna lahan pada dasarnya adalah merupakan gambaran ruang dari hasil kegiatan manusia, tingkat teknologi dan keadaan fisik daerah. Pola tata guna lahan pada suatu daerah merupakan cermin kegiatan manusia yang bermukim di daerah tersebut dalam mengusahakan dan memanfaatkan lahan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah guna memenuhi kebutuhan hidup. Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki luas 1.154,58 km². berdasarkan peta penggunaan lahan hasil interpretasi citra satelit. penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bulukumba sebagian besar didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk konservasi lahan di daerah ini masih terdapat beberapa lokasi kawasan hutan yang tersebar di 6 kecamatan dengan luas keseluruhan 8.453.25 hektar. Akan tetapi di kecamatan tersebut masih terdapat beberapa lahan kritis yang sebagian besar terdapat di 2 kecamatan yaitu Bontobahari dan Kindang. Tata guna lahan setiap tahun selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam memenuhi kegiatan perekonomian atau pembangunan sarana fisik oleh Pemerintah Daerah. Kecenderungan yang terjadi dan harus mendapatkan perhatian adalah perubahan tata guna lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian serta perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian. permukiman atau aktifitas yang lain yang dapat mengganggu eksistensi hutan. Tata guna lahan untuk pertanian adalah pemanfaatan lahan untuk aktifitas pertanian. seperti sawah, ladang, tegalan, kebun, hutan dan tambak. Sedangkan tata guna lahan untuk non pertanian dapat berupa permukiman, industry, kantor, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Tiga kecamatan yang mengalami perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian antara lain terdapat di wilayah Kecamatan Bulukumpa, Kajang, dan Kindang. Kegiatan lain yang diperoleh adalah adanya pertambangan tanah liat di lahan persawahan, sebagai bahan baku bata merah, seperti di wilayah Kecamatan Ujungloe. Dari sub sektor pertanian, penambangan tanah liat tersebut dapat merugikan, karena mengurangi luas lahan produksi dan menyisakan tanah dengan kualitas kesuburan tanah yang lebih rendah.

Penurunan luas lahan pertanian jelas akan memperbesar angka kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Bulukumba. Kepadatan penduduk agraris yang semakin besar menggambarkan semakin besarnya jumlah penduduk yang harus ditanggung kehidupannya oleh setiap luas lahan pertanian. Informasi lain yang diperoleh pada saat inventarisasi data lapangan. adalah adanya perubahan tata guna lahan yang lain yang juga dapat mempunyai dampak buruk karena adanya aktivitas pembukaan hutan sebagai ladang berpindah. Jenis tanaman semusim atau untuk pertanian tanaman perkebunan. Pada intinya bahwa. wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri dari dua bagian utama yaitu; kawasan lindung dan kawasan budidaya. Wilayah budidaya sudah diperuntukan untuk kepentingan pembangunan sektoral antara lain di sektor pertanian, industri, dan sosial lainnya. Luas dan letak masing-masing peruntukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-7
Rincian Tata Guna Lahan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Lokasi
1	Permukiman	3.502,81	Tersebar disemua kecamatan, terutama kecamatan Ujung Bulu yang wilayahnya merupakan ibu kota Kabupaten Bulukumba
2	Persawahan		
2.1	Luas Lahan Baku Sawah	22.991,74	
2.1.1	Irigasi	20.917,10	
		8.049,69	Gantarang
		308,00	Ujung Bulu
		2.905,98	Ujung Loe
		53,00	Bontobahari
		25,00	Bontotiro
		170,00	Herlang
		1.667,43	Kajang
		3.069,00	Bulukumpa
		2.814,00	Rilau Ale
		1.855,00	Kindang
2.1.2	Non Irigasi/Tadah Hujan	2.074,64	
		6,00	Gantarang
		27,00	Ujung Bulu
		182,00	Ujung Loe
		10,00	Bontobahari
		143,00	Bontotiro
		373,64	Herlang
		783,00	Kajang
		50,00	Bulukumpa
		397,00	Rilau Ale
		103,00	Kindang
2.2	Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah	75.576,42	
		8.258,00	Gantarang
		218,00	Ujung Bulu
		9.576,00	Ujung Loe
		5.654,70	Bontobahari
		7.228,76	Bontotiro
		5.871,90	Herlang
		8.688,00	Kajang
		13.326,36	Bulukumpa
		7.541,00	Rilau Ale
		9.213,70	Kindang
3	Tegalan/Kawasan Perikanan		
	Tambak	453	Gantarang
	Kolam	8	
	Mina Padi	26,50	
	Tambak	319,00	Ujung Bulu
	Kolam	0,50	
	Mina Padi	0,00	
	Tambak	2.211	Ujug Loe
	Kolam	2,50	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Lokasi
	Mina Padi	0,00	
	Tambak	278,00	Bonto Bahari
	Kolam	0,00	
	Mina Padi	0,00	
	Tambak	469,00	Kajang
	Kolam	2,50	
	Mina Padi	0,00	
4	Perkebunan	62.363,20	
4.1	Luas Areal Tanaman Perkebunan	34.998,90	Tersebar di seluruh kecamatan
4.2	Luas Areal Tanaman menghasilkan	22.760,30	Tersebar di seluruh kecamatan
4.3	Luas Areal Tanaman Hortikultura	4.604,00	Tersebar di seluruh kecamatan
5	Kawasan lindung	5.180,94	Kindang, Bulukumpa dan Bonto Bahari
6	Kawasan yang perlindungan terhadap kawasan bawahnya	6.394	Kindang dan Bulukumpa
7	Kawasan Pelestarian Alam/Taman Hutan Raya	3.475	Bonto Bahari
8	Kawasan Hutan Adat/Hutan Produksi Terbatas	313,99	
9	Hutan Bakau		
		50	Ujung Bulu
		170	Ujung Loe
		199	Kajang
		100	Herlang
		25	Bonto Tiro
		30	Gantarang
		5	Bonto Bahari
dst	Penggunaan lain-lain	15.493,21	

Sumber: Dinas PPP, Dinas LHK, Dinas TPHP, Dinas Perikanan Tahun 2021 (Data diolah)

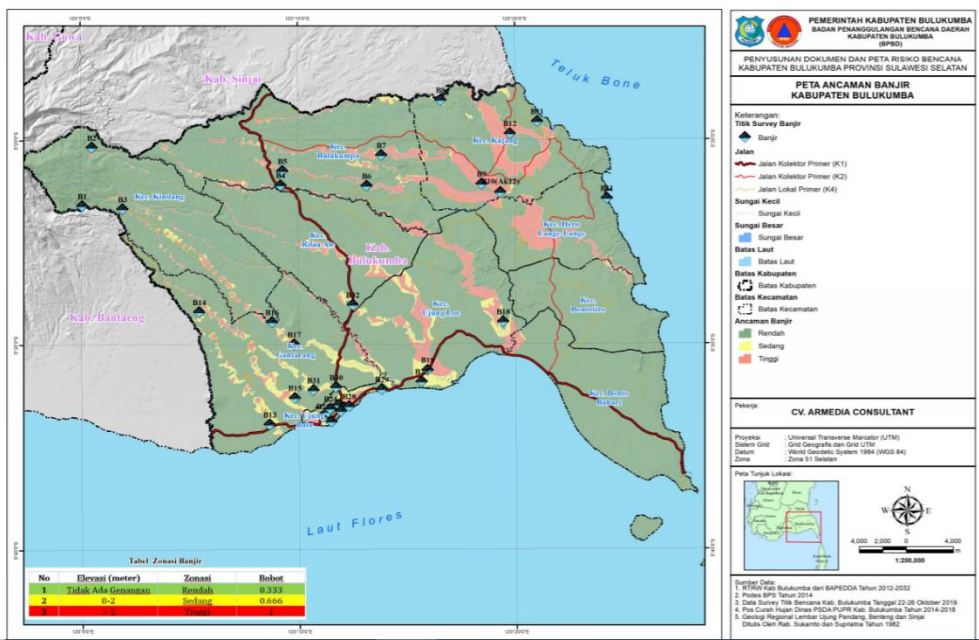
2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Karakteristik rawan bencana menggambarkan mengenai jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan. Adapun Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dalam perda RTRW 2021-2032 dan Peta Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba, meliputi:

a. Kawasan Rawan Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain. Orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bulukumba berada pada sebagian wilayah Kecamatan Gantarang. sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu. dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe. Untuk lebih jelasnya Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar II-5
Peta Ancaman Banjir di Kabupaten Bulukumba



Sumber : Peta Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba, BPBD Tahun 2019

Tabel II-8
Data Luas Resiko Ancaman Banjir Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

Kecamatan	Sedang	Tinggi	Luas Total (Ha)
Ujungbulu	691.2	532.8	1,224.0
Ujung Loe	11,556.3	3,249.4	14,805.7
Bulukumpa	15,347.9	2,191.0	17,538.9
Rilau Ale	10,910.4	1,173.3	12,083.7
Gantarang	13,987.3	2,595.4	16,582.7
Kindang	13,547.1	1,002.1	14,549.2
Herlang	6,695.3	1,278.9	7,974.2
Bontotiro	7,411.1	114.6	7,525.7
Bontobahari	11,584.0	164.9	11,748.9
Kajang	9,329.8	3,390.5	12,720.3
Luas Total (Ha)	101,060.5	15,692.9	116,753.4

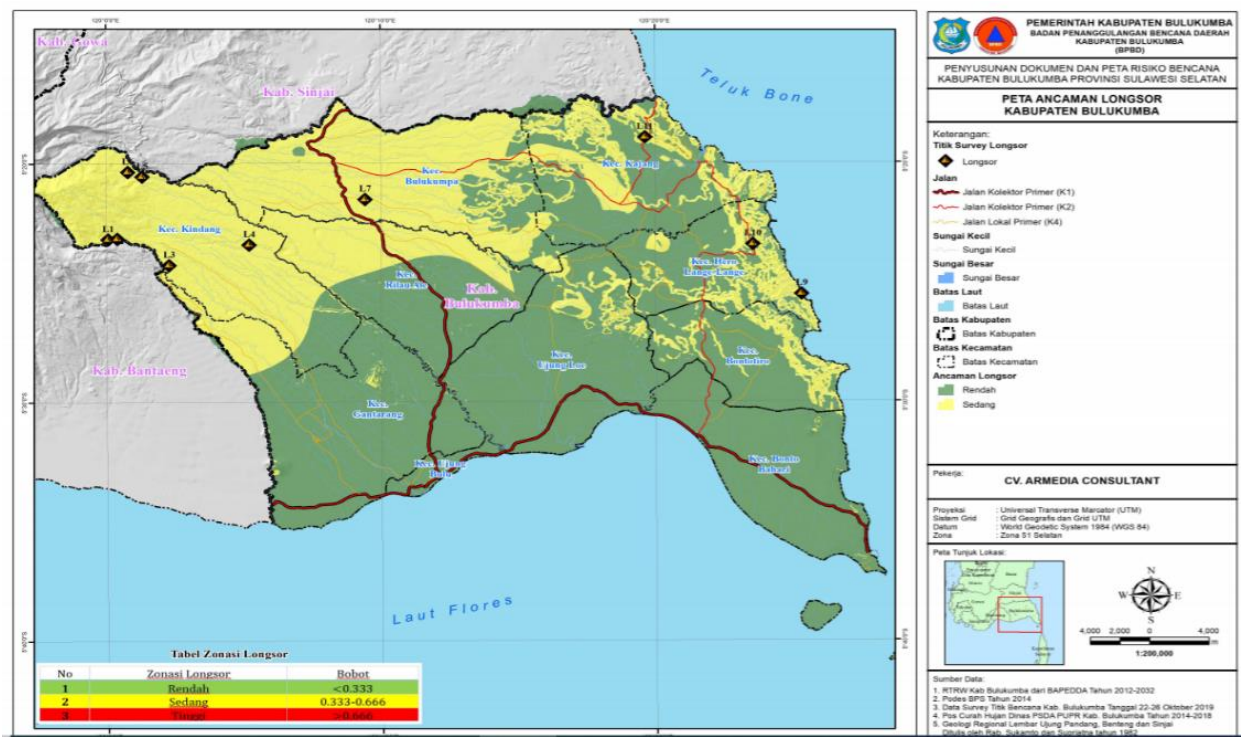
Sumber : BPBD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

b. Kawasan Rawan Tanah Longsor.

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Longsor atau gerakan tanah merupakan suatu peristiwa geologi akibat pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. a penyebab terjadinya tanah longsor yaitu antara lain : lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, curah hujan yang tinggi, jenis penggunaan lahan, Getaran, adanya material timbunan pada tebing bekas longsoran lama, penggundulan hutan dan daerah pembuangan sampah.

Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Bulukumba berada di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang. Untuk lebih jelasnya Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar II-6
Peta Kawasan Ancaman longsor di Kabupaten Bulukumba



Sumber : Peta Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba, BPBD Tahun 2019

Tabel II-9
Data Luas Resiko Ancaman Longsor Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

Kecamatan	Sedang	Tinggi	Luas Total (Ha)
Ujungbulu	1,224.0		1,224.0
Ujung Loe	13,726.4	1,079.3	14,805.7
Bulukumpa	4,133.0	13,406.0	17,538.9
Rilau Ale	7,742.8	4,340.9	12,08.7
Gantarang	14,510.4	2,072.4	16,582.7
Kindang	4,991.1	9,558.1	14,549.2
Herlang	6,298.2	1,675.9	7,974.2
Bontotiro	6,368.4	1,157.3	7,525.7
Bontobahari	11,693.9	55.0	11,748.9
Kajang	8,561.4	4,158.9	12,720.3
Luas Total (Ha)	79,249.5	37,503.9	116,753.4

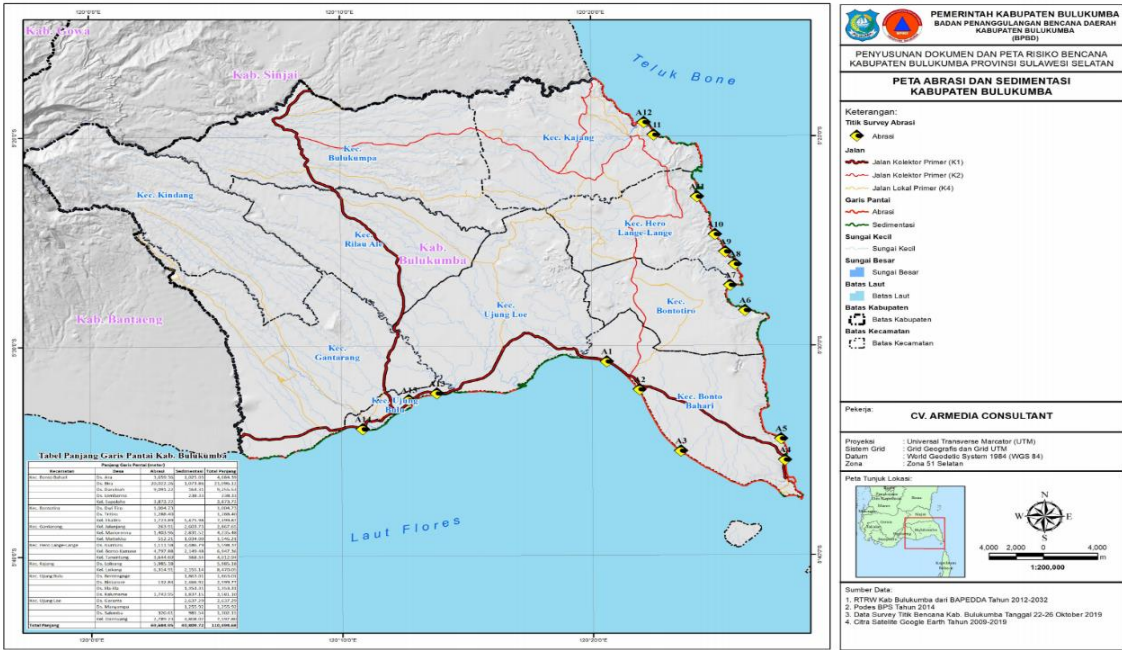
Sumber : BPBD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

Selain banjir dan tanah longsor terdapat juga potensi kawasan rawan tsunami di sebagian wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu. Kawasan rawan abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang sebagian wilayah Kecamatan Kajang sebagian wilayah Kecamatan Herlang dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu dan kawasan rawan gerakan tanah di sebagian wilayah Kecamatan Kindang.

c. Kawasan Rawan Abrasi

Kawasan Resiko Abrasi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar II-7
Peta Kawasan Bencana Abrasi Kabupaten Bulukumba



Sumber : Peta Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba, BPBD Tahun 2019

Tabel II-10
Data Luas Resiko Ancaman Abrasi Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Luas Total (Ha)
Ujungbulu	1,128.9	10.9	84.2	1,224.0
Ujung Loe	12,695.6	21.8	88.4	14,805.7
Bulukumpa	17,538.9			17,538.9
Rilau Ale	12,083.7			12,083.7
Gantarang	16,496.3	65.6	20.9	16,582.7
Kindang	14,549.2			14,549.2
Herlang	7,838.7	22.5	113.0	7,974.2
Bontotiro	7,430.8	52.2	42.8	7,525.7
Bontobahari	11,363.3	93.1	292.6	11,748.9
Kajang	12,562.1	40.2	118.1	12,720.3
Luas Total (Ha)	115,687.4	306.2	759.9	116,753.4

Sumber : BPBD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

Data kondisi Ruas dan Kanal di Kabupaten Bulukumba yang rawan terhadap abrasi terdapat 9 ruas dengan 4 kondisi kanal yang berbeda. Ruas Taccorong sepanjang 439,00 M termasuk dalam saluran tanah, Ruas Pettarani sepanjang 206,80 M termasuk dalam kondisi kanal sedang, Ruas Kanal Teratai – Pasissirie (muara Terang – Terang) dengan panjang 794,80 M termasuk dalam kondisi berat, sedangkan Ruas Pertigaan Pasar Lama – Kasimpureng sepanjang 861,60 M tergolong dalam kondisi kanal rusak berat. Untuk lebih jelasnya Data ruas dan konsidi kanal dalam kota di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel II-11
Data Ruas dan Kondisi Kanal dalam Kota Bulukumba Tahun 2020

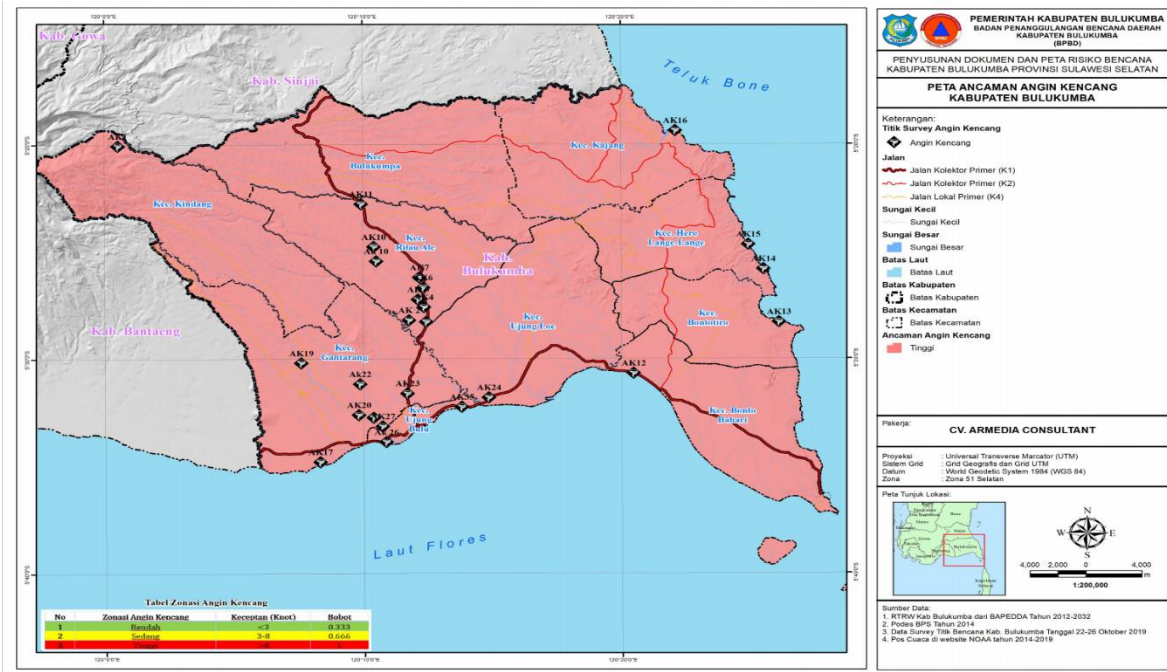
No.	Ruas	Panjang (m)	Kondisi kanal
1	Ruas Taccorong	439,00	Saluran Tanah
2	Ruas Kanal Polewali	223,80	Saluran Tanah
3	Ruas Jawi Jawi	775,09	Rusak Sedang
4	Ruas Tepponge-Mayapada-Pertigaan Pasar Lama	869,68	Rusak Sedang
5	Ruas Pertigaan Pasar Lama - Kasimpureng	861,60	Rusak Berat
6	Ruas Pettarani	206,80	Rusak Sedang
7	Ruas M.Noor Lama - M.Noor Baru	768,60	Rusak Sedang
8	Ruas Kanal Teratai - Pasissirie (Muara Terang-Terang)	794,80	Rusak Berat
9	Ruas Kanal Ela Ela	312,48	Rusak Sedang
Jumlah		5.251,85	

Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

d. Kawasan Rawan Bencana Angin Kencang

Resiko rawan angin kencang di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar II-8
Peta Kawasan Bencana Angin Kencang Kabupaten Bulukumba



Sumber : Peta Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba, BPBD Tahun 2019

Tabel II-12
Data Luas Resiko Ancaman Angin Kencang Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

Kecamatan	Sedang	Tinggi	Luas Total (Ha)
Ujungbulu	192.8	1,031.2	1,224.0
Ujung Loe		14,805.7	14,805.7
Bulukumpa		17,538.9	17,538.9
Rilau Ale		12,083.7	12,083.7
Gantarang	0.0	16,582.7	16,582.7
Kindang		14,549.2	14,549.2

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Kecamatan	Sedang	Tinggi	Luas Total (Ha)
Herlang		7,974.2	7,974.2
Bontotiro		7,525.7	7,525.7
Bontobahari	103.2	11,645.7	11,748.9
Kajang	0.0	12,720.3	12,720.3
Luas Total (Ha)	296.0	116,457.5	116,753.4

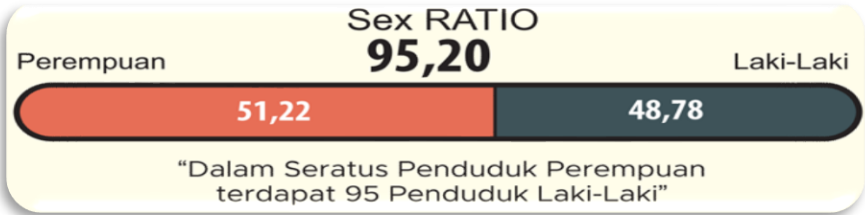
Sumber : BPBD Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

2.1.9 Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan data BPS penduduk tahun 2020 adalah 437.607 jiwa, yang terdiri dari 213.443 jiwa penduduk laki-laki dan 224.164 jiwa penduduk perempuan. Selain itu, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penduduk Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2020 adalah 441.000 Jiwa, yang terdiri dari 214.843 jiwa penduduk laki-laki dan 226.167 jiwa penduduk perempuan.

Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk di Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,04 persen. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 95,2, selengkapnya pada gambar berikut.

Gambar II-9
Rasio jenis kelamin (%) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

1) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulukumba tahun 2020 mencapai 379 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Ujung Bulu dengan kepadatan sebesar 3.398 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kindang sebesar 219 jiwa/Km².

Tabel II-13
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba
Menurut Kecamatan Tahun 2020

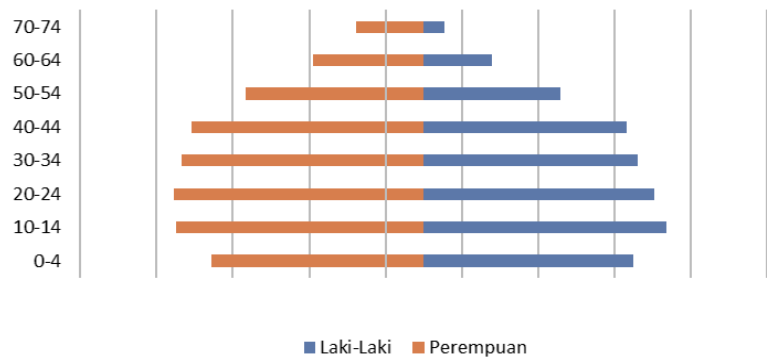
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
Gantarang	81.171	468
Ujung Bulu	49.056	3.398
Ujung Loe	46.743	324
Bonto Bahari	28.252	260
Bontotiro	26.917	344
Herlang	27.928	406
Kajang	48.631	377
Bulukumpa	54.092	316
Rilau Ale	42.194	359
Kindang	32.623	219

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Sebagaimana Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar ialah Kecamatan Gantarang, dengan jumlah penduduk sebesar 81.171

jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Herlang dengan jumlah penduduk sebesar 27.928 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2020 jika dilihat dari piramida penduduk, menunjukkan jenis ekspansif dimana jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II-1
Piramida Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2020



Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2) **Pertumbuhan Penduduk**

Sesuai dengan data BPS Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami meningkat setiap tahunnya dalam periode tahun 2016-2020. Berdasarkan data pada Tabel pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebanyak 413.229 jiwa. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai 437.607 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 4,04 persen pada tahun yang sama, artinya selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba bertambah sekitar 24.308 jiwa atau 5,5 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

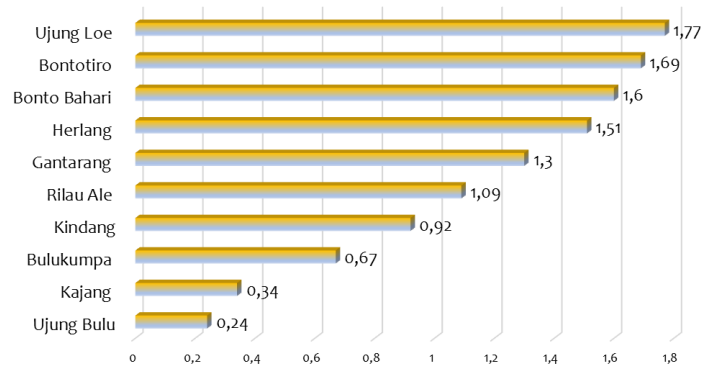
Tabel II-14
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)
2016	413.299	0,69
2017	415.713	0,58
2018	418.326	0,63
2019	420.603	0,54
2020	437.607	4,04

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Tabel juga menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulukumba dari tahun 2016 hingga 2020. Setiap tahunnya, penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan rata-rata diatas 1,3 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulukumba sebesar 4,04 persen, peningkatan nilai tersebut disebabkan oleh karena jumlah penduduk tahun 2020 merupakan hasil sensus, sementara jumlah penduduk tahun 2016-2019 merupakan nilai proyeksi. Jika dirinci menurut kecamatan, pada grafik memperlihatkan bahwa pada tahun 2020, Kecamatan Ujung loe merupakan kecamatan memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yakni sebesar 1,77 persen. Sementara itu, Kecamatan Ujung Bulu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah, dengan nilai pertumbuhan sebesar 0,24 persen. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II-2
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulukumba
per Tahun 2010-2020



Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba tren fluktuasi dalam periode tahun 2016-2020. Pada Tahun 2016 jumlah 436.751 jiwa sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dikarena jumlah kematian serta perpindahan domisili sehingga jumlah penduduk menjadi 432.141 jiwa akan tetapi pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk sebesar 441.010 jiwa. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-15
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020

Tahun	Laki- Laki	Perempuan	Total Penduduk	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)
2016	215.574	221.177	436.751	0,30
2017	216.891	217.213	434.104	(0,61)
2018	214.884	221.004	435.888	0,41
2019	214.464	223.631	438.095	0,51
2020	214.843	226.167	441.010	0,67

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Bulukumba, 2021

3) Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/rendahnya tingkat kelahiran, jumlah penduduk lansia serta dapat mencerminkan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau yang sering disebut *Dependency Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun & 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun). *Dependency ratio* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-16
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bulukumba, 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	15.969	15.218	31.187
5-9	16.434	15.711	32.145
10-14	19.002	18.220	37.222
15-19	17.784	17.817	35.601
20-24	17.909	18.269	36.178
25-29	17.242	18.142	35.384
30-34	16.654	17.527	34.181
35-39	16.367	17.688	34.055
40-44	16.337	17.553	33.890
45-49	15.202	16.292	31.494
50-54	13.062	14.305	27.367
55-59	9.864	11.535	21.399
60-64	8.107	9.235	17.342
65-69	5.866	6.798	12.664
70-74	3.961	4.818	8.779
75+	3.683	5.036	8.719
Bulukumba	213.443	224.164	437.607

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Selanjutnya, untuk mengetahui komposisi penduduk di Kabupaten Bulukumba menurut jenis kelaminnya. Rasio Jenis Kelamin (RJK) tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Tabel Informasi mengenai Rasio Jenis Kelamin dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-17
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 14	102,27	102,21	102,13	102,06	104,59
15 - 65	87,11	87,11	87,24	87,31	93,79
65 +	68,05	68,41	68,78	69,15	81,13
Total	89,55	89,57	89,55	89,54	95,22

Sumber: Bulukumba dalam Angka 2021

Pada tahun 2020, Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba sebesar 95,22. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 95 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk perempuan di Kabupaten Bulukumba lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk usia 0-14 tahun justru menunjukkan perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada Tahun 2020, Rasio Jenis Kelamin untuk penduduk usia 0-14 tahun adalah sebesar 104,59. Sementara itu, untuk penduduk usia 15-16 tahun dan usia 65 tahun keatas komposisinya menunjukkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Rasio Jenis Kelamin penduduk usia 15-65 tahun sebesar 93,79 pada tahun 2020. Untuk penduduk usia 65 tahun keatas Rasionya sebesar 81,13.

4) Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 adalah sebesar 220.103 jiwa, yang terdiri dari 215.573 jiwa penduduk yang berkerja, dan 7.530 jiwa pengangguran terbuka. Selain itu, jumlah bukan angkatan kerja adalah 102.347 jiwa, dengan rincian 16.643 jiwa penduduk yang bersekolah, 68.636 jiwa penduduk yang

mengurus rumah tangga, dan 17.068 jiwa lainnya. Untuk tahun 2020 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bulukumba adalah 3,54 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah 68.26 persen. Untuk lebih jelasnya statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

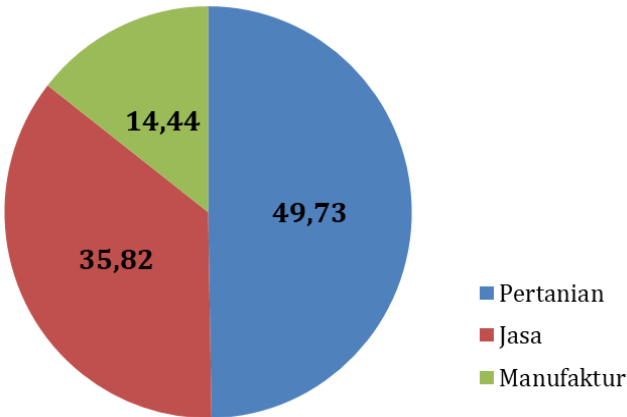
Tabel II-18
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	125.230	94.873	220.103
1. Bekerja	120.478	92.095	212.573
2. Pengangguran Terbuka	4.752	2.778	7.530
II. Bukan Angkatan Kerja	24.637	77.710	102.347
1. Sekolah	5.875	10.768	16.643
2. Mengurus Rumah Tangga	8.097	60.539	68.636
3. Lainnya	10.665	6.403	17.068
Jumlah	149.867	172.583	322.450

Sumber: Bulukumba dalam Angka tahun 2021

Jika ditinjau menurut pembagian lapangan pekerjaan utama, terdapat 49,73 persen penduduk Kabupaten Bulukumba yang bekerja di sektor Pertanian, 35,82 pesen yang bekerja di sektor Jasa, dan sisanya sebanyak 14,44 persen di sektor manufaktur. Untuk lebih jelasnya statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II-3
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pekerjaan Utama (%), tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, tahun 2021

2.1.10 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah kabupaten bulukumba diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Bulukumba sebagai pusat kegiatan wilayah dibidang agroindustri, pertanian, perikanan dan pariwisata arahan sistem jaringan struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan. Bulukumba untuk sistem jaringan transportasi nasional terdapat jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalur kereta api dan lintas penyeberangan antarpulau. Sedangkan arahan pola ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan Bulukumba untuk kawasan lindung nasional terdapat taman hutan raya Bontobahari dan kawasan budidaya strategis adalah kawasan andalan Bulukumba adalah pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan dan kawasan teluk bone untuk perikanan dan pariwisata. Rencana pola ruang wilayah dan Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bulukumba yang diklasifikasi sesuai dengan penetapan kawasan dalam RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021–

2025 yang memiliki potensi pengembangan wilayah dibagi terhadap beberapa kawasan yang secara eksplisit dapat dilihat sebagai berikut:

a. **Kawasan Lindung**, yang terdiri atas:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah. air tanah. dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Secara spesifikasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dibagi atas dua kawasan yakni kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air dimana untuk kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sedangkan kawasan resapan air ditetapkan di wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kabupaten Bulukumba.
- Kawasan perlindungan setempat; Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal serta ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya terbagi atas tiga kawasan yakni kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman hutan raya, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Untuk kawasan pantai berhutan bakau, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan luasan 30 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu dengan luasan 50 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe dengan luasan 170 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 5 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Bonto Tiro dengan luasan 25 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Herlang dengan luas 100 Ha, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang dengan luasan 100 Ha. Untuk Kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari. dengan luasan 3.475 Ha, sedangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di kawasan puncak Pua Janggo Kecamatan Bonto Bahari, Kawasan Makam Datu Tiro di Kecamatan Bontobahari, Kawasan makam Karaeng Ambibia di Kecamatan Bontotiro, dan kawasan makam Karaeng Sapohatu juga di Kecamatan Bontotiro.

e. **Kawasan Rawan Bencana Alam**

Untuk kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi dua yaitu kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe dan Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang. sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.

f. **Kawasan Lindung Geologi**

Kawasan lindung Geologi di Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan cagar alam geologi dan kawasan rawan bencana alam geologi, Kawasan cagar alam geologi merupakan kawasan dengan keunikan batuan dan fosil meliputi hampir diseluruh kawasan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba;

d. **Kawasan Lindung Lainnya**

Kawasan Lindung Lainnya ditetapkan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya dimana untuk kawasan lindung lainnya di Kabupaten Bulukumba merupakan kawasan konservasi laut

e. Kawasan Budidaya

Berdasarkan jenis peruntukannya. Kawasan Budidaya di Kabupaten Bulukumba terdiri atas sembilan jenis kawasan peruntukan yaitu sebagai berikut:

✓ Kawasan peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bulukumba dengan luas kawasan 1.972 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, Bontobahari, Bontotiro, dan sebagian Kecamatan Ujungbulu.

✓ Kawasan peruntukan Hutan Rakyat

Untuk kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba dengan luas mencapai 22.273 Ha ditetapkan di sebagian wilayah pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, dengan luasan 733 Ha yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.

✓ Kawasan peruntukan Pertanian

Berdasarkan klasifikasi jenisnya maka kawasan pertanian di Kabupaten Bulukumba terbagi atas empat jenis kawasan peruntukan pertanian yakni kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan. kawasan peruntukan pertanian hortikultura. kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan. Untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luasan 62.975 Ha yang terdiri dari beberapa komoditas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dan sayur-sayuran ditetapkan pada sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan luas area sebesar 2.700 Ha. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 23.916 Ha juga tersebar di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan untuk kawasan peruntukan peternakan juga tersebar di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan berbagai jenis spesies ternak.

✓ Kawasan peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Bulukumba berdasarkan jenis klasifikasi peruntukannya terbagi atas tiga yaitu kawasan peruntukan perikanan tangkap yang ditetapkan pada Tujuh Kecamatan yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Kecamatan Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontotiro, Bontobahari, Herlang, Kajang, kawasan peruntukan budidaya perikanan di tetapkan di sebagian wilayah pada Tujuh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba yakni Kecamatan Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang, Kajang dan Kecamatan Gantarang. sedangkan untuk kawasan pengolahan ikan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, Gantarang, Ujung Loe, Bontabahari, Bontotiro dan Kecamatan Herlang. Untuk kawasan peruntukan perikanan yang akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Kajang sebagai pusat pengembangan dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, Gantarang, Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Bontotiro, dan Kecamatan Herlang ditetapkan sebagai zona penyanggah.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

✓ Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan terdiri atas usaha pertambangan mineral dan batubara yang ditetapkan di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. sedangkan pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Herlang dan Kecamatan Gantarang.

✓ Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bulukumba terdiri atas tiga jenis kawasan peruntukan yaitu kawasan peruntukan industri besar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan jenis industri pengolahan kapas dan pengolahan kayu, Kecamatan Ujung Loe, dan Bulukumpa dengan jenis industri pengolahan karet, kawasan peruntukan industri sedang yang merupakan pembuatan industri kapal ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari. sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, Ujung Loe, Ujungbulu, Bontotiro, Herlang, Kindang, Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.

✓ Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bulukumba dibagi atas tiga jenis kawasan peruntukan yaitu:

1. Kawasan Peruntukan Wisata Budaya. terdiri atas:

- Kawasan adat Amma Toa Kajang di Kecamatan Kajang.
- Kawasan makam Samparaja Karaeng Sapo Batu di Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan situs Pua Janggo di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan situs Karangpuang di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa.
- Kawasan makam Al-Maulana Khatib Bungsu (Dato Tiro) di Hila-hila Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia) di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro.

2. Kawasan Peruntukan Wisata Alam terdiri dari:

- Kawasan Gua Passohara di Desa Ara Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Gua Malukua di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Gua Liukang Panikia di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Perkebunan Karet di Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bulukumpa.
- Kawasan Pantai Pasir Putih Tanjung Bira di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Pantai Pasir Putih Lemo-lemo di Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Pantai Mandala Ria di Desa Ara Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Pantai Samboang di Samboang Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan Pulau Liukang Loe di Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Permandian alam Limbua di Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan Permandian Sumur Panjang di Hila-hila Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan Permandian Alam Bravo di Kelurahan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.
- Kawasan Danau Buhung Tujuh Kahayya di Desa Kindang Kecamatan Kindang.
- Kawasan Pantai Panrang Luhu di Desa Bira Kecamatan Bontobahari

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

- Kawasan Pantai Marumasa di Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Kasuso di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Permandian Alam Seppenge' di Desa Bontomate'ne Kecamatan Rilau Ale.
 - Kawasan Permandian Alam Bombang Tellue di Kecamatan Rilau Ale. dan
 - Kawasan Permandian Alam Kantang Jodoh di Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale.
 - Kawasan Wisata Lembang'e Sungai Apareng Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa
 - Makam Tonrang Gowa di Desa Borong Loe Kecamatan Gantarang;
 - Bola Kambarae (Saorajae) Tanete Kecamatan Bulukumpa;
 - Makam Sombayya di Palioi;
 - Makam Raja Bone ke IX di Campadidie Dampang.
 - Kawasan Wisata Benteng Palioi; dan
 - Makam Raja Kessi Desa Bialo Kec. Gantarang
3. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan. terdiri dari:
- Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale
 - Kawasan Pembuatan Perahu Phinisi. di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Agrowisata Tambak di Kecamatan Ujung Loe.
 - Kawasan Dermaga Leppe'E di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu.
- ✓ Kawasan peruntukan permukiman
- Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas dua jenis peruntukan permukiman yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan. fasilitas sosial. fasilitas umum. serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- f. **Kawasan Strategis Kabupaten**
- Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di:
- a. Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan marine politan center. terdiri dari:
1. Kawasan Minapolitan. untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan laut ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang; dan
 2. Kawasan Minapolitan untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan pesisir dan dipusatkan di Kecamatan Kajang.
 3. Kawasan pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Gantarang;
 4. Kawasan Agrowisata di Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale;
 5. Kawasan Pusat Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Bontobahari;
 6. Kawasan Perdagangan di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 7. Kawasan Bandar Udara Pengumpan di Kecamatan Bontobahari; dan
 8. Kawasan Ekowisata Tabbuakkang di Kecamatan Kindang.
- b. KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan di Kawasan pembuatan

- c. KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup ditetapkan di Kawasan Danau Kahaya di Kecamatan Kindang
- d. Kawasan pusat pengembangan agropolitan ditetapkan akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, serta Seni Budaya dan Olahraga.

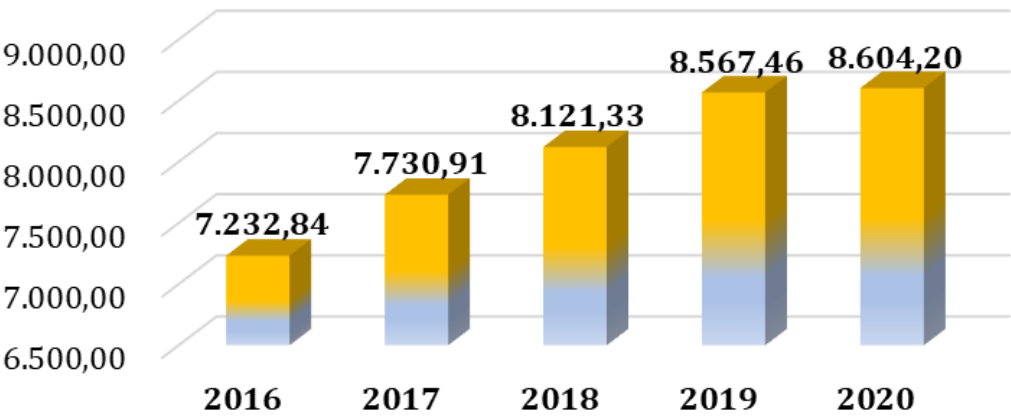
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi Kumulatif, PDRB per kapita, Indeks Gini dan Kemiskinan.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga. Saat ini, tahun dasar PDRB harga konstan ialah tahun 2010. Grafik II-4 menyajikan PDRB atas dasar harga konstan 2010 selama lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 4,93%. Pada tahun 2020 terjadi perlambatan yang sangat drastis hingga mencapai angka 0,43%, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh sangat besar pada aktivitas ekonomi di tingkat global, nasional, dan di tingkat regional. Namun demikian, terdapat kenaikan nilai output (nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai sejak tahun 2017 dipengaruhi oleh gejala elnino yang menyebabkan kekeringan panjang dan berpengaruh pada produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini menyebabkan defisit neraca perdagangan antar daerah yang berpengaruh pada terjadinya kontraksi komponen pengeluaran net ekspor antar daerah dari 0,76 trilyun rupiah pada 2017 menjadi (197,33) trilyun rupiah pada tahun 2018. Untuk selengkapnya disajikan pada Grafik II-4 berikut ini:

Grafik II-4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

Selama kurun waktu tahun tahun 2016-2019, jika dirata-ratakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Namun jika diperbandingkan dengan capaian rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba masih lebih baik. Untuk tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Bulukumba tercatat sebesar 0,43 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi hingga pada angka -0,70 persen. Kondisi yang sama juga dialami oleh nasional, yang mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen. Hal ini disebabkan oleh dampak dari Pandemi COVID-19. Sebagaimana di gambarkan pada tabel berikut.

Tabel II-19
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Bulukumba	%	6,80	6,86	5,05	5,49	0,43
2	Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,42	7,21	7,06	6,92	-0,70
3	Nasional	%	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

1) **Perkembangan PDRB**

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2016, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut. Secara total, PDRB Kabupaten Bulukumba (Atas Dasar Harga Berlaku) di tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 14.214,59 milyar Rupiah pada tahun 2019 menjadi 14.565,29 milyar Rupiah pada tahun 2020. Sejalan dengan angka PDRB (atas dasar harga) Berlaku PDRB (Atas Dasar Harga Konstan 2010) juga mengalami peningkatan yakni dari 8.567.46 milyar Rupiah pada tahun 2019 menjadi 8.604,20 milyar Rupiah pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 0,43 %. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*).

Dari sisi produksi, pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada kategori Informasi dan Komunikasi yang tumbuh di atas 11 % di tahun 2020. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba didominasi pertumbuhan komponen pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Jika dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, pada periode tahun 2016-2020 PDRB Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 10.769,94 milyar Rupiah (2016); 12.068,74 milyar Rupiah (2017); 13.198,92 milyar Rupiah (2018); 14.214,59 milyar Rupiah (2019); dan 14.565,49 milyar Rupiah (2020) dengan nilai rata-rata sebesar 12.963,54 milyar Rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume.

Di sisi lain, pertumbuhan PDRB ADHK dan PDRB ADHB mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 hal tersebut dipengaruhi oleh gejala elnino yang menyebabkan kekeringan panjang dan berpengaruh pada produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini menyebabkan defisit neraca perdagangan antar daerah yang berpengaruh pada terjadinya kontraksi komponen pengeluaran net ekspor antar daerah dari 0,76 trilyun rupiah pada 2017 menjadi (197,33) trilyun rupiah pada tahun 2018 untuk PDRB ADHK dan kontraksi komponen pengeluaran net ekspor antar daerah dari 11,39 trilyun rupiah pada 2017 menjadi (380,21) trilyun rupiah pada tahun 2018 untuk PDRB ADHB.

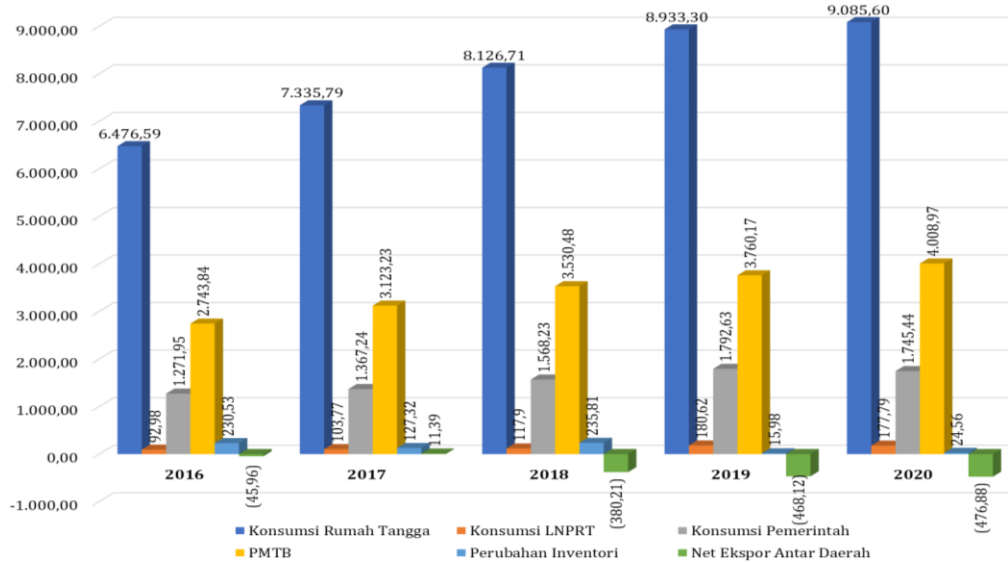
Peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bulukumba periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel II-20 dan grafik II-5 berikut ini:

Tabel II-20
PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.476,59	7.335,79	8.126,71	8.933,30	9.085,60
2. Konsumsi LNPRT	92,98	103,77	117,9	180,62	177,79
3. Konsumsi Pemerintah	1.271,95	1.367,24	1.568,23	1.792,63	1.745,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.743,84	3.123,23	3.530,48	3.760,17	4.008,97
5. Perubahan Inventori	230,53	127,32	235,81	15,98	24,56
6. Net Ekspor Antar Daerah	(45,96)	11,39	(380,21)	(468,12)	(476,88)
PDRB ADHB	10.769,93	12.068,74	13.198,92	14.214,58	14.565,48

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Grafik II-5
PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Selain dinilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun dasar 2010. Melalui pendekatan ini nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Bulukumba pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II - 13
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran.
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016 - 2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.328,34	4.666,61	4.998,46	5.376,80	5.353,90
2. Konsumsi LNPRT	65,63	68,27	74,51	109,03	99,69
3. Konsumsi Pemerintah	862,98	891,52	956,54	1.060,62	1.018,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.850,28	2.017,65	2.171,07	2.211,77	2.302,46
5. Perubahan Inventori	151,18	86,10	118,07	9,41	12,18

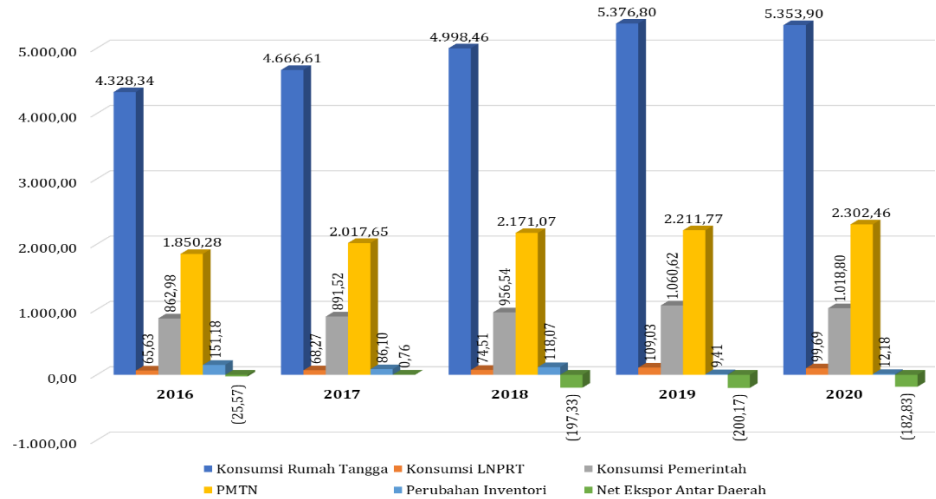
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
6. Net Ekspor Antar Daerah	(25,57)	0,76	(197,33)	(200,17)	(182,83)
PDRB ADHK 2010	7.232,84	7.730,91	8.121,33	8.567,46	8.604,20

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni sebesar 7.232.84 milyar Rupiah (2016); 7.730.91 milyar Rupiah (2017); 8.121.33 milyar Rupiah (2018); dan 8.567.46 milyar Rupiah (2019), dan 8.604,20 milyar Rupiah (2020). Sejalan dengan PDRB ADHK yang terus meningkat setiap tahunnya, perekonomian Kabupaten Bulukumba juga selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Meskipun demikian. terlihat dari gambar II-12, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2020 pertumbuhannya sangat rendah. Angka Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir yakni sebesar 6,77 persen (2016); 6,89 persen (2017); 5,05 persen (2018); 5,49 persen (2019), dan 0,43 persen (2020). Peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bulukumba periode 2016-2020 dapat dilihat dari Grafik berikut ini:

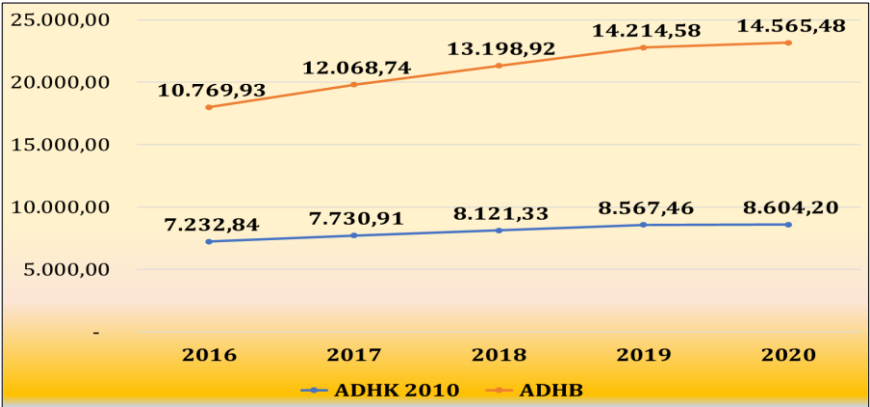
Grafik II-6
PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Apabila kita bandingkan PDRB menurut harga terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan. pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku. sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II-7
Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2) Struktur Perekonomian

Selama lima tahun terakhir (2016-2019) struktur perekonomian Bulukumba didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha. diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Jasa Perusahaan; Industri Pengolahan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Bulukumba. Namun demikian, akibat merebaknya pandemi *COVID-19*, terjadi perubahan struktur yang berkontribusi terhadap perekonomian di Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Bulukumba pada tahun 2020, adapun 5 kategori lapangan usaha yang dominan pada tahun 2020, yaitu lapangan usaha Informasi dan komunikasi, mencapai 11,92 persen (angka ini naik dari 7,66 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,27 persen (naik dari 3,31 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,00 persen. Berikutnya lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,31 persen (naik dari 5,71 persen di tahun 2019), serta lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,11 persen (naik dari 3,27 persen di tahun 2019). Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-21
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2016 - 2020

NO	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018*	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,28	5,34	0,06	2,13	-1,12
B	Pertambangan dan Penggalian	14,89	13,04	12,85	3,14	2,09
C	Industri Pengolahan	5,43	3,08	3,96	11,76	-3,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,10	5,68	6,95	7,23	3,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,04	4,52	6,34	1,72	4,98
F	Konstruksi	8,70	9,32	9,59	3,27	5,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,87	8,95	9,73	9,93	-1,25
H	Transportasi dan Pergudangan	6,44	8,94	9,46	9,68	-14,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,42	12,41	15,80	5,23	-1,99
J	Informasi dan Komunikasi	9,88	9,38	9,27	7,66	11,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,28	3,06	5,37	9,65	9,00
L	Real Estate	13,84	12,54	6,88	2,18	1,03
M, N	Jasa Perusahaan	5,49	9,95	9,88	10,53	-4,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,48	4,80	8,40	10,35	-0,43
P	Jasa Pendidikan	8,36	9,55	9,12	3,31	9,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,51	9,06	9,66	5,71	6,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,63	9,81	13,11	11,92	-1,21
Produk Domestik Regional Bruto		6,77	6,89	5,05	5,49	0,43

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

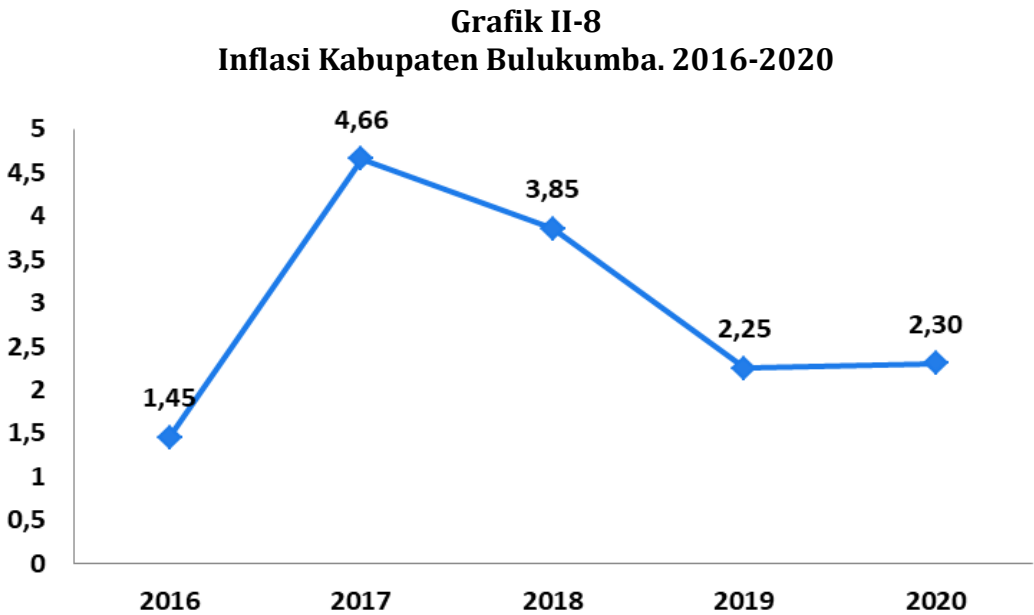
Perubahan struktur perekonomian Bulukumba yang sebelumnya didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-1,12

persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (-1,25 persen); Jasa Perusahaan (-4,26 persen); Industri Pengolahan -3,60); dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (-0,43 persen), menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,43 persen.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

Tren inflasi di Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 yang diiringi penurunan tingkat inflasi hingga 2019 pada angka 2,25 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,30 persen. Dari data tersebut menunjukkan penurunan tingkat inflasi. Hal ini sejalan dengan fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah kabupaten, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat juga semakin berkurang. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,66 persen dan termasuk kategori inflasi ringan. Pengendalian inflasi di daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak jatuh pada kemiskinan. Selengkapnya pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2.2.1.3 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Bulukumba atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB perkapita tercatat sebesar 26,06 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 34,43 juta Rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita

yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi dan ditunjukkan pada Tabel II-15.

Tabel II-22
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016-2020

Uraian/Description	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB/GRDP Value (miliar rupiahs/billion rupiahs)					
- Atas Dasar Harga Berlaku/at current price	10.769,94	12.068,74	13.198,92	14.214,59	14.565,49
- Atas Dasar Harga Konstan 2010/at 2010 constant price	7.232,84	7.730,91	8.121,33	8.567,46	8.604,20
PDRB Per Kapita/Per Capita GRDP (juta rupiahs/million rupiahs)					
- Atas Dasar Harga Berlaku/at current price	26,06	29,03	31,55	33,80	34,43
- Atas Dasar Harga Konstan 2010/at 2010 constant price	17,50	18,60	19,41	20,37	20,34
- Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010/Growth of per capita GRDP at 2010 constant price	6,06	6,25	4,39	4,92	-0,14
Jumlah Penduduk/Population (orang/people)	413.229	415.713	418.326	420.603	423.012
Pertumbuhan Jumlah Penduduk/Population Growth (persen/percent)	0,67	0,60	0,63	0,54	0,57

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bulukumba atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar 26,06 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 34,43 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Walaupun terjadi kenaikan, namun nilai ini masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 55,51 juta rupaih dan Nasional yaitu 56,90 juta rupiah. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-23
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

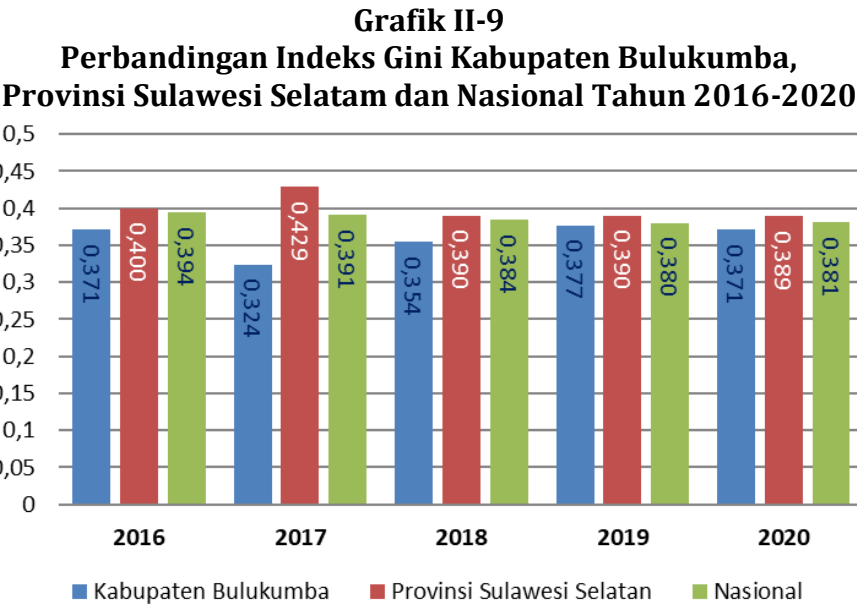
Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PDRB/PDB Perkapita (ADHB)						
Bulukumba	Juta Rp	26,06	29,03	31,55	33,80	34,43
Sulawesi Selatan	Juta Rp	43,82	47,82	52,64	57,03	56,51
Nasional	Juta Rp	47,94	51,89	55,99	59,07	56,90
PDRB/PDB Perkapita (ADHK)						
Bulukumba	Juta Rp	17,50	18,60	19,41	20,37	20,34
Sulawesi Selatan	Juta Rp	31,30	33,23	35,25	37,35	36,76
Nasional	Juta Rp	36,47	37,85	39,34	40,84	41,85

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2.2.1.4 Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh. Pada periode tahun 2016-2020 Capaian Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi. Jika diperbandingkan dengan capaian rata-rata Indeks

Gini Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, capaian Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba masih lebih baik. Sesuai dengan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, nilai Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba tahun 2020 sebesar 0,371, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,389, dan Nasional sebesar 0,381. Selengkapnya pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2.2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 9,78 persen, sementara di Sulawesi Selatan tingkat kemiskinan berada pada tingkat 8,72 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba cenderung meningkat baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk, namun berhasil ditekan hingga pada tahun 2020 berada pada angka 7,10 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-24
Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
2016	274.318	33,25	8,06
2017	284.108	33,10	8,00
2018	310.753	31,25	7,48
2019	330.161	30,49	7,26
2020	351.180	30,00	7,10

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional menunjukkan bahwa kinerja penurunan Kabupaten Bulukumba lebih baik daripada kinerja penurunan kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Bulukumba, menunjukkan bahwa program dan

kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan masih perlu lebih dioptimalkan. Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba dengan Sulawesi Selatan dan Nasional, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-25
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2020

Wilayah	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bulukumba	%	8,06	8,00	7,48	7,26	7,10
Provinsi Sulawesi Selatan	%	9,24	9,48	8,87	8,69	8,72
Nasional	%	10,7	10,12	9,66	9,41	9,78

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Selain dari data Kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia juga digunakan sebagai data pembanding bagi pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tahun 2020 tercatat sebesar 137.667 jiwa penduduk rentan dan miskin, dan 40.018 Rumah Tangga rentan dan miskin, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-26
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2022
Rumah Tangga Sasaran (KK)	23.159	35.545	38.359	39.028	40.018
Individu (Jiwa)	107.460	127.516	131.850	140.548	137.667

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2021

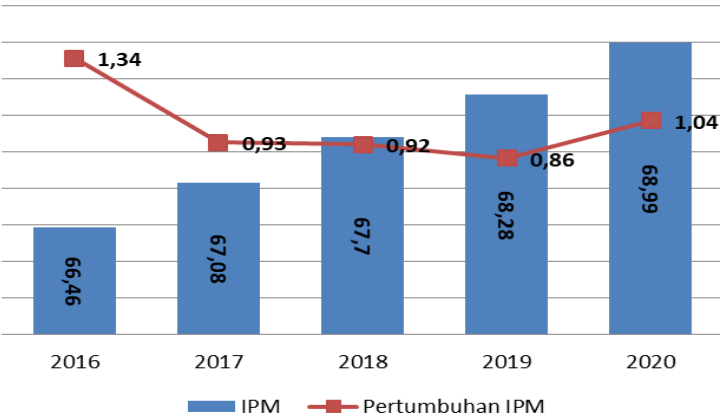
2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II-10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Sejalan dengan komponen-komponen pembentuknya. IPM Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir. IPM Kabupaten Bulukumba terus meningkat. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Bulukumba sebesar 66,46 persen. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya. pada tahun 2020. capaian IPM sebesar 68,99 persen. Berdasarkan kriteria dari UNDP. IPM kurang dari 60 tergolong kedalam IPM rendah. IPM antara 60 sampai dengan 70 tergolong IPM sedang. IPM 70 sampai dengan 80 tergolong IPM tinggi dan IPM lebih dari sama dengan 80 tergolong IPM sangat tinggi. Dengan demikian. IPM Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir masih tergolong ke dalam IPM sedang. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-27
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Beberapa Wilayah di Sulawesi Selatan,
Tahun 2019 dan 2020

Kabupaten/Kota	2019		2020	
	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
Selayar	66,91	22	67,38	21
Bulukumba	68,28	17	68,99	15
Bantaeng	68,30	15	68,73	17
Jeneponto	64,00	24	64,26	24
Takalar	66,94	21	67,31	22
Gowa	69,66	10	70,14	10
Sinjai	67,05	20	67,6	20
Makassar	82,25	1	82,25	1
Sulawesi Selatan	71,66		71,93	
Nasional	71,92		71,94	

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Berdasarkan tabel di atas, capaian IPM Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020 IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,93, sementara pada tahun yang sama, capaian IPM Kabupaten Bulukumba sebesar 68,99. Capaian IPM Kabupaten Bulukumba menempati peringkat ke 15 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung, capaian IPM Kabupaten Bulukumba lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten tetangga lainnya.

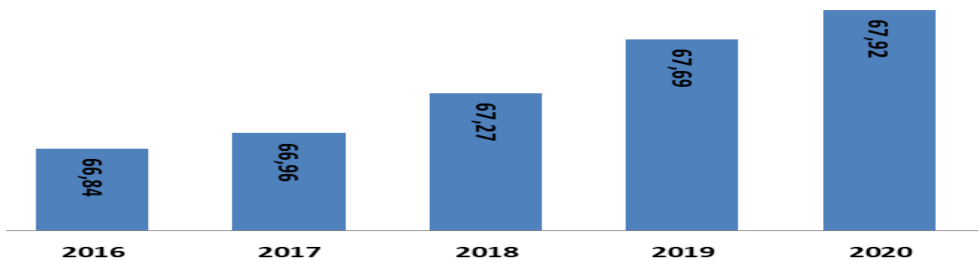
2.2.2.2 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) atau life expectancy adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation) yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup

menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik respon yang cepat dalam keadaan darurat. ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan.

Selama lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Bulukumba terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, AHH Kabupaten Bulukumba sebesar 66,84 tahun. Angka tersebut terus meningkat hingga di tahun 2020 AHH sebesar 67,92 tahun. Artinya. rata-rata penduduk di Kabupaten Bulukumba mampu bertahan hingga umur 67 tahun. Adanya peningkatan AHH mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II-11
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016-2020



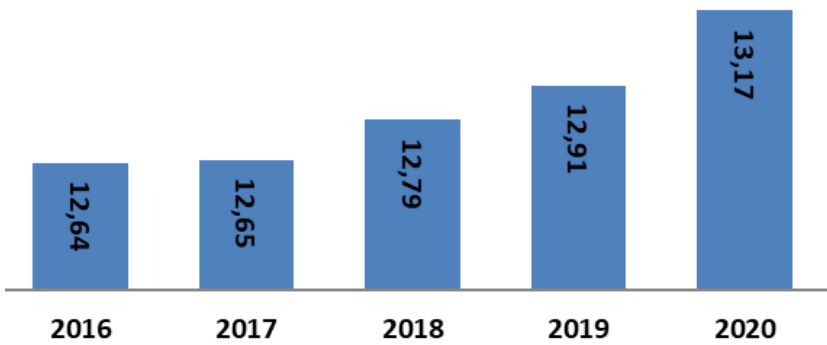
Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Pengukuran angka harapan lama sekolah (expected years of schooling) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir. HLS juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian HLS pada tahun 2016 ialah sebesar 12,64 tahun. Capaian HLS terus meningkat setiap tahunnya pada periode 2016-2020, pada tahun 2020 capaian HLS sebesar 13,17 tahun. Artinya, seorang anak berumur 7 tahun keatas diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal selama 13,17 tahun, atau minimal hingga semester 2 pada perguruan tinggi. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II-12
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016-2020



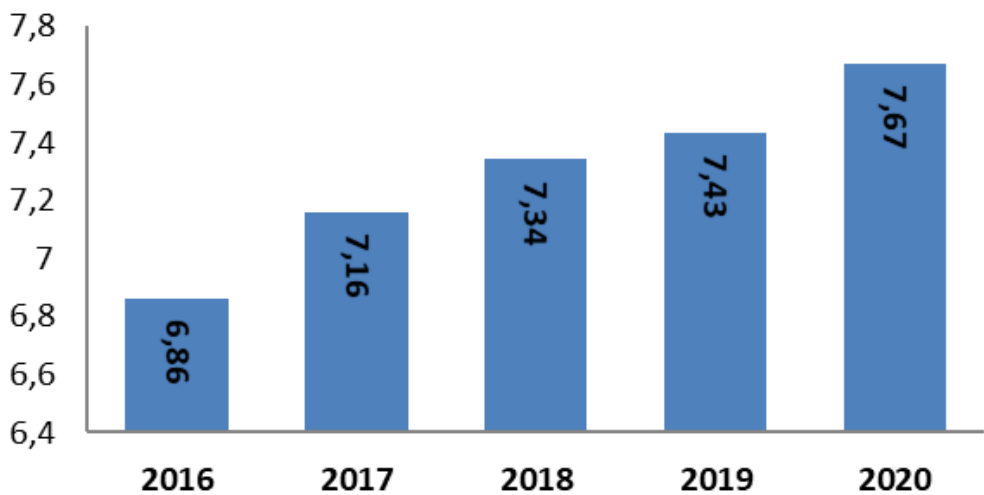
Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2.2.2.4 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan gambaran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun.

Grafik II-13 menyajikan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Selama kurun waktu tersebut, RLS juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 RLS Kabupaten Bulukumba sebesar 6,86 tahun. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2020 sebesar 7,67 tahun. Artinya, penduduk Kabupaten Bulukumba yang berusia 25 tahun ke atas, secara rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMP/ sederajat. atau lebih tepatnya kelas 7 SMP/ sederajat. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II-13
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020



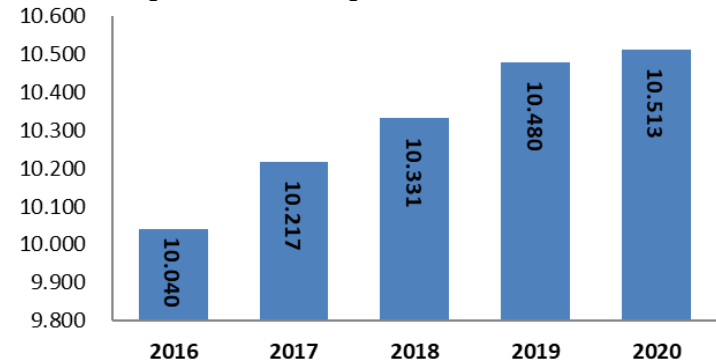
Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2.2.2.5 Pengeluaran Per Kapita Riil

Pengeluaran perkapita riil dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya.

Secara rata-rata pengeluaran tiap penduduk di Kabupaten Bulukumba mencapai 10.48 juta rupiah per tahun. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ratarata pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada tahun 2019 masih sebesar 10.480 juta per tahun. Dari angka pengeluaran perkapita yang disesuaikan tersebut, diperoleh indeks pengeluaran. Indeks pengeluaran juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 indeks pengeluaran Kabupaten Bulukumba sebesar 10.513 juta per tahun. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II-14
Pengeluaran Per Kapita Riil Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

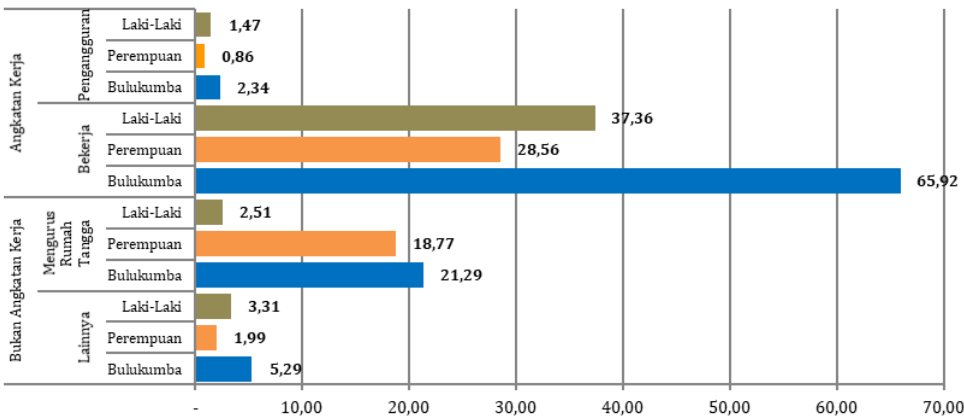
2.2.2.6 Rasio Penduduk Bekerja

(a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada data dinas tenaga kerja jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status/jenis pekerjaannya. Pada tahun 2020 jumlah pekerja laki – laki sebanyak 120.478 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 92.092 jiwa maka jumlah pekerja laki laki dan perempuan sebanyak 212.573 jiwa dan terbagi atas dua angkatan kerja yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, laki-laki sebanyak 149.867 jiwa dan perempuan sebanyak 172.583 jiwa maka jumlah total angkatan kerja dan bukan angkatan kerja sebanyak 322.450 jiwa dimana jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 437.607 jiwa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dengan merujuk pada suatu waktu dan periode waktu tertentu. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam angkatan kerja. Pada tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bulukumba sebesar 68,26 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 68 orang diantaranya termasuk dalam angkatan kerja atau sebanyak 68 orang aktif secara ekonomi. Apabila TPAK dibandingkan menurut jenis kelamin, TPAK Perempuan jauh di bawah TPAK laki-laki, yaitu 37,36 persen untuk TPAK Perempuan dan 28,56 persen untuk angkatan kerja laki-laki. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II-15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba (persen), tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Besar kecilnya TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain struktur umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan beberapa faktor lain. Struktur umur mempengaruhi TPAK pada kelompok umur tertentu, status perkawinan mempengaruhi TPAK Perempuan, karena wanita dihadapkan pada pilihan antara bekerja atau mengurus

rumah tangga setelah terikat perkawinan. Faktor lain yang mempengaruhi TPAK adalah pendidikan.

(b) Pengangguran

Salah satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini menjadi fokus perhatian selain kondisi perkembangan angkatan kerja (economically active population) dan struktur ketenagakerjaan. Ditinjau dari sisi ekonomi pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja.

Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Faktor yang menyebabkan excess supply tenaga kerja ini antara lain tingkat investasi yang rendah sehingga perusahaan dalam negeri sulit mengembangkan dan meningkatkan usahanya angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia usaha tidak ada kecocokan upah dan tidak memiliki kemauan wirausaha.

Pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja. tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha. tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers). serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (future starts).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 3,42 persen dengan total jumlah pengangguran sebanyak 7.530 orang. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba sebesar 3,06 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Jika diperbandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian TPT Kabupaten Bulukumba masih lebih baik pada periode 2016-2020. Pada tahun 2020, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara total di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 adalah 3,42 persen. Artinya dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. terdapat 3 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan, seperti pada tabel berikut.

Tabel II-28
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Bulukumba	%	3,00	3,37	3,42	3,06	3,42
Sulawesi Selatan	%	4,80	5,61	4,94	4,62	6,31
Nasional	%	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, tahun 2021

Pada Tahun 2020, jika diperbandingkan dengan beberapa kabupaten di kawasan selatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba masih berada di atas TPT Kabupaten Selayar dengan nilai TPT 2,44 persen dan Kabupaten Sinjai sebesar 2,65 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Bantaeng sebesar 4,27 persen. Seperti pada tabel berikut.

Grafik II-16
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kep. Selayar	0,90	2,34	1,74	1,10	2,44
2	Bulukumba	3,00	3,37	3,42	3,06	3,42
3	Bantaeng	4,07	3,31	3,39	3,65	4,27
4	Sinjai	1,55	4,53	1,95	2,17	2,65
Sulawesi Selatan		4,80	5,61	4,94	4,62	6,31
Nasional		5,61	5,50	5,30	5,23	7,07

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

(c) Tingkat Kesempatan Kerja

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja tentunya akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan tingkat kesempatan kerja yang ada. Kemudahan berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian merefleksikan kemudahan masyarakat mencari kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya sekaligus berpartisipasi untuk mendapatkan imbalan berupa balas jasa atas faktor produksi dalam kegiatan ekonomi.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah ukuran yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang bekerja atau angkatan kerja yang sudah terserap dalam aktifitas perekonomian. Indikator TKK juga menunjukkan kemudahan angkatan kerja untuk berpartisipasi secara ekonomi di seluruh sektor. Pada tahun 2020, dari total angkatan kerja yang ada sekitar 96,58 persen adalah penduduk yang bekerja. Ini mengindikasikan dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja terdapat sekitar 96 sampai 97 orang telah bekerja atau terserap dalam pasar kerja yang tersebar di berbagai sektor perekonomian. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TKK antara Angkatan Kerja Perempuan dan Angkatan Kerja Laki-Laki tidak berbeda secara signifikan, dimana TKK penduduk laki-laki sekitar 96,21 persen dan TKK penduduk perempuan sekitar 97,07 persen. Seperti pada tabel berikut

Tabel II-29
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bulukumba (Persen), tahun 2020

Jenis Kelamin	TKK
Penduduk Laki - Laki	96,21
Penduduk Perempuan	97,07
Kabupaten Bulukumba	96,58

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2.2.2.7 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Persentase Gizi Buruk dihitung berdasarkan jumlah balita gizi buruk tahun tertentu dibagi dengan jumlah keseluruhan balita pada tahun tertentu dikalikan seratus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren yang berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 jumlah Balita Gizi Buruk sebanyak 4 kasus atau 0,015 persen dari total Balita pada tahun 2020. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-30
Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Balita Gizi Buruk (Jiwa)	4	8	8	9	4
Jumlah Balita Jiwa	38.199	37.638	42.409	29.886	25.192
Balita Gizi Buruk (%)	0,010	0,021	0,019	0,03	0,015

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba, tahun 2021.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bulukumba kecenderungan meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2018 namun pada tahun 2019 terjadi penurunan yang drastis menjadi 0.03 persen begitupun pada tahun 2020 sebesar 0,015 persen.

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang dapat meningkatkan jumlah kelompok seni dan budaya dan jumlah kelompok olahraga di Kabupaten Bulukumba. Hasil-hasil pembangunan seni dan budaya selama periode 2016-2020, menunjukkan bahwa jumlah kelompok seni dan budaya di Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan dari segi volume pelaksanaan kegiatan, hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang menyatukan penyelenggaraan seni dan budaya kedalam kegiatan festival pinisi pada tahun 2018, kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kegiatan festival diakibatkan Pandemi COVID-19. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-31
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Bulukumba 2016 - 2020

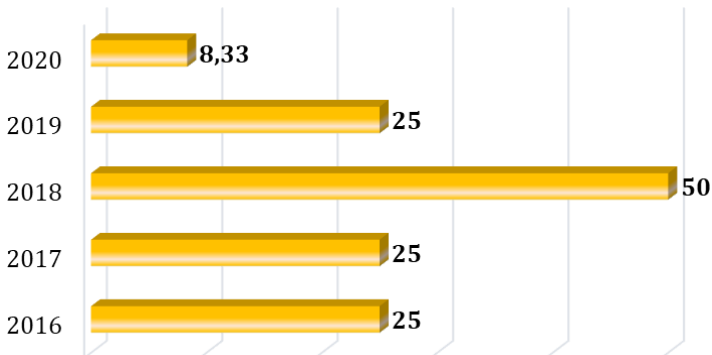
Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	3	3	5	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba tahun 2021

2.2.3.2 Cakupan pembinaan olahraga

Untuk pembangunan di bidang keolahragaan, cakupan pembinaan olahraga secara umum mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2017 pembinaan yang dilakukan sebesar 25,00 persen dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 50 persen cakupan pembinaan olahraga. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan pembinaan menjadi 8,33 persen. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga menjadi faktor utama belum optimalnya pembinaan kelompok olahraga dalam masyarakat, faktor lain adalah keterbatasan anggaran dalam pembinaan dan pelaksanaan event olah raga. Adapun data perkembangan indikator Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II-17
Cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Bulukumba 2016 - 2020



Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba tahun 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bulukumba yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan pada angka 108,09 dan tahun 2019 nilai APK SD/MI kembali naik menjadi 113,1 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 112,49. ini diakibatkan oleh masih besarnya partisipasi siswa usia 13 tahun ke-atas yang mengikuti jenjang pendidikan SD/MI.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang berfluktuasi, tahun 2016 APK SMP/MTs mencapai 84,19 persen, namun mengalami penurunan tahun 2018 menjadi 77,99 persen. Tahun 2018 terjadi peningkatan APK SMP/MTs menjadi 87,9 persen, tahun 2019 APK SMP/MTs kembali meningkat menjadi 87,75 persen, dan pada tahun 2020 capaian APK SMP/MTs meningkat menjadi 90,74 persen. Penyebab APK SMP/MTs yang tidak mencapai 100 persen pada tahun 2016-2020 yaitu masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP/MTs, Angka Putus Sekolah, sebaran sekolah SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau fasilitas pendidikan. Selain itu, permasalahan ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab anak usia sekolah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 juga menunjukkan tren yang berfluktuasi, dan capaiannya belum mencapai angka 100 persen. Tahun 2016 APK SMA/MA/SMK sebesar 84,59 persen, dan mengalami peningkatan menjadi 88,12 persen pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 60,04 persen. Capaian APK SMA/MA/SMK Kabupaten Bulukumba kembali mengalami peningkatan menjadi 91,48 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 capaiannya menurun menjadi 89,22 persen. Kondisi geografis Kabupaten Bulukumba juga menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan. Penyebaran sarana

pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan. maka semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bulukumba, sehingga anak usia sekolah yang ada di daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Untuk mengetahui perkembangan APK SD/MI, APK SMP/MTs, APK SMA/MA/SMK di Kabapaten Bulukumba Tahun 2016-2020, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-32
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba,
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK SD	%	108,99	108,61	108,09	113,1	112,49
2	APK SMP	%	84,19	77,99	87,9	87,75	90,74
3	APK SMA	%	84,59	88,12	60,04	91,48	89,22

Sumber: BPS Kabupaten Bulumba tahun 2021

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhitungan partisipasi murni sejak tahun 2007 tidak hanya menghitung siswa pada sekolah formal, tetapi juga termasuk siswa yang menempuh pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A. Paket B. dan Paket C).

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi selama periode 2016-2020. APM SD/MI pada tahun 2020 sebesar 98,32 persen, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun tahun 2019 yaitu sebesar 98,48 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016 APM SMP/MTs Kabupaten Bulukumba sebesar 78,3 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 83,37 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 menunjukkan tren berfluktuasi pada periode tersebut. Tahun 2016 APM SMA/MA/SMK Kabupaten Bulukumba sebesar 65,5 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 66,66 persen, tahun 2018 menurun menjadi 65,34 persen, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 65,88 persen, namun pada tahun 2020 kembali turun menjadi 65,78 persen.

Untuk mengetahui perkembangan capaian APM SD/MI, APM SMP/MTS, dan APM SMA/MA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-33
Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM SD/MI	%	98,01	99,16	98,75	98,48	98,32
2.	APM SMP/MTs	%	78,3	81,85	82,21	82,36	83,37
3.	APM SMA/MA/SMK	%	64,5	66,66	65,34	65,88	65,78

Sumber: BPS Kabupaten Bulumba, tahun 2021

Data diatas menunjukkan bahwa secara umum, capaian APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 belum terlalu optimal, mengingat tren capaian indikator yang berfluktuasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan adalah aksesibilitas sekolah yang belum optimal. Selain itu beberapa faktor yang penghambat pencapaian target antara lain sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan penerapan regulasi wajib belajar yang belum optimal.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut untuk 1000 penduduk. APS dihitung untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Capaian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020, capaian APS usia 7-12 tahun menunjukkan tren berfluktuasi, namun secara umum capaiannya sudah berada di atas 98 persen. Tahun 2016 capaian APS 7-12 tahun sebesar 98,72 persen dan meningkat menjadi 98,80 persen pada tahun 2020. Melihat kondisi capaian APS 7-12 tahun pada tahun 2020 yang nilainya 98,80 persen, ini berarti dari 100 persen penduduk usia 7-12 tahun, terdapat 98,80 persen yang sudah mengenyam bangku pendidikan.

Untuk capaian APS usia 13 – 15 tahun periode tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan rata-rata capaian 92 persen pada periode tersebut. Tahun 2016 capaian APS 13 - 15 tahun sebesar 92,8 persen, tahun 2017 turun menjadi 91,98 persen, tahun 2018 meningkat menjadi 92,36 persen, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 93,14 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 91,91 persen. Melihat kondisi capaian APS 13-15 tahun pada tahun 2020 yang nilainya 91,91 persen, ini berarti dari 100 persen penduduk usia 13-15 tahun, terdapat 91,91 persen yang sudah mengenyam bangku pendidikan.

Sementara itu, capaian APS usia 16 - 18 tahun periode tahun 2016-2020 juga menunjukkan tren yang berfluktuasi, dengan rata-rata capaian sebesar 73,53 persen pada periode tersebut. Tahun 2016 capaian APS 16 - 18 sebesar 70,86 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 74,18 persen, tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 74,43 persen, tahun 2019 turun menjadi 74,04 persen, dan tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 74,37 persen. capaian APS 16-18 tahun pada tahun 2020 yang nilainya 74,04 persen, ini berarti dari 100 persen penduduk usia 16-18 tahun, terdapat 74,04 persen yang sudah mengenyam bangku pendidikan.

Pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah daerah diperlukan untuk secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui perkembangan capaian APS usia 7 -12 Tahun, APS usia 13 - 15 Tahun, dan APS usia 16 - 18 Tahun di Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-34
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APS 7 -12 Tahun	%	98,72	99,16	98,93	98,77	98,80
2.	APS 13 - 15 Tahun	%	92,8	91,98	92,36	93,14	91,91
3.	APS 16 - 18 Tahun	%	70,86	74,18	74,43	74,04	74,37

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Angka Putus Sekolah (APS) bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan. Selain itu, APS berfungsi untuk melihat keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2020 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 0,03 persen, untuk jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 011 persen, dan Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 0,16 persen. Capaian Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 di semua jenjang pendidikan menunjukkan tren yang berfluktuasi, hal ini menunjukkan belum optimalnya intervensi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam penanganan Angka Putus Sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan masih belum optimal. Untuk mengetahui perkembangan capaian APS SD/MI, APS SMP/MTs, dan APS SMA/MA/SMK di Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-35
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba,
Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APS SD/MI	%	0,08	0,07	0,28	0,5	0,03
2.	APS SMP/MTs	%	0,20	0,10	0,66	0,9	0,11
3.	APS SMA/MA/SMK	%	0,20	0,17	0,15	0,15	0,16

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

5. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan (AL) merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Pada tahun 2020, Angka Kelulusan di Kabupaten Bulukumba sudah mencapai 100 persen. Hal ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai dan juga sesuai dengan standar penilaian minimal Dinas Pendidikan. Perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-36
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	AL SD	%	99	100	100	100	100
2.	AL SMP	%	99	100	100	100	100
3.	AL SMA	%	99	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba. 2021

6. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik, guru juga turut serta dalam menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Olehnya itu, guru diharuskan memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-IV.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020, rata-rata capaian guru dengan kualifikasi lulusan S1/D-IV sebesar 94,57 persen. Pada tahun 2018 jumlah guru dengan status sarjana mengalami penurunan drastis sebesar 85,40 persen hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi, serta adanya guru yang pindah tugas. Untuk tahun 2020 jumlah guru lulusan S1 sebesar 92,08 persen, artinya masih terdapat 7,92 persen

guru yang belum berstatus sarjana (S1). Adapun perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-37
Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	98,88	98,00	85,40	98,48	92,08

7. Rasio guru/murid sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas.

Untuk Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang menurun pada kurun waktu tersebut, tahun 2016 nilai rasionya sebesar 1:26 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1:13, artinya 1 (satu) orang guru SD-SMP menangani 13 (tiga belas) orang murid. Nilai tersebut tentunya sudah baik jika dibandingkan dengan Nilai Ideal Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar (SD-SMP) yakni 1:20 nila rasio.

Sedangkan untuk rasio Guru/Murid SMA mengalami penurunan di tahun 2016-2020, tahun 2016 nilai rasionya sebesar 1:25 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1:9, artinya 1 orang guru SMA menangani 9 orang murid. Nilai tersebut tentunya sudah baik jika dibandingkan dengan Nilai Ideal Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah yakni 1:20 nila rasio.

Tren penurunan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah pada periode tahun 2016-2020 disebabkan oleh karena pada tahun 2016 dan 2017 jumlah tenaga pendidikan/guru yang dihitung adalah hanya Tenaga Pendidikan/Guru yang berstatus ASN dibandingkan dengan jumlah siswa, sehingga nilainya berada di atas nilai rasio ideal (1:20), sementara pada tahun 2018-2020 jumlah tenaga pendidikan/guru yang dihitung adalah Jumlah Tenaga Pendidikan/Guru yang berstatus ASN dan Guru Honorer yang dibandingkan dengan jumlah murid jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga capaiannya mengalami penurunan jauh lebih rendah.

Untuk mengetahui perkembangan capaian Rasio Guru-Murid dan Sekolah di Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 dapat diilhat pada tabel berikut

Tabel II-38
Rasio Guru-Murid dan Sekolah Kabupaten Bulukumba,Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan Dasar	Rasio	1 : 26	1 : 28	1 : 14	1 : 14	1 : 13
2.	Rasio guru terhadap murid pendidikan Menengah	Rasio	1 : 25	1 : 27	1 : 12	1 : 12	1 : 9

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba 2021

8. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah.

Pada Tahun 2020, Angka Melek Huruf di Kabupaten Bulukumba sebesar 90,3 persen, nilai tersebut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang nilainya sebesar 92,9 persen. Pada tahun 2020 masih terdapat sebesar 9,7 persen Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang buta huruf, dan kelompok umur yang paling tinggi jumlah buta hurufnya adalah penduduk yang berusia 50 tahun ke atas. Angka Melek Huruf Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020, selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-39
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	91,8	91,8	92,5	92,9	90,3

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tataran kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu, program - program kesehatan di Indonesia banyak yang menitik beratkan pada upaya penurunan AKB.

Angka Kematian Bayi merujuk kepada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. jumlah kematian bayi menurut laporan Puskesmas di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi pada Tahun 2016-2017 mengalami penurunan menjadi (7,74 per 1000 KH) dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar (10,91 per 1000 KH),sedangkan tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi (7,53 per 1000 KH). Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan dan sarana prasarana yang belum memadai. hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-40
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kematian Bayi	Kasus	56	50	69	64	51
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Kelahiran Hidup	Angka	9	7,74	10,91	10,05	7,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

2. Angka Kematian Balita

Sepanjang tahun 2016-2020, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan, Rata-rata kematian Balita disebabkan oleh Diare dan Pneumonia, penyebab ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada saat anak sakit. Ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit yang belum adekuat. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-41
Angka Kematian Balita (AKBa) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kematian Balita	Kasus	59	55	88	70	54
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	9,48	8,52	14,06	10,99	7,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2020

3. Angka Kematian Neonatal

Sepanjang tahun 2016-2020, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami tren yang fluktuatif, Kematian Neonatal umumnya disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam mendeteksi dan tatalaksana awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, dan kualitas kesehatan. ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-42
Angka Kematian Neonatal Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kematian Neonatal	Kasus	40	40	72	51	45
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	6,43	6,19	11,51	8,01	6,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Bulukumba terutama dikarenakan hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan. Berdasarkan dua penyebab kematian tersebut, pengoptimalan program Antenatal Care (ANC) atau disebut juga Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan akan berdampak besar dalam mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan kematian. Sebaran kasus kematian ibu.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 - 2020 cenderung berfluktuasi, kematian ibu di tahun 2016 sebesar 64,27 kasus sedangkan pada tahun 2017 kematian ibu meningkat menjadi 92,91 kasus dan pada tahun 2018 kasus kematian ibu meningkat lagi menjadi 110,64 kasus, pada tahun 2019 turun menjadi 47,10 kasus kematian dan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 59,08 kasus kematian. Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini diantaranya kondisi fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana di beberapa Kecamatan untuk penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal masih belum optimal, distribusi SDM kesehatan yang kompeten untuk kasus kegawat daruratan belum merata ditingkat puskesmas, serta belum optimalnya pelayanan Antenatal Care (ANC) sesuai standar pada semua Kecamatan sehingga deteksi resiko terlambat diketahui. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-43
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ibu Hamil Yang Meninggal karena Hamil, Bersalin dan Nifas	Orang	4	6	7	3	4
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	6.224	6.458	6.327	6.370	6.770
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran	64,27	92,91	110,64	47,10	59,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

5. Rasio Posyandu per satuan balita

Keberadaan Posyandu dinilai dengan strata pratama, madya, purnama dan mandiri sehingga indikator keberhasilan Posyandu diukur dengan strata purnama dan mandiri, dimana jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri pada tahun 2020 sebanyak 593 total posyandu yang ada, pada tahun 2016-2020 rasio posyandu per satuan balita, cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari minat masyarakat untuk menjadi kader posyandu semakin meningkat. Disamping itu bertambahnya posyadu juga dipicu oleh meningkatnya kepercayaan orang tua akibat layanan posyandu yang dianggap baik. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-44
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	Unit	569	574	562	581	593
Jumlah Balita	Orang	6.334	6.458	42.409	29.886	25.192
Rasio Posyandu per satuan Balita	Per 1.000 Balita	14.90	8,89	13.25	19,44	23,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

6. Rasio Puskesmas dan Pustu Persatuan penduduk

a. Rasio puskesmas per satuan penduduk

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan bagi masyarakat, terus ditingkatkan baik dari jumlah maupun kualitas pelayanannya. Pada Tahun 2020 jumlah puskesmas di Kabupaten Bulukumba sebanyak 20 Unit.

b. Rasio pustu per satuan penduduk

Puskesmas Pembantu (pustu) adalah sarana kesehatan yang terdepan di Masyarakat dan merupakan bagian jaringan pelayanan dari Puskesmas yang mengemban tugas memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Promotif, Preventif dan kuratif. Pada tahun 2020 terdapat 61 unit Pustu yang tersebar di 10 Kecamatan dan 136 Desa/Kelurahan.

Rasio ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, menunjukkan kondisi yang stagnan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) hanya pada tahun 2016 sebanyak 58 Pustu menjadi 60 Pustu pada tahun 2017, kemudian menignkat lagi menjadi 61 Pustu hingga pada tahun 2020. Angka rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel II-45
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	Orang	413.299	415.713	418.326	420.603	437.607
Jumlah Puskesmas	Unit	20	20	20	20	20
Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	58	60	61	61	61
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas pembantu Pustu)	Unit	78	80	81	81	81
Rasio Puskesmas dan Pustu	Per 1000 Penduduk	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

7. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio ketersediaan Rumah Sakit per Satuan penduduk menunjukkan kondisi yang stagnan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Untuk kondisi tahun 2020, Kabupaten

Bulukumba hanya memiliki 1 unit Rumah Sakit tipe B dan 16 klinik kesehatan, sehingga kedepannya diperlukan upaya pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit tipe C dan D di daerah kecamatan yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa dimaksimalkan. Angka Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik per Satuan Penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel II-46
Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	Orang	413.299	415.713	418.326	420.603	437.607
Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah Poliklinik	Unit	15	15	15	15	16
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

8. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016- 2020 mengalami tren yang meningkat pada kurun waktu tersebut. Pada tahun 2016 dokter umum sebanyak 30 orang dan jumlah dokter pada tahun 2017 mengalami penambahan sebanyak 41 orang (0,073 – 0,099) ini dikarenakan adanya penempatan Dokter melalui Program Nusantara Sehat berbasis Tim dan berbasis Individu, pada tahun 2018-2019 dokter umum berjumlah sama yaitu sebanyak 40 orang (0,096 – 0,095) nilai rasio berbeda dikarena pembagiannya berdasarkan jumlah penduduk sedangkan tiap tahunnya mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2020 jumlah dokter umum berkurang menjadi 34 orang (0,078). Penurunan jumlah dokter disebabkan pendataan sudah mulai dilakukan secara online, data ketenagaan untuk Dokter sudah diupdate dan saat itu pula banyak Dokter yang ikut Pendidikan Dokter Spesialis. Dokter Umum yang ikut Pendidikan Dokter Spesialis sementara namanya tidak dimasukkan saat perhitungan rasio karena mereka tidak sedang memberikan pelayanan pada pasien.

Perkembangan Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-47
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter Umum	Orang	30	41	40	40	34
Jumlah Penduduk	Orang	413.299	415.713	418.326	420.603	437.607
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,073	0,099	0,096	0,095	0,078

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

9. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang termasuk tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2016- 2020 mengalami tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah Dokter sebanyak 78 orang (0,189 – 0,188), tahun 2018 meningkat menjadi 83 orang (0,198), tahun

2019 kembali meningkat menjadi 96 orang (0,228), namun pada tahun 2020 jumlah dokter berkurang menjadi 88 orang (0,209). Perkembangan Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-48
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tenaga Medis	Orang	78	78	83	96	88
Jumlah Penduduk	Orang	413.299	415.713	418.326	420.603	437.607
Rasio Tenaga Medis/Penduduk	Angka Per 1000 Penduduk	0,189	0,188	0,198	0,228	0,209

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

10.Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2016 sebesar 82,87 persen, tahun 2017 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 86,67 persen, tahun 2018 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan turun menjadi 85,45 persen, kemudian tahun 2019 persalinan oleh tenaga kesehatan menurun ke angka 79,51 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,35 persen. Ini diakibatkan karena adanya peran aktif tenaga medis/kesehatan melakukan sosialisasi terkait keselamatan ibu bersalin dan meningkatnya sarana dan prasarana pada seluruh layanan kesehatan. Selengkapny pada tabel berikut.

Tabel II-49
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6032	6309	6221	5788	6776
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	7279	7279	7280	7280	7847
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	82,87	86,67	85,45	79,51	86,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

11.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Penyelenggaraan imunisasi di Indonesia diukur dengan cakupan *UCI (Universal Child Immunization)* yaitu suatu kondisi dimana minimal 80 persen bayi yang berada dalam suatu desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap,Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan campak) Bentuk pelayanan kesehatan bayi berupa pemberian imunisasi rutin bagi bayi umur 0 – 1 tahun (BCG, DPT, Polio, Campak, HB) yang dilakukan di Posyansdu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Selengkapny pada tabel berikut.

Tabel II-50
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/ Kel	136	136	136	136	45
Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	Desa/ Kel	136	136	136	136	136
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	33,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa cakupan pemberian imunisasi di Kabupaten Bulukumba Periode 2016-2020 menunjukkan konsistensi capaian sebesar 100 persen antara tahun 2016-2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 merupakan tahun pertama merebaknya wabah pandemi COVID-19, dimana dilakukan pembatasan sosial sehingga kegiatan ini hanya mampu menjangkau 45 desa/kelurahan atau hanya sebesar 33,1 persen.

12. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dari tahun 2016 sampai 2020, menunjukkan tren yang berfluktuasi, dan cakupannya telah mencapai 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor diantaranya meningkatnya surveilans gizi, sehingga kasus-kasus yg terjadi semuanya dapat ditemukan dan dilakukan intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk. Selain itu tersedianya aplikasi by name by address Pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) sehingga data antropometri balita dan status gizinya tercatat dengan baik, selengkapnyanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-51
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	Balita	4	8	7	9	4
Jumlah seluruh Balita Gizi Buruk yang ditemukan	Balita	4	8	7	9	4
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC selama 3 tahun (2017-2019) menunjukkan adanya peningkatan yaitu tahun 2017 sebanyak 52,0 persen, tahun 2018 sebanyak 58,4 persen dan tahun 2019 sebanyak 67,4 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 39,4 persen. Hal ini disebabkan karena kurangnya masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan akibat gejala yang di timbulkan bagi penderita penyakit TBC hampir mirip dengan gejala bagi penderita COVID-19 dan adanya pembatasan layanan kesehatan masyarakat akibat pandemic. Selengkapnyanya pada tabel berikut.

Tabel II-52
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa/ Orang	N/A	323	338	390	237

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA	Jiwa/ Orang	N/A	621	579	579	602
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	N/A	52,0	58,4	67,4	39,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

14. Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (Per 100.000 Penduduk)

Prevalensi Kasus TBC untuk semua tipe menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2016 ditemukan 485 orang penderita TB, tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi 637 orang, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan penderita sebanyak 651 orang, dan pada tahun 2020 jumlah penderita TBC menurun menjadi 346 orang. Peningkatan Prevalensi Kasus TBC disebabkan dengan adanya rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyisiran kasus di Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta karena masih banyaknya kasus TBC yang ditemukan namun tidak dilaporkan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-53
Tingkat Prevalensi Tuberkolosis
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Penderita TBC	Orang	485	637	637	651	346
Jumlah Penduduk	Orang	413.299	415.713	418.326	420.603	437.607
Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 penduduk	117,37	153,23	152,27	154,78	79,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Evaluasi data kesembuhan dinilai secara kohor selama 1 tahun sehingga data pengobatan pasien tahun 2020 belum dapat dianalisis. Target kesembuhan tahun 2016 telah tercapai sesuai indikator nasional yaitu 85 persen. Tahun 2016 sesuai kebijakan NTP (National Tuberculosis Program) target yang harus dicapai sebesar 90 persen.

15. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis

Angka kematian pada Penderita TBC pada tahun 2017 sebanyak 6,0, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,7, tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 7,4 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 3,2 per 100.000 penduduk . Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-54
Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kematian karena TB	Jiwa	N/A	25	24	31	14
Jumlah Penduduk	Orang	413.299	415.713	418.326	420.603	437.607
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	N/A	6,0	5,7	7,4	3,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi adalah:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila ditemukan gejala awal TBC.
- Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang masih ada di masyarakat.

- Pengobatan yang tidak tuntas sehingga risiko kematian semakin tinggi.
- Penyebab utama kematian bukan karena penyakit TBC tapi adanya penyakit komorbid (penyakit penyerta) lainnya.

16.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif secara jumlah, namun bersifat konstan dari segi capaian penanganan selama periode tersebut. Tahun 2016 jumlah penderita DBD sebesar 431 orang/kasus, tahun 2017 turun menjadi 110 orang, tahun 2018 jumlahnya naik menjadi 152 orang, tahun 2019 jumlahnya kembali naik menjadi 275 kasus, namun tahun 2020 jumlah penderita penyakit DBD turun menjadi 160 orang. Dari segi penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 capaiannya sebesar 100%

Tabel II-55
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama1 tahun	Jiwa	431	110	152	275	160
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Jiwa	431	110	152	275	160
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

17.Angka kejadian Malaria

Pengendalian penyakit malaria telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Angka Kejadian Malaria yang diukur dengan Annual Parasite Incidence (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan memiliki nilai signifikan dalam pengendalian malaria.

Pencapaian kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan sumber daya manusia baik dalam diagnosis dan tata laksana, serta manajemen program, dan peningkatan kapasitas tenaga laboran dalam pemeriksaan sediaan darah malaria. Selain itu dilakukan juga surveilans migrasi dan penyelidikan epidemiologi kasus positif malaria, penemuan suspek malaria baik secara aktif maupun pasif, pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 terhadap semua kasus positif malaria, serta pemberian pengobatan sesuai standar kepada penderita malaria. Angka kejadian malaria di kabupaten Bulukumba tahun 2016 - 2020 menunjukkan tren yang berfluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan penurunan pada tahun 2020 yakni 5 kasus penderita malaria atau 1,19 per 100.000 penduduk. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-56
Angka Kejadian Malaria Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penderita Malaria	Orang/ kasus	22	39	43	23	5
Jumlah Penduduk	Jiwa	413.299	415.713	418.326	420.603	437.607
Angka Kejadian Malaria	Per 100.000	5,32	9,38	10,28	5,47	1,19

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

	Penduduk					

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai factor yang menghambat diantaranya masih belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam hal penemuan kasus, minimnya anggaran pencegahan dan pengendalian malaria, serta tidak adanya regulasi daerah yang dapat mendukung pencegahan dan pengendalian malaria.

18.Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total Populasi

Prevalensi HIV dari total populasi di Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Tahun 2016 terdapat 28 orang penderita HIV/AIDS dengan angka prevalensi sebesar 0,007, dan pada tahun 2020 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat menjadi 38 orang atau 0,009 dari total populasi penduduk. Sesuai dengan tingkat epidemiologi, Kabupaten Bulukumba adalah epidemiologi terkonsentrasi artinya kasus HIV yang ada tinggi tapi berada di populasi-populasi tertentu, belum sampai ke masyarakat umum. Kendala yang dihadapi diantaranya belum semua Puskesmas dan Rumah Sakit melakukan penemuan kasus HIV dan sistem pencatatan dan pelaporan dengan Aplikasi sistem Informasi HIV AIDS belum digunakan maksimal karena terkendala sarana komputer dan jaringan wifi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-57
Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penderita HIV/AIDS	Orang	28	21	42	66	38
Jumlah Penduduk	Jiwa	413.299	415.713	418.326	420.603	437.607
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi per 100.000	%	0,007	0,005	0,010	0,016	0,009

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

19.Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin sejak tahun 2008 yang merupakan peralihan program Asuransi Miskin (ASKESKIN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kabupaten Bulukumba melalui Program Jaminan Kesehatan Gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan penjaminan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin didukung dengan penganggaran kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman dan realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin dan masyarakat tidak mampu.Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-58
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Masyarakat Miskin yang dilayani (rujukan)	Jiwa	4.235	5.836	8.480	9.483	6.010

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Jumlah Penerima PBI KJN	Jiwa	85.143	151.790	208.227	187.225	118.100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	4,97	3,84	4,07	5,06	5,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

20. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Berdasarkan data di bawah, cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) berfluktuasi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas antar Kabupaten/kota yang variasinya cukup besar selain adanya kesenjangan, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini sehingga ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4), kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-59
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ibu Hamil yang memeriksakan Kandungan (K4)	Orang	5.799	6.309	5.943	5.262	6.026
Jumlah Ibu Hamil	Orang	7.625	7.625	7.625	7.265	8.220
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	76,05	82,74	77,94	72,43	73,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) diantaranya belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan, kondisi tempat tinggal ibu hamil dan keluarga yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan (wilayah terpencil, serta adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai masa persalinannya).

Meskipun demikian, beberapa faktor yang mendukung peningkatan cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Bulukumba diantaranya, adanya regulasi terkait pelayanan Standal Minimal untuk Pelayanan Antenatal Care yang sesuai SOP, kunjungan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil, adanya keterlibatan da perhatian tokoh masyarakat dan kader agar setiap ibu hamil memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan secara teratur, memperkuat Komunikasi, Infomasi dan Edukasi kepada Kader dan Masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, adanya pelaksanaan kelas ibu hamil di Desa dalam upaya untuk peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga, serta berjalannya Pemantauan Wilayah Setempat Program Kesehatan Ibu dan Anak

21.Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan keluarga miskin

Data pemberian makanan Pendamping ASI untuk khusus untuk keluarga miskin, tidak tersedia disebabkan dalam juknis MP-ASI yg dikeluarkan oleh kemenkes, Prioritas pemberian MP-ASI adalah diperuntukkan bagi baduta kategori kurus (BB/TB) <-2 SD sehingga tanpa memandang status kemiskinan semua balita kategori kurus mendapatkan MP-ASI. Begitu pula untuk keluarga miskin bila balitanya memiliki status gizi baik maka tidak diberikan MP-ASI. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-60
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	76,05	82,74	77,94	63,63	45,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

22.Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin

Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang berfluktuasi, tahun 2016 nilainya sebesar 38,75 persen, tahun 2017 naik menjadi 68,21 persen, tahun 2018 naik lagi menjadi 93,75 persen, namun pada tahun 2019 turun menjadi 80,56 persen, dan tahun 2020 capaian tersebut turun lagi menjadi 52,37 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-61
Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	38,75	68,21	93,75	80,56	52,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

2.3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan instrumen penting untuk mengakselerasikan perwujudan posisi Kabupaten Bulukumba sebagai pilar utama pembangunan di kawasan selatan. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.510/X/2016 tentang Penetapan status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bulukumba, menurut statusnya panjang jalan Kabupaten Bulukumba meningkat dari 1.039,17 Km menjadi 1.211,516 Km. Perubahan Keputusan Bupati terhadap kewenangan jalan berdampak pada persentase kondisi jalan yang menurun pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018-2019 panjang jalan dalam kondisi baik meningkat. Namun pada tahun 2020 persentase kondisi jalan baik kembali mengalami penurunan disebabkan oleh kondisi penganggaran dan terpenuhinya target kondisi jalan yang baik di tahun 2020 . Selengkapnya pada table berikut.

Tabel II-62
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan Kondisi baik	Km	909,28	649,98	704,74	848,74	630,57
Panjang jalan kondisi sedang	Km	302,236	561,538	506,77	362,776	556,81
Panjang jalan Keseluruhan	Km	1.211,516	1.211,516	1.211,516	1.211,516	1.211,516
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,751	0,537	0,582	0,701	0,520

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Berdasarkan database jalan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020, untuk Kondisi paling baik dari beberapa kecamatan berada pada kecamatan Gantarang yaitu 122,36 Km sedangkan untuk kondisi jalan paling rusak berat berada pada Kecamatan Kajang yaitu 5,59 Km. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II-63
Kondisi Jalan dan Panjang Jalan Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

No	Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak berat	Total Panjang Keseluruhan (Km)
1	Bonto bahari	38,98	69,10	4,28	112,36
2	Bontotiro	46,66	49,34	1,45	97,45
3	Bulukumpa	96,95	95,81	2,46	195,21
4	Gantarang	122,36	70,77	4,65	197,79
5	Herlang	24,3	56,87	0,6	81,76
6	Kajang	61,3	67,44	0,95	129,69
7	Kajang	61,26	23,90	5,59	90,74
8	Kajang	67,67	54,82	3,09	125,58
9	Ujungbulu	61,84	34,96	0,08	96,87
10	Ujung Loe	49,26	33,81	0,99	84,07
Total		630,57	556,81	24,14	1.211,52

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Berdasarkan database jembatan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020, untuk Kondisi kategori baik dari beberapa kecamatan berada pada kecamatan Gantarang yaitu 51 unit dari total jembatan sebanyak 63 dan untuk kondisi jembatan paling banyak rusak berada pada Kecamatan Bulukumpa yaitu 20 unit dari total 46 unit sedangkan jembatan dalam kondisi kritis berada pada Kecamatan Ujung Loe yaitu 1 unit jembatan. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II-64
Kondisi Jembatan berdasarkan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak	Kritis	Total (Unit)
Bontotiro	4	1	3		8
Bulukumpa	23	20	3		46
Gantarang	51	9	3		63
Herlang	12	10	6		28
Kajang	17	18	2		37
Kecamatan	1				1
Kindang	15	11	4		30
Rialu ale	26	4			30
Ujung bulu	10	1	3		14
Ujung loe	11	6		1	18
Grand total	170	80	24	1	275

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba tahun 2021

2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Pembangunan jalan dilakukan untuk menunjang akses/pergerakan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sedangkan perhitungan panjang jalan didasarkan pada SK Menteri, SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan tren yang stagnan selama priode tersebut. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II-65
Proporsi Panjang Jalan Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan Nasional	Km	87,452	87,452	87,452	87,452	87,452
Panjang Jalan Provinsi	Km	83,76	83,76	83,76	83,76	83,76
Panjang Jalan Kab/Kota	Km	1.211,52	1.211,52	1.211,52	1.211,52	1.211,52
Total Panjang Jalan	Km	1382,728	1382,728	1382,728	1382,728	1382,728
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jml penduduk	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0032

Sumber: Dinas PUPR Kab. Bulukumba, tahun 2021

3. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami tren peningkatan pada priode tersebut. Tahun 2016 capaiannya sebesar 70,87 persen, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 95,49 persen. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II-66
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	70,87	76,83	82,84	91,77	95,49

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik

Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 yaitu dari 59.79 persen menjadi 78.97 persen yang tersebar disepuluh kecamatan yang memiliki daerah irigasi. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II-67
Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas irigasi dalam Kondisi Baik	Ha	12.422	12.884	15.065	15.658	16.408
Luas Irigasi	Ha	20.777	20.777	20.777	20.777	20.777
Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	59,79	62,01	72,51	75,36	78,97

Sumber: Dinas PSDA Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Jaringan Irigasi dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi yang disebabkan dari dasar perhitungan panjang irigasi yang dikerjakan pada tahun berjalan. Pada tahun 2016 rasio jaringan irigasi 1,09 dengan panjang saluran yang dikerjakan 22.549 M, pada tahun 2017 rasio jaringan irigasi 0,16 dengan panjang saluran yang dikerjakan 3.300 M, pada

tahun 2018 rasio jaringan irigasi 0,86 dengan panjang saluran yang dikerjakan 17.872 M, pada tahun 2019 rasio jaringan irigasi 0,60 dengan panjang saluran yang dikerjakan 12.409 M, dan pada tahun 2020 rasio jaringan irigasi 0,18 dengan panjang saluran yang dikerjakan 3.804. Selengkapnya pada tabel berikut:

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang saluran irigasi	M	22.549	3.300	17.872	12.409	3.804
Luas Irigasi	Ha	20.777	20.777	20.777	20.777	20.777
Rasio Jaringan irigasi		1,09	0,16	0,86	0,60	0,18

Sumber: Dinas PSDA Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Rasio rumah layak huni

Untuk capaian indikator Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami pertumbuhan fluktuasi. Rasio pada tahun 2016 sebesar 0,224, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,246 dan pada tahun 2018 – 2020 terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 sebesar 0,236 ini dikarenakan dari dasar perhitungan data jumlah penduduk sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang tiap tahun meningkat. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

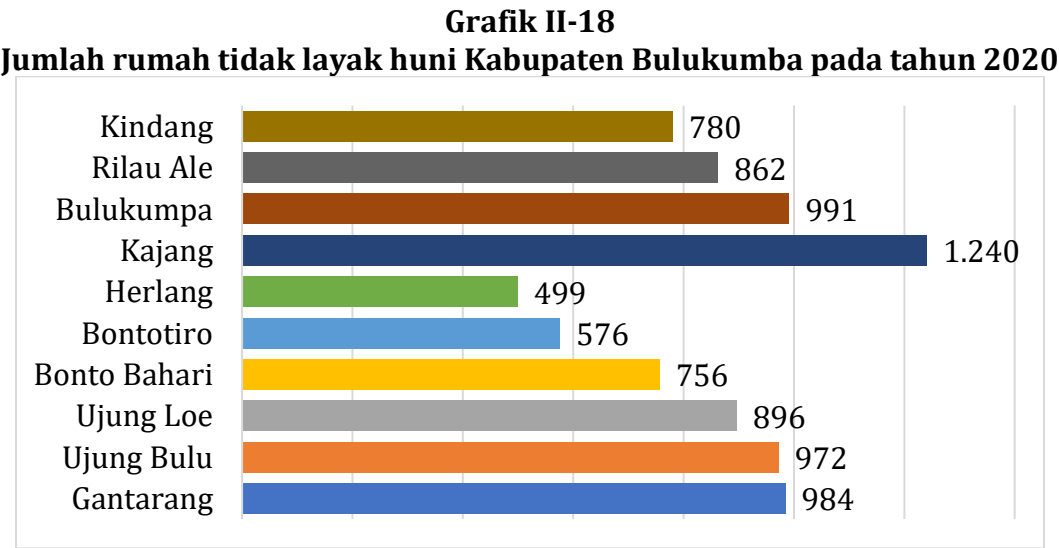
Tabel II-68

Rasio rumah layak huni Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah layak huni	Rumah	92.381	102.270	102.768	103.029	103.287
Jumlah penduduk	Rumah	413.299	415.713	418.326	420.603	437.607
Rasio rumah layak huni		0,224	0,246	0,246	0,245	0,236

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanian, 2021

Rumah tidak layak huni Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020, rumah tidak layak huni tertinggi berada pada Kecamatan Kajang yaitu 1.240 Rumah dari totalan Jumlah Rumah tidak huni sebanyak 8.556 Rumah. Selengkapnya dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanian, 2021

2. Persentase permukiman yang tertata

Persentase permukiman yang tertata dimana capaian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 53.12, mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 sebesar 65.00.

Tabel II-69
Persentase permukiman yang tertata
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase permukiman yang tertata	%	53.12	58.21	60.20	63.40	65.00

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2021

3. Persentase lingkungan permukiman kumuh
Persentase lingkungan permukiman kumuh kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan tiap tahun, ini dapat dilihat dari data capaian pada tahun 2016 sebesar 4,85 persen dan pada tahun 2020 sebesar 11,39 persen. dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-70
Persentase lingkungan permukiman kumuh
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	4.85	5.00	7.25	9.5	11.39

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2021

4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Untuk indikator Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya, ini berdasarkan data capaian sebesar 88,42 persen pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan sebesar 92,35 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-71
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Rumah	92.381	102.270	102.768	103.029	103.287
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Rumah	104.476	111.585	111.585	111.585	111.843
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	88,42	91,65	92,10	92,33	92,35

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2021

5. Persentase rumah tinggal bersanitasi
Persentase rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 rumah tinggal bersanitasi sebesar 59.1 persen sampai tahun 2018 rumah tinggal bersanitasi sebesar 77.18 persen, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 76.12 persen.selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-72
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	59,1	75,63	77,18	76,92	76,12

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2021

6. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berkases air minum dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 Persentase penduduk berkases air minum sebesar 84.3 persen , tahun 2017 Persentase penduduk berkases air minum mengalami penurunan menjadi 82.19. tahun 2018 Persentase penduduk berkases air minum mengalami peningkatan sebesar 87.77 persen, dan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi 84.4 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-73
Persentase penduduk berakses air minum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk berakses air minum	%	84.3	82.19	87.77	83.52	84.4

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanian, 2021

7. Persentase areal kawasan kumuh

Persentase areal kawasan kumuh dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 Persentase areal kawasan kumuh sebesar 0,05 persen, tahun 2017 Persentase areal kawasan kumuh mengalami peningkatan sebesar 0,15. namun pada tahun 2018 Persentase areal kawasan kumuh mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen, dan pada tahun 2019 Persentase areal kawasan kumuh pada tahun mengalami pening,katan sebesar 0,55 persen pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,09 persen dikarenakan persentase areal perkumuhan telah berkurang, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-74
Persentase areal kawasan kumuh
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase areal kawasan kumuh	%	0,05	0,15	0,13	0,55	0,09

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanian, 2021

8. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunanh sebesar 41.54 persen, sampai tahun 2019 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan mengalami penurunan sebesar 2.15 . namun pada tahun 2020 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan mengalami peningkatan sebesar 2.97 persen, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-75
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	41.54	39.58	5.58	2.15	2.97

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanian Kab. Bulukumba, 2021

2.3.1.5 **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) menunjukan tren stabil. Pada tahun 2016 cakupan petugas linmas sebesar 0.39 % sampai dengan tahun 2017 namun pada tahun 2018 berkurang menjadi 0.38 % hal ini

disebabkan karena ditahun 2018 jumlah penduduk bertambah sedangkan jumlah Linmas tetap, Pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 0,32% sampai dengan tahun 2020 hal ini disebabkan karena berkurangnya Jumlah Petugas Linmas setelah diadakan peremajaan data Linmas dari 10 Kecamatan.

Tabel II-76
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		0,39	0,39	0,38	0,32	0,32

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

Mulai dilakukan pada tahun 2016 sebesar 10,53 Persen dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun yakni tahun 2017 sebesar 20,55 Persen, tahun 2018 sebesar 82,89 Persen, tahun 2019 sebesar 71,11 Persen, pada tahun 2020 menjadi 100 Persen ini menunjukkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 semakin baik.

Tabel II-77
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	10,53	20,55	82,89	71,11	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Presentase tingkat capaian pada tahun 2016 sebesar 0,00266%, tahun 2017 sebesar 0,00265%, hal ini dikarenakan jumlah penduduk meningkat sedangkan jumlah mobil pemadam Kebakan sama dengan tahun sebelumnya yaitu 11 Unit. Tahun 2018 sebesar 0,00311% kembali meningkat dikarenakan bertambahnya jumlah mobil pemadam kebakaran menjadi 13 unit. Tahun 2019 sebesar 0,00285% kembali menurun dikarenakan jumlah mobil pemadam kebakaran kembali menurun menjadi 12 unit dan ditahun 2020 kembali menurun sebesar 0,00284% disebabkan jumlah penduduk mengalami peningkatan sementara jumlah mobil pemadam kebakaran sama dengan tahun 2019.

Tabel II-78
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		0,00266	0,00265	0,00311	0,00285	0,00284

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Presentase capaian dari 75,56% pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya diantaranya tahun 2017 sebesar 62,32%, tahun 2018 sebesar 83,33%, tahun 2019 sebesar 98,90% dan ditahun 2020 meningkat menjadi 100% hal ini dikarenakan ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran sudah semakin meningkat dengan adanya penempatan Posko Pemadam Kebakaran di 4 Sektor Kecamatan diantaranya : Sektor Dampang mencakup wilayah Gantarang-Kindang, Sektor Tanete mencakup wilayah

Bulukumpa-Rilau Ale, Sektor Bonto Bahari mencakup wilayah Bonto Bahari-Bonto Tiro, Sektor Kajang mencakup Wilayah Kajang-Herlang.

Tabel II-79

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Keterangan (dalam persen)	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		75,56	62,32	83,33	98,90	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Presentase Penegakan Perda

Presentase tingkat capaian dari 29,79% pada tahun 2016, sementara di tahun 2017 sebesar 42,75 pada tahun 2018 meningkat menjadi 45,85% namun turun pada tahun 2019 menjadi 34.12% kemudian meningkat kembali menjadi 100% ditahun 2020. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggaran peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum semakin berkurang selama periode 2016-2020.

Tabel II-80

Persentase Penegakan PERDA
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penegakan PERDA		29,79	42,75	45,85	34,12	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba adalah menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial difokuskan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah dan jenis PMKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Data capaian Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba pada RPJMD 2016-2020 berdasarkan data yang disajikan sesuai dengan indikator pada capaian kinerja yang diraih oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dalam penanganan PMKS sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Data capaian pada indikator RPJMD diperoleh berdasarkan dari jumlah PMKS dan data indikator lain diluar PMKS yang ditangani yang selanjutnya dihitung sesuai dengan formula atau rumus pada masing-masing indikator untuk memperoleh capaian baik dalam satuan Unit, Buah maupun persentase. Dalam penetapan jumlah data tersebut diperoleh dari masing-masing bidang teknis yang menangani sesuai indikator RPJMD yang telah ditentukan. Berikut penjelasan pada masing-masing indikator :

1. Sarana Sosial seperti Panti Sosial

Indikator Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi diperoleh berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khusus untuk Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba memiliki wewenang terhadap Panti Asuhan yang kelembagaannya sudah terdaftar sedangkan untuk panti jompo dan panti rehabilitasi sosial merupakan kewenangan dari Dinas Sosial provinsi karena tidak adanya panti jompo dan panti rehabilitasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba baik dari segi infrastruktur, sarana prasarana dan kelembagaan.

Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, dalam hal ini Panti Asuhan pada tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 18 Unit, Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan jumlah yaitu menjadi 13 Unit yang diakibatkan panti sosial tersebut berdasarkan hasil akreditasi oleh Tim dari Kemensos RI dinyatakan tidak terdaftar pada Dinas Sosial karena tidak dapat memenuhi persyaratan untuk terdaftar pada Dinas Sosial.

Tabel II-81
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Unit	18	18	18	13	13

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2021

Adapun beberapa panti asuhan yang sudah berubah kelembagaannya menjadi yayasan pondok pesantren (Panti Asuhan Darul Islah Desa Salemba Ujung Loe dan Panti Asuhan Darul Istiqamah Desa Taccorong Kec. Gantarang) dan yang kepengurusannya sudah tidak aktif lagi sebanyak 3 panti (Panti Asuhan Darul Qalam Desa Kambuno Kec. Bulukumpa, Panti Asuhan Anugrah Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu dan Panti Asuhan Al Mujaddid Kel. Matekko Kec. Gantarang) sedangkan untuk Sarana Panti Asuhan Kabupaten Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-82
Sarana Panti Asuhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

No	Nama	Alamat	Kecamatan	Akreditasi
1	Panti Asuhan Saadatul Banaat	Jl. AP. Pettarani	Ujung Bulu	A
2	Panti Asuhan Ihyaun Nufus	Jl. Rambutan	Ujung Bulu	A
3	Panti Asuhan Babussalam	Jl. Sultan Hasanuddin	Ujung Bulu	A
4	Panti Asuhan Ar Riyadh	Jl. Mangga	Ujung Bulu	C
5	Panti Asuhan Darul Arqam	Ponre, Matekko	Gantarang	C
6	Panti Asuhan Al Maun	Jalanjang	Gantarang	C
7	Panti Asuhan Khusnul Khatimah	Manjalling, Ujung Loe	Ujung Loe	B
8	Panti Asuhan Abu Huraerah	Lembanna, Kajang	Kajang	C
9	Panti Asuhan Phinisi	Jl. Kusuma Bangsa	Ujung Bulu	C
10	Panti Asuhan Al Jariah	Jl. Pemakaman Umum	Gantarang	C
11	Panti Asuhan Al Araf	Garanta, Ujung Loe	Ujung Loe	C
12	Panti Asuhan Darul Ijtihad	Ujung Bulu	Ujung Bulu	B
13	Panti Asuhan Wal Fajri	Matekko, Gantarang	Gantarang	B

- Faktor pendukung capaian indikator adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak lembaga/panti sosial dalam pengajuan akreditasi dan keterangan terdaftar pada Dinas Sosial.
- Faktor penghambat capaian indikator, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial tidak secara rutin melengkapi dokumen pengajuan akreditasi lembaga.

2. Persentase Jumlah Korban Bencana yang Ditangani

Untuk Jumlah Korban Bencana yang Ditangani pada tahun 2016 – 2020, mengalami peningkatan yang positif, pada tahun 2016 dan 2017 data capaian sebesar 94.9 dan 95.0, dan pada tahun 2018 – 2020 mencapai 100% karena semua korban bencana dapat dilayani sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel II-83
Persentase Jumlah Korban Bencana yang Ditangani di
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	1087	1326	147	483	365
Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Orang	1145	1396	147	483	365
Persentase Jumlah Korban Bencana yang Ditangani	%	94.9	95.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2021

- Faktor pendukung capaian indikator, koordinasi dan kerjasama antar instansi baik pusat dan daerah dalam penyediaan logistik bagi korban bencana.
- Faktor penghambat capaian indikator, masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat.

3. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Sesuai dengan data yang disajikan secara umum berfluktuatif dimana pada Tahun 2018 mencapai 100% dan megalami penurunan pada Tahun 2019 dan 2020. Salah satu faktor penurunan capaian dari tahun 2018 diakibatkan karena jumlah PMKS yang memperoleh masih relative lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada.

Tabel II-84
Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang	25,356	25,632	38,358	38,773	42,592
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	26,111	26,395	38,358	42,149	43,179
Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	97.1	97.1	100.0	92.0	98.6

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2021

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat

4. Persentase PMKS yang tertangani

Perentase PMKS yang tertangani dari tahun 2016-2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan dari target yang ditentukan. Pada Tahun 2020 PMKS yang tertangani ada pada 73.57% lebih rendah dari tahun tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh adanya pengurangan anggaran (*recofusing* penanggulangan COVID-19) pada program dan kegiatan yang menangani kegiatan tersebut.

Tabel II-85
Persentase PMKS yang tertangani di
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	25,858	26,094	38,097	39,713	31,767
Jumlah PMKS yang ada	Orang	26,111	26,395	38,358	42,149	43,179

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Persentase PMKS yang tertangani	%	99,0	98,9	99,3	94,2	73,6

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS dimana jumlah PMKS sebanyak 26 Jenis. Jumlah PMKS yang tertangani diperoleh dari Jumlah PMKS yang menerima bantuan baik dari APBD dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta APBN termasuk penerima bantuan BPNT dan PKH. Program BPNT untuk Kabupaten Bulukumba baru di Mulai pada pertengahan Tahun 2019 dimana jumlah penerima mengalami perubahan jumlah penerima di tahun berikutnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial RI. Penerima bantuan PKH untuk tahun 2020 sebanyak 13.741 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah penerima bantuan BPNT sebanyak 28.852 KPM. Dalam hal penerima Bantuan PKH, hampir keseluruhan penerima bantuan PKH juga merupakan penerima BPNT sehingga tidak diakumulasikan secara keseluruhan.

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat.

5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada akhir capaian RPJMD mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diakibatkan oleh adanya pengurangan anggaran (*recofusing* penanggulangan COVID-19) pada program dan kegiatan yang menangani kegiatan tersebut.

Tabel II-86
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Orang	916	1,395	146	480	270
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Orang	1,145	1,396	147	483	365
Persentase		80.0	99.9	99.3	99.4	74.0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2021

- Faktor pendukung capaian indikator, koordinasi dan kerjasama antar instansi baik pusat dan daerah dalam penyediaan logistik bagi korban bencana.
- Faktor penghambat capaian indikator, masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat.

6. Persentase Penyandang Disabilitas

Data Penyandang disabilitas dalam hal ini cacat fisik dan mental diperoleh dari Aplikasi Sistem Informasi Penyandang Disabilitas (SIMPDP) dari Kementrian Sosial RI melalui pendamping sosial penyandang disabilitas. Sementara data lanjut usia terlanter diperoleh dari pendamping sosial lanjut usia Dinas Sosial Kabupaten.

Persentase Penyandang Disabilitas dalam hal ini cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial capaian pada akhir periode RPJMD mencapai 82.07%. Capaian ini mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya pengurangan anggaran pada kegiatan tersebut.

Tabel II-87
Persentase Penyandang Disabilitas
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Orang	947	1.702	1.837	2.148	2.251
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	Orang	957	1.704	1.964	2.160	3.039
Lanjut Usia Terlantar	Orang	593	1.328	1.584	1.759	2.598
Penyandang Disabilitas	Orang	364	376	380	401	441
Persentase		99,0	99,9	93,5	99,4	74,1

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2021

Data Penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar merupakan data yang sudah tidak potensial lagi yang seharusnya menerima bantuan. Sedangkan data lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas potensial merupakan yang telah terpenuhi kebutuhannya dengan adanya bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial profesiaonal dalam penanganan disabilitas dan lansia.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah diantaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan dimana jumlah sengketa angkatan pengusaha pekerja pada tahun 2016 sebanyak 2 sengketa dan terus meningkat sampai tahun 2020 sebanyak 14 sengketa, dimana jumlah perusahaan pada tahun 2016 sebanyak 402 perusahaan sampai tahun 2019. Namun pada 2020 mengalami penurunan sebanyak 149 perusahaan .

Dimana angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahunnya kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 4,98 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 19,09 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 0,93 persen . selengkapnya dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II-88
Angka sengketa pengusaha-pekerja
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka sengketa pengusaha-pekerja	%	4,98	4,98	4,98	19,09	0,93

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dimana kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus yang diselesaikan sampai tahun 2018. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 5 kasus yang diselesaikan, dan tahun 2020 menurun menjadi 4 kasus yang terselesaikan, dimana pada jumlah kasus yang dicatatkan pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus yang dicatatkan. Dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2020 sebanyak 11 kasus yang dicatatkan, dimana kita lihat pada persentase kasus yang terselesaikan pada tahun 2016 sebesar 100 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0.36 persen.

Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan sosial ekonomi perusahaan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-89
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kerja
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	1	0,66	0,66	0,62	0,36

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Besaran pekerja/ buruh jamsostek dimana pada tahun 2016 sebanyak 478 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 1.318 pekerja/buruh jamsostek, dimana tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 80 pekerja/buruh jamsostek, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.319 pekerja/buruh jamsostek dan pada tahun 2020 sebanyak 688 pekerja/buruh jamsostek. Dimana pekerja/buruh pada tahun 2016-2019 sebanyak 252 pekerja/buruh dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 688 pekerja/buruh.

Persentase besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek berfluktuasi. Dimana pada tahun 2016 sebesar 0,73 persen sampai dengan tahun 2020 meningkat menjadi 1 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-90
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	0,73	0,29	0,3	0,94	1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 0,25 persen, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,38 persen dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-91
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan	%	N/A	N/A	0,25	1,38	1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan di Perusahaan kurun waktu 2016 – 2020 berfluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,29 persen, naik menjadi 0,64 persen pada tahun 2018, turun sebesar 0,60 persen di tahun 2019 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,08 persen. Selengkapnya pada tabel berikut

Tabel II-92
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,29	0,31	0,64	0,6	32

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

6. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Dari data dinas tenaga kerja perusahaan yang telah diperiksa pada tahun 2016 sebanyak 20 perusahaan dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 45 perusahaan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 32 perusahaan yang telah diperiksa, dimana perusahaan yang terdaftar pada tahun 2016 sebanyak 70 sampai pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami peningkanta sebanyak 75 perusahaan yang terdaftar dimana pada tahun 2020 jumlah perusahaan yaang sudah diperiksa dan jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 32 perusahaan.

Besaran pengujian peralatan di Perusahaan kurun waktu 2016 – 2020 berfluktuatif, dimana pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 1 persen, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,028 persen, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,826 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 3 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-93
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	1	1	0,028	0,826	3

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,49 persen, pada tahun 2017 turun menjadi 0,46 persen, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,68 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,8 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,52 persen. Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-94
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan	%	0.85	0.64	0.74	0.33	0.53

pelatihan berbasis Kompetensi						

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

8. Rasio lulusan S1/S2/S3

Data lulusan S1/S2/S3 dan jumlah penduduk berasal dari data statistik (Bulukumba dalam Angka) menunjukkan bahwa lulusan tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 758,83 per 10.000 penduduk dan terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah pada tahun 2018 sebesar 439,56 per 10.000 penduduk. Peningkatan terhadap perbandingan tersebut cukup signifikan yakni sekitar 57,92 persen, menunjukkan tingkat kemampuan secara finansial dalam pembiayaan kuliah anak dan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang semakin membaik di masyarakat. Selain itu banyaknya universitas di Kabupaten Bulukumba semakin membuka peluang kelanjutan pendidikan di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-95
Rasio lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 penduduk	514,72	476,62	439,56	739,36	758,83

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

9. Rasio daya serap tenaga kerja

Daya serap tenaga kerja dalam kurun waktu empat tahun paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 55,42 persen sedangkan daya serap tenaga kerja terendah pada tahun 2017 sebesar 0,477 persen. Banyaknya lowongan kerja pada sektor perdagangan, wirausaha, pertanian dan lainnya. Menyebabkan peningkatan daya serap tenaga kerja pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19.

Tabel II-96
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar, mendapatkan Pelatihan dan ditempatkan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio daya serap tenaga kerja	%	N/A	0,477	30,89	55,42	49,68

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

10. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,80 persen, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,84 persen, pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 1 persen, pada tahun 2019 menurun menjadi 0,75 persen dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1 persen. Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-97
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar, mendapatkan Pelatihan dan ditempatkan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	0,80	0,84	1	0,75	1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

11. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,85 persen, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,64 persen, pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 0,74 persen, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menurun menjadi 0,53 persen. Pelatihan berbasis masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Selengkapny pada tabel berikut

Tabel II-98
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar. mendapatkan Pelatihan dan ditempatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	%	0,85	0,64	0,74	0,53	0,53

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

Pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Bulukumba sebesar 81.989 orang, sementara pekerja perempuan yang ada di lembaga pemerintah sebesar 3.680 orang dari atau 4,5 %. Kemudian pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan turun menjadi 63.183 orang, namun untuk pekerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun yang sama berjumlah 3.677 orang (5,8%). Pada tahun 2018 jumlah pekerja perempuan meningkat sebanyak 69.149 orang sementara pekerja perempuan di lembaga pemerintah berjumlah 3601 (5,2%). Pada tahun 2019 jumlah pekerja perempuan berjumlah 83.583 orang, sementara pekerja perempuan di lembaga pemerintah menurun menjadi 3592 (4,3%) orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah pekerja perempuan meningkat menjadi 92.095 orang sementara jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 3670 orang, secara keseluruhan jumlah pekerja perempuan naik dari tahun sebelumnya namun secara persentase menurun dari 4,3% menjadi 4.0%.

Tabel II-99
Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	%	4,5	5,8	5,2	4,3	4,0

Sumber: Dinas PPPA, Kabupaten Bulukumba 2021

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 40 total kursi. Jumlah kursi yang diduduki anggota DPRD perempuan pada tahun 2016 yang merupakan hasil Pemilu sebesar 17.5 %, atau sebanyak 7 orang dari total 40 kursi DPRD. Pada Pemilu tahun 2019 jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bulukumba meningkat menjadi 20% atau sebanyak 8 orang dari total 40 kursi DPRD. Berarti ada kenaikan persentase dari 17,50% menjadi 20%. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah karena meningkatnya partisipasi yang mendukung keberdayaan perempuan.

Tabel II-100
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	17,50	17,50	17,50	20,00	20,00

Sumber: Dinas PPPA, Kabupaten Bulukumba 2021

3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Jumlah pekerja perempuan pada tahun 2016 sebanyak 81.989 orang, sementara itu jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta sebanyak 7.830 orang. Kemudian pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 63.183 orang, sementara pekerja perempuan di lembaga swasta berjumlah 5.950 orang. Pada tahun 2018 jumlah pekerja perempuan ialah sebanyak 69.149 orang dan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta sebanyak 6.554 orang. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah pekerja perempuan meningkat 83.583 orang (2019) dan 92.095 orang (2020) sedangkan jumlah partisipasi perempuan di lembaga swasta ialah sebesar 4.999 orang (2019) dan 8.842 orang (2020).

Tabel II-101
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	81,98	63,18	69,14	83,58	92,09

Sumber: Dinas PPPA, Kabupaten Bulukumba 2021

4. Rasio KDRT

Jumlah rumah tangga pada tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Sementara untuk jumlah KDRT yang terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2016 terdapat 1 kasus KDRT kemudian meningkat drastis pada tahun 2017 menjadi 46 kasus, lalu menurun pada tahun 2018 menjadi 37 kasus, tahun 2019 tercatat 83 kasus dan kembali berkurang dengan jumlah banyak hingga hanya tercatat 5 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ditemukan data jumlah KDRT yang tercatat.

Tabel II-102
Rasio KDRT Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio KDRT	%	0,001	0,033	0,027	0,027	0,000

Sumber: Dinas PPPA, Kabupaten Bulukumba 2021

5. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Pada tahun 2016 sebesar 81.989 dari 84.689 angkatan kerja. Pada tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan menjadi 63.183 orang, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 65.872. Pada tahun 2018 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 69.149 orang, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 71.740. kondisi ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 yaitu 92.095 orang dengan jumlah angkatan kerja sebesar 94.873 orang. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II-103
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	96,81	95,92	96,39	96,38	97,07

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Bulukumba, 2021

6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih didalam unit pelayanan terpadu. Mulai Tahun 2016 sampai dengan 2020 semua kasus terlayani 100 % oleh pelayanan terpadu.

7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2016 persentase cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit sebesar 33.33%. Hal ini disebabkan karena ada 3 jumlah korban yang terdata namun hanya 1 korban yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pada tahun 2017, jumlah korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu melonjak drastis dari tahun sebelumnya menjadi 126 orang, namun yang mendapatkan pelayanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas hanya sebanyak 12 orang sehingga persentase menurun dari tahun sebelumnya menjadi hanya 9.52% saja. Adapun jumlah korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 148 namun jumlah korban yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas juga meningkat dari sebelumnya hanya 12 kini menjadi 16 orang sehingga persentase cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit juga meningkat menjadi 10.81%.Tahun 2019 cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit kembali menurun yaitu sebanyak 9.38%, hal ini disebabkan karena terjadi penurunan jumlah korban yang terdata di puskesmas (namun masih tetap tinggi) yaitu sebanyak 128 orang serta adanya penurunan jumlah korban yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dari tahun sebelumnya yang berjumlah 16 di tahun 2018 menurun menjadi 12 orang saja di tahun 2019. Tahun 2020 kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan baik dari segi jumlah korban KtP/A yang terdata di puskesmas atau rumah sakit (sebanyak 46 orang) maupun dari segi jumlah korban yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas atau rumah sakit (sebanyak 10 orang) sehingga persentase cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit menjadi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 21.74%.

Tabel II-104
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	33,33	9,52	10,81	9,38	21,74

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Bulukumba, 2021

8. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pada tahun 2016, jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan sebanyak 3 perkara, namun hanya 1 perkara yang mendapat putusan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan persentase sebesar 33.33%. Tahun 2017, persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 96.83%, meskipun jumlah perkara meningkat namun rasio perkara yang diputuskan pengadilan lebih banyak, artinya banyak perkara yang terselesaikan. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang disidangkan kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 148 perkara dan sebanyak 144 perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan sehingga persentase meningkat menjadi 97.30% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah perkara kekerasan yang disidangkan menurun (sebanyak 128 perkara) dan lebih banyak perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan (sebanyak 125 perkara) sehingga persentase meningkat menjadi 97.66. Sedangkan pada tahun 2020 persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 100% karena semua perkara yang disidangkan mendapat putusan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu sebanyak 1 perkara.

Tabel II-105
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	33,33	96,83	97,30	97,66	100

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Ketersediaan pangan utama

Pangan utama berdasarkan konsumsi masyarakat di Kabupaten Bulukumba adalah beras, berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator ketersediaan pangan utama, menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bulukumba masih surplus dengan kondisi pertahun rata-rata diatas 300 %. Faktor utama yang mempengaruhi stabilitas ketersediaan pangan utama adalah keseimbangan antara tingkat produksi pangan dan jumlah penduduk, ini didasarkan pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebesar 326,8 % dan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan 389,13%. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-106
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan pangan utama		326,58	306,75	381,58	393,10	389,13

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein

Pada periode 2016-2020 rata-rata pertumbuhan ketersediaan energi sebesar 542, 83 Kkal/Kapita/Hari dan Protein sebesar 24,47 Gram/Kapita/Hari. Berdasrkan pengelompokan bahan makanan Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa Tahun 2018 ketersediaan energi yaitu 8.424,75 Kkal/ Kapita/Hari, sementara tahun 2019 menurun sebanyak 11,88% menjadi 7.423,66 Kkal/Kapita/Hari. Rata-rata Ketersediaan energi selama 5 tahun terakhir adalah 9.458, 39 Kkal/Kapita /Hari masih diatas dari nilai standarisasi ketersediaan energi sebesar 2.400 Kkal/ Kapita/Hari.

Kondisi Ketersedian energi dan protein perkapita Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 masing-masing sebesar 17.543,60 kkal/kapita/hari dan 1.023,25 gram/kapita/hari dan menurun masing-masing menjadi 7.423,66 kkal/kapita/hari dan 240,77 gram/kapita/hari pada tahun 2020. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-107
Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Energi	kkal/kap/hari	17.543,60	17.657,82	6.904,22	8.424,75	7.423,66
Ketersediaan Protein	gram/kap/hari	1.023,25	1.184,47	228,54	226,01	240,77

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2021

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah komoditi yang dijadikan sampel pengawasan terhadap komoditi unggulan yang ditetapkan Kementerian. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan sejak terbentuknya Dinas Ketahanan Pangan yaitu pada tahun 2017 karena itu data untuk tahun 2016 belum tersedia.

3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Persentase pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan tahun 2016 tidak dilakukan perhitungan sebab kegiatan tersebut belum ada, akan tetapi pada tahun 2017 sampai pada tahun 2018 persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 45,45 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 91 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan 36 persen disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga kegiatan tersebut mengalami penurunan kinerja. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-108
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	0	45,45	45,45	90	36

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. Persentase luas lahan yang bersertifikat

Kinerja urusan Pertanahan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kepedulian dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah memfasilitasi program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan aset dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Persentase Bersertifikat di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 luas tanah yang bersertifikat seluas 241.571.003 m² atau 20,92 persen dari luas wilayah dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 278.530.635 m² atau 24,12 persen dari luas wilayah.

Tabel II-109
Persentase Bersertifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Luas Lahan bersertifikat	M ²	241.571.003	245.576.420	256.978.093	270.937.227	278.530.635
Jumlah luas wilayah	M ²	1.154.580.000	1.154.580.000	1.154.580.000	1.154.580.000	1.154.580.000
Persentase luas lahan bersertifikat	%	20,92	21,27	22,26	23,47	24,12

Sumber: Kantah Kabupaten Bulukumba, Dinas PPP Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Penyelesaian kasus tanah negara

Persentase Penyelesaian kasus tanah negara dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 Persentase Penyelesaian kasus tanah negara sebesar 98,3 persen , tahun 2017 Penyelesaian kasus tanah negara mengalami peningkatan sebesar 100 persen. namuan pada tahun 2018 Penyelesaian kasus tanah negara mengalami penurunan sebesar 40,00 persen, dan pada tahun 2019 Penyelesaian kasus tanah negara pada tahun mengalami peningkatan sebesar 66,67 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,00 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-110
Penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penyelesaian kasus tanah negara	%	98,3	100,00	40,00	66,67	50,00

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu: Indikator Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; Indikator Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO2 dan NO2; dan Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan (Hutan Primer dan Hutan Sekunder). Adapun capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-111
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	N/A	5,34	40,54	72,58	70,35

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Indeks kualitas Air

Pengukuran indeks kualitas air telah dilakukan / dihitung dari tahun ke tahun dengan menggunakan metode indeks pencemaran (IP). Pengujian kualitas air sungai di Kabupaten Bulukumba dilakukan sebanyak 6 (enam) sungai besar yaitu Sungai Balantieng, Sungai Bijawang, Sungai Anyorang, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, dan Sungai Raowa. Hasil pengukuran menunjukkan indeks dari tahun 2017 – 2018 menunjukkan kondisi tercemar berat dengan indeks 1,19 tahun 2017 dan indeks 2,60 tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 – 2020 menunjukkan kondisi baik (memenuhi baku mutu) dengan capaian 81,90 poin tahun 2019 serta 78,23 poin tahun 2020. Hasil ini tentu saja disimpulkan bahwa pengelolaan kualitas air sungai cukup baik dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Tabel II-112
Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	N/A	1,19	2,60	81,90	78,23

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Indeks kualitas Udara

Pengukuran indeks kualitas udara telah dilakukan / dihitung dimulai dari tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2017 tidak dilaksanakan pengujian kualitas udara. Pengujian kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) titik utama yang dianggap representatif mewakili kondisi udara di Kabupaten Bulukumba. Adapun lokasi pemantauan udara yaitu BTN Ujung Bulu (perumahan), Kantor Bupati (perkantoran), Terminal (Transportasi), serta Pabrik PT.PP Lonsum, Tbk (Industri). Hasil indeks kualitas udara ambien di ke empat titik tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Bulukumba cukup baik. Tentu ini merupakan hasil yang diharapkan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Bulukumba khususnya kualitas udara ambien.

Tabel II-113
Indeks kualitas Udara
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	N/A	N/A	85,46	90,88	88,30

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 mencapai 23,64 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-114
Indeks kualitas Tutupan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	N/A	22,36	22,63	22,72	23,64

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 82,35 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,62 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-115
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	0	72,54	72,54	82,35	68,62

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

6. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA, sejak 2018 Terbentuk 1 Kelompok Masyarakat Hukum adat Ammatoa Kajang setelah terbitnya Perbub Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

Tabel II-116
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun

		2016	2017	2018	2019	2020
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	0	0	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 1 Kelompok (Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang) . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-117
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Kelompok	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

8. Penetapan Hak MHA

Penetapan hak MHA pada tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-118
Penetapan Hak MHA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan hak MHA	Klp	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

9. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada tahun pada tahun 2016 tidak dilakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada MHA karena pada tahun 2017 baru terbentuk nomenklatur perangkat daerah terkait lingkungan hidup sehingga kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada MHA mulai dilaksanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-119
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Klp	0	100	100	100	100

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

10. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana

Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana yang diberikan kepada MHA pada tahun 2016 tidak dilakukan karena Urusan Lingkungan Hidup baru terbentuk pada tahun 2017, sehingga kegiatan fasilitasi sarana yang diberikan kepada MHA Ammatoa Kajang baru terlaksana, adapun sarannya berupa timbangan sampah bank sampah sebagai dampak eko wisata ini dilakukan sampai tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-120
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Klp	0	100	100	100	100

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

11. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat pada tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-121
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Klp	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

12. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup pada tahun 2017 Penghargaan Adywiyata Kabupaten 9 Sekolah, Provinsi 1 Sekolah, Nasional 1 Sekolah 2018 Penghargaan Adywiyata Kabupaten 13 sekolah ,Provinsi 8 Sekolah, Nasional 1 sekolah sedangkan 2019 hanya penghargaan tingkat Kabupaten 10 Sekolah dan tahun 2020 tidak ada penilaian karena COVID-19

Tabel II-122
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		0	Ada	Ada	Ada	Tidak ada

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

13. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-123
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	%	0	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
kabupaten/kota.						

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

14. Timbulan sampah yang ditangani

Jumlah pengurangan Timbulan sampah yang tertangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan data Jakstrada sebagai berikut, pada Tahun 2017 Jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 2.521,28 Ton dengan persenase 4,18 % dari total timbulan sampah sebesar 60.331 ton. Pada Tahun 2018 Jumlah timbulan Sampah yang tertangani sebesar 10.754,36 Ton dengan persentase 17,83 % dari total timbulan sampah sebanyak 60.331 ton, pada Tahun 2019 jumlah timbulan sampah tertangani sebesar 12.767.36 ton dengan persentase 20,75 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton sedangkan pada Tahun 2020 jumlah timbulan sampah yang tertangani sebanyak 12,957.00 ton dengan persentase 20,64 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton.

Tabel II-124
Timbulan sampah yang ditangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Timbulan sampah yang ditangani	%	0	4,18	17,83	20,75	20,64

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

15. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Jumlah Penanganan sampah yang tertangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan data Jakstrada sebagai berikut pada tahun 2017 Jumlah sampah yang tertangani sebesar 5.801,07 Ton dengan persenase 9,60 % dari total timbulan sampah sebesar 60.331 ton, pada tahun 2018 Jumlah Sampah yang tertangani sebesar 28,329.11 Ton dengan persentase 46,96% dari total timbulan sampah sebanyak 60.331 ton, pada tahun 2019 jumlah sampah tertangani sebesar 49.275.00 ton dengan persentase 80,07 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton, sedangkan pada tahun 2020 jumlah sampah yang tertangani sebanyak 46,172.50 ton dengan persentase 73,56 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton.Penyebab turunnya penanganan sampah yang tertangani ditahun 2020 disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dibidang pengangkutan seperti mobil pengangkut sampah dan motor sampah dan adanya proses pengelolaan sampah dari sumber melalui pemilahan di Bank sampah dengan capaian 6,51 %

Tabel II-125
Persentase jumlah sampah yang tertangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	0	9,41	46,96	80,07	73,56

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

16. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota ,Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71 Nilai Adipura Tahun 2019 belum keluar sedangkan Adipura Tahun 2020 tidak ada karena COVID- 19

Tabel II-126
Tabel Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	0	82,20	77,03	0	0

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

17. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)

Pengelolaan Limbah B3 dari industri dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) sesuai kewenangan yang diatur dalam PP 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan pengelolaan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pengumpul Limbah B3. Pelaporan pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan peraturan bupati No. 81 Tahun 2015 tentang tata cara pelaporan pengelolaan LB3 dan dilakukan secara berkala atau satu kali dalam 3 bulan.

Tabel II-127
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)	Ton/ Kg	0	0	22,070	36,750	25,130

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

18. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 1 Buah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-128
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	0	1	1	1	1

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

19. Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan sebesar 23,64 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-129
Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan	%	0	22,36	22,63	22,72	23,64

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
keseluruhan						

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

20. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 25 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-130
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	%	0	25	25	25	25

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

21. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati

Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk tahun 2017 terdapat satu dokumen keaneka ragaman hayati yang priodesasinya selama 5 tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengolahan terpadu keanekaragaman hayati di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-131
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	1	0	0	0

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur melalui 6 (enam) indikator, diantara dapat dilihat sebagai berikut:

1. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk.

Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan yaitu dari 0,84 ke 0,87 dan pada Tahun 2018 sampai tahun 2020 rasionya sama yakni 1, ini menunjukkan bahwa Penduduk sudah memiliki KTP berdasarkan jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah.

Tabel II-132
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk		0,84	0,87	1	1	1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Rasio bayi berakta kelahiran

Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016-2020 mengalami nilai fluktuasi ini disebabkan karena nilai pembagiannya merupakan jumlah bayi sedangkan jumlah bayi tiap tahun meningkat.

Tabel II-133
Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio bayi berakta kelahiran		0,76	0,63	0,67	0,71	0,40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Rasio pasangan berakta nikah

Rasio pasangan berakta nikah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 mengalami peningkatan walaupun bernilai rendah dikarenakan jumlah pembagiannya berdasarkan jumlah keseluruhan pasangan nikah sedangkan tiap tahunnya meningkat akan tetapi dalam hal ini capaian pada tahun 2016 yaitu 0,02 dan pada tiap tahunnya mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2020 menjadi 0,05.

Tabel II-134
Rasio pasangan berakta nikah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio pasangan berakta nikah		0,02	0,03	0,03	0,05	0,05

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Capaian Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 sampai tahun2020 sudah diberlakukan sehingga penduduk usia > 17 atau telah menikah sudah wajib memiliki KTP yang sudah berbasis NIK.

5. Cakupan penerbitan KTP-el

Cakupan penerbitan KTP-el Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami nilai fluktuasi akan tetapi pada Tahun 2018 hingga 2019 mencapai 100 persen akan tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi 99,99 persen ini diakibatkan pandemi COVID-19.

Tabel II-135
Cakupan penerbitan KTP-el Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penerbitan KTP-el		88,12	95,74	100	100	99,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2021

6. Cakupan penerbitan akte kelahiran

Cakupan penerbitan akte kelahiran Kabupaten Bulukumba pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan mulai dari 63,32 persen hinggann menjadi 83,73 persen. Namun pada tahun 2020 menurun menjadi 49,74 persen yang diakibatkan Pandemi COVID-19 sehingga dilakukan Pembatasan Sosial.

Tabel II-136
Cakupan penerbitan akte kelahiran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penerbitan akte kelahiran		75,88	63,32	66,83	83,73	49,74

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintahan desa yang baik

Jumlah Desa yang memiliki sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintahan desa yang baik pada tahun 2016 adalah 70 Desa dari 109 Desa di Kabupaten Bulukumba atau 64,2 %, ini disebabkan karena masih banyaknya desa yang baru membenahi Desanya baik dari segi pemerintahan desa, sarana prasarana, tata wilayah desa dan perencanaan penganggaran dan pengelolaan keuangan desa, pada tahun 2017 sampai 2018 persentase kenaikannya belum terlalu signifikan ini dibuktikan pada tahun 2017 jumlah kantor pemerintahan desa yang baik 73 Desa atau 66,9 Persen dan pada tahun 2018 jumlah kantor pemerintahan desa yang baik 74 Desa atau 67,8 %, nanti pada tahun 2019 terjadi perkembangan yang sangat signifikan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik yaitu 100 desa dari 109 Desa atau 91,74 % ini dipengaruhi oleh beberapa hal pendukung diantaranya kesirusan pemerintah Desa dalam mengembangkan dan menata desanya sesuai dengan potensi desa yang dimiliki serta adanya dukungan anggaran baik yang bersumber dari ADD dan BDD serta tidak kalah pentingnya faktor pendukung yang sangat menentukan adalah pembinaan dan pendampingan dari pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terus memberikan pembinaan kepada seluruh aparat pemerintahan desa baik dari segi pelaksanaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, perencanaan dan penganggaran di desa, penataan kelembagaan desa dan setiap tahunnya diadakan evaluasi perkembangan desa dan Lomba desa dengan tujuan melihat sejauh mana perkembangan desa, pada tahun 2020 seluruh Desa dari 109 desa dikabupaten bulukumba memiliki sarana dan prasana Kantor desa yang baik yang mendukung dalam proses pelayanan administrasi masyarakat di desa dan jalannya pemerintahan di desa.

Tabel II-137
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik		64,2	66,9	67,8	91,74	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada dikabupaten bulukumba dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki kontribusi dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiaitan di Desa, namun belum Optimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di 109 desa yang ada dikabupaten bulukumba, sehingga Pemerintah kabupaten bulukumba dalam hal ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Pemerintah Desa agar desa yang belum optimal dan belum jalan lembaga pemberdayaannya agar kiranya di aktifkan kembali guna menunjang program pemerintah Desa.

Tabel II-138
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun

		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		93	93	93	93	93

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Kelompok Binaan PKK

Jumlah PKK yang ada di kabupaten Bulukumba dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdiri 146 kelompok yang terdiri dari 109 PKK ditingkat Desa, 27 kelompok PKK tingkat kelurahan dan 10 kelompok PKK di tingkat Kecamatan. Keberadaan PKK ditingkat desa/Kelurahan dan Kecamatan memiliki peran yang sangat aktif, baik itu kegiatan yang ada di desa/Kelurahan, Kecamatan maupun kegiatan ditingkat Kabupaten. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan memiliki peran penting dalam proses pembangunan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam di desa/kelurahan maupun di kecamatan untuk dikelola semaksimal mungkin dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di desa terutama kalangan ibu rumah tangga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerjasama dengan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba dari tahun 2016 sampai 2020 senantiasa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok Binaan PKK yang ada di tingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan agar lebih aktif dan produktif mengambil peran dalam kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga di Desa baik itu dalam hal sosialisasi terkait Pemanfaatan halaman rumah tangga yang produktif, manfaat pemberian ASI eksklusif untuk bayi, Pencegahan Gizi buruk untuk anak balita serta kegiatan lainnya yang berkontribusi dalam hal pembangunan ditingkat Desa/kelurahan.

Tabel II-139
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		146	146	146	146	146

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2021

6. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif dari tahun 2016 sampai dengan 2020 di Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya 146 PKK dari Jumlah PKK di kabupaten Bulukumba atau setiap tahunnya mencapai target angka 100 %. Kegiatan PKK baik itu ditingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan kabupaten setiap tahunnya dilaksanakan sebagai wujud peran aktif PKK dalam proses pembangunan dan pemberdayaan perempuan, diharapkan kedepan dalam menunjang Kegiatan PKK ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dibutuhkan dukungan anggaran yang cukup baik itu yang berduit dari dana Desa dan APBD kabupaten, dalam hal sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kader dan pengurus PKK, kegiatan sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan penataan kelembagaan.

Tabel II-140
Persentase PKK aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PKK aktif		100	100	100	100	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Posyandu Aktif

Persentase Posyandu aktif pada tahun 2016 544 Posyandu (99,63%) dari jumlah Posyandu 546 posyandu yang tersebar di 10 Kecamatan di kabupaten bulukumba, yang

diklasifikasikan dalam empat tingkatan strata yaitu pratama, Madya, Purnama dan Mandiri, dan pada tahun 2016 tingkatan posyandu dibulukumba terdiri dari : Pratama 137 Posyandu, Madya 255 Posyandu, Purnama 151 Posyandu dan mandiri 3 Posyandu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk terus berusaha dalam peningkatan jumlah posyandu dan peningkatan strata posyandu setiap tahunnya, dan alhamdulillah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 total jumlah Posyandu dikabupaten bulukumba mengalami peningkatan dari sebelumnya 546 posyandu menjadi 577 Posyandu, ada penambahan 31 jumlah posyandu dan persentase posyandu aktif mencapai angka 100 %. Adapun klasifikasi tingkatan Posyandu di tahun 2019 sampai 2020 terdiri dari : Pratama 147 Posyandu, Madya 274 Posyandu, Purnama 153 Posyandu dan Mandiri 3 Posyandu. Untuk lebih meningkatkan strata posyandu diperlukan dukungan penganggaran dan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia kader posyandu yang ada ditingkat desa serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, ini menjadi tugas dan target kinerja tahun berikutnya agar kiranya strata posyandu atau tingkatan posyandu strata mandiri dapat ditingkat jumlah posyandu yang tersebar di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-141

Persentase Posyandu aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Posyandu aktif	%	99,63	100	100	100	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2021

6. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berjalan dengan baik dimana setiap tahunnya desa melakukan kegiatan baik itu sifatnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dan seluruh potensi yang ada didesa tersebut dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian didesa sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa, bahwa dana desa tersebut dikelola dan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat yang ada di desa tersebut., Pengelolaan dana Desa diatur dalam beberapa peraturan tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Desa diantaranya : Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana Desa, PMK No.205/PMK 07/2019 tentang pengelolaan dana Desa, PP No.60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN dan Perbub No.69 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Salah satu kegiatan peningkatan ekonomi di desa dengan dibentuknya Bumdes di 109 Desa dengan tujuan agar usaha ekonomi kecil menengah dan potensi unggulan didesa dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui wadah Bumdes, namun kendala yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat desa terkait dengan peran aktif masyarakat dalam program pemberdayaan, Perlunya peningkatan kapasitas Sumber daya manusia aparat pemerintah desa serta pengelola kegiatan termasuk didalamnya pengurus Bumdes, Perlunya penataan Kelembagaan di desa dengan baik agar menunjang program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan pendampingan termasuk didalamnya melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat pemerintah desa, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat didesa termasuk didalamnya pengelola Bumdes, namun kendala yang kami hadapi adalah kurangnya penganggaran yang bersumber dari APBD kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan di 109 Desa di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-142
Persentase LSM aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase LSM aktif		100	100	100	100	100
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		93	93	93	93	93

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah 1) Kelahiran. Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program keluarga berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Adapun kesertaan KB pada pasangan usia subur menjadi penghambat jumlah kelahiran. 2) Kematian. Kematian juga dapat di pengaruhi beberapa faktor yaitu pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang menyebabkan angka kematian antara lain, tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wiliyah tersebut seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi, wilayah berperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur dan wabah penyakit. Adapun faktor yang menghambat kematian antara lain menjaga kesehatan, pola makan yang teratus, makan yang bergizi, sedikitnya angka kemiskinan, sarana kesehatan yang lengkap. 3) Migrasi. Penduduk yang datang bisa saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini bisa menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Sebaliknya penduduk yang pergi ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak, seperti menjadi TKI, bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk. Beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 sampai dengan 2020 laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,66 persen. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,60 persen. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,63 persen. Tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,54 persen namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-143
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,66	0,60	0,63	0,54	0,57

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Total Fertility Rate (TFR)

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, juga untuk menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat).

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi.

Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,320 persen. Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,309 persen. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 2,320 persen dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 2,318 persen. Selangkanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-144
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Total Fertility Rate (TFR)	%	1,926	2,320	2,309	2,320	2,318

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Capaian persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam membangun daerah melalui Kampug KB di tahun 2016 telah terbentuk 1 kampung KB, tahun 2017 terbentuk 10 Kampung KB dan ditahun 2018 terbentuk 11 kampung KB. Sehingga persentase keterlibatan OPD di Tahun awal pembentukan belum maksimal yang menduukung terkait dengan kampung KB. Namun di tahun 2019 dan tahun 2020 ada peningkatan keterlibatan OPD terkait dengan pembentukan Kampung KB.

Tabel II-145
Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam	%	2.78	27.78	30.56	61.11	61.11

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
pembangunan daerah melalui kampung KB						

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk

Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar 41,67 persen dan tahun 2018 menurun sampai dengan tahun 2020 menjadi 8,33 persen. Kondisi ini dikarenakan yang menyusun data dan yang memanfaatkan data berbeda, untuk yang memanfaatkan data ada beberapa OPD, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-146

Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	41,67	41,67	8,33	8,33	8,33

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masing-masing di tetapkan 1 dokumen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-147

Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dok	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

6. Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ada enam organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan data profil. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-148

Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sektor yg menyepakati dan		1. Dinas DUK CAPIL	1. Dinas DUK CAPIL	1. Dinas DUK CAPIL	1. Dinas DUK CAPIL	1. Dinas DUK CAPIL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ada tiga organisasi perangkat daerah yang melakukan pendidikan kependudukan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-149
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		1. Disdikbud 2. IBI 3. Panti Asuhan Aisyah	1. Disdikbud 2. IBI 3. Panti Asuhan Aisyah	1. Disdikbud 2. IBI 3. Panti Asuhan Aisyah	1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM	1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

8. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 Rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 23.54 persen. Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 22.42 persen, tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 22.47 persen, tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 20.39 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-150
Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	23,54	22,42	22,47	21,46	20,39

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

9. Ratio Akseptor KB

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Bulukumba pada kurun waktu 2016 hingga 2020. Mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016 sebesar 7.24 persen sampai dengan tahun 2020 menjadi 13.47 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-151
Ratio Akseptor KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ratio Akseptor KB	%	7,24	8,47	10,80	12,16	13,47

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 di Kabupaten Bulukumba berfluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar 78.39 sampai dengan tahun 2018 menjadi 79.19 namun tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 74,97 persen.

Tabel II-152
Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	78,39	79,00	79,19	75,28	74,97

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

11. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami kenaikan yaitu 89.79 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-153
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	89,79	89,79	89,79	89,79	89,79

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

12. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar 3.80 persen meningkat sampai tahun 2019 sebesar 4.28 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4.25 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-154
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	3,80	3,96	4,20	4,28	4,25

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

13.Cakupan Pus Yang Ingin Ber- Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Bahwa selama ini unmet need menjadi penyumbang cukup besar terhadap belum berpartisipasi PUS dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana. Berdasarkan persentase capaian unmet need pada tahun 2016 sebesar 10.457 dari total PUS sampai pada tahun 2020 sebanyak 8.387 belum ber KB selebihnya adalah hamil dan ingin anak segera, PUS yang hamil dan ingin anak segera secara normative adalah bukanlah sasaran penyuluh agar mau Ber- KB sehingga PUS dalam kategori IKT dan IKD ini yang harus digarap agar menjadi peserta KB. Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik demografi sosial ekonomi, sikap dan kualitas pelayanan.

Tabel II-155
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kabupaten
Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14.42	16.67	16.58	15.68	11.74

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

14.Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Untuk Indikator Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Tahun 2016 9,24, tahun 2017 11,55 , tahun 2018 48,66. Disini kita dapat lihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun penyebab meningkatnya Persentase Punggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang adalah adanya kesadaran masyarakat untuk ber-KB dan menggunakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang untuk menjarangkan kehamilan dan menjaga jarak kelahiran, juga dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yag terlalu dekat.

Sedangkan persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang pada tahun 2019 33.37. Penyebab menurunnya persentase penggunaan MKJP yaitu dropping alokon dari BKKBN Pusat sangat terbatas karena ada maslaah internal di BKKBN Pusat terkait pengadaan ALOKON MKJP, sehingga berpengaruh pada penggunaan MKJP.

Dan, untuk tahun 2020 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 18,51. disini bisa dilihat bahwa mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan karena pada bulan maret 2020 wabah COVID-19 melanda Indonesia sehingga pelayanan KB di seluruh Indonesia terbatas dan rata rata faskes tidak bisa melayani pemasangan Alokon MKJP.

Tabel II-156
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	9.24	11.55	48.66	33.37	18.51

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

15.Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Indikator Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Tahun 2016 9,75%,. Menurunnya persentase keberlangsungan pemakaian kontrasepsi disebabkan oleh pendistribusian Alokon yang tidak merata di setiap faskes, pencatatan dan pelaporannya tidak akurat sehingga kebutuhan dan persediaan Alokon tidak seimbang.

Sedangkan persentase keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada tahun 2019 11,96 Penyebab menurunnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yaitu dropping

alokon dari BKKBN Pusat sangat terbatas karena ada masalah internal di BKKBN Pusat terkait pengadaan ALOKON MKJP, sehingga berpengaruh pada penggunaan MKJP.

Sedangkan tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dengan persentase 39,94 dikarenakan Dropping Alokon dari BKKBN Pusat sudah stabil sehingga pemakaian kontrasepsi bisa meningkat.

Tabel II-157
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	9.75	12.90	36.80	11.96	39.94

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

16.Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita sebanyak 41.26 persen sampai pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan sebanyak 80.97 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-158
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	41,26	41,38	50,76	57,54	80,97

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

17.Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB sebanyak 32.25 persen sampai pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan sebanyak 71.54 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-159
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB	%	32,25	39,18	46,67	55,74	71,54

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

18.Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB sebanyak 19.12 persen sampai pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan sebanyak 71.88 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-160
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB	%	19,12	23,11	43,50	47,16	71,88

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

19.Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak mengalami peningkatan yaitu 10 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-161
Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	10	10	10	10	10

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

20.Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa sebanyak 75.60 persen tidak mengalami penigkatan pada tahun 2017. Tahun 2018 menagalami penurunan manjadi 3.60 persen sampai pada tahun 2019 namun di tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 4.30 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-162
Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	%	75,60	75,60	3,60	3,60	4,30

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

21.Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tiidak mengalami peningkatan yaitu 100 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-163
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

22.Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 sebanyak 1.09 persen. Tahun 2018 mengalami penurunan samapai pada tahun 2020 yaitu 0.15 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-164
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri	%	0,00	1,09	0,19	0,16	0,15

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

23.Rasio petugas pembantu pembina kB Desa PPKBD setiapDesa/ Kelurahan

Rasio petugas pembantu pembina kB Desa PPKBD setiapDesa/ Kelurahan pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu 100 persen Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-165

Rasio petugas pembantu pembina KB Desa PPKBD setiap Desa/ Kelurahan

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio petugas pembantu pembina KB Desa PPKBD setiap Desa/ Kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

24.Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu 100 persen Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-166
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

25.Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 sebanyak 100 persen namun Tahun 2018 mengalami penurunan sampai tahun 2020 yaitu 23.56 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-167
Persentase Faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengn BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	23,56	23,56	23,56

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

26.Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa

Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa pada tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu 100 persen Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-168
Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

27.Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) pada tahun2016 sampai pada tahun 2020. Tahun 2016 sampai tahun 2017 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) 0.004 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-169
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0,004	0	0	0

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

28.Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Pada tahun 2016 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga sebanyak 89,16 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 61,85 persen dan meningkat pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020 100 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-170
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	89,16	61,85	89,16	89,16	100,00

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

29.Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak pada tahun 2016 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebesar 35,16 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 14,05 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 samapai dengan tahun 2019 sebesar 53,44 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 20,16 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-171
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	35,16	14,05	51,08	53,44	20,16

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

30.Rata-rata usia kawin pertama wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebanyak 20,5 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 22,00 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-172
Rata-rata usia kawin pertama wanita Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	20,5	21,00	22,00	22,14	22,00

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

31.Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Pada tahun 2016 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes sebanyak sebanyak 0,0073 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 0,0057 persen namun pada tahun 2018 capaian indikator mengalami penurunan menjadi 0 persen, pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,0057 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 0 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-173
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	%	0,0073	0,0057	0	0,0057	0

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Keluarga melalui APBD dan APBDes						

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Jumlah arus penumpang angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2016-2020, pada tahun 2016 sebanyak 30.500 sampai pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 14.500 jumlah penumpang ini diakibatkan karena beberapa angkutan yang mengalami kerusakan yang sudah tidak layak apalagi di pengaruhi adanya angkutan seperti TAXI dan banyaknya maasyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi.

Tabel II-174
Jumlah arus penumpang angkutan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah arus penumpang angkutan Umum		30.500	25.500	23.500	20.500	14.500

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2021

2. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis sebanyak 3 unit di antanranya jumlah pelabuhan sebanyak 2 unit yaitu pelabuhan Leppe dan Pelabuhan Bira. 1 Terminal Bulukumba.

Tabel II-175
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		3	3	3	3	3

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2021

3. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat tahun 2016 -2020. Pada tahun tahun 2016 Persentase layanan angkutan darat sebesar 2.23 persen, tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 2.61. persen.sampai pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.18 persen. Ini diakibatkan kurangnya layanan sehingga kendaraan angkutan tdk beroperasi.

Tabel II-176
Persentase layanan angkutan darat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase layanan angkutan darat		2.23	2.61	1.83	1.57	1.18

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2021

4. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 19.8 persen. Tahun 2017 meningkat menjadi 41.82 persen. Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 14.8 persen. Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 31.06 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 86.8 persen.

Tabel II-177
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	19.8	41.8	14.8	31.6	86.8

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2021

5. Pemasangan Rambu-rambu

Pemasangan Rambu-rambu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 Pemasangan Rambu-rambu sebesar 40 Persen. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 57 Persen dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 58,5 persen dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 59 persen sedangkan pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan diakibatkan tidak dilakukan pemasang karena kurangnya anggaran yang dialokasikan pada program penyeleggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Tabel II-178
Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pemasangan Rambu-rambu		40	57	58,5	59	59

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2021

6. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum sebanyak 30.500 unit sampai pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 14.500 unit. Ini diakibatkan karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan. Adapun upaya Pemerintah Daerah dengan melakukan penertiban angkutan pribadi yang dijadikan angkutan umum.

Tabel II-179
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		30.500	25.500	23.500	20.500	14.500

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2021

7. Rasio ijin trayek

Rasio ijin trayek pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 Rasio ijin trayek sebesar 0.002 Persen. Sampai pada tahun 2020 terus mengalami penurunan sebesar 0.0005 Persen. Ini diakibatkan karena jumlah ijin trayek karena semakin banyaknya angkutan yang beroperasi pada tahun 2020.

Tabel II-180
Rasio ijin trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio ijin trayek		0.002	0.002	0.001	0.008	0.005

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2021

2.3.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator. proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami

peningkatan 48 % sedangkan di tahun 2018 tidak dilakukan survay karena tidak ada data dari statistik sektoral sedangkan pada tahun 2019 mengalami fluktuatif sedangkan pada tahun 2020 tidak dilakukan survay karena adanya Covid 19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-181
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer		14	62	0	14	0

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bulukmba, 2021

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi Cakupan layanan komunikasi dari Tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan hingga pada tahun sebesar 0,67 dari keseluruhan wilayah Kabupaten Bulukumba. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-182
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Yang Tercoverage	Km ²	398,33	600,38	704,29	738,93	773,57
Luas Wilayah Keseluruhan	Km ²	1.154,58	1.154,58	1.154,58	1.154,58	1.154,58
Cakupan Layanan Telekomunikasi		0,34	0,52	0,61	0,64	0,67

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bulukmba, 2021

3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon mengalami fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 tidak dilakukan survay karena adanya Covid 19 sehingga diadakan pembatasan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-183
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		81	78	82	82	0

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bulukmba, 2021

4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Proporsi rumah tangga dengan akses internet. Proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan pada tahun 2020 tidak dilakukan survey karena adanya Covid 19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-184
Proporsi rumah tangga dengan akses internet
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi rumah tangga dengan akses internet		25	33	39	0	0

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bulukmba, 2021

5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Proporsi rumah tanggaa dengan akses internet pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 tidak dilakukan survey karena adanya Covid 19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-185
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi		14	62	0	60	0

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bulukmba, 2021

2.3.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2016-2020 secara umum mengalami peningkatan, yaitu tahun 2016 persentase koperasi aktif sebesar 66,56 % dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 72,66 %, namun jumlah koperasi mengalami penurunan, yaitu tahun 2016 jumlah koperasi sebanyak 308 koperasi dan pada tahun 2020 menjadi 289 koperasi. Penurunan jumlah koperasi ini disebabkan adanya pembubaran koperasi yang tidak aktif oleh Pemerintah (Melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi UKM Nomor : 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2018 Tentang Pembubaran Koperasi), Dimana pada tahun 2016, jumlah koperasi secara keseluruhan adalah 308 koperasi, dan 205 diantaranya adalah koperasi dengan kategori aktif atau persentase koperasi aktif sebesar 66,56 %, tahun 2017, jumlah koperasi sebanyak 280 dan 202 koperasi diataranya termasuk kategori koperasi aktif atau persentase koperasi aktif sebesar 72,14 %, tahun 2018, jumlah koperasi sebanyak 285 koperasi dan 206 diataranya adalah termasuk kategori koperasi aktif atau persentase koperasi aktif sebesar 72,28 % dan pada tahun 2019 jumlah koperasi sebanyak 289 dengan kategori koperasi aktif sebanyak 209 koperasi aktif atau persentase sebesar 72,32 %, serta pada tahun 2020 jumlah koperasi sebanyak 289 dengan kategori koperasi aktif sebanyak 210 koperasi aktif atau persentase sebesar 72,66 %. Tren peningkatan persentase koperasi aktif ini disebabkan oleh pembinaan, pendampingan serta penyuluhan yang dilakukan serta kesadaran dari para pengurus dan anggota koperasi itu sendiri, dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-186
Persentase koperasi aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase koperasi aktif	%	66,56	72,14	72,28	72,32	72,66

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba tahun

2. Perkembangan Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Untuk perkembangan persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2016-2020 secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu untuk tahun 2016, jumlah usaha mikro dan kecil meningkat menjadi 33.440 usaha dari total jumlah UMKM secara keseluruhan sebanyak 34.982 usaha atau persentase sebesar 95,59 %, tahun 2017 jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 34.053 usaha dari total jumlah UMKM secara keseluruhan sebanyak 35.595 usaha atau persentase sebesar 95,67 %, dan tahun 2018 jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 37.720 usaha dari total jumlah UMKM sebanyak 39.262 usaha atau persentase sebesar 96,07 %, dan tahun 2019 jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 38.120 dari total jumlah UMKM sebanyak 39.662 usaha atau persentase sebesar 96,11%, serta hingga akhir tahun 2020 jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 76.064 dari total jumlah UMKM sebanyak 77.586 usaha atau persentase sebesar 98,04 %. Capaian ini tentu perlu diapresiasi secara positif karena menjadi tanda bahwa perekonomian UKM di Kabupaten Bulukumba cukup hidup dan berkontribusi baik bagi masyarakat.

Secara lengkap indikator urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-187
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	95,59	95,67	96,07	96,11	98,04

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba tahun 2021

Selain perkembangan UMKM tersebut diatas, sejak tahun 2016-2020 telah difasilitasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM, berupa :

1. Penyaluran bantuan peralatan usaha sebanyak 16 kelompok , berupa; alat perbengkelan, pertukangan, alat rumah tangga, dan alat pertokoan serta bantuan lemari etalase sebanyak 16 kelompok pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebanyak 53 kelompok usaha serta pada tahun 2019 sebanyak dan pada tahun 2020 sebanyak kelompok usaha;
2. Pembangunan Lapak Pedagang Kaki Lima TA 2018 sebanyak 50 Lapak dan pada tahun 2019 sebanyak 8 Lapak PKL dan 1 paket penataan kawasan PKL serta tahun 2020 sebanyak 4 lokasi Lapak PKL;
3. Melakukan Pelatihan Wirausaha Pemula sebanyak 180 orang pada tahun 2019, Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Pesisir (UEP) bagi 80 usahawan pada tahun 2019, Pelatihan Wira usaha Baru (WUB) sebanyak 235 kelompok serta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebanyak 480 orang;
4. Pengucuran bantuan modal usaha untuk Wira Usaha Baru sebanyak Rp. 1.740.000.000 untuk 174 WUB;
5. Pengucuran bantuan modal usaha, melalui Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan dampak COVID-19 bagi pelaku UMKM sebanyak 3900 pelaku usaha mikro senilai Rp. 2.000.000.000 pada tahun 2020.
6. Melakukan pembinaan terhadap usahawan sebanyak 3.968 usaha;

2.3.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Investasi di Kabupaten Bulukumba dilihat dari segi perekonomian dimana Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 68,99 persen, hal ini mejadi peluang bagi investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Bulukumba, namun dilihat pada kondisi pandemi yang tidak bisa diprediksi hal ini mempengaruhi banyaknya pengusaha yang mengalami penurunan omset dan banyaknya pekerja yang di PHK yang juga berimbas pada investasi. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bulukumba untuk menjaga iklim investasi salah satunya adalah mempermudah proses perizinan usaha.

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Urusan penanaman modal diukur melalui indikator. yaitu jumlah investor berskala nasional baik PMA maupun PMDN. Jumlah PMA/PMDN pada tahun 2016 sebanyak 32 Buah, tahun 2017 mengalami kenaikan Jumlah PMA/PMDN sebanyak 60 Buah, namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 51 Buah dan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 58 Buah. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-188
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Buah	32	60	51	51	58

Sumber: Dinas PM,PTSP Kabupaten Bulukmba, 2021

2. Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN

Urusan penanaman modal diukur melalui indikator jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN mengalami trend fluktuasi ini disebabkan oleh besaran nilai inventasi dari investor, pada tahun 2016 sebesar Rp.1.366.000.000.000 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp.1.225.838.905.053. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-189
Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN	Rp (juta)	1.366.000	81.600	599.891	50.200	1.225.838

Sumber: Dinas PM,PTSP Kabupaten Bulukmba, 2021

3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Urusan penanaman modal diukur melalui indikator. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) pada tahun 2016 sebesar 0 persen, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi -94 persen ini dipengaruhi oleh jumlah nilai investasi yang kecil, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 635 persen, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi -92 persen ini dipengaruhi oleh jumlah nilai investasi yang kecil walaupun nilai investornya sama dengan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 2.432 persen dikarenakan ada 2 Investor yang memiliki nilai investasi besar. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-190
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	0	-94	635	-92	2.432

Sumber: Dinas PM,PTSP Kabupaten Bulukmba, 2021

2.3.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskripsi berikut.

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator kinerja persentasi organisasi pemuda yang aktif diperoleh dengan membagi jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah organisasi pemuda yang terdaftar. Organisasi pemuda yang aktif ini berdasarkan laporan dari komite nasional pemuda Indonesia dan organisasi pemuda lainnya yang mendapatkan pembinaan dari dinas pemuda dan olahraga.

Pada awal kondisi RPJMD tahun 2016, jumlah organisasi pemuda yang dibina 44 OKP atau 78,57% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Hal ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2016-2021, dimana dinas pemuda dan olahraga di beri target untuk melakukan pembinaan terhadap 44 organisasi kepemudaan.

Pada tahun 2017, jumlah organisasi pemuda yang dibina 45 OKP atau 80,36% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Hal ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2016-2021, dimana dinas pemuda dan olahraga di beri target untuk melakukan pembinaan terhadap 45 organisasi kepemudaan. Pada tahun 2018, jumlah organisasi pemuda yang dibina 46 OKP atau 82,14% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Hal ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2016-2021, dimana dinas pemuda dan olahraga di beri target untuk melakukan pembinaan terhadap 46 organisasi kepemudaan.

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah organisasi pemuda yang dibina 47 OKP atau 83,93% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Hal ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2016-2021, dimana dinas pemuda dan olahraga di beri target untuk melakukan pembinaan terhadap 47 organisasi kepemudaan dan pada tahun 2207, jumlah organisasi pemuda yang dibina 48 OKP atau 85,71% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Hal ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2016-2021, dimana dinas pemuda dan olahraga di beri target untuk melakukan pembinaan terhadap 48 organisasi kepemudaan.

Dari data di atas dapat di lihat bahwa capaian kinerja setiap tahun selalu mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Hal ini tentunya berkat dukungan anggaran yang cukup memadai pada kegiatan pengembangan dan pembinaan kepemudaan seperti anggaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Anggaran untuk kegiatan Karya Ilmiah Remaja. Namun tentunya perlu intervensi anggaran yang lebih besar untuk peningkatan sumber daya manusia pemuda di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-191
Persentase organisasi pemuda yang aktif
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	78,57	80.36	80.36	83.93	85.71

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Persentasi Wirausaha Muda

Pada awal kinerja RPJMD periode tahun 2016-2021, Jumlah wirausaha muda yang telah dilakukan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun 2016, jumlah wirausaha muda pemula yang dilakukan pelatihan bertambah 30 orang menjadi 159 orang.

Jika dipersentasikan dengan jumlah wirausaha total yang ada di Kabupaten Bulukumba berdasarkan data amak diperoleh persentasi sebesar 1,59%. Jumlah wirausaha muda yang dilakukan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan olah dinas pemuda dan

olahraga pada tahun 2017 sebanyak 30 orang, sehingga hanya sekitar 1,99% saja jumlah wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan. Sedangkan pada tahun anggaran 2018, jumlah wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan berjumlah 30 orang sehingga total wirausaha muda yang mendapat pelatihan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 229 atau sekitar 2,99% dari total jumlah wirausaha.

Sedangkan pada tahun anggaran 2019, telah dilakukan pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha muda pemula sebanyak 30 orang, sehingga sampai dengan tahun 2019 terdapat wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan sebanyak 259 orang atau jika dipersentasikan dengan jumlah total wirausaha sebesar 2,58%. Pada tahun anggaran 2020, kegiatan pelatihan kewirausahaan tidak dilakukan dikarenakan adanya refocussing anggaran.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelatihan kewirausahaan muda sangat terbatas, dengan peningkatan setiap tahunnya hanya berkisar 30 orang wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran yang diberikan, selain itu kegiatan pelatihan kewirausahaan bukan merupakan target kinerja pada RPJMD tahun 2016-2021 sehingga kurang mendapatkan porsi anggaran yang memadai.

Tabel II-192
Persentase wirausaha muda
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase wirausaha muda	%	1,69	1.99	1.99	2.59	2.59

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan merupakan pembagian antara jumlah cabang olahraga yang di bina dengan jumlah cabang olahraga yang terdaftar. Jumlah cabang olahraga yang terdaftar di Kabupaten Bulukumba sebanyak 24 cabang olahraga. Pada awal kinerja RPJMD 2016-2021 tahun anggaran 2016, jumlah cabang olahraga yang dibina naik menjadi 6 cabang olahraga atau sebesar 25% dari jumlah total cabang olahraga yang terdaftar. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut diselenggarakan persiapan pra pekan olahraga daerah (Pra Porda) di kabupaten pinrang, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan olahragapun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga di maksud adalah atletik, taekwondo, pencak silat, bola volley, billiard dan karate. Jumlah cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun sama dari pada tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasan anggaran dan tidak adanya even besar yang diselenggarakan.

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga mengalami kenaikan lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 50%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, bulutangkis, sepak takraw, billiard, bola volley, futsal, tenis meja, tenis lapangan dan basket. Pada tahun 2018 jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga naik 2 kali lipat dari tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2018 dilaksanakan pekan olahraga daerah (porda) yang dilaksanakan di kabupaten pinrang.

Pada ajang 4 tahunan ini, kabupaten bulukumba berhasil meloloskan 12 cabang olahraga yang selanjutnya dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga.

Pada tahun 2019, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, sepak takraw, billiard, bola volley. Jumlah ini tentunya menurun dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi deficit anggaran pada pemerintah kabupaten bulukumba sehingga harus dilakukan rasionalisasi anggaran. Hal ini tentunya berdampak pada terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan cabang-cabang olahraga.

Sedangkan pada tahun anggaran 2020, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga hanya 2 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan hanya 8,33%. Apaun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik dan taekwondo. Jumlah cabang olahraga yang dibina sangat terbatas di karenakan adanya pandemic Covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda olahraga yang dibatalkan dan dilakukannya refocussing anggaran.

Tabel II-193
Cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pembinaan olahraga	%	25.00	25.00	50.00	25.00	8.33

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan

Cakupan pelatih yang bersertifikat dimaksud merupakan pembagian antara jumlah pelatih olahraga yang berlisensi dengan jumlah pelatih olahraga yang terdaftar. Jumlah pelatih olahraga yang terdaftar sebanyak 58 orang. 2016 tidak dianggarkan pelatihan bagi wasit berlisensi dikarenakan kurangnya anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan pelatihan, selain itu pelaksanaan kegiatan pelatihan pelatih berlisensi bukan merupakan target RPJMD pada tahun tersebut.

Pada tahun 2017, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 7 orang atau 12,07% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Persentasi ini sangat kecil dibanding kebutuhan, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu kegiatan pelatihan pelatih berlisensi bukan merupakan target RPJMD tahun 2016-2021 sehingga kurang mendapatkan intervensi anggaran.

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 12 orang atau 20,69% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Penambahan ini terjadi dikarenakan pada tahun anggaran 2018, dinas pemuda dan olahraga mengalokasikan anggaran untuk pelatihan wasit/pelatih olahraga berlisensi untuk 5 orang. Pada tahun 2019, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 15 orang atau 25,86% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Jumlah kenaikan pelatih berlisensi dari tahun sebelumnya sebanyak 3 orang. jumlah ini sangat kecil dibanding kebutuhan, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya rasionalisasi anggaran pemerintah daerah menyebabkan beberapa kegiatan di hapus atau di kurangi volumenya, salah satunya kegiatan pelatihan pelatih olahraga berlisensi.

Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi tidak mengalami penambahan. Hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya pandemic Covid 19 yang menyebabkan banyak kegiatan olahraga yang di batalkan untuk menghindari banyak kerumunan, salah satunya

pelatihan pelatih berlisensi. Lain dari pada itu, adanya pandemic Covid 19 juga menyebabkan harus dilakukannya refocusing anggaran pada dinas pemuda dan olahraga, yang dampaknya terdapat banyak kegiatan yang di hilangkan, salah satunya adalah kegiatan pelatihan pelatih berlisensi.

Tabel II-194
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	8.62	12.07	12.07	25.86	25.86

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Cakupan Pembinaan Atlet Usia Dini

Cakupan pembinaan atlet usia dini dimaksud merupakan pembagian antara jumlah atlet usia dini yang dibina dengan jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Atlet usia dini yang di maksud adalah atlet yang status nya masih belajar di sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Jumlah atlet usia dini yang terdaftar sebanyak 167 orang. Pada tahun awal kinerja rpjmd 2016-2021 berdasarkan data yang ada jumlah atlet usia dini yang dibina berjumlah 15 orang, atau 8,92% dari total jumlah atlet usia dini yeng terdaftar. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan pada tahun 2016. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan jumlah atlet usia dini secara keseluruhan dikarenakan kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut, hal ini terjadi dikarenakan pembinaan usia dini bukan merupakan target rpjmd tahun 2016-2021.

Pada tahun 2017, jumlah atlet usia dini yang di bina sebanyak 20 orang atau 11,98% dari total jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah atlet usia dini yang di bina sebanyak 20 orang, sehingga persentase nya bertambah menjadi 23,95% dari total jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah atlet usia dini yang di bina sebanyak 20 orang, sehingga persentase nya bertambah menjadi 35,93% dari total jumlah atlet usia dini yang terdaftar

Sedangkan pada tahun 2020, kegiatan pembinaan atlet usia muda tidak diselenggarakan dikarenakan adanya pamdemi Covid 19 yang melarang dilakukannya kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang dan menjaga jarak/*social distencing*. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan pada kegiatan olahraga karena pastinya melibatkan banyak orang. Selain itu adanya pandemic Covid 19 menyebabkan hampir semua kegiatan keolahrgaan diberbagai level tingkatan ditidakan.

Dilihat dari data di atas, persentasi ini sangat kecil dibanding jumlah atlet yg ada dan peningkatannya pun sangat kecil dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut. Selain dari pada itu, tidak adanya *tallent scouting* dan pemandu bakat menyebabkan sulitnya mencari atlet muda yang berbakat. Selain itu juga adanya pandemic Covid 19 menyebabkan harus dilakukan nya rasionalisasi dan refocusing anggaran yang tentunya berimbas pada harus di hilangkannya beberapa kegiatan. Faktor anggaran juga yang menjadi salah satu factor kegiatan pembinaan atlet usia dini hanya difokuskan untuk pelatihan dan pembinaan kepada atlet yang betul-betul berbakat dan mempunyai prospek mendapatkan prestasi di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel II-195
Cakupan pembinaan atlet muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pembinaan atlet muda		8,92	11.98	23.95	35.93	35.93

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2021

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah medali yang di peroleh oleh atlet dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun 2016, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh sebanyak 10 medali dengan rincian 4 medali emas, 4 medali perak dan 2 medali perunggu. Jumlah medali tersebut di peroleh dari 4 cabang olahraga yaitu pencak silat, atletik, sepak takraw dan tenis. Pada tahun 2017, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 13 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 3 medali perak dan 5 medali perunggu. Dari 13 medali tersebut di peroleh pada 4 cabang olahraga yaitu atletik, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Perolehan medali ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dimana di tahun 2017 dinas pemuda dan olahraga ditergetkan mendapatkan 13 medali atau jika di persentasikan mencapai 100% dari target.

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 26 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 7 medali perak dan 14 medali perunggu. Dari 26 medali tersebut di peroleh pada 6 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Perolehan medali ini melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dimana di tahun 2018 dinas pemuda dan olahraga ditergetkan mendapatkan 15 medali atau jika di persentasikan mencapai 173% dari target.

Pada tahun 2019, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 31 medali yang terdiri dari 10 medali emas, 11 medali perak dan 20 medali perunggu. Dari 31 medali tersebut di peroleh pada 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Perolehan medali ini jauh melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dimana di tahun 2019 dinas pemuda dan olahraga ditergetkan mendapatkan 15 medali atau jika di persentasikan mencapai 206% dari target. Hal ini tidak lepas dari focus nya pembinaan yang dilakukan olah dinas pemuda dan olahraga terhadap atlet yang berbakat dan cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet hanya 3 medali yang terdiri dari 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Dari 3 medali tersebut di peroleh pada 1 cabang olahraga yaitu atletik. Perolehan medali ini sangat jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dimana di tahun 2020 dinas pemuda dan olahraga ditergetkan mendapatkan 13 medali atau jika di persentasikan hanya mencapai 23,07% dari target. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic Covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaan nya, selain itu adanya pandemic Covid 19 juga menyebabkan dilakukan nya rasionalisasi dan refocusing anggaran.

Tabel II-196
Jumlah atlet berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah atlet berprestasi	%	10	13	26	31	3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga adalah jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2016, dimana jumlah cabang olahraga yang berprestasi meningkat menjadi 4 cabang olahraga yaitu pencak silat, atletik, sepak takraw dan tenis. Peningkatan ini tentunya berkat kerja keras dari semua bidang

keolahragaan, walaupun dana sangat terbatas namun tidak menghentikan prestasi cabang-cabang olahraga.

Pada tahun 2017, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh pada 4 cabang olahraga yaitu atletik, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Jumlah ini sama dengan tahun 2016, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2017 merupakan masa transisi dari dinas pendidikan pemuda dna olahrtaga menjadi dinas pemuda dan olahraga. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 6 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Pada tahun 2019, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga di peroleh dari 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Peningkatan ini terjadi tidak lepas dari adanya dukungan dan sinergitas dalam penyelenggaraan dan pembinaan cabang olahraga.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 1 cabang olahraga yaitu atletik. Jika dilihat dari hasil ini sangat kurang sekali, hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic Covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaan nya.

Tabel II-197

Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah prestasi olahraga	%	4	4	6	5	1

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bulukumba dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "Kabupaten Dalam Angka" dan Buku "PDRB". Buku Kabupaten Bulukumba Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya. adapun yang telah dirilis sampai dengan tahun 2019. Begitu pula dengan buku PDRB Kabupaten Bulukumba. dimana pada tahun 2019 juga telah tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Buku "kabupaten dalam angka". Buku "kabupaten dalam angka" dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai target dengan tersedia buku Kabupaten dalam Angka. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-198

Buku "kabupaten dalam angka" Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Buku "PDRB"

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Buku "PDRB". Buku "PDRB" dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai target dengan tersedia Buku "PDRB". Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-199

Buku "PDRB" Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Kabupaten Bulukumba telah menggunakan persandian dalam mengelola informasi penting daerah. Pada tahun 2016-2019 sebesar 76 persen dari perangkat daerah atau 30 Perangkat daerah belum memiliki akun terkait persandian namun ada beberapa kecamatan juga sudah memilki persandian. Akan tetapi, pada Tahun 2020 Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sudah mencapai 100 persen karena semua sistem komunikasi sudah berbasis digital.

Tabel II-200
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	%	76	76	76	76	100

2.3.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pada tahun 2016 sebanyak 2 festival seni kebudayaan yang dilaksanakan dan tahun 2019 meningkat menjadi 5 jenis festival seni dan budaya yang sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah: Festival Pinisi, Songkabala Bantilang, Gowes Hutan Karet, Jelajah Hutan Karet , dan Andingingi. Pada tahun 2020 menurun menjadi 1 kegiatan festival seni budaya yang dapat dilaksanakan karena adanya pandemic COVID-19. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-201
Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya		2	3	3	5	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pendataan sistem informasi sejarah purbakala Kabupaten Bulukumba dan di data banyak sekali situs sejarah dan purbakala yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam mendukung indikator jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah pendataan cagar budaya untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Pada tahun 2016 sebanyak 50 benda situs cagar budaya yang dilestarikan dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 58 cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel II-202
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		50	45	50	57	58

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

3. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mulai tahun 2016-2020 sebanyak 2 jumlah cagar budaya yang dikelola yaitu cagar budaya pasanggrahan tanete di kecamatan bulukumpa dan kompleks makam dato tiro di kecamatan bontotiro.

Tabel II-203
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu		2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2021

2.3.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Adapun langkah-langkah pemerintah khususnya pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan untuk menumbuhkan minat baca bagi masyarakat dengan cara membangun perpustakaan di setiap kecamatan bahkan sampai kelurahan dan desa, ini butuh kerja keras pemerintah dalam mensosialisasikan tentang pentingnya minat baca bagi masyarakat, rendahnya minat baca masyarakat di Kabupaten Bulukumba ini menyebabkan kualitas dan mutu pendidikan Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan beberapa penelitian, penyebab rendahnya minat baca ini karena masyarakat lebih suka menggunakan internet dan media sosial dibandingkan membaca buku, bila kondisi ini terus berlangsung dan tidak diantisipasi sejak dini, maka kita tidak bisa berharap banyak pada mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bulukumba. Untuk mendorong dan memaksimalkan dalam menumbuhkan budaya baca masyarakat, pemerintah harus mendorong atau memperbanyak kegiatan minat baca di sekolah, dan memastikan penyediaan buku bacaan baik di perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah maupun memperbanyak taman-taman bacaan di tempat umum. Adapun capaian indikator pada urusan perpustakaan sebagai berikut ;

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah kunjungan perpustakaan pada Tahun 2016 jumlah pengunjung sebanyak 281.020 orang dan jumlah populasi yang harus dilayani adalah 346.971 orang atau sebesar 80.99%, terjadi peningkatan jumlah pengunjung sebesar 2.63% dari tahun sebelumnya, tahun 2017 jumlah pengunjung sebanyak 284.060 orang dan jumlah populasi yang harus dilayani adalah 349.100 orang atau sebesar 81,37% terjadi peningkatan sebesar 0,38% dari tahun sebelumnya, tahun 2018 jumlah pengunjung sebanyak 290.784 orang dan jumlah populasi yang harus dilayani adalah 351.278 orang atau sebesar 82.78% terjadi peningkatan sebesar 1,41% dari tahun sebelumnya, tahun 2019 jumlah pengunjung sebanyak 294.447 orang dan jumlah populasi yang harus dilayani adalah 365.603 orang atau sebesar 80.54%. Dari segi jumlah pengunjung terjadi peningkatan, namun jumlah populasi yang harus dilayani lebih besar dari tahun sebelumnya, sehingga terjadi penurunan persentase jumlah pengunjung sebesar 2,24% dari tahun sebelumnya sedangkan tahun 2020 jumlah pengunjung sebanyak 35.929 orang dan jumlah populasi yang harus dilayani adalah 376.258 orang atau sebesar 9,55% terjadi penurunan sebesar 70,99% dari tahun sebelumnya

Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan disebabkan adanya pembatasan kunjungan dan layanan akibat pandemic COVID-19. Hal lain yang menjadi kendala dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

- a. Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan, yaitu kondisi gedung yang tidak representative, berpengaruh pada penataan ruang, jauh dibawah standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
- b. Jumlah armada yang digunakan dalam memberikan layanan eksternal masih kurang untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba
- c. Alokasi anggaran pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II-204
Persentase jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		80.99	81.36	82.78	80.54	9.55

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Formulasi yang digunakan untuk menghitung persentase Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah dibagi dengan jumlah eksamplar buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tahun 2016 s/d 2020 berfluktuasi, pada Tahun 2016 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.052 dan 17.518 eksamplar atau 45,96%. Terdapat penambahan buku 833 judul dan 1.445 eksamplar. Terjadi peningkatan jumlah pengadaan buku sebesar 1.04% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.052 dan 17.518 eksamplar atau 45,96%. Jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan karena tidak adanya pengadaan buku inventaris di tahun tersebut, tahun 2018 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.503 judul dan 19.810 eksamplar atau 42,92%. Terdapat penambahan buku sebanyak 451 judul dan 2.292 eksamplar. Jumlah pengadaan buku mengalami penurunan sebesar 3.04% dari tahun sebelumnya, tahun 2019 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.628 judul dan 20.150 eksamplar atau 42,82%. Terdapat penambahan buku sebanyak 125 judul dan 340 eksamplar. Jumlah pengadaan buku turun sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2020 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 10.684 judul dan 24.828 eksamplar atau 3.03%. Penambahan buku sebanyak 2.056 judul dan 4.678 eksamplar. Jumlah pengadaan buku meningkat sebanyak 0,21 % dari tahun sebelumnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penambahan jumlah buku adalah Kondisi keuangan daerah /minimnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pengadaan buku setiap tahunnya sehingga diharapkan peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan.

Tabel II-205
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		45.96	45.96	42.92	42.82	43.03

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Rasio Perpustakaan persatuan penduduk

Formulasi yang digunakan untuk menghitung persentase rasio perpustakaan per satuan penduduk adalah jumlah perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2016 Jumlah perpustakaan sebanyak 300 unit dan jumlah penduduk sebanyak 413.229 jiwa. Sehingga rasio perpustakaan per satuan penduduk sebesar 0.73 persen,

tahun 2017 Jumlah perpustakaan sebanyak 300 unit dan jumlah penduduk sebanyak 415.713 jiwa. Sehingga rasio perpustakaan per satuan penduduk sebesar 0.72 persen, pada tahun 2018 Jumlah perpustakaan sebanyak 300 unit dan jumlah penduduk sebanyak 418.326 jiwa. Sehingga rasio perpustakaan per satuan penduduk sebesar 0.72 persen, pada tahun 2019 Jumlah perpustakaan sebanyak 300 unit dan jumlah penduduk sebanyak 420.603 jiwa. Sehingga rasio perpustakaan per satuan penduduk sebesar 0.71 persen sedangkan tahun 2020 Jumlah perpustakaan sebanyak 414 unit dan jumlah penduduk sebanyak 437.607 jiwa. Sehingga rasio perpustakaan per satuan penduduk sebesar 0.95 persen

Jumlah perpustakaan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 tidak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 300 unit perpustakaan. Tahun 2020 terjadi penambahan sebanyak 114 unit perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat.

Kendala yang dialami dalam penambahan jumlah perpustakaan adalah masih terdapat beberapa desa dan kecamatan yang belum membentuk perpustakaan umum di tengah tengah masyarakat.

Tabel II-206
Rasio perpustakaan persatuan penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0.73	0.72	0.72	0.71	0.95

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis yang diakibatkan oleh adanya pembatasan pelayanan akibat COVID-19.

Hal lain yang menjadi kendala dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah:

- a. Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan, yaitu kondisi gedung yang tidak representative, berpengaruh pada penataan ruang, jauh dibawah standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
- b. Jumlah armada yang digunakan dalam memberikan layanan eksternal masih kurang untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba
- c. Alokasi anggaran pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II-207
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	281.020	284.060	290.784	294.447	35.925

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Jumlah judul koleksi judul buku perpustakaan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir.

Hal yang menjadi kendala adalah daya tamping gedung perpustakaan yang terbatas untuk menampung buku dan sarana pendukung lainnya, sehingga buku yang ada kami layankan dalam bentuk layanan *book loan* (Peminjaman buku) ke perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat.

Tabel II-208
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	8.052	8.052	8.503	8.628	10.684

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2021

6. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat

Formulasi yang digunakan untuk menghitung jumlah pustkawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat adalah: Jumlah pustkawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dibagi dengan jumlah pustkawan di Kabupaten Bulukumba.

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat Tahun 2016 sebanyak 302 orang, dan jumlah pustawakan keseluruhan sebanyak 629 orang atau sebesar 48.01 %. Keadaan ini sama kondisinya sampai Tahun 2020.

Faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat adalah kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan , sehingga diharapkan tahun tahun selanjutnya alokasi anggaran pembinaan SDM dapat ditingkatkan untuk pelaksanaan diklat dan pembinaan kepustakawanan.

Tabel II-209
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki Sertifikat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki Sertifikat	%	48.01	48.01	42.90	48.01	48.01

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, Arsip adalah aset yang sangat berharga, warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Bahkan tingkat peradaban suatu daerah dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya.

Keberadaan data arsip di kabupaten bulukumba akan memperkuat pengelolaan dan data yang diarsipkan utamanya arsip Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Oleh karena itu kepemilikan arsip di kabupaten bulukumba harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh kegiatan atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat ditemukan dalam pencatatan arsip tersebut, Semakin banyak dan akurat data arsip yang dikelola dapat memberikan manfaat pemerintah Kabupaten Bulukumba, namun pada dasarnya dilihat dari sarana dan prasarana yang belum memadai, hal ini menjadi penting dan harus di tingkatkan untuk keberlangsungan pelestarian tersebut. Kinerja pelayanan pada urusan kearsipan tahun 2016-2020 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan dari tahun 2016 – 2020 yaitu jumlah pengelola kearsipan yang dibina, tahun 2016 yaitu 41 OPD, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 46 OPD terkait sosialisasi dan Bimtek Pola klasifikasi kearsipan mencapai 100%, dan tahun 2020 yaitu 36 OPD dan 10 Kecamatan mengalami penurunan disebabkan karena adanya Covid 19 sehingga aktivitas program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya Sosial Distancing dan Physical Distancing.

Tabel II-210
Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan		100.00	100.00	100.00	100.00	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku, tidak semua OPD yang telah dibina menerapkan arsip secara baku karena terkendala pada sarana prasana, gedung dan tenaga dibidang kearsipan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya arsip demi kelangsungan organisasi. Ini dapat dilihat dari data capaian tahun 2016-2020 yang tiap tahun mengalami penurunan, data capaian pada tahun 2016 hanya 12,20 persen dan terus mengalami penurunan bahkan pada tahun 2020 untuk Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku tidak ada.

Tabel II-211
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	12.20	10.87	6.52	2.17	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta kelautan dan perikanan.

2.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap dari perairan laut yang didaratkan di Kabupaten Bulukumba secara garis besar terdiri dari kelompok ikan pelagis dan kelompok ikan demersal. Produksi ikan ekonomis penting pada kelompok ikan pelagis didominasi oleh 6 jenis ikan, yakni: Tuna, Cakalang, Tongkol, Layang, Tembang dan lemuru . Sementara, untuk kelompok ikan demersal, produksi ikan yang bernilai ekonomi pentingnya didominasi oleh jenis ikan: Kerapu dan Kakap.

Produksi perikanan pelagis di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 didominasi oleh jenis Ikan Tongkol, dengan produksi sebesar 11.193 ton (atau 21 % dari total produksi perikanan tangkap Kabupaten Bulukumba), selanjutnya adalah Ikan Tuna yang mencapai 8.428 ton (16 %), Ikan Cakalang mencapai 4.800 ton (9%), Layang 1.809 ton (3 %), dan Ikan Kembung mencapai 1.324 ton (2%). Jumlah produksi dari jenis ikan pelagis utama yang didaratkan di Kabupaten Bulukumba.

Dari sekian banyak program dan salah satu program andalan yang merupakan prioritas pembangunan periode ini adalah Program 1.000 Rumpon, yang dialokasikan pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap. Program 1.000 rumpon ini diharapkan akan memberi hasil signifikan terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan adapun budidaya yang harus ditingkatkan yaitu budidaya Rumput Laut karena usaha budidaya ini sangat mudah dilakukan oleh masyarakat dan tidak membutuhkan modal yang tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian di bawah ini.

1. Cakupan Produksi Perikanan

Produksi perikanan secara umum mengalami fluktuasi dalam produksi perikanan, ini dapat dilihat pada data capaian, untuk tahun 2016 sebesar 131, pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 126 dan tahun 2018 mengalami kenaikan 132 dan di tahun 2019 mengalami penurunan 125 dan di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 128, selengkapnya dapat dilihat pada tabel:

Tabel II-212

Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Produksi perikanan	Persen	131	126	132	125	128

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2021

Adapun kontribusi produksi dapat dilihat dari sub bidang berikut :

a. Perikanan tangkap

Pada tahun 2020, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bulukumba mencapai 53.860,1 ton. Kontribusi terbesar diperoleh dari Kecamatan Ujung Bulu yang mencapai 11.310 ton, selanjutnya adalah Kecamatan Kajang yang mencapai 10.745 ton. Pada tahun 2020 ini produsen perikanan tangkap terbanyak pada Kecamatan Ujung Bulu karena ujung bulu merupakan Ibu Kota Kabupaten yang menjadi pusat pemasaran perikanan di Kabupaten Bulukumba, meskipun armada – armada perikanan yang bertonase besar lebih banyak di Kecamatan Kajang dan Bontobahari. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh peningkatan sarana penangkapan dan semakin membaiknya pola penangkapan ikan yang digunakan oleh Nelayan. Adapun produksi per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-213

Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Jenis Perikanan	2016	2017	2018	2019	2020
Penangkapan di laut	50.072,0	50.004,0	53.455,6	52.651,6	53.860,1
Gantarang	7.010	6.224	5.913	5.850	5.984
Ujung bulu	10.014	10.146	11.161	11.056	11.310
Ujung loe	1.502	2.067	2.212	2.140	2.189
Bonto bahari	9.013	8.857	9.561	9.480	9.698
Bonto tiro	2.504	5.047	5.451	5.370	5.493
Herlang	9.013	7.888	8.569	8.252	8.441
Kajang	11.016	9.775	10.589	10.504	10.745

Sumber : Statistik Perikanan, 2021

Dari grafik di bawah terlihat bahwa Kecamatan Ujung Bulu dan Kajang menyumbang produksi sebesar 21 % & 20% sementara yang terendah adalah Kecamatan Ujung Loe sebesar 4%, hal ini karena kecamatan ujung loe lebih banyak terkonsentrasi dengan lapang usaha budidaya air payau (Tambak).



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Sumber : Statistik Perikanan, diolah, 2021

Produksi perikanan tangkap dari perairan laut yang didaratkan di Kabupaten Bulukumba secara garis besar terdiri dari kelompok ikan pelagis dan kelompok ikan demersal. Produksi ikan ekonomis penting pada kelompok ikan pelagis didominasi oleh 6 jenis ikan, yakni: Tuna, Cakalang, Tongkol, Layang, Tembang dan lemuru. Sementara, untuk kelompok ikan demersal, produksi ikan yang bernilai ekonomi pentingnya didominasi oleh jenis ikan: Kerapu dan Kakap.

Produksi perikanan pelagis di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 didominasi oleh jenis Ikan Tongkol, dengan produksi sebesar 11.193 ton (atau 21 % dari total produksi perikanan tangkap Kabupaten Bulukumba), selanjutnya adalah Ikan Tuna yang mencapai 8.428 ton (16 %), Ikan Cakalang mencapai 4.800 ton (9%), Layang 1.809 ton (3 %), dan Ikan Kembung mencapai 1.324 ton (2%). Jumlah produksi dari jenis ikan pelagis utama yang didaratkan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel.

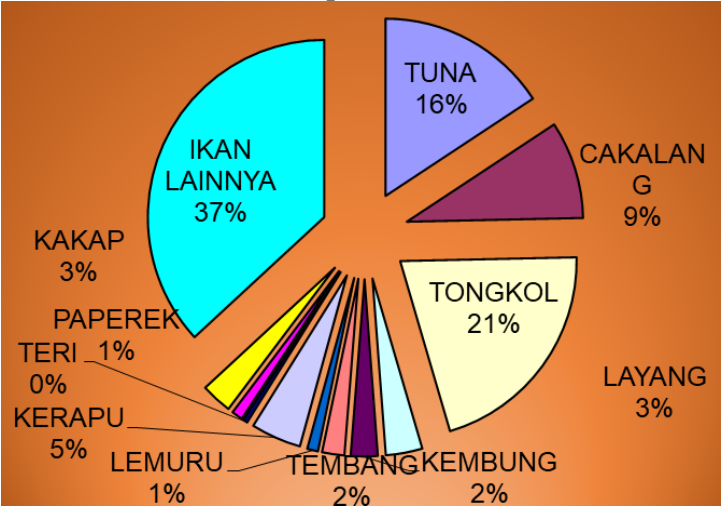
Tabel II-214
Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No	Jenis Ikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tuna	2.233	2.231	8.349	8.291	8.482
2	Cakalang	2.654	2.639	4.823	4.692	4.800
3	Tongkol	8.393	8.376	10.971	10.942	11.193
4	Layang	8.200	8.192	1.777	1.768	1.809
5	Kembung	1.791	1.775	1.314	1.294	1.324
6	Tembang	2.984	2.976	1.117	1.076	1.100
7	Lemuru	2.063	2.054	536	522	534
8	Kerapu	1.124	1.118	2.459	2.427	2.483
9	Teri	-	225	233	219	224
10	Paperek	776	747	545	530	542
11	Kakap	1.696	1.512	1.633	1.492	1.526
12	Ikan lainnya	18.160	18.160	19.699	19.398	19.843
Jumlah		50.072,0	50.004,6	53.455,6	52.651,6	53.860,1

Sumber : Statistik Perikanan, 2021

Sementara itu komposisi produksi berdasarkan jenis ikan dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik II-20
Komposisi Produksi 2020 Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020



Sumber : Statistik Perikanan, diolah, 2021

b. Perikanan Budidaya

Kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Bulukumba ini dilakukan di beberapa tempat yaitu laut, tambak, dan kolam. Secara umum, produksi perikanan budidaya tahun

2020 mengalami peningkatan produksi, hal ini karena pada tahun 2019 terjadi musim kemarau ekstrim berkepanjangan sehingga usaha budidaya sering mengalami kegagalan dan pada Tahun 2020 kondisi cuaca mulai membaik sehingga berdampak pada peningkatan produksi. Tahun 2020 produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 198.556 ton, meningkat 8,3 % dari tahun 2019 yang jumlahnya sebesar 183.348 ton. Selengkapnya data jumlah RTP, petani, luas bersih pemeliharaan, produksi, dan nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bulukumba tahun 2020 disajikan dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel II-215
Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Tempat,
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

T A H U N	PERIKANAN BUDIDAYA			
	KOLAM	TAMBAK	LAUT	MINA PADI
2016	667	1.301	3.155	62
2017	964	1.036	3.089	61
2018	668	1.308	3.173	62
2019	630	1.308	3.173	60
2020	630	1.308	3.173	60

Sumber : Statistik Perikanan, 2021

2. Cakupan bina kelompok tani mengalami penurunan sebesar

Kategori kelompok yang dibina adalah kelompok yang sudah mendapat bantuan dari Dinas Perikanan Bulukumba, bantuan yang diberikan tersebut bukan hanya berupa bantuan fisik namun juga berupa bantuan non fisik seperti penyelenggaraan pelatihan teknis perikanan seperti Penangkapan ikan dan budidaya perikanan.

Kesulitan dalam meningkatkan persentase binaan kelompok adalah semakin meningkatnya jumlah kelompok tiap tahun sehingga meskipun bantuan yang diberikan ke kelompok masyarakat juga bertambah namun laju penanmbahan jumlah kelompok perikanan juga cukup besar.

Oleh karena itu, terjadi fluktuasi bahkan cenderung penurunan persentasi cakupan binaan kelompok karena anggaran Dinas dari tahun ke tahun semakin menurun yang berdampak pada semakin kurangnya bantuan yang diserahkan ke kelompok masyarakat sementara jumlah kelompok juga semakin meningkat.

Secara lengkap indikator urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-216
Cakupan bina kelompok tani mengalami penurunan sebesar
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan bina kelompok tani		52	51,4	56,8	66,7	69,5

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah yang terletak dibagian selatan jazirah Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba memiliki pesona wilayah 4 jenis seperti dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai dan laut lepas. Selain itu kekayaan alam dan keunikan budayanya juga memiliki daya pikat tersendiri. Belum lagi keahlian masyarakatnya dalam membuat perahu phinisi yang telah mendunia.

Mayoritas penduduk Bulukumba memeluk agama Islam, dengan struktur masyarakat yang memegang prinsip "*Mali siparappe Tallang Sipahua*" yang merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Kabupaten Bulukumba merupakan sebuah kabupaten yang kaya akan potensi wisatanya. Dengan wilayah geografis yang eksotis antara pegunungan dan pantai, menjadikan Bulukumba menjadi tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan. Tentunya hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pariwisata, beberapa obyek wisata di Kabupaten Bulukumba.

Adapun Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap Pariwisata Lokal dimana pada dasarnya mendukung penuh aktivitas masyarakat dengan adanya tempat-tempat wisata yang didirikan oleh masyarakat itu sendiri.

1. Kunjungan wisata

Indikator kinerja urusan pariwisata dapat dilihat dari fluktuasi kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, lama kunjungan wisatawan, dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sector pariwisata. Dari angka kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Total Angka kunjungan wisatawan tahun 2016 sebanyak 178.580. Jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2016 mencapai 3.125 orang yang sebagian besar berasal dari asia fasifik dan eropa. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan 14,41 persen dari tahun sebelumnya yakni 203.770 orang, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar - 2,85 persen pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya. Untuk Angka kunjungan wisatawan domestic pada tahun 2018 mengalami kenaikan 30,92 persen dari tahun 2017, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sebesar 17,16 persen pada tahun 2018 dari tahun 2017. Sedangkan Angka kunjungan wisatawan domestic pada tahun 2019 mengalami kenaikan 5,91 persen dari tahun 2018, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sebesar 2,25 persen pada tahun 2019 dari tahun 2018. Dan pada tahun 2020 Angka kunjungan wisatawan domestic mengalami kenaikan 8.22 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan -87.04 persen pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya.

Tabel II-217
Kunjungan wisata Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan wisata	Orang	178.580	203.770	266.296	280.590	301.507

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Lama kunjungan Wisata

Untuk indikator lama kunjungan wisatawan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 tetap yaitu 2-4 hari. Hal ini juga tergantung pada hari-hari libur Panjang yang cukup menarik animo wisatawan untuk menginap di Kawasan wisata.

Tabel II-218
Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Lama Kunjungan Wisata		2-4	2-4	2-4	2-4	2-4

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2021

3. PAD sektor pariwisata

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 dari target 3,6 Milyard dapat direalisasikan sebesar 2,5 Milyar atau 69,75 persen. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017 dari sektor pariwisata dari target Rp. 6.826.660.000,- Rp. 3.007.970.000,- dengan persentase realisasi keuangan mencapai 44,06%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 dari sektor pariwisata dari target Rp. 6.826.660.000,- Rp. 3.075.895.000,- dengan persentase realisasi keuangan mencapai 45,06%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 dari sektor pariwisata dari target Rp. 5.110.552.667,- Rp. 3.275.065.000,-dengan persentase realisasi keuangan mencapai 64.08

%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020 dari sektor pariwisata dari target Rp.2.574.700.000,- dapat di capai realisasi sebesar Rp. 3.757.615.000,- dengan persentase realisasi keuangan mencapai 145,94%.

Tabel II-219
PAD sektor pariwisata Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PAD sektor pariwisata		1.52	1.77	1.26	1.54	1.74

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB

Berdasarkan tabel diatas terlihat, terjadi penurunan nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba secara terus menerus dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain; 1) semakin berkurangnya tenaga kerja dibidang pertanian khususnya subsektor tanaman pangan karena meningkatnya penggunaan alsintan, 2) semakin menurunnya penerapan teknologi tepat guna oleh petani, 3) semakin berkembangnya sektor jasa lainnya, 4) terjadinya anomali iklim yang menyebabkan kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang sering menggagalkan panen serta, 5) kurangnya dana stimulan bagi petani misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tabel II-220
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB	%	31.75	31.03	28.72	26.62	26.62

Sumber : Dinas TPHP Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Cakupan bina kelompok tani

Cakupan bina kelompok tani adalah merupakan jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan dibagi dengan jumlah kelompok tani secara keseluruhan dikali 100 persen.

Indikator Capaian Bina Kelompok Tani selama tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi capaian. Tahun 2016 cakupan bina kelompok tani mengalami peningkatan sebesar 65,60% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) cukup besar. Tapi tahun 2017 menjadi 32,69%, Hal ini disebabkan menurunnya alokasi dana APBD dan APBN sehingga berimplikasi terhadap jumlah kelompok tani penerima bantuan. Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 61,2 %, tahun 2019 cakupan bina kelompok tani mengalami penurunan sebesar 53,75% dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 71,18%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-221
Cakupan bina kelompok tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan bina kelompok tani	%	65,60	32,69	61,2	53,73	71,18

Sumber : Dinas TPHP Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Jumlah populasi ternak

Untuk komoditi peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Bulukumba adalah sapi potong, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan

ternak itik. Dan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Bulukumba adalah sapi potong, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Pengembangan komoditas sapi potong ini memang diikuti oleh animo masyarakat untuk memelihara sapi cukup tinggi baik yang sifatnya turun temurun, maupun dengan melihat peluang pasar yang prospektif, sehingga pemeliharaan sapi ditingkat masyarakat sangat signifikan dari tahun ke tahun. Demikian halnya dengan dukungan program pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah kebijakannya lebih kepada pengembangan sapi potong, dan secara Nasional Kabupaten Bulukumba sudah ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan sapi potong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 472 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi kawasan pertanian nasional. Sedangkan untuk komoditas unggas komersial yaitu ayam ras petelur dan ayam ras pedaging peningkatannya juga sangat signifikan menjadi salah satu usaha peternakan yang diminati oleh masyarakat sebagai salah satu usaha yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan,. Berdasarkan data capaian Ayam Ras Pedaging merupakan jumlah populasi yang paling banyak pada tahun 2016 sebanyak 2.063.600 ekor dan mengalami kenaikan positif hingga pada tahun 2019 sebesar 2.550.438 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah menjadi 2.309.930 ekor, berbeda dengan Ayam Ras Petelur yang dari tahun 2016 mengalami kenaikan positif hingga pada tahun 2020, pada tahun 2016 jumlah populasi Ayam Ras Petelur sebanyak 28.426 dan tiap tahun mengalami kenaikan hingga pada tahun 2020 menjadi 638.724 ekor. Sedangkan untuk komoditas Sapi Potong merupakan jumlah capaian paling kecil yaitu pada tahun 2016 hanya 70.662 dan terus mengalami kenaikan tiap tahun hingga 2020 sebesar 76.797 ekor. Untuk perkembangan populasi dari tiga jenis komoditas unggulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-222
Jumlah populasi ternak Kabupaten Bulukumba

Komoditas	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi Potong	Ekor	70.662	72.602	75.993	76.434	76.797
Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.063.600	2.295.000	2.381.401	2.550.438	2.309.930
Ayam Ras Petelur	Ekor	282.426	310.218	452.158	463.793	638.724

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Kabnupaten Bulukumba, 2021

2.3.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Pengelolaan hutan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah memiliki kewenangan atas kawasan hutan. mulai dari perencanaan. perizinan. dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai kewenangan mengontrol proses perencanaan dan pemantauan sumberdaya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan yang secara implementasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengurusan kehutanan oleh provinsi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. rehabilitasi dan reklamasi hutan. dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi pengelolaan taman hutan raya. penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.

2.3.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Jumlah rumah tangga pengguna listrik

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Persentase jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan capaian tahun 2020 sebesar 109,73 persen artinya realisasi jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2020 sebanyak 102,619 dengan adanya Program Listrik Masuk Desa mulai di tahun 2017 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan PT. PLN Cabang Bulukumba. Melalui program tersebut sebanyak 762 KK yang berada di 482 titik di beberapa kecamatan, dan beberapa desa terpencil/pelosok desa seperti Desa Pattiroang, Kacibo, Parampakku, Bonto Nangka, Kampung Baru, Tokombeng, yang selama ini belum menikmati listrik sekarang ini sudah dapat menikmatinya. Selanjutnya di tahun 2020 ini Kabupaten Bulukumba masuk dalam 5 kabupaten yang mendapatkan program LISA (Listrik Desa) oleh PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselrabar. Untuk Kabupaten Bulukumba program LISA ini difokuskan di Desa Kahayya Kec. Kindang. Selain itu program kerjasama Listrik Masuk Desa antara Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan PT. PLN Cabang Bulukumba untuk tahun 2019 dilanjutkan di Desa Garuntungan, Desa Batunilamung, Desa Sopa, Desa Kahayya, dan Desa Balong.

Tabel II-223
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	91.764	99.494	102.61	91.764	99.494

Sumber : BPS & PLN Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Persentase cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Tahun 2016 sebesar 0,68 persen, tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah kelompok pedagang/usaha formal tidak menerima bantuan. Namun pada tahun 2020 jumlah kelompok yang menerima bantuan Coolbox 0,85 persen dan jumlah kelompok yang menerima bantuan Tenda 0,51 Persen sehingga diperoleh capaian sebesar 0,68 persen. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Cakupan Bina Kelompok Perdagangan di Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,68	0	0	0	0,68

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Jumlah Pasar

Jumlah pasar yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Bulukumba sebanyak 43 yang dihitung dari berbagai tipe pasar, tipe A sebanyak 1 Unit, tipe B sebanyak 15 Unit, tipe C sebanyak 26 Unit, dan tipe D sebanyak 1 Unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-224
Jumlah Pasar berdasarkan Kecamatan, Tipe serta Alamat
Kabupaten Bulukumba tahun 2020

No	Uraian	Tipe	Alamat
	UJUNG BULU		
1	Pasar Sentral	A	Caile
2	Pasar Kasuara	C	Tanah Kongkong

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Uraian	Tipe	Alamat
3	Pasar Cekkeng	B	Terang-terang
	GANTARANG		
1	Pasar Kalimassang	C	Mariorennu
2	Pasar Ponre	B	Matteko
3	Pasar Gunung Jati/Pasar Mode	B	Bontomacinna
4	Pasar Mannaungi	C	Gantarang
5	Pasar Dampang	C	Dampang
6	Pasar Bonto Nyeleng	C	Bonto Nyeleng
7	Pasar Borong Tellu	C	Bukit Tinggi
8	Pasar Bangkeng Buki	C	Bengkeng Buki
	KINDANG		
1	Pasar Borong Rappoa	B	Borong Rappoa
2	Pasar Pa'Baeng-Baeng	C	Anrihua
3	Pasar Cilibbo	C	Cilibbo
4	Pasar Tapolloe	C	Benteng Palioi
	UJUNG LOE		
1	Pasar Dannuang	B	Dannuang
2	Pasar Ulu Tedong	B	Gantarang
3	Pasar Allu/Tamatto	C	Tammatto
4	Pasar Seppang	C	Seppang
	HERLANG		
1	Pasar Batu Asang	B	Singa
2	Pasar Gunturu	C	Gunturu
3	Pasar Tanuntung	C	Tanuntung
4	Pasar Kupang	C	Kupang
	KAJANG		
1	Pasar Kassi	C	Kassi
2	Pasar Kalimporo	B	Kalimporo
3	Pasar Maleleng	C	Maleleng
	RILAU ALE		
1	Pasar Bontomanai	B	Bontomanai
2	Pasar Palampang	B	Palampang
3	Pasar Balimbing	C	Bonto Mate'ne
4	Pasar Swatani	C	Swatani
5	Pasar Sampeang	B	Desa Bonto Haru
	BULUKUMPA		
1	Pasar Tanete	B	Tanete
2	Pasar Balang Riri	C	Bajiminasa
3	Pasar Dinding	D	Jojjolo
4	Pasar Salassae	C	Salasae
	BONTO BAHARI		
1	Pasar Tanah Beru	B	Sapolohe
2	Pasar Ara	C	Ara
3	Pasar Bira	C	Bira
	BONTO TIRO		
1	Pasar Batang	C	Batang
2	Pasar Hila-Hila	C	Ekatiro
3	Pasar Bonto Tangnga	B	Bonto Tangga
4	Pasar Basokeng	C	Dwitiro
5	Pasar Tamalanrea	B	Tamalanrea

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.3.7 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1. Cakupan bina kelompok pengrajin

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin. Perkembangan produktivitas sektor industri di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pengrajin sebanyak 0,14 persen dimana jumlah pengrajin sebanyak 14 kelompok dan yang menerima bantuan hibah sebanyak 2 kelompok. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tidak ada kelompok yang menerima bantuan, namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 penerima bantuan kelompok sebanyak 2 kelompok dengan persentase 0,14 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

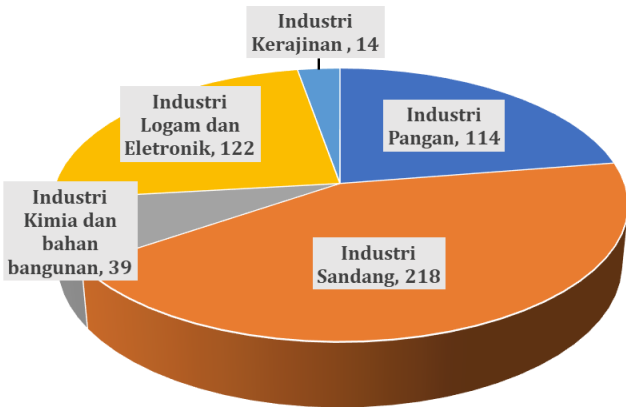
Tabel II-225
Produktivitas Sektor Industri di Kabupaten Bulukumba, 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0,14	0	0	0,14	0,14

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, 2021

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Dan Perindustrian jumlah industri kecil dan menengah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 sebanyak 507 Usaha dibagi atas 5 (lima) kategori yaitu :

Grafik II-21
Jumlah Usaha Industri berdasarkan Kategori Kabupaten Bulukumba tahun 2020



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 mengalami trend fluktuasi yang disebabkan dari dasar perhitungan yang pembagiannya berdasarkan jumlah penduduk sedangkan laju pertumbuhan penduduk tiap tahun meningkat, pada tahun 2016 rasionya sebesar 2,5 akan tetapi pada tahun 2017 sampai pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,55. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-226
Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tempat ibadah	Unit	848	1.118	1.118	1.118	1.118

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Jumlah Penduduk	Jiwa	413.299	415.713	418.326	420.603	437.607
Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	2,05	2,69	2,67	2,66	2,55

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Berikut ini adalah perkembangan indikator Sekretariat Dewan pada unsur penunjang atau pendukung daerah di Kabupaten Bulukumba.

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD untuk tahun 2016 sampai 2017 oleh sekeretariat DPRD secara administrasi tidak di disusun dalam bentuk surat keputusan nanti setelah 2018 sejak berlakunya pp 12 tahun 2018 sekretariat DPRD mulai menyusun rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam bentuk surat keputusan sehingga baru dilaksanakan pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020. Untuk capaian 2016-2020 sudah tersedia/ada Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD.

Tabel II-227
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 12 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah, juga undang-undang No 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintahan No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tiga fungsi yaitu :

- 1) Fungsi Legislasi
- 2) Fungsi Anggaran
- 3) Fungsi Pengawasan

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki sekretariat DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2004 dan dipertegas dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi DPRD. Yang meliputi penyelenggaraan administrasi sekretariat DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD.

Tabel II-228
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan

Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam
Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan		Ada	Ada	Ada	Ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas-tugas DPRD, Maka Sekretariat DPRD menyusun indikator kinerja yang menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang dihubungkan dengan Visi yang di emban, Penetapan indikator kinerja bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi & Misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD menetapkan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel II-229

Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatih; dan pengawasan.

2.3.5.1 Perencanaan

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah memiliki dokumen RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bulukumba 2005-2025.

Tabel II-230

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 -2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021.

Tabel II-231

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 -2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulukumba, 2021

Dengan berbedanya tahun perencanaan di Kabupaten Bulukumba dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dinamika pembangunan yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi terhadap penyusunan dokumen perencanaan Jangka Menengah Daerah, namun dengan meningkatkan sistem yang berbasis pada teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Pemerintah Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Namun karna Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian/ Lembaga terkait penyusunan dokumen perencanaan dan juga kebijakan perencanaan pada tingkat global/nasional (pembangunan berkelanjutan) sehingga memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah, serta dengan adanya perbedaan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah dinilai cukup mempengaruhi pencapaian target ini. Namun dengan adanya teknologi informasi yang dikembangkan sehingga dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba dapat konsisten, koheren, transparan, efektif dan efisien.

Tabel II-232

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 -2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Bulukumba Tahun 2012-2032 dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan.

Tabel II-233
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 -2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mencapai nilai 100 persen, ini menunjukkan bahwa pada jumlah program RKPD sesuai dengan jumlah pada RPJMD.

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD adalah jumlah program RKPD tahunan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilakukan pada tahun berkenaan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dilihat pada tabel berikut:

**Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 -2020**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	108,47	100,33	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.5.2 Keuangan

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terdiri dari Neraca per 31 desember, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas untuk tahun berakhir dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern yang memadai atas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pada kondisi awal tahun 2016 yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan sehingga BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini. untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi laporan keuangan pemerintah daerah Per 31 Desember berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada akhir periode tahun 2020 memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan adanya

penyajian laporan yang material yang tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel II-234

Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Persentase SILPA terhadap APBD

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyebutkan bahwa SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Munculnya SILPA terjadi karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan. Selain itu, terjadinya SILPA juga karena adanya kegiatan atau program pemerintah daerah yang belum terselesaikan serta adanya pembatalan proyek yang hendak dilaksanakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pada kondisi awal SILPA tahun 2016 sebesar Rp92.598.569.344,28 atau 6,53 % (silpa tahun 2016 dibagi total belanja dalam APBD 2016 dikali 100%) dari total realisasi belanja dalam APBD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Silpa tahun 2017 sebesar Rp 8.249.679.255,60 atau 0,55 % (silpa tahun 2017 dibagi total belanja dalam APBD 2017 dikali 100%) dari total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dan mengalami penurunan dari tahun lalu. Silpa tahun 2018 sebesar Rp 18.483.237.488,36 atau 1,32 % (silpa tahun 2018 dibagi total belanja dalam APBD 2018 dikali 100%) dari total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 124,00 %. Silpa tahun 2019 sebesar Rp 27.150.553.902,82 atau 1,86 % dari silpa tahun 2019 dibagi total belanja dalam APBD 2019 dikali 100%) total realisasi belanja tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 46,89 % dan silpa tahun 2020 sebesar Rp. 54.762.010.490,96 atau 3,83% dari (silpa tahun 2020 dibagi total belanja dalam APBD 2020 dikali 100%) . Adapun rincian silpa terdiri atas kas di kasda, kas dibendaharan penerima, kas dibendahara pengeluaran , kas di BLUD, kas dibendahara JKN dan kas dana bos.

Tabel II-235

Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase SILPA terhadap APBD	%	6,53	0,55	1,32	1,86	3,83

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0 persen artinya Persentase program/kegiatan yang masuk dalam APBD terlaksana 100 persen atau semua kegiatan dalam APBD terlaksana.

4. Persentase belanja pendidikan (20%)

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20% dari APBD dan APBN. Pada tahun Tahun 2016 sebesar **Rp.1.418.879.167.317,96** sedangkan Urusan

Pendidikan pada TA 2016 dianggarkan belanja sebesar Rp585.602.345.596,47 dan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp462.311.585.867,00 atau 32,58 %. dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp.1.490.352.730.162** sedangkan untuk urusan pendidikan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 497.728.820.784,71 realisasi sebesar Rp 441.844.055.235 atau 29,65%, dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp.1.402.274.876.733,31** sedangkan untuk urusan pendidikan tahun 2018 dianggarkan belanja sebesar Rp 470.190.140.479,04 realiasi sebesar Rp 458.440.296.950 atau 32,69 % dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100),realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp.1.456.915.385.877,28** sedangkan untuk urusan pendidikan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 458.214.716.554,44 realisasi sebesar Rp444.935.152.215,85 atau 30,54% dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100), dan untuk dikondisi akhir priode realisasi tahun 2020 dalam APBD sebesar **Rp.1.428.511.722.922,59** sedangkan urusan pendidikan tahun 2020 dianggarkan belanja dalam APBD sebesar Rp462.570.740.898 realisasi sebesar Rp457.168.426.752 atau 32.00%. dari (total realisasi belanja pendidikan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100).

Tabel II-236
Persentase belanja pendidikan (20%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	32,58	29,65	32,69	30,54	32,00

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

5. Persentase belanja kesehatan (10%)

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besaran anggaran pemerintah Daerah dialokasikan minimal 10% dari total anggaran APBD diluar gaji. Pada tahun APBD Tahun 2016 sebesar **Rp 1.418.879.167.317,96** sedangkan belanja pada Urusan Kesehatan pada TA 2016 dianggarkan sebesar 278.170.563.350,40 dan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp251.548.435.393 atau 17,73 %. dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp1.490.352.730.162** sedangkan belanja untuk urusan Kesehatan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 283.331.619.230 realisasi sebesar Rp260.436.327.893 atau 17,47%, dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp 1.402.274.876.733,31** sedangkan belanja pada urusan Kesehatan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp262.574.862.184,21 realiasi sebesar Rp246.657.141.350,75 atau 17,59 % dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100),realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp1.456.915.385.877,28** sedangkan belanja pada urusan Kesehatan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 277.653.563.465,92 realisasi sebesar Rp281.341.194.863,38 atau 19,31% dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100), dan untuk dikondisi akhir priode realisasi tahun 2020 dalam APBD sebesar **Rp1.428.511.722.922,59** sedangkan belanja pada urusan Kesehatan tahun 2020 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp326.212.379.968 realisasi sebesar Rp 269.164.875.500,02 atau 18,84%. dari (total realisasi belanja kesehatan dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100).

Tabel II-237
Persentase belanja kesehatan (10%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020

Indikator	Satuan	Tahun

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	17,73	17,47	17,59	19,31	18,84

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

6. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak Langsung

Kondisi awal APBD Tahun 2016 sebesar **Rp1.418.879.167.317,96** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp932.448.247.151,68 dan realisasi sebesar Rp801.808.893.142 atau 56,51 % dari (total realisasi belanja tidak langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 735.284.227.104,50 realisasi sebesar Rp617.070.274.175,96 atau 43,49% dari (total realisasi belanja langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100 sehingga berbanding 0,77 : 1), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp1.490.352.730.162** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp774.559.295.403,71 dan realisas sebesar Rp719.457.889.006 atau 48,27% dari (total realisasi belanja tidak langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp836.521.229.518 realisasi sebesar Rp770.894.841.156 atau 51,73% dari (total realisasi belanja langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100 sehingga berbanding 1,07 : 1), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp1.402.274.876.733,31** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp741.251.538.775,27 dan realisasi sebesar Rp727.652.665.654atau 51,89% dari (total realisasi belanja tidak langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp737.495.021.216,21 realisasi sebesar Rp674.622.211.079,31 atau 48,11% dari (total realisasi belanja langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100 sehingga berbanding 0,93 : 1), Realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp1.456.915.385.877,28** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp827.102.191.004,44dan realisasi sebesar Rp797.178.268.965 atau 54,72% dari (total realisasi belanja tidak langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp700.491.070.832,92 realisasi sebesar Rp659.737.116.912,28 atau 45,28% dari (total realisasi belanja langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100 sehingga berbanding 0,83 : 1), dan untuk dikondisi akhir priode realisasi tahun 2020 dalam APBD sebesar **Rp1.428.511.722.922,59** sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan belanja sebesar Rp844.063.640.828,42 dan realisasi sebesar Rp816.837.296.463 atau 57,18 % dari (total realisasi belanja tidak langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2020 dikali 100) sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp716.897.425.497 realisasi sebesar Rp611.674.426.459,59 atau 42,82% dari (total realisasi belanja langsung dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2020 dikali 100 sehingga berbanding 0,75 : 1).

Tabel II-238
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak Langsung
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak Langsung	%	0,77:1	1,07:1	0,93:1	0,83:1	0,75:1

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

7. Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)

Otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), mengakibatkan pemda memiliki kebebasan untuk

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya adalah pemda diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 3 Tahun 2004). Pengertian mengenai keuangan daerah telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 3 Tahun 2006) sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai Tulisan Hukum – UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 2 suatu rencana keuangan tahunan pemda. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.¹ Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu: 1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA); 2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD); 4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD; 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD; 6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.

- Perda APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan nomor 13 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015
- Perda APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Nomor 15 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016
- Perda APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Nomor 6 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017
- Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 27 Desember 2018
- Perda APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

Tabel II-239
Penetapan APBD (tepat waktu/tidak) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

8. Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa pemerintah kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kondisi awal APBD Tahun 2016 sebesar **Rp1.418.879.167.317,96** sedangkan belanja bagi hasil

kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar Rp5.420.786.539 dan realisasi sebesar Rp3.029.513.328 atau 0,21% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2016 dikali 100), Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar **Rp1.490.352.730.162** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar Rp5.640.702.200 dan realisasi sebesar Rp3.199.133.941 atau 0,21% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2017 dikali 100), realisasi belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp 1.402.274.876.733,31** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar Rp3.589.440.542 dan realisasi sebesar Rp1.582.675.368 atau 0,11% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2018 dikali 100),realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar **Rp1.456.915.385.877,28** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar Rp6.223.178.546 dan realisasi sebesar Rp4.699.557.898 atau 0,32% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2019 dikali 100), dan untuk dikondisi akhir priode Tahun 2020 Realisasi dalam APBD sebesar **Rp1.428.511.722.922,59** sedangkan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dianggarkan belanja sebesar Rp8.059.007.085 dan realisasi sebesar Rp3.257.853.281 atau 0,23% dari (total realisasi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dibagi total realisasi belanja dalam APBD tahun 2020 dikali 100),

Tabel II-240
Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016– 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa		0,21	0,21	0,11	0,32	0,23

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

9. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap pendapatan adalah kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Keberhasilan dalam menjalankan perekonomian disuatu daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu unsur dari Pendapatan Daerah adalah pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan Kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah Daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiaya pelayanan kepada masyarakat daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah antara periode tahun 2016-2017 Persentase PAD sebesar 14.04 ini disebabkan karena meningkatnya sumber-sumber pendapatan yang dapat dikelola, meningkatnya tingkat hunian hotel dan meningkatnya penerimaan Pajak bumi dan bangunan. Periode tahun 2017-2018 mengalami penurunan yang hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 9.65 persen dikarenakan turunnya penerimaan BLUD, adanya salah satu potensi pajak yakni pajak Galian C yang tidak dapat dipungut lagi di Daerah, penerimaan Pajak bumi dan bangunan yang mengalami penurunan karena adanya beberapa obyek pajak yang dobel dan tidak diketahui keberadaannya serta retribusi pelayanan parkir karena tidak dipungutnya parkir pada pasar-pasar kecamatan. Periode 2018-2019 kembali mengalami kenaikan yang dapat memberikan kontribusi sebesar

11.63%. Pada Tahun ini semua kelompok pajak, retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan penerimaan dari tahun pada tahun 2018. Ini disebabkan karena telah digunakannya alat transaksi pajak (M-Pos) pada beberapa hotel, restoran dan rumah makan walaupun tidak semua pelaku usaha dapat dipasang. Sektor pariwisata juga mengalami kenaikan retribusi tempat rekreasi karena meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri. Pada tahun 2019-2020 kembali mengalami Penurunan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 11.39 persen. Ini karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada maret 2020 sampai sekarang. Tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan karena adanya aturan pemerintah pembatasan skala besar dimana semua orang dilarang bepergian dan berkerumum yang berdampak pada penutupan beberapa tempat rekreasi yang mengakibatkan menurunnya tingkat hunian hotel yang berdampak pula pada penerimaan para pengusaha restoran dan rumah makan sehingga tidak mampu membayar pajak sesuai yang ditetapkan. Pada tahun 2020 capaian PAD terhadap pendapatan mengalami penurunan menjadi 11,39%. Adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah tentunya berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Daerah. Karena PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi Daerah, maka Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD

Tabel II-241
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	9,34	14,04	9,65	11,63	11,39

Sumber: Bapenda Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.5.3 Kepegawaian

Keberhasilan kinerja pelayanan pada urusan kepegawaian serta diklat dapat dilihat pada indikator yaitu persentase peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan persentase jabatan struktural yang terisi berserta indikator pendukung lainnya. Berikut adalah perkembangan indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

1. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 sebanyak 40 jabatan yang terdiri atas sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 3 (tiga) Staf Ahli Bupati Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Kasatpol PP dan Damkar, 6 (enam) Kepala Badan, dan 24 (Dua Puluh Empat) Kepala Dinas. Untuk Pengangkatan jabatan pimpinan tinggi tersebut dilakukan melalui proses seleksi terbuka. Dalam Pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama yang dilakukan belum memenuhi empat elemen sistem MERIT yang terdiri dari Transparansi, Netralitas, Kemampuan Individu dan non Diskriminasi dengan menyeluruh. Namun dalam aspek transparansi terdapat salah satu alat ukur yang sudah terpenuhi oleh seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan disetiap Instansi yaitu menerbitkan Informasi tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan dalam aspek non diskriminasi terdapat alat ukur yang sudah terpenuhi dalam seleksi jabatan tinggi pratama yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama dan kemampuan individu melalui tes cat dan wawancara oleh panitia seleksi.

Tabel II-242
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	N/A	37	40	40	40

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan pelaksana sebanyak 2.297 jabatan administrasi pada tahun 2020. Setiap jabatan ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dimana diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, namun kondisi sekarang standar kompetensi jabatan administrasi masih dalam tahap penyusunan.

Tabel II-243
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	N/A	2.452	2.613	2.425	2.297

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.5.4 Pendidikan Dan Pelatihan

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih dari tiga bulan dan pemenuhan 20 jam pelajaran yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 70 yang ditindak lanjuti dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS atas hak PNS pada Pasal 203 ayat A tentang Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran dalam 1 tahun. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan pejabat struktural (PKA,PKP,PKN) dan Juga pelatihan Dasar CPNS/Pelatihan Prajabatan CPNS yang dianggarkan oleh BKPSDM/difasilitasi oleh BKPSDM Kab Bulukumba. Pelatihan Fungsional yang berhubungan dengan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan tidak menjadi bagian dari kegiatan BKPSDM. Pada tahun 2016 – 2020 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan sebanyak 3 bulan.

Tabel II-244
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	Bulan	3	3	3	3	3

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Indikator capain RPJMD Tahun 2016 – 2020 sebelumnya masih menggunakan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan menggunakan analisis data Jumlah ASN bukan Presentase .Sehingga untuk mengukur target capaian Tahun 2016-2020 dengan menggunakan Permendagri 86 Tahun 2017 dengan menggunakan analisis data Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal. Pada Tahun 2017 capaian realisasi menurun sebesar 116,13 % dan Capaian Realisasi pada Tahun 2020 Menurun sebesar 96,77 Persen disebabkan karena Anggaran Yang terbatas.

Tabel II-245
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	N/A	116.13	38.71	100	96.77

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Indikator capain RPJMD Tahun 2016 - 2020 sebelumnya masih menggunakan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembngunan Daerah Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2019 Menurun capaian realisasi mencapai 7,71% dan pada Tahun 2020 menurun capaian realisasi mencapai 0,34%. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran.

Tabel II-246
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	N/A	15.29	50.59	55.81	47.06

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase implementasi rencana Kelitbangan

Capaian indikator urusan Penelitian dan Pengembangan dapat diketahui dari beberapa indikator. Untuk Indikator Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, pada tahun 2016, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 73.33% (Dari 15 kajian yang direncanakan terealisasi 11 kajian), pada tahun 2017, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 52.63% (Dari 19 kajian yang direncanakan terealisasi 10 kajian), pada tahun 2018, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 58.33% (Dari 24 kajian yang direncanakan terealisasi 14 kajian), pada tahun 2019, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 48.28% (Dari 29 kajian yang direncanakan terealisasi 14 kajian), dan pada tahun 2020, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 6.06% (Dari 33 kajian yang direncanakan terealisasi 2 kajian).

Berdasarkan realisasi jumlah kajian setiap tahun dari tahun 2016-2019 berfluktuasi tergantung besarnya pagu anggaran. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-247
Persentase implementasi rencana Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	73.33	52.63	58.33	48.28	6.06

Sumber : Balitbang Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Pada tahun 2016, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 26.67% (Dari 15 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 4 kajian, pada tahun 2017, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 26.32% (Dari 19

kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 4 kajian, pada tahun 2018, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 16.67% (Dari 24 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 4 kajian, pada tahun 2016, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 24.14% (Dari 29 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 7 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 7 kajian sedangkan pada tahun 2020, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 12.12% (Dari 33 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 4 kajian. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-248
Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan		26.67	26.32	16.67	24.14	12.12

Sumber : Balitbang Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Derah

Pada tahun 2016, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 60% (Dari 10 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 6 SKPD terealisasi), pada tahun 2017, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 50% (Dari 12 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 6 SKPD terealisasi). Pada tahun 2018, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 42.85% (Dari 14 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 6 SKPD terealisasi), pada tahun 2016, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 62.5% (Dari 16 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 10 SKPD terealisasi) sedangkan pada tahun 2020, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 11.11% (Dari 18 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 2 SKPD terealisasi). Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-249
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		60	50	42.85	62.5	11.11

Sumber : Balitbang Kabupaten Bulukumba, 2021

4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah:

Pada tahun 2016, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 50% (Dari target 20 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 10 kajian yang terealisasi), pada tahun 2017, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 80% (Dari target 25 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 20 kajian yang terealisasi), pada tahun 2018, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 66.67% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 20 kajian yang terealisasi), pada tahun 2019, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 83.33% (Dari target 30

kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 25 kajian yang terealisasi) sedangkan pada tahun 2020, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 33.33% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 10 kajian yang terealisasi). Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-250
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		50	80	66.67	83.33	33.33

Sumber : Balitbang Kabupaten Bulukumba, 2021

Rencana kelitbangan rata-rata baru mencapai 60% dari keseluruhan rencana yang sudah diimplementasikan. Begitupula dengan pemanfaatan hasil kelitbangan rata-rata 23%. Walaupun demikian Balitbangda Kabupaten Bulukumba sudah berusaha dengan baik untuk menerapkan inovasi-inovasi di daerah dalam bentuk kebijakan pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan.

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.6.1 Inspektorat Daerah

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator kinerja pertama untuk bidang urusan pengawasan adalah persentase tindak lanjut temuan. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dan dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020 jumlah total temuan hanya 849 dan ditindaklanjuti sebanyak 212 temuan sehingga persentase tindak lanjut temuan sebesar 24,97%.

Rendahnya penyelesaian tindak lanjut antara lain disebabkan oleh komitmen dan penerapan tata kelola tindak lanjut yang rendah. OPD sebagai auditan banyak yang tidak menjadikan tindak lanjut sebagai prioritas. Selain itu mekanisme *reward and punishment* terhadap OPD yang cepat dan yang lambat menindaklanjuti temuan belum dilakukan. Secara umum persentase tindak lanjut temuan sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel II-251
Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tindak lanjut temuan	%	79.6	73.7	61.9	54.2	59.5

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Indikator ini dihitung dengan cara jumlah ASN yang dikenai sanksi dibagi jumlah total ASN dan dikalikan dengan 100%. Dalam rentang waktu lima tahun sejak tahun 2016 – 2020, jumlah ASN yang dikenai sanksi mengalami peningkatan. Di tahun 2020 dari 6056 total ASN, sebanyak 25 orang yang dikenai sanksi atau 0,413%. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan pengendalian internal para ASN dalam pelaksanaan kegiatan di OPD sehingga mengurangi potensi pelanggaran.

Tabel II-252
Persentase pelanggaran Pegawai Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pelanggaran Pegawai	%	0.105	0.106	0.26	0.315	0.273

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Jumlah Temuan BPK

Pada tahun 2016 jumlah temuan BPK sebanyak 25 temuan, selanjutnya Tahun 2017 hingga pada Tahun 2020 terus mengalami penurunan. Di Tahun 2020 ada 9 temuan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Trend penurunan jumlah temuan BPK ini tentu saja suatu hal yang harus terus dipertahankan melalui sinergitas yang terjaga dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun trend penurunan jumlah temuan BPK sebagaimana tergambar pada Tabel berikut:

Tabel II-253
Jumlah temuan BPK Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah temuan BPK	Temuan	25	22	17	10	9

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2021

2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.3.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dimana lembaga ini bertugas membantu Kepala Daerah dalam memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Disamping itu juga sebagai wadah/sarana Dialog terkait masalah keagamaan yang terjadi. Forum Kerukunan Umat Beragama yang keanggotaannya terdiri dari unsur tokoh Agama dari beberapa agama yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-254
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	15	60	70	75	0

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba, 2021

2. Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah

Berdasarkan data terkait Persentase peningkatan penanganan konflik di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa semua konflik yang terjadi dapat tertangani. Selanjutnya dapat dilihat pada berikut.

Tabel II-255
Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba, 2021

3. Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat

Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat di kabupaten bulukumba pada tahun 2016 sampai tahun 2018 jumlah kegiatan yang dilakukan sebanyak 5 kali, pada tahun 2019 menurun menjadi 4 kali kegiatan dan pada tahun 2020 tidak ada kegiatan pendidikan politik masyarakat dikarenakan adanya Pandemi COVID-19.

Tabel II-256
Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	5	4	0

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba, 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

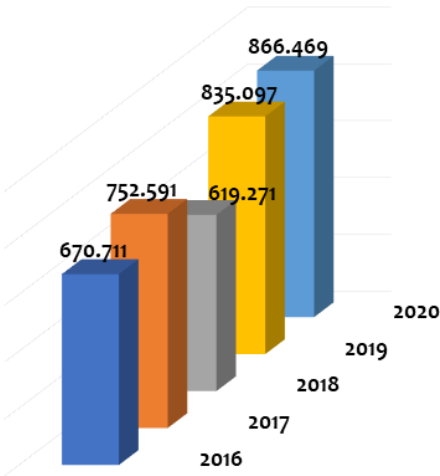
Aspek daya saing daerah terdiri dari Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur. Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya Manusia.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terus mengalami tren peningkatan di Kabupaten Bulukumba pada 2016-2020. Pada tahun 2016 mencapai 670.711, anomali terjadi di tahun 2018 dengan penurunan tingkat konsumsi hanya 619.271. Walaupun demikian tahun 2020 tingkat konsumsi masyarakat kembali meningkat sebesar 866.469. sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik II-22
Rata-rata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Per Rumah Tangga
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

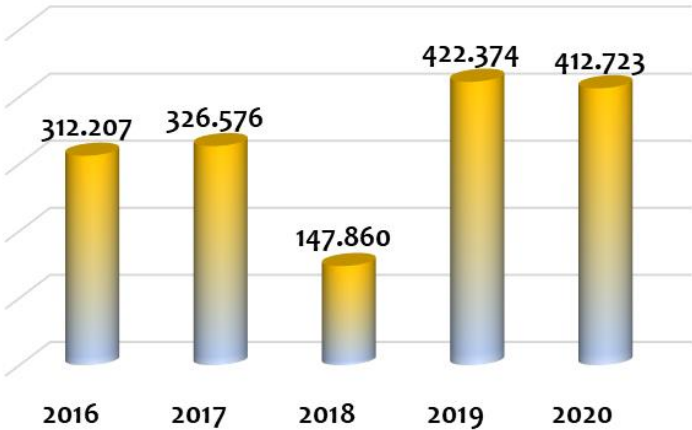


Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Konsumsi non pangan Bulukumba juga terus mengalami peningkatan kecuali di tahun 2018 hanya 147.860. Pada tahun 2020, konsumsi non pangan mencapai 412.723 dari total konsumsi rumah tangga. Apabila dirata-ratakan pada periode 2016-2020, konsumsi non pangan Bulukumba mencapai 324.348 dari total konsumsi. hal ini menunjukkan bahwa pangan semakin menjadi bukan konsumsi utama masyarakat sebagaimana gambar dibawah ini.

Grafik II-23
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Kabupaten Bulukumba 2016 - 2020



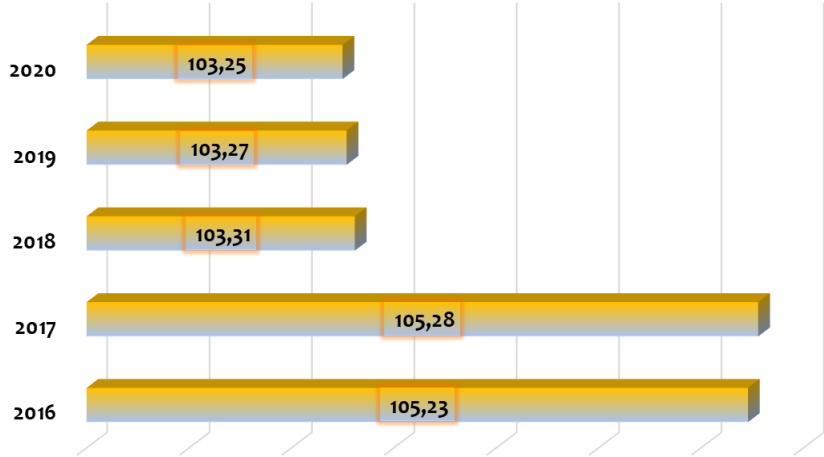
Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

3) Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan indikator ukuran tingkat kesejahteraan petani. Nilai tukar petani menggambarkan kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup dari nilai produksi yang diperoleh. Nilai tukar petani dapat diukur pada setiap subsektor pertanian. Nilai Tukar Petani menunjukkan tingkat pendapatan petani dibandingkan apa yang mereka keluarkan untuk melakukan usaha tani. Angka 100 merupakan tingkat impas antara pendapatan dan pengeluaran.

NTP Bulukumba menunjukkan tren positif walaupun mengalami penurunan sejak tahun 2017. Walaupun mengalami penurunan, NTP masih berada di atas angka 100. Penurunan NTP ini yang memungkinkan terjadinya penurunan konsumsi masyarakat, dilihat dari data NTP pada tahun 201-2020 mengalami tren fluktuasi akan tetapi pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yaitu 103,27 dan 103,25. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel II-257
Nilai Tukar Petani Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020



Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Ketaatan Terhadap RTRW

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bulukumba menargetkan sebanyak 65% ruang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan tata ruang. dan realisasinya sudah sesuai dengan target. Realisasi ini masih belum optimal menunjukkan adanya pencapaian pada tahun 2019 karena realisasi pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang masih sebesar 80%. Artinya hingga tahun 2019 baru 80% ruang yang sesuai RTRW dan sebanyak 20% belum sesuai dengan peruntukannya.

Tabel II-258
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang		N/A	N/A	65	70	80

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, 2021

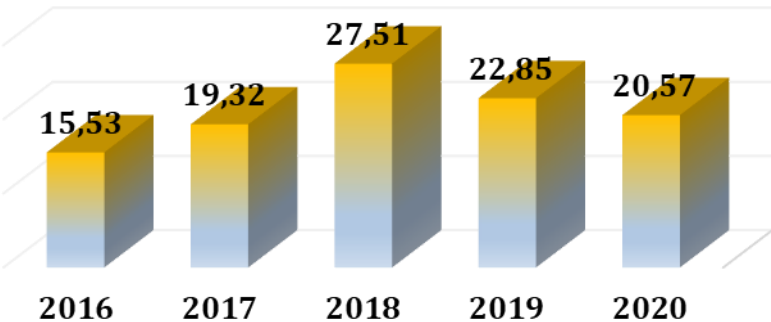
2.4.3 Iklim Berinvestasi

1) Kriminalitas

Secara umum, fungsi angka kriminalitas ini adalah untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, informasi ini juga

ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah angka kriminalitas tertangani di Kabupaten Bulukumba dari kurun waktu 2016-2020.

Grafik II-24
Angka Kriminalitas Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020



Di Kabupaten Bulukumba persentase angka kriminalitas tertangani menunjukkan tren positif dari tahun 2016-2020. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan berkurang kasus-kasus yang terjadi. Secara keseluruhan hal tersebut menunjukkan perbaikan kinerja aparat penegak hukum yang semakin baik dalam memberikan layanan penegakkan hukum.

2.4.4 Sumberdaya Manusia

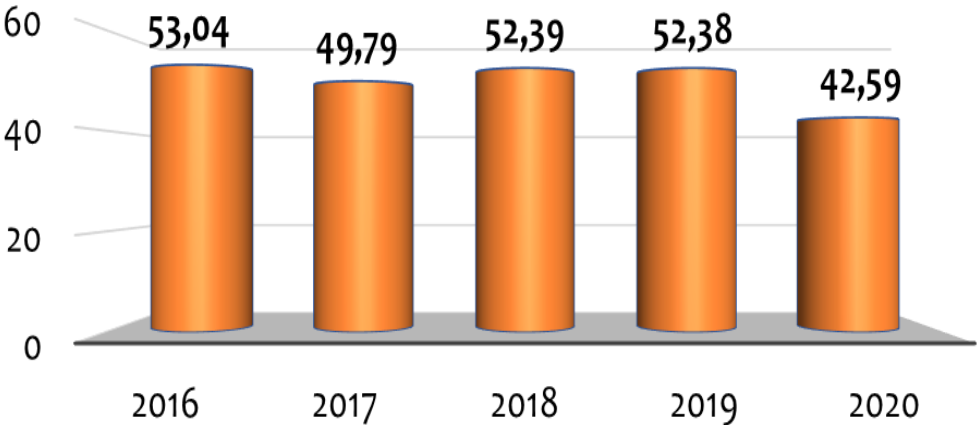
1) Rasio Ketergantungan

Semakin tingginya persentase dependency ratio/ rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka rasio ketergantungan di Bulukumba mengalami peningkatan. hal tersebut menunjukkan jumlah penduduk usia non produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan usia produktif. Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian Bulukumba agar usia produktif dapat membiayai usia non produktif

Dari Rasio Ketergantungan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 sebesar 42,59 persen, artinya setiap 100 orang yang produktif (berusia kerja) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang (yang belum produktif dan atau tidak produktif lagi).

Grafik II-25
Rasio ketergantungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari data BPS Bulukumba, 2021

2.5 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Bulukumba diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan pada RPJMD Kabupaten Bulukumba, seperti pada tabel berikut.

Tabel II-259
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019-2020

No	Uraian	Satuan	Target Nasional	Capaian SPM	
				2019	2020
1	PENDIDIKAN				
1.1	Pendidikan Dasar				
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100	93,41	95,00
1.2	Pendidikan Kesetaraan				
2	Persentase Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	100	94,56	94,00
1.3	Pendidikan anak usia dini				
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	96,27	67,00
2	KESEHATAN				
2.1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah				
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	%	100	100	73,31
2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin				
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	100	100	85,66
2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	79,00
2.4	Pelayanan kesehatan balita				
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	50,02
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	2,14
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif				
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	4,46
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut				
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	31,41
2.8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi				
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	7,88
2.9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus				
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100,00
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Uraian	Satuan	Target Nasional	Capaian SPM	
				2019	2020
13	Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	63,49
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis				
14	Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100,00
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
15	Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	40,63
3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	83,53	84,40
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic				
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	100	75,96	76,12
4	PERUMAHAN DA PEMUKIMAN				
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;				
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100	100	54,00
4.2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota				
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.	%	100	100	0
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum				
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100	71,11	100
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana				
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Uraian	Satuan	Target Nasional	Capaian SPM	
				2019	2020
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
6	SOSIAL				
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti				
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	92,00	89,80
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti				
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	90,00	0
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti				
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	92,80	41,18
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosialdasartuna sosial diluar panti	%	100	86,90	0
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota				
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100

2.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi- generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen globaldan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

- 1) Tanpa Kemiskinan;
- 2) Tanpa Kelaparan;
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- 4) Pendidikan Berkualitas;
- 5) Kesetaraan Gender;
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau;
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

- 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
- 10) Berkurangnya Kesenjangan;
- 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- 13) Penanganan Perubahan Iklim;
- 14) Ekosistem Lautan;
- 15) Ekosistem Daratan;
- 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten. Target-target SDGs ditingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 202 indikator yang menjadi kewenangan, dengan gambaran sebagai berikut:

- a. 79 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (39,11%);
- b. 73 indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (36,14%);
- c. 17 indikator yang belum dilaksanakan (8,42%);
- d. 33 indikator yang belum atau tidak ada data (16,34%).

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel II-260
Capaian Target Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	TUJUAN 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	8,06	8	8	7,86	7,1	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	70,14	70,14	77,5	82,9	82,9	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	1,28	1,79	5,19	5,29	5,37	Dinas Sosial
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	30	30	214	203	74,1	Dinas Sosial
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	2696	6229	13817	13696	13696	Dinas Sosial
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	82,87	86,7	84,83	79,38	86,4	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	96,19	96,19	96,19	96,19	96,19	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,63	64,63	64,63	64,63	64,63	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	88	89	89,40	90,20	84,40	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	74,90	75,63	89,90	90,80	36,90	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	119,00	112,90	107,91	104,81	89,43	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen	101,81	100,01	99,00	98,92	75,47	Dinas Pendidikan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	SMP/MTs/ sederajat.							
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	61,43%	62,51%	65,32%	0,00%	63,94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga	80537,0	40277,0	41176,0	42432,0	49747,0	Sekretariat Daerah Bagian ESDM
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	209	1197	0	1,18	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	10	12,82	23,07	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Orang	200	200	200	345	345	Dinas Sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Orang	200	200	200	345	345	Dinas Sosial
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)							Dinas Sosial
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	150.000.000	500.000.000			500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Persen	22,39	21,46	23,82	23,4	23,4	Dinas Sosial
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	28,53	27,23	25,29	25,46	25,46	Dinas Sosial
2	TUJUAN 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	1,03	2,62	3,79	2,00	10,90	Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	5,61	5,61	1,10	1,05	8,27	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen	0,98	0,58	2,25	3,06	3,06	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	18,2	15,30	25,3	17,4	2,93	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	34,24	28,45	21,17	22,56	16,46	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	62,14	87,6	64,3		74	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	85,70	85,00	80,90	89,00	74,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).							Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	TUJUAN 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka	7	4	7	3	4	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	82,87	86,7	75,5	79,38	86,4	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	82,87	86,7	84,83	79,38	85,7	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	4	9	5	10,99	7,98	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	4	6	6	8,01	6,65	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	4	9	9	10,05	7,53	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai	Persen	92,26	97,72	97,72	97,72	97,72	Dinas Kesehatan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	10	16	16	0,016	0,009	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Orang	118,15	122,54	122,54	122,54	122,54	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Orang	0,05	0	0,11	0,11	0,01	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	142	73	138	138	138	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen	1,48	1,48	1,58	0,24	0,24	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	8,37	89,04	86,1	75,3	7,46	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen	2,1	8,5	11,2	9,8	0,15	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		0	0	0	2		Dinas Kesehatan
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.							Dinas Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.							Dinas Kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.							Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	65	64,63	64,63	75,28	74,97	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Persen	9,24	11,55	48,66	33,37	18,51	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).							Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	TFR	6566	6224	6224	2,32	2,318	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Persen	81,67	77,81	68,62	-	68,62	Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persen	14,42	16,67	16,58	15,68	11,74	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Penduduk	287930	287930	324287	348767	348767	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	70,14	70,14	77,5	82,9	71,83	Dinas Kesehatan
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.		0	0	28	0		Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	61,48	49,98	44,93	44,93	44,93	Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	926	885	885	0,001	0,368	Dinas Kesehatan
4	TUJUAN 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Pendidikan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	70,01	75,90	80,95	96,75	90,29	Dinas Pendidikan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal	Persen	48	52,97	57,17	58,90	71,43	Dinas Pendidikan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	B.							
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	130,10	125,87	110,78	103,81	112,49	Dinas Pendidikan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	132,90	127,78	110,90	102,91	90,74	Dinas Pendidikan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	12	12	12	12	7	Dinas Pendidikan
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	94,11	95,55	96,75	97,34	31,93	Dinas Pendidikan
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen	30,33	32,00	34,33	16	16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen	119,00	112,90	107,91	104,81	104,81	Dinas Pendidikan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	92,50	92,51	92,56	92,90	99,53	Dinas Pendidikan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persen	92,50	92,51	92,56	92,90	92,90	Dinas Pendidikan
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Pendidikan
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	65,00	65,00	65,00	65,00	46,80	Dinas Pendidikan
5	TUJUAN 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	3	4	4	4	4	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
								Perlindungan Anak
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	1	33	38	31	21,74	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	3	92	85	71	71	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	11	11	13	22	22	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	30,00	50,00	65,00	56,00	56,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	1	3	3	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.							Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).							Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di	Persen	17,50	17,50	17,50	20,00	20,00	Dinas Pengendalian

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.							Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	20,0	20,0	18,4	18,4	18,4	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Persen						Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	14,42	16,67	16,58	15,68	11,74	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	3,8	3,96	4,2	4,28	4,25	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persen	86,87	86,87	91,83	92,46	92,46	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
6	TUJUAN 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	88	89	89,40	90,20	88,90	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.							Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	88	89	89,40	90,20	88,90	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.							Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	74,90	75,63	89,90	90,80	36,90	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	136	136	136	136	136	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	24	41	52,20	64,71	136	Dinas Kesehatan
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Desa	0,4	0,4	0,79	1,13	1,13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	%	25	50	75	19	19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.							Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	50	50	60	65	65	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sungai	3	10	15	18	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Ada	Ada	Ada	Ada		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	TUJUAN 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.							Sekda, Bagian ESDM
7.3.1*	Intensitas energi primer.							Sekda, Bagian ESDM
8	TUJUAN 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	6,77	6,89	5,05	5,49	0,43	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta	26,06	29,03	31,55	33,8	34,43	Badan Perencanaan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
								Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Persen	6,90	7,05	7,9	8,1	8,1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen	50,35	50,85	51,73	51,95	0,22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persen	44,17	44,35	44,47	44,75	44,75	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	33,7	34,3	55,12	35,26	35,26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persen	5,25	8,25	7,74	10,68	10,68	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 86.000	Rp 90.000	Rp 34.143	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	3,65	3,73	4,12	4,35	0,03	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Persen	31,65	31,87	31,82	32,08	0,10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen	37,04	37,95	37,33	38,09	38,09	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.							Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	3125	3036	3555	2260	293	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	175455	200734	262741	278330	278330	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp						Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.							Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	ATM	1	0	3	1	1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).							Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Persen	21,05	21,05	21,05	33,61	33,61	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	TUJUAN 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi							
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dermaga	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	6,85	6,61	7,35	7,47	7,47	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	5,5	1,002	0,74	1,2	5,4	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.							Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.							Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.							Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	9,00	9,00	25,00	50,00	50,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	86,87	86,87	91,83	92,46	94,46	Dinas Komunikasi, Informatika dan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
								Persandian
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	62,00	40,00	42,00	43,00	43,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
10	TUJUAN 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara							
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien	0,370	0,320	0,354	0,377	0,371	Dinas Sosial
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	8,15	8,06	7,48	7,26	7,1	Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa		15	5	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	50	50	15	11	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	94	94	104	109	109	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	8,06	7,97	8,06	7,86	7,86	Dinas Sosial
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.							Dinas Sosial
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							Sekda, Bagian Hukum dan HAM
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	1,276	1,787	5,194	5,289	5,369	Dinas Sosial
11	TUJUAN 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	88,85	91,0000	92,0900	92,3300	92,3500	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan	Orang	209	1197		1,18	3	Badan Penanggulangan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	terkena dampak bencana per 100.000 orang.							Bencana Daerah
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	Rp 150.000.000	Rp 500.000.000			Rp 500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	99,94	99,25	90,22	92,45	73,56	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	TUJUAN 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	2,557	2,557	2,557	2,557	25,13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	60,33	60,33	4,8	3,747	62,769	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	TUJUAN 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	209	1197		1,18	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	TUJUAN 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Ton	50072	50004,6	53455,6	52651,6	53.860,10	Dinas Perikanan
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	496	1597	838	867	867	Dinas Perikanan
15	TUJUAN 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.			10	5			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi			0,0035	0,002			Dinas Lingkungan Hidup

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	terhadap luas lahan keseluruhan.							dan Kehutanan
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	TUJUAN 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		6	7	4	2	7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	RT	1	8	3	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Orang	3	125	148	128	128	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Orang	1	39	29	517	517	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).							Inspektorat
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen	84,16	91,79	94,29	90,3	91,51	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WDP (50%)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas	Persen	50	50	60,02	61,14	61,14	Inspektorat

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).							
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	25,66	15,22	16,79	90,00	97,16	Sekda, Bagian Pembangunan
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	66,46	67,39	54,11	55,15	55,71	Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).				0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	17,50	17,50	17,50	20,00	20,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	20,0	20,0	18,4	18,4	15,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		23,20	65,50	73,40	73,40	75,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	61,43	62,51	65,32	65,32	78,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	ASN	1,25	1,25	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam							Setda, Bagian Hukum dan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							HAM
17	TUJUAN 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rp	128.236.254.047	130.060.914.218	130.060.914.218	130.060.914.218	130.060.914.218	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	11,81	11,98	0,38	0,37	0,36	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	0,917	0,958	0,958	0,958	0,958	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.							Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	9,00	9,00	25,00	50,00	50,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	40,00	40,00	42,00	43,00	43,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen	100	100	80	97,73	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	100	100	80	66,67	66,67	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Capaian TPB/SDGs					Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		2	2	80	6	6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Orang	6000	6000	4000	7996	7996	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.7 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 diukur melalui indikator kinerja menunjukkan bahwa dari 265 indikator yang diukur, terdapat 112 indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2020, 44 indikator yang sesuai target 2020 dan 109 indikator yang belum mencapai target 2020. Pada aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi terdapat 6 Indikator yang diukur. Terdapat 2 Indikator yang belum tercapai dan 4 Indikator melampaui. Sehingga permasalahan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masih akan menjadi titik berat pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026. Pada aspek Kesejahteraan sosial terdapat 8 Indikator yang diukur. Terdapat 7 indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan dan 1 indikator yang belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target adalah Angka Harapan Lama Sekolah. Disamping pengukuran kinerja dari kedua aspek tersebut di atas yang menggambarkan kinerja impact Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, pengukuran capaian aspek pelayanan umum yang menggambarkan kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Bulukumba tahun 2021-2026 dengan berbagai indikator dan capaiannya sebagaimana disajikan dalam Tabel II-261.

Tabel II-261

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
1				ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	1			Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	1	1		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,80	6,86	5,05	5,49	0,43	8,5	Belum Tercapai
2	1	2		PDRB ADHK	Rp, Miliar	7.232,84	7.730,91	8.121,33	8.567,46	8.604,20	8.520,76	Melampaui
3	1	3		Laju inflasi	%	1,45	4,66	3,85	2,25	2,30	2,66	Belum Tercapai
4	1	4		PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	26,06	29,03	31,55	33,8	34,43	32,9	Melampaui
5	1	5		Indeks Gini	%	0,371	0,324	0,354	0,377	0,371	0,365	Melampaui
7	1	6		Persentase Penduduk miskin	%	8,06	8,00	7,48	7,26	7,10	6,8	Melampaui
1	2			Kesejahteraan sosial								
1	2	1		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	66,46	67,08	67,7	68,28	68,99	66,68	Melampaui
2	2	2		Angka Usia Harapan Hidup	angka	66,84	66,96	67,27	67,69	67,92	66,81	Melampaui
3	2	3		Angka Harapan Lama Sekolah	angka	12,64	12,65	12,79	12,91	13,17	14,00	Belum Tercapai
4	2	4		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	6,86	7,16	7,34	7,43	7,67	7,63	Melampaui
5	2	5		Pengeluaran Per Kapita Riil	Rp	10.040	10.217	10.331	10.480	10.513	10.429	Melampaui
6	2	6		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		65	60,56	63	67	68,26	67,37	Melampaui
7	2	7		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,00	3,37	3,62	3,06	3,42	3,42	Melampaui
8	2	8		Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,010	0,021	0,019	0,030	0,015	0,023	Melampaui
1	3			Seni Budaya Dan Olahraga								
1	3	1		Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kali	2	3	3	5	1	4,0	Belum Tercapai
2	3	2		Cakupan Pembinaan Olahraga	%	25,00	25,00	50,00	25,00	8,33	22,43	Belum Tercapai
1				ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
1	1	1	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
				SD	%	108,99	108,61	113,10	113,10	112,49	100,0	Melampaui
				SMP	%	84,19	77,99	87,9	87,75	90,74	100,0	Belum Tercapai

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
				SMA	%	84,59	88,12	60,04	91,48	89,22	100,0	Belum Tercapai
1	1	1	2	Angka Partisipasi Murni (APM)								
				SD	%	98,01	99,16	98,75	98,48	98,32	98,00	Melampaui
				SMP	%	78,3	81,85	82,21	82,36	83,37	98,22	Belum Tercapai
				SMA	%	64,5	66,66	65,34	65,88	65,78	98,25	Belum Tercapai
1	1	1	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)								
				7-12 Tahun	%	98,72	99,16	98,93	98,77	98,80	100,5	Belum Tercapai
				14-15 Tahun	%	92,80	91,98	92,36	93,14	91,91	100,3	Belum Tercapai
				16-18 Tahun	%	70,86	74,18	74,43	74,04	74,37	98,6	Belum Tercapai
1	1	1	4	Angka Putus Sekolah								
				SD	%	0,08	0,07	0,28	0,5	0,03	0,04	Belum Tercapai
				SMP	%	0,2	0,1	0,66	0,9	0,11	0,10	Melampaui
				SMA	%	0,2	0,17	0,15	0,15	0,16	0,05	Melampaui
1	1	1	5	Angka Kelulusan								
				SD	%	99	100	100	100	100	100,0	Sesuai
				SMP	%	99	100	100	100	100	100,0	Sesuai
				SMA	%	99	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	1	1	6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	98,88	98,00	85,40	98,48	92,08	96,57	Belum Tercapai
1	1	1	7	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1:26	1:28	1:14	1:14	1:13	1:30	Belum Tercapai
1	1	1	8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:25	1:27	1:12	1:12	1:9	1:30	Melampaui
1	1	1	9	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	91,8	91,8	92,5	92,9	90,3	93,0	Belum Tercapai
1	1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
1	1	2	1	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		9,00	7,74	10,91	10,05	7,53	6,32	Melampaui
1	1	2	2	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		9,48	8,52	14,06	10,99	7,98	10,02	Melampaui
1	1	2	3	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		6,43	6,19	11,51	8,01	6,65	3,47	Melampaui
1	1	2	4	Angka Kematian Ibu		64,27	92,91	110,64	47,10	59,08	55,60	Melampaui
1	1	2	5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		14,9	8,89	13,25	19,44	23,54	20,51	Melampaui
1	1	2	6	Rasio Puskesmas Dan Pustu		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	Sesuai
1	1	2	7	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,00	Sesuai

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
1	1	2	8	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Sesuai
1	1	2	9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		0,073	0,099	0,096	0,095	0,078	0,09	Belum Tercapai
1	1	2	10	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		0,189	0,188	0,198	0,228	0,209	0,200	Melampaui
1	1	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	82,87	86,67	85,45	79,51	86,35	86,12	Melampaui
1	1	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	33,1	94,4	Belum Tercapai
1	1	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	1	2	14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	N/A	52	58,4	67,4	39,4	44,48	Belum Tercapai
1	1	2	15	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 1000 Penduduk	117,37	153,23	152,27	154,78	79,07	40,0	Melampaui
1	1	2	16	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	N/A	6	5,7	7,4	3,2	3,3	Melampaui
1	1	2	17	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	1	2	18	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	5,32	9,38	10,28	5,47	1,19	3,0	Melampaui
1	1	2	19	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0,007	0,005	0,010	0,016	0,009	0,0	Melampaui
1	1	2	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	4,97	3,84	4,07	5,06	5,09	9,7	Belum Tercapai
1	1	2	21	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	76,05	82,74	77,94	72,43	73,30	93,0	Belum Tercapai
1	1	2	22	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	76,05	82,74	77,94	63,63	45,25	50,4	Belum Tercapai
1	1	2	23	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	38,75	68,21	93,75	80,56	52,37	50,2	Melampaui
1	1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
1	1	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi	%	0,751	0,537	0,582	0,701	0,520	0,1	Melampaui

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
				Baik								
1	1	3	2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0032	0,0	Melampaui
1	1	3	3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	70,87	76,83	82,84	91,77	95,49	92,77	Melampaui
1	1	3	4	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	59,79	62,01	72,51	75,36	78,97	77,17	Melampaui
1	1	3	5	Rasio Jaringan Irigasi		1,09	0,16	0,86	0,6	0,18	0,16	Melampaui
1	1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman								
1	1	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,224	0,246	0,246	0,245	0,236	0,215	Melampaui
1	1	4	2	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	53,12	58,21	60,2	63,4	65	63,88	Melampaui
1	1	4	3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	4,85	5,00	7,25	9,50	11,39	0,08	Melampaui
1	1	4	4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	88,42	91,65	92,1	92,33	92,35	91,06	Melampaui
1	1	4	5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	59,1	75,63	77,18	76,92	76,12	80,0	Belum Tercapai
1	1	4	6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,3	82,19	87,77	83,52	84,4	100,0	Belum Tercapai
1	1	4	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,05	0,15	0,13	0,55	0,09	0,06	Melampaui
1	1	4	8	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		41,54	39,58	5,58	2,15	2,97	26,16	Belum Tercapai
1	1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	1	5	1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		0,39	0,39	0,38	0,32	0,32	0,33	Belum Tercapai
1	1	5	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		10,53	20,55	82,89	71,11	100	82,09	Melampaui
1	1	5	3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		0,00266	0,00265	0,00311	0,00285	0,00284	0,00256	Melampaui
1	1	5	4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		75,56	62,32	83,33	98,9	100	90,0	Melampaui
1	1	5	5	Persentase Penegakan Perda	%	29,79	42,75	45,85	34,12	100	79,4	Melampaui

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
1	1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
1	1	6	1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	18	18	18	13	13	22,0	Belum Tercapai
1	1	6	2	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	94,90	95,00	100,00	100,00	100,00	100,0	Sesuai
1	1	6	3	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	97,10	97,10	100,00	92,00	98,60	8,2	Melampaui
1	1	6	4	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	99,00	98,90	99,30	94,20	73,60	72,04	Melampaui
1	1	6	5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	80,00	99,90	99,30	99,40	74,00	100,0	Belum Tercapai
1	1	6	6	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	99,00	99,90	93,50	99,40	74,10	85,77	Belum Tercapai
1	2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
1	2	1	1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun		4,98	4,98	4,98	19,09	0,93	2,00	Belum Tercapai
1	2	1	2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)		1	0,66	0,66	0,62	0,38	0,31	Melampaui
1	2	1	3	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek		0,73	0,29	0,3	0,94	1	3,47	Belum Tercapai
1	2	1	4	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan		N/A	N/A	0,25	1,38	1	1,80	Belum Tercapai
1	2	1	5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		0,29	0,31	0,64	0,6	0,08	0,29	Belum Tercapai
1	2	1	6	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan		1	1	0,28	0,83	0,02	0,29	Belum Tercapai
1	2	1	7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		0,49	0,46	0,68	0,8	0,52	0,73	Belum Tercapai
1	2	1	8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	514,72	476,62	439,56	739,36	758,83	696,42	Melampaui
1	2	1	9	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		N/A	47,7	30,89	55,42	49,68	45,64	Melampaui
1	2	1	10	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan		0,8	0,84	1	0,75	1	1,00	Melampaui

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
				Pelatihan Kewirausahaan								
1	2	1	11	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,85	0,64	0,74	0,53	0,53	0,57	Belum Tercapai
1	2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
1	2	2	1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,5	5,8	5,2	4,3	4,00	4,5	Belum Tercapai
1	2	2	2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	17,50	17,50	17,50	20	20,00	20,0	Sesuai
1	2	2	3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	81,98	63,18	69,14	83,58	92,09	82,1	Melampaui
1	2	2	4	Rasio KDRT		0,001	0,033	0,027	0,027	0,003	0,008	Melampaui
1	2	2	5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	96,81	95,92	96,39	96,38	97,07	96,8	Melampaui
1	2	2	6	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	2	2	7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit		33,33	9,52	10,81	9,38	21,74	58,9	Belum Tercapai
1	2	2	8	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		33,33	96,83	97,3	97,66	100	93,8	Melampaui
1	2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								
1	2	3	1	Ketersediaan Pangan Utama		326,58	306,75	381,58	393,1	389,13	432	Belum Tercapai
1	2	3	2	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)		17.543,60	17.657,82	6.904,22	8.424,75	7.423,66	16.406	Belum Tercapai
1	2	3	3	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)		1.023,25	1.184,47	228,54	226,01	240,77	697	Belum Tercapai
1	2	3	4	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan		0	45,45	45,45	90	36	68,3	Belum Tercapai

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
				(%)								
1	2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan								
1	2	4	1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	20,92	21,27	22,26	23,47	24,12	20,05	Melampaui
1	2	4	2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	98,3	100	40	66,67	50	50,00	Sesuai
1	2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
1	2	5	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	N/A	5,34	40,54	72,58	70,35	63,12	Melampaui
1	2	5	2	Indeks Kualitas Air	Angka	N/A	1,19	2,60	81,90	78,23	65,30	Melampaui
1	2	5	3	Indeks Kualitas Udara	Angka	N/A	0,00	85,46	90,88	88,30	76,4	Melampaui
1	2	5	4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	N/A	22,36	22,63	22,72	23,64	21,6	Melampaui
1	2	5	5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	N/A	72,54	72,54	82,35	68,62	82,67	Belum Tercapai
1	2	5	6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	N/A	0	1	1	1	0,8	Melampaui
1	2	5	7	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	N/A	1	1	1	1	0,9	Melampaui
1	2	5	8	Penetapan Hak MHA	Kelompok	N/A	1	1	1	1	0,9	Melampaui
1	2	5	9	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	N/A	100	100	100	100	33,9	Melampaui
1	2	5	10	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	N/A	100	100	100	100	33,9	Melampaui
1	2	5	11	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	N/A	1	1	1	1	0,9	Melampaui
1	2	5	12	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	N/A	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Belum Tercapai
1	2	5	13	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah	sekolah	N/A	100	100	100	100	91,7	Melampaui

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
				Kabupaten/Kota,								
1	2	5	14	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	N/A	4,18	17,83	20,75	20,64	19,99	Melampaui
1	2	5	15	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	N/A	9,41	46,96	80,07	73,56	100,00	Belum Tercapai
1	2	5	16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	N/A	82,2	77,03	0	0	27,14	Belum Tercapai
1	2	5	17	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	N/A	0	22,07	36,75	25,13	32,09	Belum Tercapai
1	2	5	18	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	N/A	1	1	1	1	1,22	Belum Tercapai
1	2	5	19	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	N/A	22,36	22,63	22,72	23,64	28,00	Belum Tercapai
1	2	5	20	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	N/A	25	25	25	25	30,38	Belum Tercapai
1	2	5	21	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	N/A	1	0	0	0	0,17	Belum Tercapai
1	2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
1	2	6	1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,		0,84	0,87	1	1	1	1,0	Melampaui
1	2	6	2	Rasio bayi berakta kelahiran,		0,76	0,63	0,67	0,71	0,40	0,38	Melampaui
1	2	6	3	Rasio pasangan berakta nikah,		0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,03	Melampaui
1	2	6	4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	2	6	5	Cakupan penerbitan KTP-el		88,12	95,74	100	100	99,99	100,00	Belum Tercapai
1	2	6	6	Cakupan penerbitan akte kelahiran		75,88	63,32	66,83	83,73	49,74	95,00	Belum Tercapai
1	2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								
1	2	7	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik		64,2	66,9	67,8	91,74	100	90,9	Melampaui
1	2	7	2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk		146	146	146	146	146	146,0	Sesuai
1	2	7	3	Persentase Lsm Aktif	%	100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	2	7	4	Persentase Pkk Aktif	%	100	100	100	100	100	100,0	Sesuai

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	7	5	Persentase Posyandu Aktif	%	99,63	100	100	100	100	100,0	Melampaui
1	2	7	6	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	2	7	7	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		93	93	93	93	93	93,0	Sesuai
1	2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
1	2	8	1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	0,66	0,60	0,63	0,54	0,57	0,6	Melampaui
1	2	8	2	Total Fertility Rate (Tfr)	%	1,926	2,320	2,309	2,32	2,318	2,2	Melampaui
1	2	8	3	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	2,78	27,78	30,56	61,11	61,11	62,85	Belum Tercapai
1	2	8	4	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	41,67	41,67	8,33	8,33	8,33	36,90	Belum Tercapai
1	2	8	5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	1	1	1	1,0	Sesuai
1	2	8	6	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	Sesuai
1	2	8	7	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, Panti Asuhan Aisya	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, Panti Asuhan Aisya	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, Panti Asuhan Aisya	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	Sesuai
1	2	8	8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	23,54	22,42	22,47	21,46	20,39	18,2	Melampaui

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	8	9	Ratio Akseptor Kb	%	7,24	8,47	10,8	12,16	13,47	6,7	Melampaui
1	2	8	10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	78,39	79	79,19	75,28	74,97	18,5	Melampaui
1	2	8	11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		89,79	89,79	89,79	89,79	89,79	74,8	Melampaui
1	2	8	12	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	3,8	3,96	4,2	4,28	4,25	4,32	Belum Tercapai
1	2	8	13	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	14,42	16,67	16,58	15,68	11,74	10,4	Melampaui
1	2	8	14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,24	11,55	48,66	33,37	18,51	33,52	Belum Tercapai
1	2	8	15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	9,75	12,9	36,8	11,96	39,94	43,94	Belum Tercapai
1	2	8	16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	41,26	41,38	50,76	57,54	80,97	79,0	Melampaui
1	2	8	17	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	32,25	39,18	46,67	55,74	71,54	69,0	Melampaui
1	2	8	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	19,12	23,11	43,5	47,16	71,88	70,8	Melampaui
1	2	8	19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	%	10	10	10	10	10	10,0	Sesuai
1	2	8	20	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	75,6	75,6	3,6	3,6	4,3	14,13	Belum Tercapai
1	2	8	21	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdag Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	2	8	22	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	0	1,09	0,19	0,16	0,15	0,28	Belum Tercapai
1	2	8	23	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	2	8	24	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan	%	100	100	100	100	100	100,0	Sesuai

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
				Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat								
1	2	8	25	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100	100	23,56	23,56	23,56	66,51	Belum Tercapai
1	2	8	26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	2	8	27	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,0003	Melampaui
1	2	8	28	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	89,16	61,85	89,16	89,16	100	94,1	Melampaui
1	2	8	29	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	35,16	14,05	51,08	53,44	20,16	37,33	Belum Tercapai
1	2	8	30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	20,50	21,00	22,00	22,14	22	22,32	Belum Tercapai
1	2	8	31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APD Des	%	0,0073	0,0057	0	0,0057	0	0,00	Belum Tercapai
1	2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
1	2	9	1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		3	3	3	3	3	3,0	Sesuai
1	2	9	2	Jumlah arus penumpang angkutan Umum		30.500	25.500	23.500	20.500	14.500	16.660	Belum Tercapai
1	2	9	3	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	2,23	2,61	1,83	1,57	1,18	1,45	Belum Tercapai
1	2	9	4	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	19,8	41,8	14,8	31,6	86,80	95,00	Belum Tercapai
1	2	9	5	Pemasangan Rambu-Rambu		40,00	57,00	0,05	0,00	0	16,17	Belum Tercapai
1	2	9	6	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum		30.500	25.500	23.500	20.500	14,500	8.342	Belum Tercapai
1	2	9	7	Rasio Ijin Trayek		0,002	0,002	0,001	0,008	0,005	0,01	Belum Tercapai
1	2	#		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi								

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
				dan Informatika								
1	2	10	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer		14,00	62,00	0	14,00	0,00	62,32	Belum Tercapai
1	2	10	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		0,34	0,52	0,61	0,64	0,67	0,70	Belum Tercapai
1	2	10	3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	81	78	82	82	0	76,62	Belum Tercapai
1	2	10	4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet		25	33	39	0	0	43,10	Belum Tercapai
1	2	10	5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi		14	62	0	60	0	65,83	Belum Tercapai
1	2	#		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah								
1	2	11	1	Persentase koperasi aktif	%	66,56	72,14	72,28	72,32	72,66	70,70	Melampaui
1	2	11	2	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	95,59	95,67	96,07	96,11	98,04	98,0	Melampaui
1	2	#		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
1	2	12	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	32	60	51	51	58	62,36	Belum Tercapai
1	2	12	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	1.366.000	81.600	599.891	50.200	1.225.838	22.870	Melampaui
1	2	12	3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	0	-94	635	-92	243	72,7	Melampaui
1	2	#		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga								
1	2	13	1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	78,57	80,36	80,36	83,93	85,71	80,88	Melampaui
1	2	13	2	Persentase wirausaha muda		1,69	1,99	1,99	2,59	2,59	2,99	Belum Tercapai
1	2	13	3	Cakupan Pembinaan Olahraga		25,00	25,00	50,00	25,00	8,33	8,3	Sesuai
1	2	13	4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan		8,62	12,07	12,07	25,86	25,86	33,39	Belum Tercapai
1	2	13	5	Cakupan pembinaan atlet muda		8,92	11,98	23,95	35,93	35,93	22,4	Melampaui
1	2	13	6	Jumlah atlet berprestasi		10	13	26	31	3	17,97	Belum Tercapai
1	2	13	7	Jumlah prestasi olahraga		4	4	6	5	1	15,00	Belum Tercapai
1	2	#		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
1	2	14	1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	14	2	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1	2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
1	2	15	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	76	76	76	76	100	70,0	Melampaui
1	2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
1	2	16	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		2	3	3	5	1	4,00	Belum Tercapai
1	2	16	2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		50	45	50	57	58	24,0	Melampaui
1	2	16	3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2	2	2	2	2,0	Sesuai
1	2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
1	2	17	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		81,0	81,36	82,78	80,54	9,55	46,82	Belum Tercapai
1	2	17	2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		45,96	45,96	42,92	42,82	43,03	46,04	Belum Tercapai
1	2	17	3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,73	0,72	0,72	0,71	0,95	1,64	Belum Tercapai
1	2	17	4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	281.020	284.060	290.784	294.447	35.925	144.164	Belum Tercapai
1	2	17	5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	8.052	8.052	8.503	8.628	10.684	11.120	Belum Tercapai
1	2	17	6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	48,01	48,01	42,9	48,01	48,01	62,1	Belum Tercapai
1	2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								
1	2	18	1	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100	100	100	100	0	80,0	Belum Tercapai
1	2	18	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	12,20	10,87	6,52	2,17	0	3,6	Belum Tercapai
1	3			Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	3	1		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan								
1	3	1	1	Cakupan Produksi perikanan		131	126	132	125	128	128,4	Belum Tercapai
1	3	1	2	Perikanan tangkap	ton	50.072,0	50.004,6	53.455,6	52.651,6	53.860,1	180.001	Belum Tercapai

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
1	3	1	3	Perikanan Budidaya	ton	5.185	5.150	5.211	5.171	5.171	17.281	Belum Tercapai
1	3	1	4	Cakupan Bina Kelompok Tani		52	51,4	56,8	66,7	69,5	65,6	Melampaui
1	3	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
1	3	2	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	%	178.580	203.770	266.296	280.590	301.507	400.000	Belum Tercapai
1	3	2	2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-3	Melampaui
1	3	2	3	PAD Sektor Pariwisata	%	1,52	1,77	1,26	1,54	1,74	1,3	Melampaui
1	3	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
1	3	3	1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		31,75	31,03	28,72	26,62	26,62	36,7	Melampaui
1	3	3	2	Cakupan bina kelompok tani		65,60	32,69	61,20	53,73	71,18	71,64	Belum Tercapai
1	3	3	3	Jumlah Populasi Ternak								
				<i>Sapi Potong</i>	<i>Ekor</i>	<i>70.662</i>	<i>72.602</i>	<i>75.993</i>	<i>76.434</i>	<i>76.797</i>	<i>87.308</i>	Belum Tercapai
				<i>Ayam Ras Pedaging</i>	<i>Ekor</i>	<i>2.063.600</i>	<i>2.295.000</i>	<i>2.381.401</i>	<i>2.550.438</i>	<i>2.309.930</i>	<i>3.285.440</i>	Belum Tercapai
				<i>Ayam Ras Petelur</i>	<i>Ekor</i>	<i>282.426</i>	<i>310.218</i>	<i>452.158</i>	<i>463.793</i>	<i>638.724</i>	<i>415.385</i>	Melampaui
1	3	4		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral								
1	3	4	1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	91.764	99.494	102,61	91.764	99.494	91574,8	Melampaui
1	3	5		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
1	3	5	1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,6	Melampaui
1	3	5	2	Jumlah Pasar	Unit	40	43	43	43	43	45,0	Belum Tercapai
1	3	6		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
1	3		1	Cakupan bina kelompok pengrajin		0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,15	Belum Tercapai
1	4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
1	4	1		Sekretariat Daerah								
1	4	1	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		2,05	2,69	2,67	2,66	2,55	2,5	Melampaui
1	4	2		Sekretariat DPRD								
1	4	2	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1	4	2	2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
				Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)								
1	4	2	3	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1	5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
1	5	1		Perencanaan								
1	5	1	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1	5	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1	5	1	3	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1	5	1	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD		100	100	100	100	100	100	Sesuai
1	5	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD		108,47	100,33	100	100	100	100,0	Sesuai
1	5	1	6	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW		100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	5	2		Keuangan								
1	5	2	1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	Belum Tercapai
1	5	2	2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	6,53	0,55	1,32	1,86	3,83	1,4	Melampaui
1	5	2	3	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0	0	0	0	0	Sesuai
1	5	2	4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	32,58	29,65	32,69	30,54	32,00	28,6	Melampaui
1	5	2	5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	17,73	17,47	17,59	19,31	18,84	19,6	Belum Tercapai
1	5	2	6	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)		Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Sesuai

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
						Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	
1	5	2	7	Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung		0,77:1	1,07:1	0,93:1	0,83:1	0,75:1		
1	5	2	8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa		0,21	0,21	0,11	0,32	0,23	7,3	Belum Tercapai
1	5	2	9	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	9,34	14,04	9,65	11,63	11,39	10,0	Melampaui
1	5	3		Kepegawaian								
1	5	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	3	3	3	3	3,0	Sesuai
1	5	3	2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	N/A	116,13	38,71	100	96,77	89,0	Melampaui
1	5	3	3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	N/A	0,65	50,59	55,81	47,06	70,4	Belum Tercapai
1	5	4		Pendidikan Dan Pelatihan								
1	5	4	1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	N/A	37	40	40	40	33	Melampaui
1	5	4	2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	N/A	2.452	2.613	2.425	2.297	2.215	Melampaui
1	5	5		Penelitian Dan Pengembangan								
1	5	5	1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	73,33	52,63	58,33	48,28	6,06	26,5	Belum Tercapai
1	5	5		Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	26,67	26,32	16,67	24,14	12,12	16,4	Belum Tercapai
1	5	5	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	26,67	26,32	16,67	24,14	12,12	16,4	Belum Tercapai
1	5	5	3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	50	80	66,67	83,33	33,33	61,8	Belum Tercapai
1	6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
1	6	6		Inspektorat Daerah								
1	6	6	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	79,6	73,7	61,9	54,2	59,5	100,0	Belum Tercapai
1	6	6	2	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,105	0,106	0,26	0,315	0,273	0,2	Melampaui
1	6	6	3	Jumlah temuan BPK	Temuan	25	22	17	10	9	8	Melampaui
1	7			Unsur Pemerintahan Umum								
1	7	7		Kesatuan Bangsa dan Politik								

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No				Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
						2016	2017	2018	2019	2020		
1	7	7	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	15	60	70	75	0	58,8	Belum Tercapai
1	7	7	2	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100	100	100	100,0	Sesuai
1	7	7	3	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	5	4	0	4,5	Belum Tercapai
2				ASPEK DAYA SAING DAERAH								
2	1			Kemampuan Ekonomi Daerah								
2	1	1	1	Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per Rumah Tangga		670.711	752.591	619.271	835.097	866.469	754.784	Melampaui
2	1	2	2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita		312.207	326.576	148	422.374	412.723	410.456	Melampaui
2	1	3	3	Nilai Tukar Petani		105,23	105,28	103,31	103,27	103,25	102,28	Melampaui
2	2			Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
2	2	1	1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang	%	N/A	N/A	65	70	80	75,39	Melampaui
2	3			Iklim Berinvestasi								
2	3	1	1	Angka Kriminalitas yang tertangani		15,53	19,32	27,51	22,85	20,57	20,15	Melampaui
2	4			Sumberdaya Manusia								
2	4	1	1	Rasio Ketergantungan		53,04	49,79	52,39	52,38	42,59	41,65	Melampaui

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi. pengelolaan pendapatan. pengelolaan belanja. dan pengelolaan pembiayaan, Dalam melakukan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah yang tersedia untuk digunakan sebagai belanja pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal

Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dijelaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya berupa bagi hasil pajak, dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat serta Pendapatan lainnya.

Kebijakan Pendapatan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan daerah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Berkaitan dengan pencapaian target penerimaan daerah dari komponen Pendapatan Daerah , maka beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh dan dapat diketahui masyarakat.
- b. Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

- c. Melakukan penyesuaian tarif baru sesuai ketentuan yang berlaku, yang didahului dengan sosialisasi
- d. Memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Perkembangan Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun pada 2016 – 2020 mengalami perkembangan fluktuasi. Sebagai ilustrasi, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1,37 Triliun lebih, sedangkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1,43 Triliun lebih atau mengalami kenaikan. Realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1,42 Triliun lebih atau mengalami penurunan, dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017, pada Tahun Anggaran 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,48 Triliun lebih namun pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan menjadi 1,47 lebih Triliun disebabkan adanya Pandemi *COVID-19* sehingga diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga berdampak berkurangnya Pendapatan Daerah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahunan selama tahun 2016-2020 mencapai 1,90 persen.

Pendapatan daerah mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016–2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel III-1

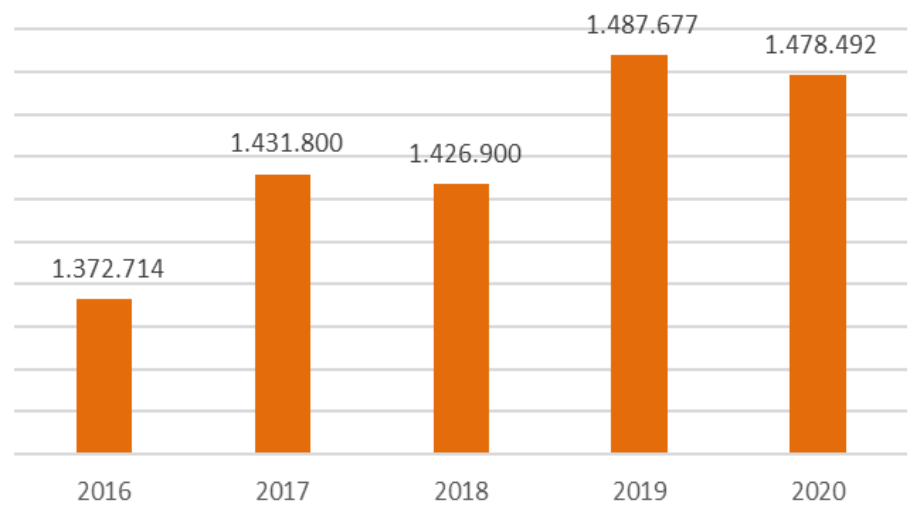
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

No. Rek	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	1.372.714.249.806,06	1.431.800.027.268,32	1.426.900.299.517,07	1.487.677.783.317,24	1.478.492.269.013,86	1,90%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	128.236.254.047,06	201.080.429.101,32	137.711.717.885,07	173.001.144.148,90	168.422.009.341,24	12,07%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	23.655.061.617,00	29.579.398.164,00	31.038.938.988,00	31.855.880.730,00	31.138.613.050,50	7,59%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.380.601.183,00	11.418.822.526,00	10.945.342.367,00	16.668.146.140,00	14.387.214.516,00	8,70%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.616.144.373,00	3.273.064.494,43	3.657.435.565,00	5.193.141.336,00	4.840.897.279,00	18,01%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.584.446.874,06	156.809.143.916,89	92.070.000.965,07	119.283.975.942,90	118.055.284.495,74	15,09%
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.238.658.649.153,00	1.215.071.169.417,00	1.232.816.294.178,00	1.256.698.479.168,34	1.247.769.948.927,62	0,20%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.102.336.310.869,00	1.059.812.765.683,00	1.041.482.831.591,00	1.023.703.426.308,00	980.797.900.196,00	-2,87%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	19.044.735.167,00	16.158.442.917,00	13.766.673.172,00	9.086.969.000,00	13.755.879.914,00	-3,14%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.508.032.211,00	17.237.070.681,00	4.077.967.928,00	4.612.648.000,00	4.182.528.559,00	14,26%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	716.654.228.000,00	704.064.918.000,00	705.099.263.000,00	737.200.482.000,00	665.224.246.000,00	-1,71%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	359.129.315.491,00	322.352.334.085,00	318.538.927.491,00	272.803.327.308,00	297.635.245.723,00	-4,17%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	73.317.019.000,00	94.488.702.000,00	130.396.406.000,00	139.522.731.000,00	158.752.652.000,00	21,92%
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	73.317.019.000,00	94.488.702.000,00	130.396.406.000,00	139.522.731.000,00	158.752.652.000,00	21,92%
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	50.623.028.751,00	50.758.448.934,00	49.135.748.318,00	63.148.752.960,34	52.501.770.231,62	2,18%
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.623.028.751,00	50.758.448.934,00	49.135.748.318,00	63.148.752.960,34	52.501.770.231,62	2,18%
1.2.4	Bantuan Keuangan	12.382.290.533,00	10.011.252.800,00	11.801.308.269,00	30.323.568.900,00	55.717.626.500,00	59,86%
1.2.3.1	Bantuan Keungan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	12.382.290.533,00	10.011.252.800,00	11.801.308.269,00	30.323.568.900,00	55.717.626.500,00	59,86%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.819.346.606,00	15.648.428.750,00	56.372.287.454,00	57.978.160.000,00	62.300.310.745,00	109,86%
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.010.633.856,00	13.000.000.000,00	52.226.669.404,00	57.978.160.000,00	62.300.310.745,00	163,00%
1.3.3	Pendapatan Lainnya	2.808.712.750,00	2.648.428.750,00	4.145.618.050,00	0,00		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

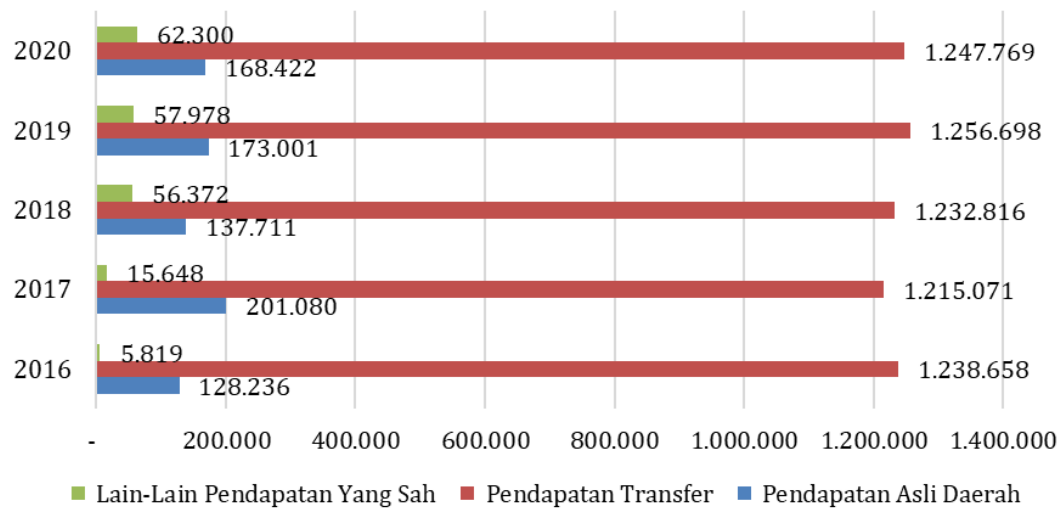
Meskipun kontribusi pendapatan yang bersumber dari dana transfer masih lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah namun rata-rata pertumbuhan PAD selama tahun 2016 sampai dengan 2020 memiliki rata-rata 12,7% dibandingkan dengan pendapatan transfer yang hanya tumbuh sebesar 0.20% selama kurung waktu 5 tahun (2016-2020), sehingga dapat dikatakan bahwa PAD dapat mendorong kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang akan semakin memperkuat dalam struktur anggaran pendapatan daerah. Adapun kinerja pertumbuhan dan fostur Pendapatan daerah secara berturut-turut terlihat pada grafik berikut.

Grafik III-1
Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Bapenda Kabupaten Bulukumba, 2021

Grafik III-2
Postur Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Bapenda Kabupaten Bulukumba, 2021

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Pemerintah Kabupaten Bulukumba berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah

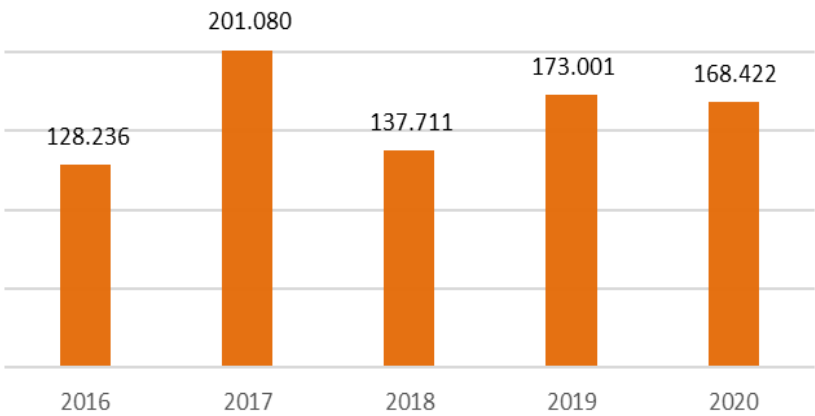
daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Pendapatan asli Daerah meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Gambaran perkembangan PAD dapat dilihat pada grafik berikut:

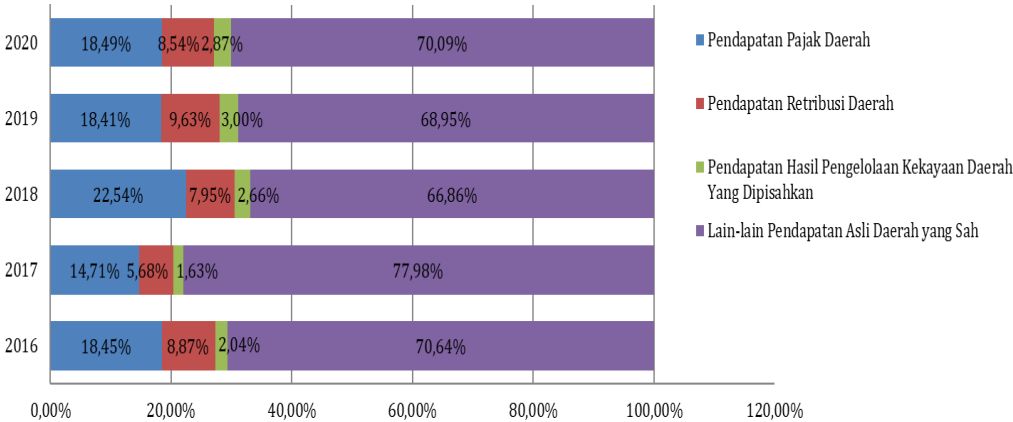
Grafik III-3
Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Bapenda Kabupaten Bulukumba, 2021

Dalam grafik perkembangan PAD dapat dilihat bahwa perkembangan PAD paling signifikan terjadi pada tahun 2017 meningkat 57% dibandingkan tahun 2016, mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 32% namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat sebesar 26%. Dari segi postur pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba masih didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memberikan kontribusi sebesar 70,90% dari total PAD kemudian pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 18,52% dari total PAD, pendapatan retribusi memberikan kontribusi sebesar 8,14% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 2.44% dari total PAD.

Grafik III-4
Grafik Postur PAD Tahun Tahun 2016 – 2020

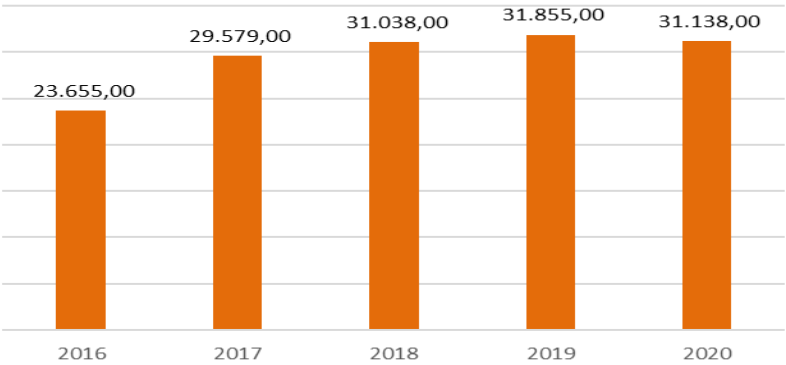


Sumber: Bapenda Kabupaten Bulukumba, 2021

Pendapatan Pajak daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Grafik III-5
Perkembangan Pajak Daerah Tahun Tahun 2016 – 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)



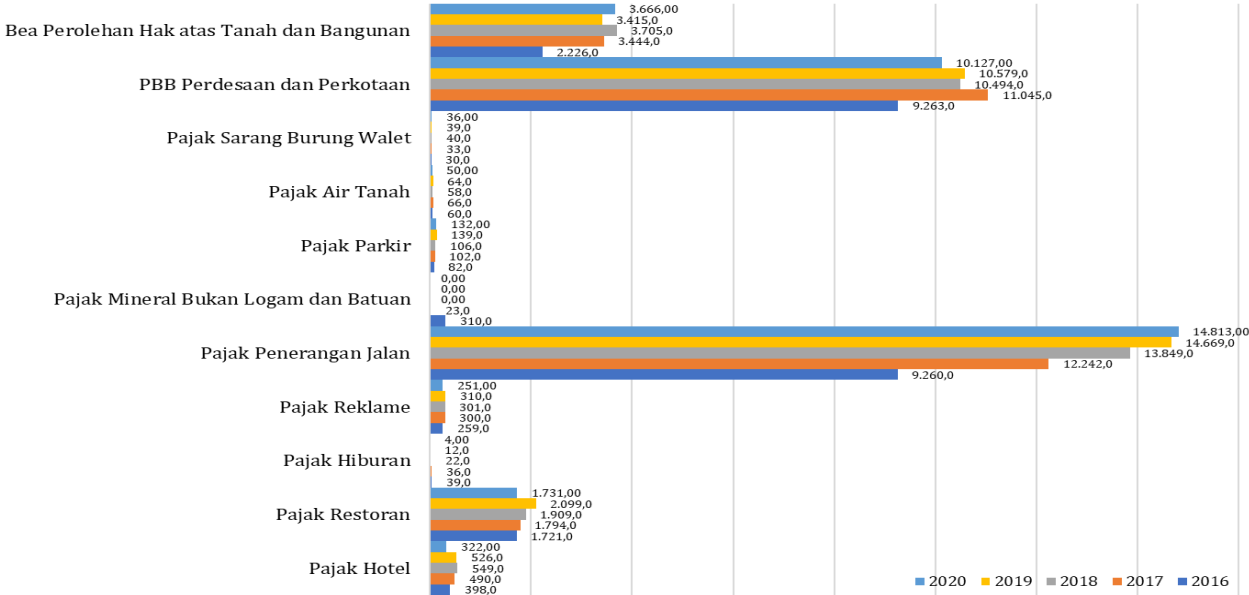
Sumber: (Bapenda Kab. Bulukumba, 2021)

Komponen pendapatan pajak daerah untuk pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan amanat undang-undang 28 tahun 2009 terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Secara umum pendapatan pajak masih didominasi oleh pendapatan pajak penerangan jalan yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan pajak daerah kemudian pendapatan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

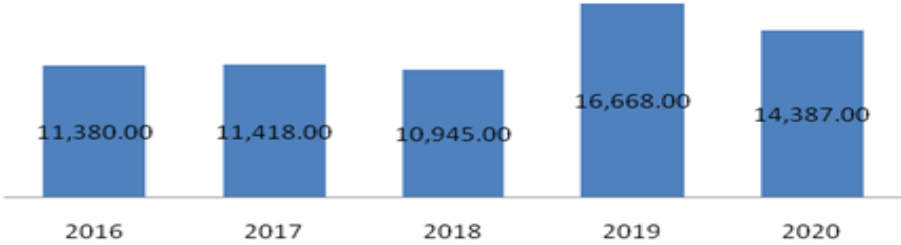
Grafik III-6
Postur Pajak Daerah berdasarkan Komponen Pendapatan Pajak Tahun 2016 –2020 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Bapenda Kab. Bulukumba, 2021

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor Retribusi Daerah di Kabupaten Bulukumba, berkontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi sebesar 8,14% dari total PAD. Sementara untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 2,44% terhadap total PAD. Secara keseluruhan terlihat dari masing-masing grafik berikut:

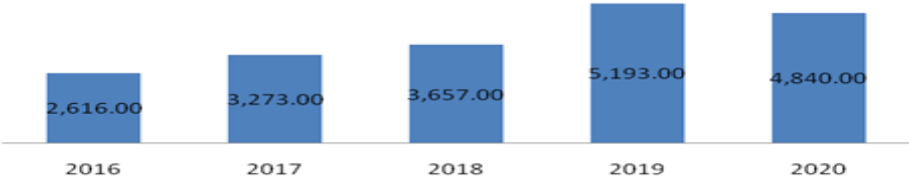
Grafik III-7
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016- 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Untuk jenis penerimaan jenis ini masih mengandalkan penerimaan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar. Selama tahun 2016-2020, realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan masih fluktuatif, hal ini tergambar pada grafik berikut

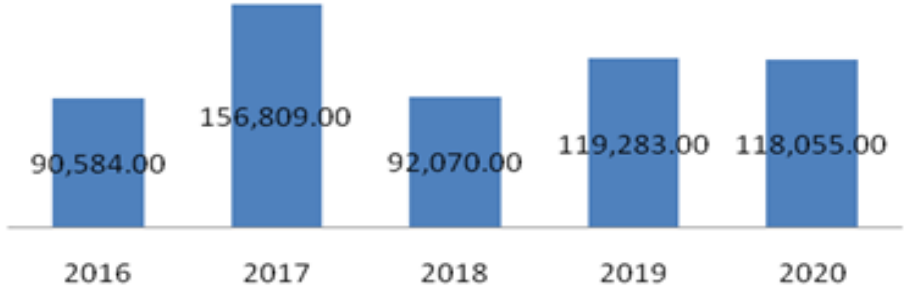
Tabel III-2
Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Khusus Komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari: hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Grafik III-8
Grafik Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Lain-lain pendapapatan asli daerah yang sah memberikan pengaruh paling signifikan terhadap total pad yaitu sebesar 70,90%. Salah satu yang berpengaruh besar adalah pendapatan BLUD yang termasuk dalam kategori lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan meliputi transfer Pemerintah Pusat; dan transfer antar-daerah.

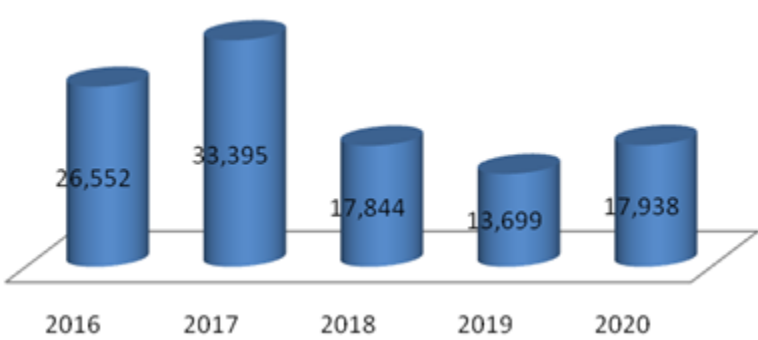
Grafik III-9
Rincian Dana Perimbangan (dalam juta)



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Transfer Pemerintah Pusat merupakan Dana Perimbangan terdiri dari Dana bagi hasil / bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah. Dana bagi hasil / bagi hasil bukan pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

Grafik III-10
Realisasi Dana Bagi Hasil/ bagi hasil bukan Pajak Tahun 2016-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

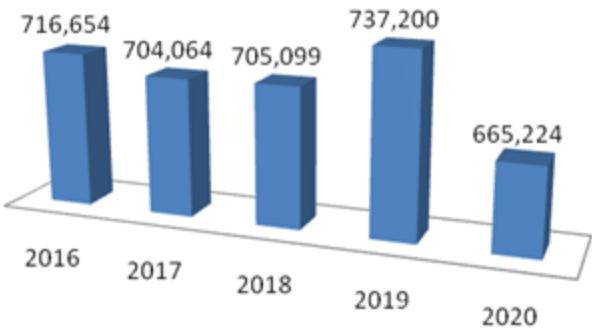


Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP 55 tahun 2005 Pasal 1 angka 23 dan PP 12 tahun 2019 pasal 37).

Dana Alokasi Umum setiap tahunnya fluktuasi yang secara keseluruhan mengalami penurunan dalam kurun waktu 2016-2020 rata-rata 1,71%. penurunan DAU terjadi tahun 2017 yang disebabkan peralihan kewenangan Pendidikan menengah ke Pemerintah Provinsi sehingga gaji guru SMA/SMK juga disalurkan melalui DAU Pemerintah Provinsi. Pada tahun berikutnya, penyaluran DAU cenderung stagnan, bahkan DAU tahun 2017 jumlahnya sama dengan tahun 2018, DAU tahun 2019 kembali meningkat karena adanya DAU tambahan Kelurahan dan DAU untuk PPPK sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik III-11
Realisasi penerimaan DAU Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, realisasi Penerimaan DAK seperti Gambar dibawah ini

Grafik III-12
Realisasi Penerimaan DAK Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

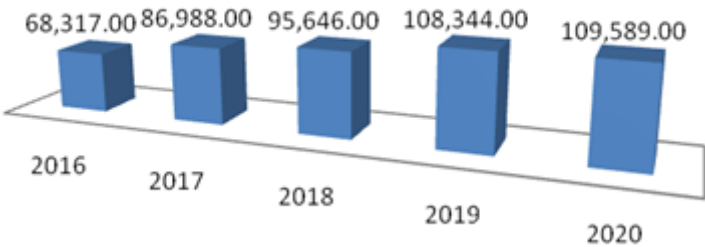
Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu (PP 12 tahun 2019 pasal 39). Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undangundangan (PP 12 tahun 2019 pasal 40). Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan (PP 12 tahun 2019 pasal 41). Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa (PP 12 tahun 2019 pasal 42). Realisasi Dana Insentif Daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan dan rata-rata pertumbuhan 115, 19 persen dalam kurun waktu 2016-2020, hal tersebut tergambar pada grafik berikut.

Grafik III-13
Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah Tahun 2016-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Grafik III-14
Realisasi Penerimaan Dana Desa Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

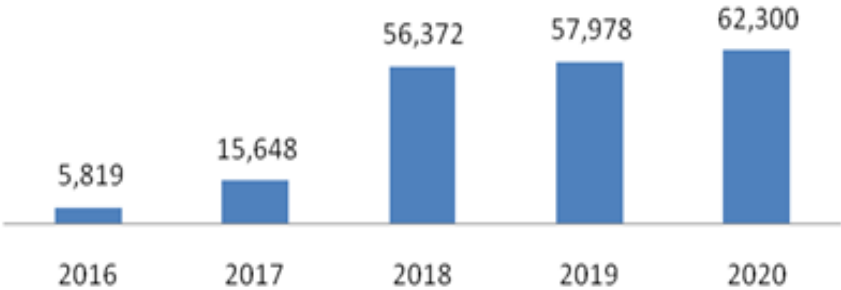
c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi:

- a. Hibah;
- b. Dana darurat; dan/atau
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba memperoleh pendapatan hibah berupa pendaptan Hibah Non Kas dari penyertaan modal PDAM untuk tahun 2016 dan 2017 dan pendapatan hibah dana BOS untuk tahun 2018, 2019 dan 2020. Kemudian untuk pendapatan lainnya berupa pendapatan dana non kapitasi dinas kesehatan yang pada tahun 2016,2017 dan 2018 termasuk dalam kategori pendapatan lainnya. Namun pada tahun 2019 dan 2020 dipindahkan menjadi pendaaptan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan nilai rata-rata pertumbuhan untuk pendapatan lainnya sebesar 109%. Secara keseluruhan pendapatan transfer dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik III-15
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . menyebutkan bahwa adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain urusan wajib pelayanan dasar. urusan wajib non pelayanan dasar. urusan pilihan dan urusan penunjang. Belanja daerah merupakan bentuk upaya untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan. Hakekat dari belanja daerah sebagai perwujudan dan amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Secara umum komponen belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain:

- 1) Belanja Operasi. yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek Langsung yang didalamnya terdiri dari : Belanja Pegawai. Belanja Barang dan Jasa. Belanja Bunga. Belanja Subsidi. Belanja Hibah. Belanja Bantuan Sosial.
- 2) Belanja Modal. yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari: Belanja Tanah. Belanja. Belanja Peralatan Mesin. Belanja Bangunan dan Gedung. Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan. Belanja Asset Tetap Lainnya dan Belanja Asset Lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga. yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. . Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai. Belanja Barang dan Jasa. serta Belanja Modal.
- 4) Belanja Transfer. yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer ini terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Dalam pengelolaan belanja Pemerintah Daerah dihadapkan pada besarnya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan urusan disatu sisi. sementara disisi lain anggaran yang tersedia sangat terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah menetapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.

Belanja Daerah harus diprioritaskan pada pendanaan pada urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka untuk mencapai standar pelayanan minimal. kemudian barulah untuk pendanaan pencapaian visi dan misi dan urusan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja belanja dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang dapat diwujudkan terhadap anggaran yang disediakan. Semakin besar realisasi belanja semakin baik kinerja suatu daerah dalam menggunakan anggaran. Realisasi belanja daerah tahun 2016-2020. sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

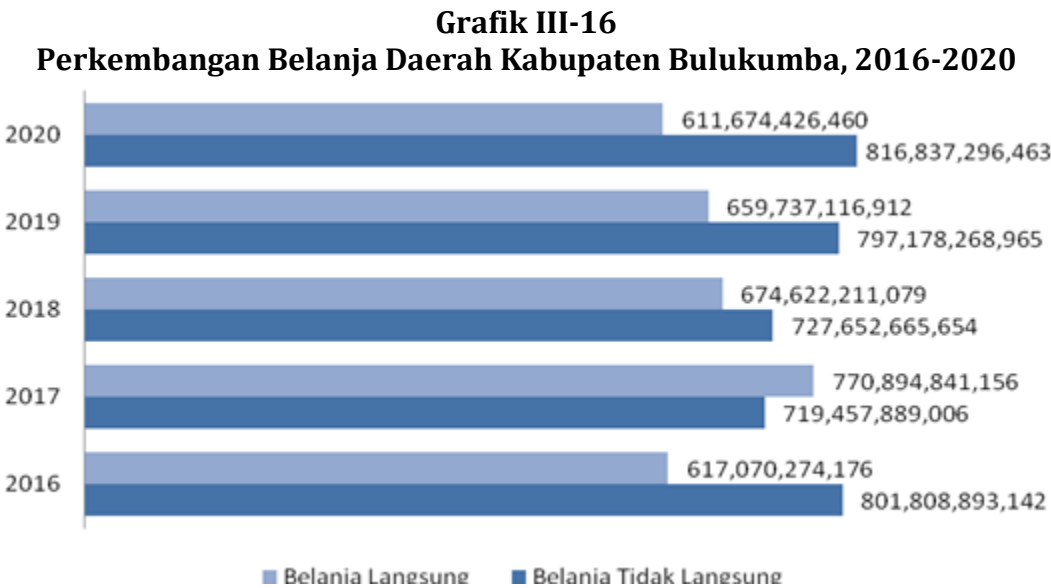
Tabel III-3
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020

URAIAN	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
BELANJA	1,418,879,167,317.96	1,490,352,730,162.00	1,402,274,876,733.31	1,456,915,385,877.28	1,428,511,722,922.59	0,27%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	801,808,893,142.00	719,457,889,006.00	727,652,665,654.00	797,178,268,965.00	816,837,296,463.00	0,72%
Belanja Pegawai	602,889,231,015.00	534,284,832,307.00	538,858,041,506.00	588,605,115,441.00	571,759,289,495.00	-1,04%
Belanja Bunga	5,966,397,180.00	6,047,233,571.00	4,286,242,719.00	2,337,562,081.00	361,816,433.00	-39,44%
Belanja Hibah	81,547,557,579.00	10,968,499,900.00	13,185,600,000.00	14,880,345,500.00	54,827,917,000.00	53,74%
Belanja Bantuan Sosial	361,500,000.00	284,000,000.00	191,884,300.00	4,370,304,026.00	659,488,000.00	509,70%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,029,513,328.00	3,199,133,941.00	1,582,675,368.00	4,699,557,898.00	3,257,853,281.00	30,33%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	107,372,975,220.00	164,564,859,087.00	169,414,305,761.00	182,096,034,019.00	177,835,842,504.00	15,34%
Belanja Tidak Terduga	641,718,820.00	109,330,200.00	133,916,000.00	189,350,000.00	8,135,089,750.00	1044,31%
BELANJA LANGSUNG	617,070,274,175.96	770,894,841,156.00	674,622,211,079.31	659,737,116,912.28	611,674,426,459.59	0,74%
Belanja Pegawai	47,769,081,636.00	62,418,228,677.00	58,668,619,037.00	40,948,717,404.00	36,002,762,237.00	-4,41%
Belanja Barang dan Jasa	277,529,956,731.00	364,147,137,291.00	310,623,466,272.31	338,164,830,104.38	287,613,281,405.52	2,61%
Belanja Modal	291,771,235,808.96	344,329,475,188.00	305,330,125,770.00	280,623,569,403.90	288,058,382,817.07	0,31%

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Perkembangan Belanja daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari tahun 2016 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan rata-rata selama 5 tahun (2016-2020) sebesar 0,91%, sebagaimana grafik berikut.



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Secara umum komponen Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan daerah didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Tabel III-4
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

URAIAN	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pembiayaan	138,924,267,947.18	66,802,382,149.28	(6,142,185,295.40)	(3,611,843,537.14)	4,781,464,399.69	-108.67%
Penerimaan Pembiayaan	147,652,553,205.18	91,977,979,757.28	20,033,412,312.60	96,702,868,870.86	33,447,938,397.69	50.34%
Pengeluaran Pembiayaan	8,728,285,258.00	25,175,597,608.00	26,175,597,608.00	100,314,712,408.00	28,666,473,998.00	101.06%

Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Realisasi Pembiayaan Daerah selama Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Hal ini diakibatkan oleh fluktuasi nilai Silpa yang menurun. Selain itu, fluktuasi nilai pembiayaan dari segi penerimaan pembiayaan berupa pinjaman dalam negeri serta pembayaran pokok pinjaman BLUD turut mempengaruhi nilai pembiayaan. Secara rata-rata penurunan nilai pembiayaan sebesar 108% selama 5 tahun (2016-2020). Perkembangan Pembiayaan selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi ditunjukan pada grafik dibawah ini.

Grafik III-17
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2016-2020



Sumber: BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

3.1.2 Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Bulukumba selama periode pencatatan 2016-2020, ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

**Tabel III-5
Rata - Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET	2,332,729,453,064	2,351,355,240,429	2,389,599,789,031	2,471,352,726,249	2,599,516,934,727	2.76%
ASET LANCAR	142,106,529,099	64,753,837,508	92,314,045,296	94,004,280,667	114,086,435,531	2.83%
Kas di Kas Daerah	90,473,160,237	2,265,686,959	16,799,230,475	25,567,715,734	41,023,931,504	164.15%
Kas di Bendahara Penerimaan	55,569,375	105,047,000	52,158,000	4,078,000	84,180,000	477.69%
Kas di Bendahara Pengeluaran	30,944,154	662,376,008	312,910	24,641,783	9,225,889,350	11763.92%
Kas di BLUD	1,108,440,249	1,375,873,146	234,253,267	418,715,651	3,492,174,954	188.48%
Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	-	-	
Setara Kas	-	-	-	-	-	
Kas Lainnya - Kas Dana BOS	938,678,700	3,895,333,474	1,083,000,489	962,155,484	935,834,683	57.22%
Kas Lainnya	1,829,724	1,465,576	314,594,097	173,247,250	-	5300.18%
Investasi Jangka Pendek			-		-	
Piutang Pendapatan	35,976,380,381	40,342,769,224	65,437,183,597	60,102,355,152	52,513,121,840	13.39%
Piutang Lainnya	5,621,298,357	6,026,426,555	5,699,937,130	4,545,059,330	4,544,409,330	-4.62%
Penyisihan Piutang	-8,321,489,197	-10,125,556,045	-12,240,937,003	-14,852,225,361	-17,780,175,548	20.90%
Beban Dibayar Dimuka	489,581,850	-	250,398,438	214,978,694	-	
Persediaan	15,732,135,268	20,204,415,611	14,683,913,896	16,843,558,950	20,047,069,418	8.71%
INVESTASI JANGKA PANJANG	20,485,302,005	23,485,302,005	25,752,440,457	24,841,548,524	50,258,014,663	30.77%
Investasi Jangka Panjang Permanen	20,485,302,005	-				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		23,485,302,005	25,752,440,457	24,841,548,524	50,258,014,663	
ASET TETAP	2,123,708,368,002	2,247,578,110,833	2,252,210,254,491	2,335,596,277,480	2,411,170,949,974	3.24%
Tanah	469,408,561,730	511,552,238,654	512,872,022,654	509,665,250,318	513,378,229,318	2.33%
Peralatan dan Mesin	332,992,632,102	352,083,373,549	390,374,413,164	454,866,206,916	522,258,777,902	11.99%
Gedung dan Bangunan	981,842,272,579	939,087,913,125	1,016,694,797,548	1,074,337,121,909	1,146,207,427,557	4.07%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,492,800,132,434	1,741,116,711,045	1,915,534,362,739	2,043,333,632,029	2,162,143,075,408	9.78%
Aset Tetap Lainnya	22,416,720,255	20,985,817,411	10,147,853,296	10,696,664,096	11,118,657,415	-12.17%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	90,641,728,912	41,589,191,448	18,820,857,100	40,439,766,551	56,748,176,346	11.58%
Akumulasi Penyusutan	-1,266,393,680,010	-1,358,837,134,399	-1,612,234,052,010	-1,797,742,364,339	-2,000,683,393,972	12.19%

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET LAINNYA	46,429,253,958	15,537,990,083	19,323,048,787	16,910,619,578	24,001,534,558	-3.18%
Tagihan Jangka Panjang	15,600,000	15,600,000	-	-	-	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	375,000,000	375,000,000	375,000,000	375,000,000	375,000,000	0.00%
Aset Tidak Berwujud	807,920,451	973,760,451	1,815,968,451	2,094,933,451	2,394,252,551	34.17%
Aset Lain-lain	45,644,189,973	14,746,713,855	17,721,391,302	15,357,391,022	22,531,069,494	-3.54%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 413,456,466	- 573,084,223	-589,310,966	-916,704,895	- 1,298,787,487	34.67%
KEWAJIBAN	154,633,692,790	94,200,003,431	89,236,087,860	57,636,521,367	36,455,408,794	-29.13%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	99,194,698,768	60,936,607,017	78,148,289,054	57,636,521,367	36,455,408,794	-18.33%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10,053,095	56,102,908	915,957,169	-	-	
Utang Bunga	6,437,539,489	498,565,953	498,565,953	102,562,139	-	-67.92%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	22,175,597,608	22,175,597,608	22,175,597,608	11,087,798,806	-	-37.50%
Pendapatan Diterima Dimuka	-	124,419,009	398,409,423	-	-	
Utang Beban	1,183,924,579	1,577,655,223	28,735,816,361	26,299,992,614	24,708,649,020	435.04%
Utang Jangka Pendek Lainnya	69,387,583,997	36,504,266,315	25,423,942,540	20,146,167,808	11,746,759,774	-35.05%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	55,438,994,022	33,263,396,414	11,087,798,806	-	-	
Utang Dalam Negeri	55,438,994,022	33,263,396,414	11,087,798,806	-	-	
EKUITAS	2,178,095,760,274	2,257,155,236,998	2,300,363,701,170	2,413,716,204,882	2,563,061,525,933	4.16%
EKUITAS	2,178,095,760,274	2,257,155,236,998	2,300,363,701,170	2,413,716,204,882	2,563,061,525,933	4.16%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,332,729,453,064	2,351,355,240,429	2,389,599,789,031	2,471,352,726,249	2,599,516,934,727	2.76%

3.1.2.1 Aset

Analisis Aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2016-2020, Kabupaten Bulukumba mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 2,76 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari Investasi Jangka Panjang yang tumbuh sebesar 30,77%. Pertumbuhan investasi yang tumbuh paling signifikan pada tahun 2020 dikarenakan pertumbuhan penyertaan modal pada Bank Sulselbar dan PDAM. Aset lancar tumbuh sebesar 2,83% aset tetap tumbuh 3,24% persen. sementara aset lainnya mengalami penurunan 3,18%.

3.1.2.2 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Secara keseluruhan Kewajiban daerah Kabupaten Bulukumba selama periode 2016-2020 terus mengalami penurunan rata - rata sebesar 29,13%. Penurunan kewajiban tersebut karena adanya pelunasan kewajiban terhadap utang pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur yang telah berakhir pada tahun 2020.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Kabupaten Bulukumba selama periode 2016-2020, mengalami trend positif, meskipun rata-rata pertumbuhan yang relative kecil yakni hanya 4,16% setiap tahunnya.

3.1.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Aktivitas, Solvabilitas)

Analisis terhadap neraca daerah dapat mengetahui fundamental keuangan Pemerintah Daerah. Analisis yang dilakukan melalui analisis rasio-rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Rasio keuangan dimaksud terdiri dari tiga jenis yaitu:

- 1) Rasio likuiditas. yaitu analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat.
- 2) Rasio aktivitas. adalah rasio untuk melihat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintahan. Rasio ini terdiri dari rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. dan
- 3) Rasio solvabilitas (leverage). adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio ini terdiri dari rasio total hutang terhadap total asset dan rasio total hutang terhadap modal.

Adapun rasio-rasio kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel III-6
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio Lancar (current ratio)					
	current ratio = aset lancar / utang lancar	1,43	1,06	1,18	1,63	3,13
2	Rasio Cepat (quick ratio)					
	Quick ratio = aset lancar - persediaan/utang lancar	1,27	0,73	0,99	1,34	2,58
B	RASIO SOLVABILITAS					
1	Rasio Total Hutang terhadap total aset					
	debt aset ratio = Total utang / Total aset	0,07	0,04	0,04	0,02	0,01
2	Rasio Hutang terhadap modal					
	debt equity ratio = total utang / ekuitas	0,07	0,04	0,04	0,02	0,01
C	RASIO AKTIVITAS					
1	rata rata umur piutang (Hari)					
2	rata rata umur persediaan (hari)					

Sumber: Data Olahan BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Merujuk pada Tabel III-6 di atas secara ringkas dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- 1) Rasio Lancar (*Current Ratio*) menunjukkan *trend* yang semakin meningkat dari 1.06 pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.18 pada tahun 2018. Keadaan ini terus berlanjut pada tahun 2019 yakni meningkat menjadi 1.63. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 3,13. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Pada tahun 2020 rasio lancarnya sebesar 2,58 yang berarti bahwa Rp. 2 utang jangka pendek dijamin dengan Rp. 2,58 aset lancar.
- 2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*) menunjukkan trend yang semakin membaik dari 0.73 pada tahun 2017 meningkat menjadi 0.99 pada tahun 2018. kemudian pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 1.34 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,58. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar dikurangi persediaan semakin membaik.
- 3) Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan dari 0.04 pada tahun 2017 turun menjadi 0.02 pada tahun 2019. Artinya pada tahun 2017 hutang sebesar Rp. 0.04 dijamin dengan Rp. 1 aset, yang kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi Rp. 0.02 sehingga hutang dijamin dengan Rp. 0.02 aset. Tahun 2020 menurun menjadi 0,01 Ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba dari sisi solvabilitas cenderung kurang baik.
- 4) Rasio Hutang terhadap Modal (*Total Debt Equity Ratio*) menunjukkan trend yang menurun dari 0.04 tahun 2017 menurun menjadi 0.02 pada tahun 2019. Ini berarti bahwa pada tahun 2017 hutang sebesar Rp 0.04 dijamin dengan Rp. 1 modal. kemudian menurun dimana hutang sebesar Rp 0.02 dijamin dengan Rp. 1 modal. Pada tahun 2020 menurun hingga menjadi 0,01.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2016-2020, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba diantaranya Penyelamatan Aset Daerah, Peningkatan Infrastruktur daerah, pemberian bantuan Hibah dan Bantuan dan Peningkatan Kesejahteraan ASN.

Terkait Penyelamatan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menindaklanjuti MoU bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sejak tahun 2017 dalam program MCP KPK. Salah satu area intervensi adalah manajemen aset daerah yang meliputi :

1. Sistem pencatatan BMD
2. Pemanfaatan BMD yang sesuai aturan
3. Percepatan legalisasai BMD
4. Penertiban aset

Berkaitan dengan kegiatan percepatan legaliasasi BMD dimana fokus pada percepatan sertifikasi tanah milik pemda, pada tahun 2020 total jumlah tanah yang memiliki sertifikat sebanyak 1.327 bidang tanah, yang belum memiliki sertifikat sebanyak 714 bidang tanah dan yang memiliki sertifikat sebanyak 613 bidan tanah.

Kebijakan pemberian bantuan hibah dan Bantuan sosial selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dimana belanja bantuan hibah mengalami pertumbuhan rata-rata 53,74 persen sedangkan bantuan sosial rata-rata pertumbuhan sebesar 509,70 persen.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dengan memberikan tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberian TPP telah melewati proses fasilitasi Ditjen Otoda Kemendagri dan Korsupgah KPK. Tambahan TPP tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, agar memacu kinerja ASN agar semakin disiplin, inovatif, dan produktif.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan Anggaran belanja untuk kebutuhan aparatur selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Tahun 2016 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp.650,658,312,651.00 atau memiliki kontribusi sebesar 45,58 persen dari toral pengeluaran daerah. Tahun 2017 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun menjadi Rp.596,703,060,984.00 dengan kontribusi sebesar 39,37 persen. Tahun

2018 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Rp.597,526,660,543.00 atau memiliki kontribusi sebesar 41,83 persen dari total pengeluaran daerah. Kemudian Tahun 2019 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan menjadi Rp.629,553,832,845.00 atau memiliki kontribusi sebesar 40,43 dari toral pengeluaran daerah. Tahun 2020 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan menjadi Rp. 607,762,051,732.00 atau memiliki kontribusi sebesar 41,71 persen dari total pengeluaran daerah Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel III-7

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 (Dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (persen)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 %
1	2016	650,658,312,651.00	1,427,607,452,575.96	45.58
2	2017	596,703,060,984.00	1,515,528,327,770.00	39.37
3	2018	597,526,660,543.00	1,428,450,474,341.31	41.83
4	2019	629,553,832,845.00	1,557,230,098,285.28	40.43
5	2020	607,762,051,732.00	1,457,178,196,920.59	41.71

Sumber : BPKD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Bulukumba selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami defisit. Defisit tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 83 Milyar lebih dan pada tahun 2019 defisit menurun menjadi 1.5 milyar lebih namun pada tahun 2019 defisit riil kembali meningkat menjadi 69 milyar lebih. Sementara pada tahun 2020 terjadi surplus sebesar 21 milyar lebih. Defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2016 secara keseluruhan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dan Pinjaman dalam Negeri. Untuk tahun 2017 dan 2019 defisit juga ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Defisit Riil dan Komposisi penutupan defisit Anggaran, serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 secara berturut- turut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel III-8

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun (Jutaan Rp.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,372,714.00	1,431,800.00	1,426,900.00	1,487,677.00	1,478,492.00
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1,418,879.00	1,490,352.00	1,402,274.00	1,456,915.00	1,428,511.00
3	Pengeluaran Pembiayaan	8,728.00	25,175.00	26,175.00	100,314.00	28,666.00
	(Defisit Riil)	(54,893.00)	(83,727.00)	(1,549.00)	(69,552.00)	21,315.00

Sumber : BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Tabel III-9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100	100	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber : BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Tabel III-10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp. Juta	% dari SiLPA	Rp. Juta	% dari SiLPA	Rp. Juta	% dari SiLPA	Rp. Juta	% dari SiLPA	Rp. Juta	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	109,373.00		91,957.00	100	8,249.00	100	18,624.00	100	27,591.00	100
2	Pelampauan Penerimaan PAD										
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan										
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah										
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya										
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
7	Kegiatan Lanjutan			-	-	-	-	-	-		

Sumber : BPKD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Dalam konteks Pandemi global *COVID-19*, ruang fiskal pada periode RPJMD 2021-2026 semakin menyempit, hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan pemerintah merefocusing dana APBD pada setiap OPD yang dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus *COVID-19* yang dilanjutkan dengan proses pemulihan perekonomian pada tahun-tahun selanjutnya. Pada sisi lainnya, dalam kaitannya dengan ruang fiskal daerah, refocusing dana APBD pada setiap OPD berpengaruh pada sulitnya pemerintah daerah dalam mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya pada tahun 2020.

3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2021-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Bulukumba yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Bulukumba lima tahun ke depan, tetapi karena adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah *COVID-19* akan memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba di beberapa sektor antara lain : 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan; 2) sektor perdagangan besar dan eceran; 3) Reparasi mobil dan sepeda motor; 4) Industri pengolahan; 5) Konstruksi. dimana pada sektor ini yang menjadi penyumbang terbesar di Kabupaten Bulukumba.

Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi di Kabupaten Bulukumba, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segala potensi yang di miliki.

Tabel III-11
Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2026

No.	Uraian	Satuan	Tahun						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	68,99	69,71	70,11	70,61	71,17	71,7	72,17
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,1	7,04	6,62	6,18	6,1	6,05	6
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,42	3,40	3,33	3,27	3,23	3,17	3,11
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,43	3,20	3,85	4,25	4,83	5,45	6,00
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp.	34,43	37,43	39,15	40,92	42,83	45,04	46,75
6	Rasio Gini	Angka	0,371	0,364	0,356	0,349	0,342	0,334	0,327

Sumber : Data diolah, 2021

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021-2026 diperkirakan akan tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah *COVID-19*

Tabel III-12
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2022 (dalam juta)

No.	Uraian	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r
1	Pendapatan Asli Daerah	214.268.055.079	14,1	238.481.972.179	14,7	273.606.227.185	15,3	318.401.788.035	16,4	397.859.526.193	18,5	523.234.847.352	20,9
2	Pendapatan Transfer	1.252.886.354.719	82,3	1.317.847.079.769	81,3	1.432.702.364.418	80,2	1.528.480.079.500	78,9	1.650.202.523.773	76,8	1.807.027.921.917	72,3
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	54.585.600.000	3,6	64.585.600.000	4,0	79.585.600.000	4,5	89.585.600.000	4,6	99.585.600.000	4,6	170.585.600.000	6,8

Sumber : BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional.

Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah antara lain Hibah dan Pinjaman melalui Bank, Pemerintah. Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut;

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Tabel III-13
Target Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026

Kode	Uraian	Rencana Capaian Tahun 2021	%	Proyeksi Tahun 2022	%	Proyeksi Tahun 2023	%	Proyeksi Tahun 2024	%	Proyeksi Tahun 2025	%	Proyeksi Tahun 2026	%
4	PENDAPATAN	1.521.740.009.798	100,00	1.620.914.651.948	100,00	1.785.894.191.603	100,00	1.936.467.467.535	100,00	2.147.647.649.966	100,00	2.500.848.369.269	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	214.268.055.079	14,08	238.481.972.179	14,71	273.606.227.185	15,32	318.401.788.035	16,44	397.859.526.193	18,53	523.234.847.352	20,92
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	62.796.217.623	4,13	73.615.087.293	4,54	88.110.469.677	4,93	107.801.675.366	5,57	140.123.667.488	6,52	196.056.052.617	7,84
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	43.821.837.456	2,88	50.716.884.886	3,13	59.845.757.508	3,35	73.450.112.669	3,79	103.585.858.705	4,82	151.028.794.735	6,04
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.000.000.000	0,39	7.500.000.000	0,46	9.000.000.000	0,50	10.500.000.000	0,54	12.500.000.000	0,58	14.500.000.000	0,58
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101.650.000.000	6,68	106.650.000.000	6,58	116.650.000.000	6,53	126.650.000.000	6,54	141.650.000.000	6,60	161.650.000.000	6,46
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.252.886.354.719	82,33	1.317.847.079.769	81,30	1.432.702.364.418	80,22	1.528.480.079.500	78,93	1.650.202.523.773	76,84	1.807.027.921.917	72,26
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.047.690.384.000	68,85	1.101.199.861.000	67,94	1.196.055.145.649	66,97	1.256.832.860.731	64,90	1.333.555.305.004	62,09	1.445.380.703.148	57,80
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	17.500.844.000	1,15	17.500.844.000	1,08	18.500.844.000	1,04	19.500.844.000	1,01	21.500.844.000	1,00	23.500.844.000	0,94
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			2.000.000.000	0,12	2.000.000.000	0,11	3.000.000.000	0,15	4.000.000.000	0,19	5.000.000.000	0,20
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	681.648.431.000	44,79	715.730.852.550	44,16	772.989.320.754	43,28	811.638.786.792	41,91	868.453.501.867	40,44	955.298.852.054	38,20
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	348.541.109.000	22,90	365.968.164.450	22,58	402.564.980.895	22,54	422.693.229.940	21,83	439.600.959.137	20,47	461.581.007.094	18,46
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	129.024.961.000	8,48	135.476.209.050	8,36	145.476.209.050	8,15	165.476.209.050	8,55	190.476.209.050	8,87	215.476.209.050	8,62
4.2.2.1	Dana Penyesuaian	129.024.961.000	8,48	135.476.209.050	8,36	145.476.209.050	8,15	165.476.209.050	8,55	190.476.209.050	8,87	215.476.209.050	8,62
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	76.171.009.719	5,01	81.171.009.719	5,01	91.171.009.719	5,11	106.171.009.719	5,48	126.171.009.719	5,87	146.171.009.719	5,84
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.171.009.719	5,01	81.171.009.719	5,01	91.171.009.719	5,11	106.171.009.719	5,48	126.171.009.719	5,87	146.171.009.719	5,84
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	54.585.600.000	3,59	64.585.600.000	3,98	79.585.600.000	4,46	89.585.600.000	4,63	99.585.600.000	4,64	170.585.600.000	6,82
4.3.1	Pendapatan Hibah	54.585.600.000	3,59	54.585.600.000	3,37	64.585.600.000	3,62	69.585.600.000	3,59	69.585.600.000	3,24	70.585.600.000	2,82
4.1.3.3	Pendapatan Lainnya			10.000.000.000	0,62	15.000.000.000	0,84	20.000.000.000	1,03	30.000.000.000	1,40	100.000.000.000	4,00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Kode	Uraian	Rencana Capaian Tahun 2021	%	Proyeksi Tahun 2022	%	Proyeksi Tahun 2023	%	Proyeksi Tahun 2024	%	Proyeksi Tahun 2025	%	Proyeksi Tahun 2026	%
5	BELANJA	1.532.690.063.871	100,00	1.820.914.651.948	100,00	1.735.894.191.603	100,00	1.886.467.467.536	100,00	2.097.647.649.966	100,00	2.450.848.369.269	100,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.033.433.185.689	67,43	1.066.629.923.348	58,58	1.106.383.054.117	63,74	1.139.996.638.710	60,43	1.182.926.319.287	56,39	1.245.750.887.448	50,83
5.1.1	Belanja Pegawai	663.934.753.171	43,32	697.131.490.830	38,28	731.988.065.371	42,17	753.947.707.332	39,97	791.645.092.699	37,74	847.060.249.188	34,56
5.1.2	Belanja Barang	348.627.986.158	22,75	348.627.986.158	19,15	338.524.542.386	19,50	351.614.760.518	18,64	358.647.055.728	17,10	369.406.467.400	15,07
5.1.3	Belanja Bunga			-		13.000.000.000	0,75	10.000.000.000	0,53	6.700.000.000	0,32	3.350.000.000	0,14
5.1.4	Belanja Hibah	18.434.170.860	1,20	18.434.170.860	1,01	19.434.170.860	1,12	19.434.170.860	1,03	20.434.170.860	0,97	20.434.170.860	0,83
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.436.275.500	0,16	2.436.275.500	0,13	3.436.275.500	0,20	5.000.000.000	0,27	5.500.000.000	0,26	5.500.000.000	0,22
5.2	BELANJA MODAL	306.474.864.630	20,00	555.992.710.728	30,53	415.030.847.292	23,91	524.696.035.943	27,81	680.819.292.473	32,46	951.973.376.481	38,84
5.2.1	Belanja Tanah	5.255.565.080	0,34	5.255.565.080	0,29	5.255.565.080	0,30	5.255.565.080	0,28	5.255.565.080	0,25	5.255.565.080	0,21
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	101.464.779.509	6,62	111.464.779.509	6,12	111.464.779.509	6,42	111.464.779.509	5,91	121.464.779.509	5,79	141.464.779.509	5,77
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	65.993.054.126	4,31	298.510.900.224	16,39	208.510.900.224	12,01	295.026.948.478	15,64	415.876.512.059	19,83	630.406.292.141	25,72
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.307.207.705	8,37	135.307.207.705	7,43	84.345.344.269	4,86	107.494.484.666	5,70	132.768.177.615	6,33	169.392.481.541	6,91
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.454.258.210	0,36	5.454.258.210	0,30	5.454.258.210	0,31	5.454.258.210	0,29	5.454.258.210	0,26	5.454.258.210	0,22
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	7.616.611.576	0,50	2.000.000.000	0,11	10.000.000.000	0,58	10.000.000.000	0,53	10.000.000.000	0,48	10.000.000.000	0,41
5.3.1	Belanja Tak Terduga	7.616.611.576	0,50	2.000.000.000	0,11	10.000.000.000	0,58	10.000.000.000	0,53	10.000.000.000	0,48	10.000.000.000	0,41
5.4	BELANJA TRANSFER	185.165.401.976	12,08	196.292.017.873	10,78	204.480.290.194	11,78	211.774.792.883	11,23	223.902.038.206	10,67	243.124.105.341	9,92
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	6.464.907.880	0,42	12.433.197.218	0,68	14.795.622.719	0,85	18.125.178.804	0,96	24.370.952.619	1,16	34.708.484.735	1,42
5.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	6.464.907.880	0,42	7.361.508.729	0,40	8.811.046.968	0,51	10.780.167.537	0,57	14.012.366.749	0,67	19.605.605.262	0,80
5.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi			5.071.688.489	0,28	5.984.575.751	0,34	7.345.011.267	0,39	10.358.585.871	0,49	15.102.879.474	0,62
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	178.700.494.096	11,66	183.858.820.655	10,10	189.684.667.475	10,93	193.649.614.079	10,27	199.531.085.587	9,51	208.415.620.605	8,50
	BDD	110.535.651.000	7,21	110.535.651.000	6,07	110.535.651.000	6,37	110.535.651.000	5,86	110.535.651.000	5,27	110.535.651.000	4,51
	ADD	68.164.843.100	4,45	73.323.169.655	4,03	79.149.016.475	4,56	83.113.963.079	4,41	88.995.434.587	4,24	97.879.969.605	3,99
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.950.054.073)	(0,71)	(200.000.000.000)	(10,98)	50.000.000.000	2,88	50.000.000.000	2,65	50.000.000.000	2,38	50.000.000.000	2,04
6	PEMBIAYAAN												
6.1	PENERIMAAN DAERAH	46.050.054.073	100,00	235.100.000.000	100,00	35.100.000.000	100,00	35.100.000.000	100,00	35.100.000.000	100,00	35.100.000.000	100,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	10.950.054.073	23,78										
	Penerimaan Pinjaman Daerah	35.100.000.000	76,22	235.100.000.000	100,00	35.100.000.000	100,00	35.100.000.000	100,00	35.100.000.000	100,00	35.100.000.000	100,00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Kode	Uraian	Rencana Capaian Tahun 2021	%	Proyeksi Tahun 2022	%	Proyeksi Tahun 2023	%	Proyeksi Tahun 2024	%	Proyeksi Tahun 2025	%	Proyeksi Tahun 2026	%
6.2	PENGELUARAN DAERAH	35.100.000.000	100,00	35.100.000.000	100,00	85.100.000.000	100,00	85.100.000.000	100,00	85.100.000.000	100,00	85.100.000.000	100,00
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang	35.100.000.000	100,00	35.100.000.000	100,00	85.100.000.000	100,00	85.100.000.000	100,00	85.100.000.000	100,00	85.100.000.000	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	10.950.054.073	100,00	200.000.000.000	100,00	(50.000.000.000)	100,00	(50.000.000.000)	100,00	(50.000.000.000)	100,00	(50.000.000.000)	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-		(0)		0		(0)		0		(0)	

Sumber : BPKD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah; dan Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

Prioritas Pertama Untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021 – 2026 yang terdiri atas:

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat
2. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
3. Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor
4. Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah. Nasional dan Internasional
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
10. Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
11. Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Prioritas Ketiga Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Nilai kapasitas riil pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2021- 2026, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut diatas ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel III-14
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	1.521.740.009.798	1.620.914.651.948	1.785.894.191.603	1.936.467.467.535	2.147.647.649.966	2.500.848.369.269
2	Pencairan data cadangan (sesuai perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran						
4	Pinjaman Daerah	35.100.000.000	235.100.000.000	35.100.000.000	35.100.000.000	35.100.000.000	35.100.000.000
	Total penerimaan	1.556.840.009.798	1.856.014.651.948	1.820.994.191.603	1.971.567.467.535	2.182.747.649.966	2.535.948.369.269
5	Dikurangi						
6	Belanja Operasi + BTT+ Belanja Transfer	877.587.213.083	916.293.955.062	969.338.801.925	1.000.156.671.075	1.051.481.301.765	1.126.118.525.388
7	Pengeluaran Pembiayaan	35.100.000.000	35.100.000.000	85.100.000.000	85.100.000.000	85.100.000.000	85.100.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	644.152.796.715	904.620.696.886	766.555.389.678	886.310.796.461	1.046.166.348.202	1.324.729.843.881

Sumber : BPKD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Tabel III-15
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Rata2 Proporsi per Thn (%)
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	904.620.696.886	766.555.389.678	886.310.796.461	1.046.166.348.202	1.324.729.843.881	100,00
1	Prioritas I	285.446.532.171	285.664.716.853	286.061.211.513	286.649.358.664	287.537.812.166	30,04
2	Prioritas II	287.515.802.138	91.582.354.318	199.462.697.362	407.327.717.012	460.662.551.000	27,99
3	Prioritas III	331.658.362.576	389.308.318.507	400.786.887.585	352.189.272.525	576.529.480.715	41,97

Sumber : BPKD & Bappeda Kabupaten Bulukumba, Tahun 2021

3.4 Dampak Pandemi terhadap pendapatan daerah tahun 2020

Pandemi *COVID-19* memberi dampak sangat besar diberbagai bidang yang membuat ekonomi menjadi terpuruk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yang sangat drastis. Dampak *COVID-19* dari sisi ekonomi berimplikasi kepada tidak Bergeraknya sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi sumber retribusi. *COVID-19* turut mengganggu kegiatan-kegiatan yang selama ini sumber pendapatan dari sektor pajak yang dikelola Bapenda. Kurangnya pendapatan yang diterima dari sektor usaha itu, tentu menghambat pembiayaan atau belanja kegiatan prioritas lainnya sehingga dibutuhkan anggaran yang besar untuk diarahkan pada agenda penanggulangan *COVID-19*. Kesesuaian penerimaan negara juga berimplikasi pada terganggunya dana transfer kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba. Sebagian besar APBD di Kabupaten Bulukumba bertumpu pada alokasi dana transfer dari pusat. Dalam struktur APBD Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sementara kapasitas fiskal rendah masih bertumpu pada dana transfer, namun disisi lain Kementerian Keuangan perlu mengadakan penyesuaian dana transfer ke daerah. Secara umum Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dampak *COVID-19* terhadap Penerimaan Pajak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Pokok tahun anggaran 2021, mengalami defisit akibat dampak *COVID-19* yang sangat mempengaruhi semua sektor pendapatan di Kabupaten Bulukumba.

Adanya perubahan target pendapatan pajak ini merujuk pada surat keputusan bersama (SKB) Mendagri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2021 Dalam Rangka Penanganan *COVID-19* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial. penyesuaian (target pajak) menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menteri Keuangan. Dalam SKB itu, diatur kepala daerah bisa melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD.

APBD Pokok tahun 2021 yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2022 meningkat senilai Rp.251.804.752.594. Jumlah ini bersumber dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba dan berbagai isu-isu strategis daerah yang berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba selama periode 2021-2026. Pada Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih adanya permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang, utamanya pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2026.

Uraian secara rinci pada bab ini meliputi; permasalahan pembangunan daerah yang dibagi menjadi tiga aspek tujuan pembangunan daerah yaitu Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Permasalahan pembangunan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional. kebijakan nasional maupun regional.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah atau *gap* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum termanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Untuk itu, identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bulukumba dibagi dalam 2 cakupan permasalahan, yaitu identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada sasaran pembangunan daerah untuk penentuan prioritas daerah dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk penentuan prioritas masing-masing urusan.

4.1.1 Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap demi tahap. Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah:

4.1.1.1 Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sebesar 68,28 persen dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 68,99 persen, lebih rendah dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 71,93 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional pada tahun 2020 mencapai 71,94 persen. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi yang disetarakan dengan indeks daya beli. Penyebab dari rendahnya IPM Kabupaten Bulukumba adalah rata-rata lama sekolah, Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2016 sebesar 6,86 persen sampai pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 7,67 persen, yaitu masih rendahnya layanan Pendidikan dan masih rendahnya angka partisipasi murni yang dimana pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 dilihat dari tren capaian indikatornya yang masih berfluktuasi. Penurunan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi serta adanya guru yang pindah tugas. Untuk tahun 2020 jumlah guru lulusan S1 sebesar 92,08 persen, artinya masih terdapat 7,92 persen guru yang belum berstatus sarjana (S1).

Pembangunan sektor kesehatan memperlihatkan bahwa angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Bulukumba tahun 2020 sebesar 67,92 tahun, Angka Harapan Hidup Kabupaten Bulukumba masih rendah menunjukkan kinerja pembangunan sektor kesehatan yang belum maksimal yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dimana pada tahun 2016 sebesar 64,27 angka (per 100.000 kelahiran) sampai dengan tahun 2020 angka kematian ibu mengalami penurunan sebesar 59,08 angka (per 100.000 kelahiran) Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum optimalnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita, masih rendahnya Rasio Dokter Per Satuan Penduduk, dan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan belum optimal. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menurun pada tahun 2020 karena hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 merupakan tahun pertama merebaknya wabah pandemi *COVID-19*, dimana dilakukan pembatasan sosial sehingga kegiatan ini hanya mampu menjangkau 45 desa/kelurahan atau hanya sebesar 33,1 persen

4.1.1.2 Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 sebesar 8,06 persen sampai pada tahun 2020 menjadi 7,10 persen. Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Bulukumba. Selain itu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba cenderung menurun walaupun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk.

4.1.1.3 Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 3,42 persen dengan total jumlah pengangguran sebanyak 7.530 orang. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba sebesar 3,06 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara total di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 adalah 3,42 persen. Artinya dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat 3 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja. Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Faktor yang menyebabkan excess supply tenaga kerja ini antara lain tingkat investasi yang rendah sehingga perusahaan dalam negeri sulit mengembangkan dan meningkatkan usahanya angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia usaha tidak ada kecocokan upah dan tidak memiliki kemauan wirausaha.

4.1.1.4 Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 4,93%. Pada tahun 2020 terjadi perlambatan yang sangat drastis hingga mencapai angka 0,43%, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi *COVID-19* yang berpengaruh sangat besar pada aktifitas ekonomi di tingkat global, nasional, dan di tingkat regional. Namun demikian, terdapat kenaikan nilai *output* (nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

4.1.1.5 Belum optimalnya fungsi infrastruktur wilayah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik hanya 0,539 sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Indikasi lain dari masalah pokok ini adalah belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan baik untuk mobilitas antar pulau (pelabuhan/dermaga) maupun mobilitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan atau antara dataran rendah dengan dataran tinggi (terminal dan marka jalan). Masalah lain terkait infrastruktur wilayah adalah keterpenuhan sarana-prasarana perumahan dan pemukiman yang belum mencukupi.

Menurunnya rasio Rasio rumah layak huni pada tahun 2020 sebesar 24,56% diakibatkan karena penyediaan kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau belum dapat memenuhi laju pertumbuhan kebutuhan rumah baik untuk mengatasi *back lock* perumahan, mengantisipasi kebutuhan rumah baru, maupun meningkatkan kualitas perumahan yang tidak layak huni selain penganggaran yang terkesan sangat minim untuk perumahan layak huni, persentase lingkungan permukiman kumuh sebanyak 11,39 % terbatasnya penyediaan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman menyebabkan belum tertatanya Kawasan permukiman kumuh dan rumah tinggal bersanitasi sebanyak 76,12%. Masih terdapatnya rumah tangga yang kesulitan yang mengakses pelayanan air minum yang layak , belum optimalnya system perencanaan pelayanan air minum serta Rumah tinggal yang tidak mengakses air bersih masih terdapat di berbagai wilayah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

terutama pada kepulauan dan dataran tinggi diakibatkan karena masih terbatasnya penyelenggaraan air minum yang kredibel dan berkualitas, menurunnya kuantitas air baku serta belum optimalnya akses layanan air bersih yang layak dan aman terhadap lingkungan tersebut

Selain hal tersebut di atas belum optimalnya fungsi infrastruktur wilayah karena masih adanya program pada periode sebelumnya yang belum tuntas antara lain :

- a. Pembangunan beberapa jalan dan jembatan yang tidak tuntas di 10 Kecamatan.
- b. Pembangunan Mall Pelayanan Publik
- c. Pembangunan Rumah Sakit tipe D
Pembangunan pasar di beberapa Kecamatan
- d. Pembangunan Sport Center
- e. Pembangunan Bandar Udara
- f. Pengadaan dan Pemasangan PJU Meterisasi, PJU tenaga surya serta pemeliharaan PJU
- g. PDAM; dan
- h. Pemecah Ombak

Oleh karena itu bahwa sistem pembangunan adalah bersifat berkelanjutan atau dalam kata lain jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menuntaskannya karena sudah dianggarkan dengan biaya besar.

4.1.1.6 Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan tingkat kepuasan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan standarisasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Berdasarkan data indeks reformasi birokrasi pada tahun 2020 pencapaiannya "B". Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Selain itu organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja. Adapun permasalahan pembangunan pada tata Kelola pemerintahan yaitu:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dimana pada tahun 2020 nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bulukumba hanya bernilai B, hal ini disebabkan karena hal-hal berikut: penyusunan indikator tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome dan belum sepenuhnya mengacu pada sasaran RPJMD, cascading kinerja antara sasaran dengan program/kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara optimal, kualitas laporan kinerja di tingkat pemerintah daerah dan OPD belum optimal, dan masih lemahnya evaluasi SAKIP perangkat daerah. Namun dilihat dari target RPJMD tahun 2016 sampai tahun 2021 dimana target capaiannya hanya bernilai "CC" dan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengoptimalkan kinerja daerah.
2. Masih Rendahnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik. Pengukuran kepuasan terhadap pelayanan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

4.1.1.7 Adanya kerentanan ekologi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Untuk kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi dua yaitu kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe; dan Kawasan rawan tanah longsor berada di sebagian

wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang. Kondisi ekologis Kabupaten Bulukumba rentan terhadap berbagai bencana. Ini disebabkan Kabupaten Bulukumba yang membentang disepanjang Pesisir Pantai, ada 7 wilayah kecamatan yang termasuk wilayah pesisir pantai di daerah Kabupaten Bulukumba. Bencana banjir sering terjadi di daerah aliran Sungai Bialo, Sungai Balantieng, Sungai Anyorang, dan Sungai Bijawang, terutama di daerah muara dan alirannya pada daerah Palatte, Bampang, dan Lembang. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di sekitar bagian hulu, daerah pengalirannya cukup sempit. Batuan penyusunan adalah batuan gunung api yang permeabilitas dan porositasnya rendah, adanya penggunaan tanah untuk budidaya pertanian di daerah lereng yang tidak sesuai dengan topografi dan kondisi Akar masalah dari kerentanan ekologis ini adalah kondisi tutupan lahan yang terus mengalami degradasi terutama pada lahan berkemiringan di wilayah pegunungan. Pada wilayah pesisir, kerentanan ekologis ini disebabkan oleh tutupan mangrove yang juga mengalami degradasi, meskipun pada sisi lain upaya rehabilitasi mangrove terus berjalan melalui inisiatif masyarakat dan peranan pemerintah.

4.1.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

4.1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Belum Optimalnya Penduduk Usia 6 – 15 tahun yang termasuk dalam usia penduduk yang berpartisipasi dalam Pendidikan (SPM)
- b. Belum optimalnya pencapaian peningkatan angka melek huruf
- c. Belum Optimalnya Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah Jenjang PAUD /Keseteraan dan Pendidikan Dasar
- d. Belum Optimalnya Pemenuhan kuantitas dan kualitas Tenaga Pendidik

2. Kesehatan

- a. Masih tingginya persentase balita gizi buruk .
- b. Masih tingginya prevalensi angka stunting.
- c. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.
- d. Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
- e. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh.
- f. Masih rendahnya cakupan penanganan prevalensi HIV AIDS

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya proporsi jaringan jalan dengan kondisi baik
- b. Masih rendahnya persentase jalan yang memiliki talud/drainase saluran pembuangan air
- c. Belum tersedianya data base talud/drainase
- d. Masih rendahnya progres revisi RTRW Kabupaten Bulukumba serta masih terbatasnya rencana rinci tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
- e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan setelah masa panen
- f. Peningkatan maupun penurunan persentase irigasi dalam kondisi baik sangat dipengaruhi oleh tingkat kerusakan yang biasanya akibat longsor/bencana alam dan tingginya curah hujan
- g. Persentase irigasi dalam kondisi baik juga dapat meningkat karena pengerjaan pembenahan jaringan irigasi maupun kegiatan peningkatan jaringan irigasi

- h. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sangat ditunjang oleh ketersediaan anggaran

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih rendahnya kawasan kumuh dan permukiman kumuh yang tertata
- b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dan keterbatasan akses pembiayaan.
- c. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman
- d. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Cakupan petugas perlindungan masyarakat masih kurang
- b. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
- c. Cakupan pelayanan bencana kebakaran terkait sarana prasarana masih belum memadai
- d. Perlu penambahan armada mobil pemadam kebakaran untuk memaksimalkan pelayanan waktu tanggap (response time rate)
- e. Masih minimnya petugas penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan fasilitas pendukung lainnya.

6. Sosial

- a. Masih rendahnya sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang dikelola pemerintah Daerah
- b. Masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat
- c. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan Sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
- d. Jumlah jenis PMKS yang tidak didukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

4.1.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Lapangan pekerjaan semakin terbatas
- b. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
- c. Rendahnya tingkat pendidikan
- d. Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan
- e. Rendahnya kompetensi pencari kerja
- f. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
- b. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- c. masih rendahnya cakupan layanan kesehatan korban kekerasan anak dan perempuan.
- d. Kurangnya tenaga psikiater yang menangani trauma korban kekerasan anak dan perempuan.
- e. Tidak adanya kontribusi yang diberikan perempuan dalam pekerjaan non pertanian.

3. Pangan

- a. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat / Kelompok Tani dan pemenuhan kebutuhan dari budidaya pangan lokal.
- b. Kelembagaan usaha pangan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal
- c. Rendahnya peran serta masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

- d. Kurangnya ketersediaan dan cadangan pangan serta infrastruktur pendukung kemandirian pangan

4. Pertanian

- a. Masih minimnya penyelesaian kasus negara
- b. Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur yg membutuhkan pengadaan lahan

5. Lingkungan Hidup

- a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ,Sarana -Prasarana PPLHD dan PPNS belnm ada dikabupaten/Kota sehingga Pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan ,izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan tidak terlaksana dengan baik
- b. Kurangnya Tenaga Polisi kehutanan untuk pengamana TAHURA BONTOLAHARI sehingga Lokasi TAHURA BT.BAHARI banyak diklain oleh Masyarakat BONTOLAHARI.
- c. Permasalahan dalam mengurangi dan menangani persampahan :
 - SDM Pengelola belum memenuhi Standar
 - Armada Pengangkutan Persampahan sudah banyak yang tidak layak pakai
 - Prilaku dan Patisipasi Masyarakat Masih rendah
- d. Dimensi Cell landfill TPA Bulukumba seluas 16.208 m² dengan kapasitas 577.512 M3 atau 190.579 ton dan diperkirakan dapat melayani kota bulukumba sampai dengan jangka waku +.6 Tahun. Dimana saat ini TPA Bulukumba sudah beroperasi selama 6 tahun lebih dan total volume sampah yang masuk ke TPA sudah mencapai 109.540 ton. Sehingga luas cell landfill hanya dapat menampung sekitar 81.039 ton lagi. (kota Bulukumba sudah darurat sampah)
- e. Tidak adanya alat berat (Buldozer) untuk memadatkan sampah pada cell landfill
- f. Lahan untuk penempatan TPS/container yang tidak ada sehingga selama ini hanya memakai lahan kosong/milik masyarakat
- g. Tidak ada container yang tetap di TPST untuk dipakai setelah memilah sampah
- h. Kurangnya alat dan prasarana alah pengolahan sampah di TPST
- i. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium yang mendukung kineija dal am rangka pemantauan kualitas air sungai dan air limbah di Kabupaten Bulukumba. Sarana dan prasarana utama yang seharusnya tersedia adalah Atomic Absorbtion Spektrofotometer (AAS), Ultra-Violet Visible (UV-Vis), peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), peralatan sampling, termasuk peralatan kualitas udara ambien dan emisi
- j. Belum tersedianya sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
- k. Instalasi ruang asam tidak berfungsi dengan baik
- l. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) personil UPT Laboratorium

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kualitas jaringan perekaman biometrik KTP-el yang tidak stabil
- b. Ketersediaan blangko KTP-el juga tidak memadai
- c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mengurus KTP-el masih rendah.
- d. Belum seluruhnya masyarakat memiliki adminduk

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih rendahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa.
- b. Belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat guna menunjang program pemerintah desa.
- c. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- b. Masih rendahnya SDM kader dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tribina di tingkat desa.
- d. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga.

9. Perhubungan

- a. Alat kir sudah tidak beroperasi karena mengalami kerusakan dan diberlakukannya KIR elektronik
- b. Menurunnya arus penumpang karena banyaknya kendaraan umum yang rusak
- c. Masih kurangnya rambu-rambu di Kabupaten B
- d. ulukumba
- e. Masih kurangnya pengawasan sehingga isin trayek semakin berkurang dari tahun ketahun

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Perjanjian kerja sama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba
- b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
- c. Perlunya peningkatan optimalisasi peran keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi
- d. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data penguatan pengelolaan data statistik sektoral
- e. Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarkan hasil assessment.

11. Koperasi dan UKM

- a. Para pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
- b. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah
- c. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran;
- d. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk

12. Penanaman Modal

- a. Potensi penanaman Modal di Kabupaten Bulukumba masih rendah.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya pembinaan sumber daya kepemudaan.
- b. Masih rendahnya peningkatan pelatihan kewirausahaan Muda untuk menunjang pembangunan Daerah
- c. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia Dini dan pelajar
- d. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang sesuai standar yang ditetapkan

14. Statistik

- a. Belum adanya data sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah
- b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral.
- c. Perlunya pengelolaan data secara optimal menuju program satu data

15. Persandian

- a. Masih rendahnya SDM dan sistem persandian modern yang masih menggunakan

sarana dan prasarana manual.

- b. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi berdasarkan hasil assesment.

16. Kebudayaan

- a. Belum Optimalnya Pembinaan pelaku budaya dan kesenian pada satuan pendidikan dan daerah
- b. Belum Optimalnya Pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
- c. Belum Optimalnya Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah

17. Perpustakaan

- a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
- b. Belum optimlanya jumlah buku dan pengadaan buku setiap tahunnya pada perpustakaan
- c. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan
- d. Masih kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di Desa dan Kecamatan
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat

18. Kearsipan

- a. Belum mencukupinya arsiparis di daerah
- b. sarana dan prasarana arsip belum memadai
- c. belum adanya landasan hukum untuk arsip Jadwal Retensi Arsip (JRA)
- d. Terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi.
- e. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi” untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan e-arsip terintegrasi.

4.1.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Menjangkitnya penyakit udang dan rumput laut
- b. Pencapaian peningkatan produksi terganggu karena kewenangan kelautan diambil alih provinsi sehingga program perlidungan dan pengawasan ekosistem kelautan tidak bisa dilaksanakan
- c. Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut.
- d. Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dg standar budidaya oleh masyarakat
- e. Metode penangkapan ikan yang masih cenderung tradisional
- f. Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan
- g. Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum *Bankable* sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit.
- h. Adanya pencemaran tambak intensif secara masif sehingga mengganggu budidaya rumput laut
- i. Lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya.
- j. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu
- k. Nelayan masih tergolong miskin

2. Pariwisata

- a. Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata
- b. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata
- c. Rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur
- d. Rendahnya peran aktif dan sadar wisata dari pelaku pariwisata

3. Pertanian

- a. Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian
- b. Masih rendahnya daya saing produk pertanian
- c. Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh
- d. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan
- e. Masih rendahnya pemahaman para pelaku utama pembangunan pertanian melakukan registrasi produk sebagai syarat mendapatkan sertifikat Prima
- f. Pertumbuhan populasi ternak rendah
- g. Sarana prasarana peternakan dan daya saing produk hewan yang belum optimal
- h. Skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan Jejaring pemasaran produk hewan belum optimal
- i. Keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan usaha peternakan masih kurang
- j. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani peternak serta akses untuk memperoleh informasi, teknologi dan sarana Prasarana
- k. Ancaman Penyakit Hewan menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), gangguan reproduksi ternak dan Pemotongan ternak ruminansia betina produktif belum terkendali
- l. Belum optimalnya produksi ternak

4. Kehutanan

- a. Perlunya dibuatkan rekonstruksi palbatas karena sejak Tahun 1991 sampai sekarang belum pernah dilaksanakan rekonstruksi palbatas, seharusnya sekali dalam 5 tahun dilaksanakan Rekonstruksi.
- b. Perlunya penambahan tenaga polisi kehutanan karena luas kawasan TAHURA 3.475 Ha tidak sebanding dengan polisi kehutanan yang hanya berjumlah 2 orang saat ini, perbandingan untuk 1 tenaga polisi kehutanan dengan luasan sekitar 50 – 75 Ha /orang polisi hutan, sehingga untuk luas TAHURA 3.475 Ha membutuhkan 47 orang polisi hutan.
- c. Perlunya pengganti tanaman penghijauan pada turus jalan yang sudah tua yang sering roboh pada saat hujan dan angin kencang yang dapat membahayakan masyarakat dan memperbanyak ruang-ruang terbuka Hijau, untuk taman kota tidak adanya lahan pemerintah untuk dijadikan penambahan lahan luasan RTH pembangunan taman, penataan dan pemeliharaan taman, yang sampai saat ini seluas 13,88 % sesuai perda nomor 22 tahun 2012 harus mencapai 20% , sesuai Perbup untuk pemenuhan porsi RTH dikota Kab Bulukumba maka pemerintah harus menyiapkan lahan RTH. karena tanaman pelindung sudah mengawatirkan sudah mengganggu ketenteraman pengguna jalan yang berbatasan perlunya dipikirkan penambahan lokasi pekuburan umum.

5. Perdagangan

- a. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail moderen karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal karena rendahnya anggaran pelaksanaan kegiatan serta terbatasnya jumlah sdm kemetrologian (Penera, Pengamat dan PPNS).
- c. Terbatasnya sarana metrologi legal.

6. Perindustrian

- a. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah.
- b. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi

pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang.

- c. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat promosi

4.1.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat DPRD

- a. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT).

2. Sekretariat Daerah

- a. Peranan Forum kerukunan umat beragama belum berfungsi secara optimal.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pengembangan SDM syiar Al Quran.
- c. Kurangnya data akurat terkait pembinaan dan pengembangan SDM keagamaan.
- d. Tingkat dukungan pemerintah akan pengembangan keagamaan masih rendah.

4.1.2.5 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.
- b. Ketersediaan data terkini yang belum akurat
- c. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
- d. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
- e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2. Keuangan

- a. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan pelaku usaha Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat

- a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;
- b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

4.1.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

- a. belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal.
- b. Masih perlunya peningkatan internal para ASN dalam pelaksanaan kegiatan di OPD untuk mengurangi potensi pelanggaran.
- c. Opini atas laporan Keuangan BPK-RI menjadi sebagai salah satu indikator dalam penatausahaan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.

4.2 Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas Pembangunan pemerintah pusat.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis. maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

4.2.1 Isu Strategis Global

4.2.1.1 Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 melanda hampir semua negara dalam waktu singkat. dengan waktu penyebaran dan lama pandemi. tingkat gangguan. serta kemampuan negara-negara untuk meresponnya sangat bervariasi. Negara maju memiliki sumberdaya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk melakukan recovery dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina, sehingga berdampak serius pada bidang ekonomi dan sosial. Meskipun demikian negara berkembang memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi. Menurut studi yang dilakukan McKinsey Global Institute (2020). terdapat 5 (lima) sektor yang sangat berpotensi. yaitu: 1) sebagai pusat manufaktur. 2) infrastruktur hijau. 3) investasi dalam sektor digital. 4) pelatihan ulang bakat. dan 5) industri makanan bernilai tinggi, Potensi ini bila mampu dikelola dengan baik, dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara negara berkembang.

Tekanan untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah di setiap daerah dipastikan akan meningkat, yang berarti ketidakpastian ekonomi akan cenderung naik dan membuat pelambatan ekonomi baik secara gradual maupun drastis. Semua daerah akan

berhadapan dengan kondisi dimana pendapatan daerah turun, tetapi di sisi lain daerah membutuhkan peningkatan pengeluaran daerah yang sangat tinggi untuk berbagai kebutuhan penanganan *COVID-19* sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan daerah.

4.2.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca tahun 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak kepada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ditahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara;
- 11) Membuat kota kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menggantikan dan mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi Muatan KLHS yang telah disesuaikan dengan Analisis tujuan pembangunan berkelanjutan dimana Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 202 indikator yang menjadi kewenangan. Adapun Rekomendasi Muatan KLHS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian maka disarankan untuk menerapkan pendekatan intensifikasi pertanian dikarenakan kemampuan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bulukumba terbatas.
- 2) Pangan merupakan kebutuhan primer untuk kebutuhan hidup manusia, tetapi perlu diperhatikan bahwa perubahan tata guna lahan untuk kawasan pertanian dapat menghilangkan potensi pertanian. Sehingga, perencanaan pusat kegiatan dapat diletakkan pada daerah yang memiliki jasa ekosistem penyedia pangan sedang.
- 3) Air merupakan sumber kehidupan manusia, namun perlu diperhatikan bahwa pada area yang memiliki nilai jasa ekosistem penyediaan tinggi perlu tetap perlu dipertahankan eksistensinya sehingga ketersediaan air tetap *sustain*.
- 4) Apabila nilai jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir tinggi maka pada area tersebut mengindikasikan mempunyai daya tampung yang baik, sehingga rencana pembangunan dapat diarah ke daerah tersebut untuk menghindari terendahnya permukiman dari bencana banjir.
- 5) Apabila nilai jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dengan nilai tinggi maka pada area tersebut mengindikasikan mempunyai daya tampung yang baik. Sehingga rencana kegiatan pembangunan harus menghindari area jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dari sangat rendah hingga rendah.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah pada daerah-daerah yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
- 7) Sebagai upaya menghadapi resiko bencana maka perlu dilakukan :
 - Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
 - Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
 - Peningkatan kapasitas pemulihan bencana

4.2.1.3 Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan Conference of the Parties (COP) -24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada Talanoa Dialogue.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca di Kabupaten Bulukumba disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah.

4.2.1.4 Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya, sehingga memiliki efek disruption industri disetiap negara pada keseluruhan sistem serta meluas mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, kesehatan, pendidikan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Pada bidang ekonomi ditandai dengan munculnya bidang pekerjaan baru (data miner. analis big data. ilmuwan kecerdasan buatan) dan hilangnya beberapa pekerjaan lama; pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan mesin atau robot yang mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang pekerjaan tersebut. Bidang organisasi dan institusi publik yang menghendaki pengambilan keputusan dilakukan secara cepat. sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisis big data dan kecerdasan buatan, sedangkan pada bidang sosial kemasyarakatan, revolusi industri 4,0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif pada perubahan perilaku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Bila disikapi dengan positif. era revolusi industri 4.0 membawa peluang secara ekonomi makro berupa proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

4.2.2 Isu Kebijakan Nasional

4.2.2.1 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target

pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

4.2.2.2 Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba yang berusia 15- 64 tahun sebesar 70,13 persen. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

4.2.3 Isu Strategis Daerah

4.2.3.1 Isu Strategis Sulawesi Selatan

Kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 diarahkan untuk mencapai Visi Sulawesi Selatan yaitu “Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu: 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif; 2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel; 3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif; 4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter; 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan Isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continously).
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif.
3. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni.
4. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan. Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

5. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah.
7. Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual) Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.
8. Sulawesi Selatan sebagai poros maritim.

4.2.3.2 Isu Strategis Kabupaten Bulukumba

Isu strategis Kabupaten Bulukumba merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi berdasarkan dinamika isu-isu strategis internasional, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Isu Strategis Kabupaten Bulukumba dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat Bulukumba khususnya peningkatan nilai tukar petani dan menurunnya angka kesenjangan (Indeks Gini) serta penurunan rasio ketergantungan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif khususnya dalam peningkatan kualitas layanan pemerintah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
4. Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan dalam membangkitkan perekonomian daerah.
5. Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah secara merata serta Pengendalian kualitas lingkungan hidup.
6. Meningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

Visi 2021-2026 merefleksikan arah Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dilaksanakan dengan fokus prioritas yang lebih jelas, strategis dan berdaya ungkit tinggi. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba periode kedua (2018-2022) yang berbunyi: “Mengembangkan berbagai bidang pembangunan sebagai modal dasar pembangunan khususnya kualitas sumber daya manusia yang handal”, maka visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD periode ini juga bermaksud untuk mewujudkan pembangunan yang maju dari sisi profesionalisme penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses dasar masyarakat, pengembangan kualitas manusia yang unggul dan ekonomi daerah serta kelestarian lingkungan hidup yang mendukung kemandirian daerah sehingga ketiganya dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjelasan Visi Kabupaten Bulukumba 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V-1

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

VISI		PENJELASAN VISI
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF. YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA”	PRODUKTIF	Mendorong seluruh sektor pembangunan. meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. sosial kemasyarakatan. lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera.
	BERKARAKTER	Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk berperikehidupan dan kemasyarakatan.
	KEARIFAN LOKAL	Potensi adat, budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan.
	MAJU	Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

VISI		PENJELASAN VISI
		mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
	SEJAHTERA	Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social politik baik bagi perempuan maupun laki-laki

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, meliputi :

1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
4. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
10. Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
11. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel V-2
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
1.	PRODUKTIF	(3) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
		(9) Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2.	BERKARAKTER	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(10) Misi 10: Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
		(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
3.	KEARIFAN LOKAL	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
		(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
4.	MAJU	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
5.	SEJAHTERA	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
		Berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi di atas menyatakan duabelas hal yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dari tahun 2021 hingga 2026 untuk mewujudkan Visi “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”, dengan penjelasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V-3
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang rukun dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya, menjadi syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Sebagai wilayah administrasi, pembangunan harus ditopang dengan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang prima, transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang prima dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki Aparatur Sipil Negara dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan serta sarana prasarana penunjang yang memadai menjadi dasar dalam peningkatkan tata kelola pemerintah dan layanan publik yang lebih baik.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor	Untuk menjadi kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan di bidang pertanian, pengembangan perdagangan dan industri serta pembangunan pasar. Kabupaten Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
4	Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah. Nasional dan Internasional	Untuk menjadi kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan, pengembangan perdagangan dan industri serta pengembangan /pembangunan pasar. Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang berpendidikan, rukun, dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
6	Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang sehat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera. Hal ini juga merupakan lanjutan program

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

NO	MISI	PENJELASAN MISI
		pembangunan periode sebelumnya pada misi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai program dari misi-misi tersebut telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bulukumba namun masih akan terus ditingkatkan.
7	Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Kabupaten Bulukumba emiliki kondisi alam yang indah, dan asri. Kondisi alam ini memiliki keterkaitan erat dengan kultur dan budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga Potensi Bulukumba dapat dijadikan sasaran objek wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat
8	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	Pembangunan daerah pada hakikatnya mengedepankan pentingnya kebutuhan infrastruktur fisik. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur fisik merupakan alasan utama mengapa Kabupaten Bulukumba terus mendorong penyediaan infrastruktur fisik yang lebih memadai. Sarana infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan, jembatan, pasar, perumahan, sanitasi, listrik dan telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mewujudkan kemajuan wilayah Kabupaten Bulukumba.
9	Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	Untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera maka diperlukan pengembangan ekonomi terutama peningkatan produktivitas serta pengembangan industri untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah dalam bidang perdagangan dan perindustrian.
10	Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme	Meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional melalui pembinaan generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.
11	Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Untuk menjadi desa yang maju dan sejahtera maka perlu untuk mengedepankan pentingnya peran pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba untuk secara aktif mengembangkan potensi perekonomian desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih maju dan mandiri. Untuk itu desa perlu meningkatkan potensi dan produktivitas unggulan agar lebih cepat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa.
12	Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Mendorong ketercapaian tujuan pembangunan yang tentunya tidak terlepas dari meningkatnya kondisi lingkungan yang nyaman dan tertib sehingga dapat menurunkan konflik-konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang yang salah satunya dapat dilihat dari menurunnya tingkat kriminalitas lingkungan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba merupakan cita-cita masyarakat Bulukumba yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2021-2026. Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan Bulukumba yang bermarwah, maju dan sejahtera. Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bulukumba periode keempat. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulukumba akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (*impact*) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

Tabel V-4

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba 2021-2026

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Rencana Capaian 2021	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat										
Tujuan 1 Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	n/a	n/a	70	71	71	72	72	72
Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	2 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik										
Tujuan 2 Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	3 Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC	CC	CC	B	B	B	B
Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Skor LPPD/Kategori	Skor	n/a	n/a	3,5095	3,5260	3,5415	3,5560	3,5695	3,5695
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	5 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	3.26-4.00	3.26-4.00	3.26-4.00	3.26-4.00	3.26-4.00
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor										
Tujuan 3 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	6 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,80	23,47	22,76	22,28	22,04	22,02	22,24	22,24
Sasaran 4 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	7 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	-0,77	-0,42	1,52	2,85	3,77	4,69	5,60	5,60

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Rencana Capaian 2021	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional										
Tujuan 4 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	8 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	11,94	12,52	12,86	13,21	13,55	13,89	14,24	14,24
Sasaran 5 Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	9 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	-1,93	3,54	5,14	6,75	7,66	10,22	13,52	13,52
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal										
Tujuan 5 Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	10 Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,99	69,71	70,11	70,61	71,17	71,70	72,17	72,17
Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11 Indeks Pendidikan	Angka	62,15	63,00	64,06	65,13	66,21	67,31	68,42	68,42
Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat										
Tujuan 6 Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	12 Indeks Kesehatan	Angka	73,72	74,32	74,94	75,62	76,36	77,15	77,9924	77,99
Sasaran 7 Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	Tahun	67,92	68,30	68,71	69,15	69,63	70,14	70,69	70,69
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara										
Tujuan 7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,60	2,74	2,88	3,05	3,26	3,51	3,79	3,79
Sasaran 8 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	15 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	1,31	4,52	5,37	6,11	6,76	7,34	7,86	7,86
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat										

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Rencana Capaian 2021	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan 8 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	16 Gini Rasio/ Indeks Gini	Angka	0,371	0,364	0,356	0,349	0,342	0,334	0,327	0,327
Sasaran 9 Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	17 Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	85	86	88	90	92	94	95	95
Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah										
Tujuan 9 Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	18 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23,44	24,05	24,47	24,91	25,36	25,83	26,32	26,32
Sasaran 10 Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	19 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	-4,85	11,33	11,08	10,84	10,63	10,42	10,24	10,24
Misi 10 Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme										
Tujuan 10 Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	20 Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	n/a	55,11	56,6	58,38	59,94	61,57	63,24	63,24
Sasaran 11 Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	21 Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%	n/a	18	18	27	27	36	36	36
Misi 11 Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat										
Tujuan 11 Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	22 Indeks Desa Membangun	Angka	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	0,824
Sasaran 12 Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	23 Persentase Desa Mandiri	%	0	0,92	1,83	2,75	4,59	6,42	9,17	9,17

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Rencana Capaian 2021	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan 12 Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	24 Indeks Rasa Aman	Angka	14	15	15	15	15	15	15	15
Sasaran 13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	25 Peresentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	83,13	88,02	88,56	89,11	89,66	90,20	90,75	90,75

5.4 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Tabel V - 4 di atas, menunjukkan tujuan dan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Bulukumba yang terdiri atas 12 tujuan, 13 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 12 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Bulukumba sebanyak 25 indikator. Tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021 – 2026 diarahkan pula untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD 2005–2025. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat 21 sasaran pokok RPJPD 2005–2025 yang didukung oleh 13 sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021–2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Tabel V-5
Hubungan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 terhadap RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

No.	MISI RPJPD 2005-2025	SASARAN POKOK RPJPD 2005-2025	MISI RPJMD 2021-2026	SASARAN RPJMD 2021-2026	INDIKATOR	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
1	Mewujudkan masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustri	1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan melalui kegiatan industri yang berbasis pada potensi unggulan daerah berupa pertanian (agroindustri), jasa (agribisnis), dan pariwisata (agrowisata);	9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	10,24 %
		2. Meningkatnya penyuluhan kepada para petani dalam peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya, meningkatkan kreativitas petani, serta peningkatan adopsi teknologi bidang pertanian.;				
		3. Meningkatnya diversifikasi dan integrasi usaha secara berkelanjutan melalui sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan;				
		4. Meningkatnya nilai guna lahan melalui peningkatan pola usaha tani.				
2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1. Meningkatnya kemandirian masyarakat Kabupaten Bulukumba dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	68,42 %

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No.	MISI RPJPD 2005-2025	SASARAN POKOK RPJPD 2005-2025	MISI RPJMD 2021-2026	SASARAN RPJMD 2021-2026	INDIKATOR	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
		yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berpendidikan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;	6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,69 Tahun
		2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang seimbang serta berdaya saing dengan tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat Kabupaten Bulukumba yang memegang prinsip <i>mali siparappe tallang sipahua</i> . Secara umum, peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya IPM				
		3. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sehingga terdapat kesetaraan dengan kaum laki-laki sesuai kaidah pengarusutamaan gender				
3	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah serta menjunjung tinggi supremasi hukum	1. Meningkatnya kinerja aparaturnya pemerintah yang bersih, berakhlak mulia, jujur dan adil, sejahtera, profesional, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat yang	1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	100 %

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No.	MISI RPJPD 2005-2025	SASARAN POKOK RPJPD 2005-2025	MISI RPJMD 2021-2026	SASARAN RPJMD 2021-2026	INDIKATOR	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
		dilayani;				
		2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dinamis, mengikuti tuntutan kebutuhan dan perubahan internal maupun eksternal;	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor LPPD/Kategori	3,5695
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan modernisasi birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.26-4.00
		3. Meningkatnya kesadaran hukum dan budaya tertib masyarakat sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum	10. Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme	Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	36 %
		4. Terwujudnya stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi	12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	90,75 %
4	Mewujudkan Kabupaten Bulukumba yang bersih lingkungan dan alam yang ramah mendukung Indonesia <i>go green</i>	1. Meningkatnya fungsi penataan ruang dan pertanahan melalui konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan; 2. Meningkatnya aksesibilitas, pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan; 3. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; 4. Terwujudnya keindahan daerah melalui budaya bersih, budaya	8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	95 %

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No.	MISI RPJPD 2005-2025	SASARAN POKOK RPJPD 2005-2025	MISI RPJMD 2021-2026	SASARAN RPJMD 2021-2026	INDIKATOR	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
		malu dan penghijauan desa serta penghijauan skala rumah tangga; 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk kepada perlindungan masyarakat dari bencana serta meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan; 6. Berkurangnya daerah-daerah terisolir dan terpencil dengan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka otonomi desa dan penguatan kegiatan ekonomi dengan daerah yang lebih strategis dan cepat tumbuh				
5	Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dengan meningkatkan kerjasama antarpulau yang berbasis regional dan nasional	1. Terjalinnnya kerjasama pengembangan dibidang agroindustri dengan daerah kabupaten terdekat;	3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	5,60 %
		2. Meningkatnya perdagangan dengan kabupaten, provinsi terdekat yang ditandai dengan meningkatnya arus barang dan jasa melalui perbaikan kualitas sarana prasarana jalan, jembatan dan penyeberangan;	4. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional	Meningkatnya produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	13,52 %
		3. Terciptanya iklim investasi yang sehat dengan kepastian usaha, layanan efisien untuk memperkuat daya saing pada	7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	7,86 %

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No.	MISI RPJPD 2005-2025	SASARAN POKOK RPJPD 2005-2025	MISI RPJMD 2021-2026	SASARAN RPJMD 2021-2026	INDIKATOR	KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
		zona pasar terbuka;				
		4. Meningkatnya promosi Kabupaten Bulukumba sebagai tujuan wisata sejarah, seni dengan manajemen pengelolaan yang profesional.	8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	95 %
			11. Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	9,17 %

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Misi pembangunan Kabupaten Bulukumba sejalan dengan arahan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dapat dicermati pada tabel berikut :

Tabel V-6.
Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO.	MISI RPJMN 2020-2024	MISI RPJMD KAB. BULUKUMBA TAHUN 2021-2026
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
2.	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
3.	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
4.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
5.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

NO.	MISI RPJMN 2020-2024	MISI RPJMD KAB. BULUKUMBA TAHUN 2021-2026
		Sportivitas dan Profesionalisme
6.	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
7.	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	
8.	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
9.	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Tabel V-7

Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba terhadap Program Prioritas Nasional

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				2020	2021	2022	2023	2024			Capaian	Rencana Capaian	Target				
													2020	2021	2022	2023	2024
1	PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan							Pangan								
									Pertanian								
									Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah								
									Perdagangan								
									Perikanan								
									Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	PP	Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (Ebt)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5									
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68,8	69,2	70,3									
	PP	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	4	4,4	4,7	5,1	5,4	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	80,79	80,79	80,79	81,7	82,61	83,52	84,43
	PP	Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman (persen)	36	36	45	45	45	45	45
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (Kkal)	4.026	4.026	4.026	4.208	4.292	4.378	4.465
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57		Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (Gram)	98,71	98,71	98,71	100,69	102,7	104,7	106,85
			Prevalensi	6,2	5,8	5,5	5,2	5	Penyediaan Dan	Persentase Jumlah	71,69	72,00	73,00	75,00	76,00	78,00	80,00

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under- nourishment/PoU)						Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian (Persen)							
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4		Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan (Persen)	15,30	16,90	18,00	20,00	22,00	25,00	28,00
									Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia (Persen)	80	80	80	80	90	90	90
	PP	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9									
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	≤80	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan (persen)	11,94	12,52	12,86	13,21	13,55	13,89	14,24
										Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (persen)	66	66	66	66,5	67	67,5	68
										Produksi Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100	100	100	100	100
									Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (persen)	100	100	100	100	100	100	100
										Cakupan Bina Kelompok Perikanan (persen)	68	68	68	68,5	69	70	71
	PP	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (Ukm), Dan Koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan (persen)	2,2	2,2	2,2	2,3	3,2	3,7	4,2
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha (persen)	2,2	2,2	2,2	2,7	100	100	100

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5									
	PP	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (persen)	50	50	50	50	50	50	50
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku (persen)	30	30	30	35	40	45	50
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5	5,5	6,5	7,5	8,1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (persen)	80	80	80	85	90	95	100
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5	Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (persen)	80	80	80	85	90	95	100
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1689	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (persen)	1,6	1,6	1,6	1,64	1,66	1,68	1,7
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4									
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (persen)	1	1,75	1,94	2,09	2,24	2,36	2,47
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (persen)	0,52	0,71	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15	15,3	15,7									
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22									
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15									

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21									
	PP	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Tkdn)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	Pengembangan Ekspor	Promosi Komoditi Ekspor (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15									
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30									
2	PN2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan							Perikanan								
									Pangan								
									Kesehatan								
									Pertanian								
									Pendidikan								
	PP	Pembangunan Wilayah Sulawesi	Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi (persen/tahun)					6,91	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan (persen)	92	92	92	93	94	90	91
			Share PDRB Wilayah Sulawesi (persen)					6,23	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina (persen)	90	90	95	95	95	95	95
			IPM Wilayah Sulawesi					69,41- 75,83	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM)	73	100	100	100	100	100	100
			Persentase penduduk miskin wilayah Sulawesi (persen)					7,90		Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM)	86	100	100	100	100	100	100
										Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	79	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
										Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	50	100	100	100	100	100	100
										Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	2	100	100	100	100	100	100
										Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	4	100	100	100	100	100	100
										Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	31	100	100	100	100	100	100
										Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	8	100	100	100	100	100	100
										Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	100	100	100	100	100	100	100
										Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	63	100	100	100	100	100	100
										Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	100	100	100	100	100	100	100
										Persentase orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	41	100	100	100	100	100	100
										Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91	91	91	93	95	97	99
										Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75	75	75	80	85	90	95
										Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	1,42	1,42	1,42	1,5	1,57	1,63	1,7

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
										Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1
									Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen)	95	100	100	100	100	100	100
										Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) (persen)	94	100	100	100	100	100	100
										Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen)	67	100	100	100	100	100	100
									Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	0,048	0,048	0,047	0,047	0,047	0,046	0,046
										Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen)	92	98	100	100	100	100	100
									Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	71,69	72,00	73,00	75,00	76,00	78,00	80,00
										Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan	15,30	16,90	18,00	20,00	22,00	25,00	28,00
									Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	80	80	80	80	90	90	90
3	PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing							Kesehatan								
									Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
									Sosial								
									Tenaga Kerja								
									Pendidikan								
									Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
									Kepemudaan dan Olahraga								
									Penanaman Modal								
	PP	Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98	Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
										Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
										Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
										Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1	Pengendalian Penduduk	Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter	100	100	100	100	100	100	100

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
										Dan Proyeksi Penduduk) (persen)							
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80	Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
	PP	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98		Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2				80		Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
										Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
									Pengendalian Penduduk	Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
	PP	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM)	73	100	100	100	100	100	100
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000	20,6	19,5	18,6	17,6	16		Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan	86	100	100	100	100	100	100

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			kelahiran hidup)							(fasyankes) (SPM)							
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10		Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	79	100	100	100	100	100	100
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4		Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	50	100	100	100	100	100	100
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4		Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	2	100	100	100	100	100	100
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18		Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	4	100	100	100	100	100	100
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14		Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	31	100	100	100	100	100	100
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7		Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	8	100	100	100	100	100	100
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18		Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	100	100	100	100	100	100	100
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190		Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	63	100	100	100	100	100	100
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405		Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	100	100	100	100	100	100	100
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09		Persentase orang orang terduga beresiko Terinfeksi	41	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
										virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)							
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91	91	91	93	95	97	99
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8		Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75	75	75	80	85	90	95
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1		Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	1,42	1,42	1,42	1,5	1,57	1,63	1,7
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100		Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100		Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2	Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen)	95	100	100	100	100	100	100
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) (persen)	94	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen)	67	100	100	100	100	100	100
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	0,048	0,048	0,047	0,047	0,047	0,046	0,046
										Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen)	92	98	100	100	100	100	100
	PP	Peningkatan Kualitas	Indeks Perlindungan	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	Perlindungan	Cakupan perempuan dan	100	100	100	100	100	100	100

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
		Anak, Perempuan Dan Pemuda	Anak (IPA)						Perempuan	anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)							
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (persen)	75	75	75	77	80	83	90
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,211648	91,277943	91,278962	91,334696	91,38627	Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD (persen)	45	45	45	50	55	60	65
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24481	73,5005	73,740519	73,96592	74,177476	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga (persen)	20	20	20	25	30	35	40
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Sistem Data Gender / Data Terpilah (persen)	45	45	45	50	55	60	65
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	600 Nilai	600 Nilai	600 Nilai	650 Nilai	700 Nilai	750 Nilai	800 Nilai
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator (persen)	100	100	100	100	100	100	100
									Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional (persen)	100	100	100	100	100	100	100
	PP	Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan,	27,9				40	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada (persen)	100	100	100	100	100	100	100

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			pelatihan)														
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6				50	Program Pendidikan Dan Latihan perkoperasian	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan (persen)	40	40	40	55	65	75	85
									Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi(persen)	99	99	99	99	99	99	100
									Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (persen)	20	20	20	20	20	20	20
									Promosi Penanaman Modal	Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (persen)							
										PMA (investor)	1	1	1	1	1	1	1
										PMDN (investor)	75	75	75	75	75	75	75
									Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630.000	1.600.000	1.850.000	1.350.000	1.100.000	Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana(persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Bidang tanah yang diredistribusi	750.000				7.750.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				56.286.087	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (persen)	100	100	100	100	100	100	100
									Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah (persen)	86	86	86	90	95	100	100
	PP	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (persen)	1	1,75	1,94	2,09	2,24	2,36	2,47
			Jumlah PT yang Masuk						Pelatihan Kerja	Besaran Tenaga Kerja	0,52	0,71	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			ke dalam World Class University						Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (persen)							
			a. Top 200	0	0	0	0	1									
			b. Top 300	1	1	1	1	2									
			c. Top 500	2	2	2	2	3									
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). (persen)	100	100	100	100	100	100	100
4	PN4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan							Kesatuan Bangsa dan Politik								
									Komunikasi dan Informatika								
									Sekretariat Daerah								
									Pendidikan								
									Kebudayaan								
	PP	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter							Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi (persen)	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
									Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen)	95	100	100	100	100	100	100
										Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun	94	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) (persen)							
										Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen)	67	100	100	100	100	100	100
									Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	0,048	0,048	0,047	0,047	0,047	0,046	0,046
										Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen)	92	98	100	100	100	100	100
	PP	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia							Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah (persen)	15	15	15	15	15	15	15
									Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (persen)	40	40	40	65	70	75	75
									Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan (persen)	30	30	30	45	50	60	60
	PP	Memperkuat	Indeks Kerukunan Umat						Peningkatan	Persentase Kegiatan	0,75	75	75	75	75	75	75

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
		Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Beragama						Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pendidikan Politik Masyarakat (persen)							
									Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama. (persen)	100	100	100	100	100	100	100
	PP	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter							Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat (persen)	0,75	75	75	75	75	75	75
5	PN5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar							Perumahan dan Permukiman								
									Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
									Pertanian								
									Perhubungan								
									Komunikasi dan Informatika								
	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai	92,84	93,44	94	94,63	95	Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang	85	85	85	85	92.00	100	100

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			per kapita (%)							ditangani (persen)							
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87									
			Persentase rumah tangga yangmemiliki sertifikat hak atas tanahuntuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah (persen)	86	86	86	90	95	100	100
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,1	3,3	3,6	4									
			Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman(%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses	79,43% akses layak (termasuk 11% akses	82,07% akses layak (termasuk 13% akses	86,03% akses layak (termasuk 14% akses	90% akses layak (termasuk 15% akses	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yang masihmempraktikkan buang air besarsembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0		Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan aksesampah yang terkelola dengan baik(%)	72.92% penanganan ;3.70% pengurangan	73.70% penanganan ;5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	0,8 penanganan; 0,2 pengurangan	Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (persen)	54	100	60	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan akses airminum layak (%)	91.8%(JP: 23.6%,BJP: 68.2%)	93.8%(JP: 25.4%,BJP: 68.4%)	95.9%(JP: 27.1%,BJP: 68.7%)	97.9%(JP: 28.9%,BJP: 69.0%)	1(JP: 30.4%,BJP: 69.5%)		Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan akses airminum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (persen)	100	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,501896	55,181463	57,059998	58,104983	58,498632	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,79	80,79	80,79	81,7	82,61	83,52	84,43
			Luas lahan pertanian padi dan non- padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229,167	115942,71	116142,71	116342,71	116342,71									
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana														
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)														
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	20	20	20	20	20									
	PP	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)						Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)														
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)														
	PP	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal						Penyediaan Dan Pengembangan	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	80	80	80	80	90	90	90

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)						Prasarana Pertanian								
									Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C (persen)	70	75	80	80	85	90	95
	PP	Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100									
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408									
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07									
	PP	Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8									
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3	Aplikasi Informatika	Persetase perangkat daerah yag terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100	Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7									
6	PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim							Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
									Lingkungan								

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
									Hidup								
	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (persen)	80	80	80	85	90	95	100
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota (persen)	26,2	26,2	25,2	24,3	23,5	22,8	22,2
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari (persen)	80	80	80	85	90	95	100
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah (persen)	100	100	100	100	100	100	100
	PP	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1	1,15		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
	PP	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	Perencanaan Lingkungan	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang	80	80	80	85	90	95	100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			baseline pada sektor energi (persen)						Hidup	taat terhadap peraturan perundang-undangan (persen)							
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota (persen)	26,2	26,2	25,2	24,3	23,5	22,8	22,2
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9	9,3	9,4	9,4									
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2	2,3	2,5	2,6	2,9									
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7	7,3									
7	PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
									Sekretariat Daerah								
									Perencanaan								
									Kepegawaian								
									Keuangan								
									Inspektorat Daerah								
									Pendidikan dan Pelatihan								
									Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	PP	Optimalisasi	Indeks pengaruh dan	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67	Peningkatan	Persentase Gangguan	100	100	100	100	100	100	100

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
		Kebijakan Luar Negeri	peran Indonesia di dunia internasional						Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Trantibum yang dapat diselesaikan (persen)							
	PP	Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (persen)	100	100	100	100	100	100	100
	PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0.20		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibt dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM) (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Global Terrorism Index	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24									
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%									
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4									
	PP	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85									
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85									
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu (persen)	100	100	100	100	100	100	100
									Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan (persen)	100	100	100	100	100	100	100
									Pengelolaan Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total	90,22	90,58	92,22	93,51	93,75	94,35	95,50

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
				Target							Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
									Daerah	dalam APBD (persen)							
										Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa (persen)	0,23	0,22	0,42	0,62	0,82	1,02	1,22
										Penetapan APBD (Tepat Waktu) (persen)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
										Persentase SILPA terhadap APBD (persen)	3,83	3,50	3,25	3,00	2,75	2,50	2,25
										Persentase Belanja Pendidikan (20persen) (persen)	32,00	21,00	21,20	21,40	21,60	21,80	22,00
										Persentase Belanja Kesehatan (10persen) (persen)	18,84	19,04	19,24	19,44	19,64	19,84	20,04
										Opini BPK terhadap Laporan Keuangan ()	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
									Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan (persen)	91,22	93,22	93,42	93,62	93,82	94,02	94,22
									Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (persen)	42	42	42	45	60	65	80
									Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya (persen)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
									Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK (persen)	100	100	100	100	100	100	100
										Persentase Pelanggaran Pegawai (persen)	17	17	17	15	15	12	11
									Perumusan Kebijakan, Pendampingan	Persenatse Tindak Lanjut Temuan (persen)	45	45	45	50	60	65	65

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian	Rencana Capaian	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
									Dan Asistensi								
									Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (persen)	100	100	100	100	100	100	
									Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (persen)	100	100	100	100	100	100	
									Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran. (persen)	85	85	85	90	90	95	

Sumber : Perpres RI No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024, diolah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Misi pembangunan Kabupaten Bulukumba juga telah disinkronkan dengan arahan dalam Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu:

- 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
- 2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*;
- 3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
- 4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
- 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dapat dicermati pada tabel berikut :

Tabel V-8
Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO.	MISI RPJMD PROV. SULSEL TAHUN 2018-2023	MISI RPJMD KAB. BULUKUMBA TAHUN 2021-2026
1.	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
2.	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
3.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
4.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	
5.	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
		Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai targetnya. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, maka disusun sejumlah strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang sistematis berdasarkan strategi yang telah ditentukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan kepala daerah dan kebijakan yang terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bulukumba merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang efektif serta efisien Bupati dapat didukung oleh tenaga ahli yang berasal dari akademisi atau profesional.

Adapun strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 tersaji pada Tabel 6.1 sebagai berikut

Tabel VI-1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bulukumba

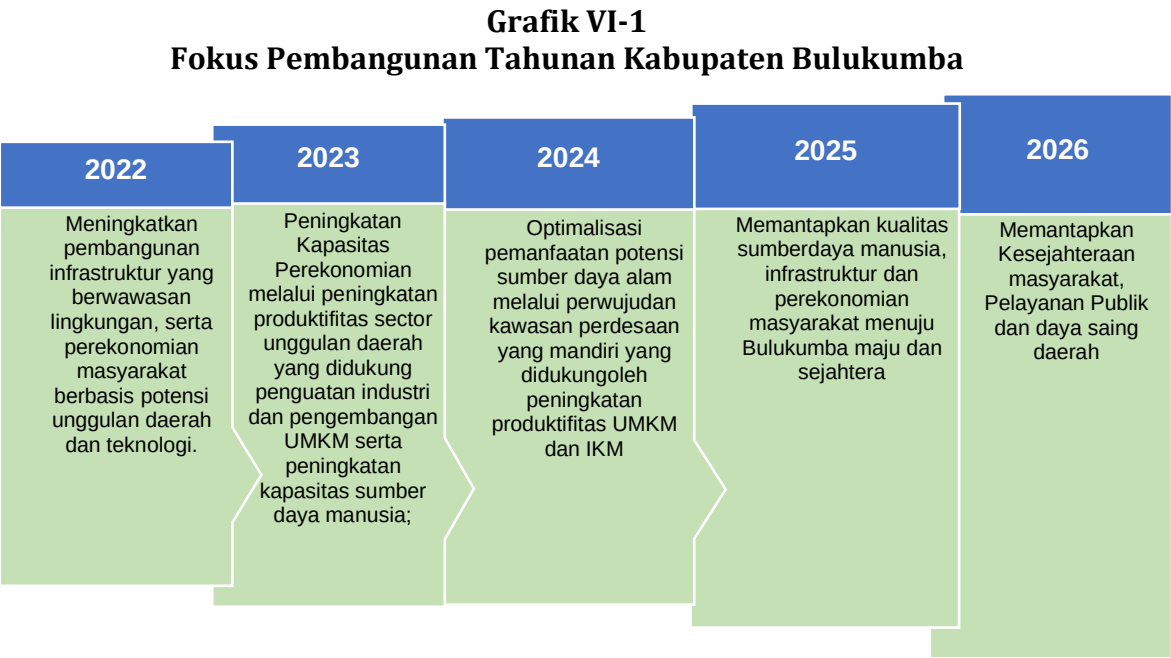
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”		
Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi Dan Beragama Dalam Masyarakat		
1.Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	1.Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan keagamaan serta sarana dan prasarana ibadah
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Layanan Publik		
2.Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Responsif, Profesional, Transparan Dan Akuntabel	2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan modernisasi birokrasi	2. Peningkatan kualitas dankapasitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayananpublic yang didukung oleh penerapan TIK
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Ekspor		
3.Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	4.Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	3. Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh penyuluh pertanian
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional Dan Internasional		
4.Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	5.Meningkatnya produksi hasil Perikanan	4. Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produk perikanan,
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal		
5.Terwujudnya SDM Yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	6.Meningkatnya Kualitas Pendidikan	5. Peningkatan akses,kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, danpeningkatan kualitas guru,
Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat		
6.Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat	7.Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	6. Peningkatan akses, mutu,dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik Dan Mancanegara		
7.Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	8.Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	7. Peningkatan jumlahkunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatankontribusi sektor pariwisata terhadap PAD,
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat		
8.Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	9.Meningkatnya pemenuhan infrastruktur wilayah	8. Peningkatan akses dankualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah,

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”		
Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah		
9.Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	9. Peningkatan daya saingindustri, khususnya industri pengolahan komoditasunggulan wilayah diiringi dengan penguatan danpeningkatan kinerja UMKM serta penguatan distribusiperdagangan,
Misi 10 Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas Dan Profesionalisme		
10.Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	11. Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	10. Peningkatan kualitasdan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan danolahraga disertai optimalisasi pembinaan dan pemberdayaankepemudaan dan olahraga
Misi 11 Membangun Desa Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
11.Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	12. Meningkatnya Kawasan Desa menuju Desa Mandiri	11. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh peningkatan peran masyarakat desa dankerjasama antar kawasan perdesaan
Misi 12 Penegakan Supremasi Hukum Dan Pertahanan Dan Keamanan		
12.Meningkatnya Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	13.Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	12. Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan dalam periode lima tahun pembangunan ini dirumuskan lagi menjadi rencana kerja tahunan pembangunan daerah dengan berfokus kepada penetapan tema dan prioritas sasaran makro yang akan dicapai.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Bulukumba dengan fokus atau penekanan arah pembangunan tahunan yang dideskripsikan pada gambar berikut:



Tahun 2022 (Tahun Pertama RPJMD)

Pada tahun pertama ini diharapkan pemulihan ekonomi dan kondisi masyarakat sudah mulai membaik kembali. Arah pembangunan daerah pada penggalan pertama ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan sebagai penopang utama terhadap pengembangan perekonomian masyarakat berbasis potensi unggulan daerah dengan mengedepankan penggunaan dan penerapan teknologi.

Tahun 2023 (Tahun Kedua RPJMD)

Pada tahun kedua ini pembangunan daerah difokuskan untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan daya tahan perekonomian masyarakat dengan fokus pada upaya untuk memajukan sektor pertanian, perkebunan, perikanan. Industri, perdagangan dan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Pembangunan perekonomian diharapkan lebih terintegrasi dengan infrastruktur pendukung yang telah kokoh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat. Pembangunan perekonomian baik pada pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata yang mengarah pada industrialisasi dikuatkan pada penggalan ini dan

dikoordinasikan secara lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terutama pada lokasi-lokasi pengembangan ekonomi potensial dan merupakan prioritas nasional.

Tahun 2024 (Tahun Ketiga RPJMD)

Pada penggalan ketiga pembangunan jangka menengah ini difokuskan untuk mengembangkan lebih lanjut potensi daerah dengan mengedepankan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi lokal yang telah direncanakan pada pembangunan berbasis spasial Kabupaten Bulukumba. Penguatan lokus pembangunan ini dilakukan secara terintegrasi dan mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Pembangunan yang terarah dan terintegrasi pada lokus-lokus ini dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat serta mendorong peningkatan produktifitas dan jiwa wirausaha (*enterprenuership*) generasi muda yang berbasis pada UMKM (*Start Up*)

Tahun 2025 (Tahun Keempat RPJMD)

Pada penggalan keempat RPJMD ini diarahkan pada memantapkan kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur dan perekonomian masyarakat menuju Bulukumba yang maju dan sejahtera. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur ini merupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sebelumnya yang diharapkan telah membentuk struktur perekonomian daerah yang kuat baik perekonomian yang mendukung industri maupun perekonomian berbasis masyarakat. Kualitas sumber daya yang memiliki daya saing yang baik serta infrastruktur konektifitas yang telah lancar antar kawasan.

Tahun 2026 (Tahun Kelima RPJMD)

Pada penggalan kelima atau penggalan terakhir pada RPJMD ini diarahkan pada memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemantapan kesejahteraan masyarakat ini merupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sumberdaya manusia, yang diharapkan akan meningkat baik pada pendidikan, kesehatan serta pendapatan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Pembangunan pada penggalan terakhir ini diharapkan dapat menyempurnakan tingkat kesejahteraan masyarakat menuju Bulukumba yang bermarwah, maju dan sejahtera.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Tabel VI-2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026

Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”							
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi Dan Beragama Dalam Masyarakat							
1.Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	1. Meningkatkan Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan keagamaan serta sarana danprasarana ibadah	1. Meningkatkan peran pemuka agama dan Lembaga keagamaan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama;	Peningkatan Kelembagaan Keagamaan	Peningkatan Insentif Imam Masjid	Akselerasi Peningkatan kualitas SDM Keagamaan	Akselerasi Peningkatan Kelembagaan Keagamaan
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Layanan Publik							
2.Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Responsif, Profesional, Transparan Dan Akuntabel	2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	2. Peningkatan kualitas dankapasitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh penerapan TIK	2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan publik dan kinerja aparatur pemerintah melalui pemanfaatan TIK;	Pengembangan sumber daya manusia dalam Peningkatan kinerja aparatur pemerintah	Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik yang bermutu untuk menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Ekspor							
3.Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	4. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian	3. Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh penyuluh pertanian	3. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian serta kualitas petani yang didukung olehpeningkatan nilai tambah dan pelayanan system informasi komoditas unggulan pertanian;	Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit untuk mendukung produksi pertanian Akselerasi Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya alam	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi, di bidang pertanian Peningkatan produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk pertanian Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, dan kemaritiman	Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian yang potensial Peningkatan pengolahan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”							
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional Dan Internasional							
4.Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	5. Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	4. Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produk perikanan,	4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang didukung oleh penerapan teknologi system perikanan tangkap	Peningkatan sektor perikanan menuju hilirisasi industri	Peningkatan promosi investasi sektor perikanan	Mempercepat pertumbuhan sektor perikanan	Peningkatan peran riset dan teknologi dalam mengoptimalkan dukungan terhadap Peningkatan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal							
5.Terwujudnya SDM Yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	6. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	5. Peningkatan akses,kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, danpeningkatan kualitas guru,	5. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan dan tenaga pendidik yang didukung oleh pemanfaatan TIK;	Penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan tamatan yang bisa menciptakan lapangan kerja	Peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan dasar dengan merancang dan menerapkan integrasi nilai-nilai moral dan karakter dalam proses belajar mengajar	Akselerasi Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dalam meluluskan tamatan	Peningkatan sarana dan media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah
Misi 6Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat							
6.Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat	7.Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	6. Peningkatan akses, mutu,dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan	6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya pada ibu, anak, remaja, dan lanjut usia, melalui peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas tenaga medis;	Perbaikan pelayanan kesehatan khususnya perbaikan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan stunting	1. Akselerasi pembangunan rumah sakit 2. Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar	Peningkatan keamanan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik Dan Mancanegara							
7.Meningkatkan Kontribusi	8.Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata	7. Peningkatan jumlah kunjungan	7. Mengoptimalkan dukungan sarana dan	Penguatan SDM pelaku usaha dan	1. Pemantapan prasarana dan	1. Peningkatan promosi wisata	Peningkatan citra dan mutu pelayanan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”							
Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Domestik Dan Mancanegara	wisatawan mancanegara dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD,	prasaranayang berkualitas pada destinasi wisata unggulan yangdidukung oleh peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan destinasi wisata unggulan;	dukungan sarana prasarana, teknologi, dan micro finance padawilayah pertumbuhan	sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; 2. Perluasan Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata; 2. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	pariwisata
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat							
8.Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	9.Meningkatnya pemenuhan infrastruktur wilayah	8. Peningkatan akses dankualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah,	8. Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, dan infrstruktur sumber daya air dengan mengarusutamakan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	1. Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan provinsi serta wilayah terisolir 2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan, dermaga, terminal dan bandara	1. Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan 2. Peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi serta pembangunan infrastuktur wilayah terisolir 3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman	Penyediaan infrastruktur sumberdaya air	Peningkatan layanan infrastruktur daerah
Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah							
9.Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan	10. Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	9. Peningkatan daya saingindustri, khususnya industri pengolahan komoditasunggulan wilayah diiringi dengan penguatan danpeningkatan kinerja UMKM serta	9. Meningkatkan kapasitas dan kinerja industri pengolahan komoditas unggulan wilayah yang bersinergi dengan penguatankapasitas UMKM yang didukung oleh	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	1. Pengembangan dan Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 2. Peningkatan akses	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau	Peningkatan peran umkm dalam mendongkrak perekonomian daerah

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”							
Ekonomi		penguatan distribusiperdagangan,	peningkatan fasilitasdan kualitas iklim berusaha;		kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial	kelompok sosial lainnya	
Misi 10 Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas Dan Profesionalisme							
10.Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	11. Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	10. Peningkatan kualitasdan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan danolahraga disertai optimalisasi pembinaan dan pemberdayaankepemudaan dan olahraga	10. Meningkatkan upaya fasilitasi pembinaan danpemberdayaan serta kuantitas dan kualitas prasaranakepemudaan dan olahraga;	Peningkatan persentase pemuda mendukung domain partisipasi dan kepemimpinan	Peningkatan peran pemuda dalam pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan pemuda yg berkualitas dan terintegrasi	Pencapaian sasaran pemuda yang berkarakter, berbudaya dan berwawasan kebangsaan
Misi 11 Membangun Desa Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat							
11.Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	12. Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	11. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh peningkatan peran masyarakat desa dankerjasama antar kawasan perdesaan	11. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perdesaan dengan mengedepankan peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perdesaan	Akselerasi Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya alam	Peningkatan produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan	Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan kemaritiman	Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melauai pemberdayaan masyarakat desa
Misi 12 Penegakan Supremasi Hukum Dan Pertahanan Dan Keamanan							
12.Meningkatnya Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	13. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	12. Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum	12. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparaturn pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam ketaatan danpenegakan hukum	Peningkatan peran dan fungsi kamtibmas sebagai upaya menekan gangguan keamanan	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan sinergitas untuk menjaga kamtibmas	Terwujudnya kondisi aman dan tertib

6.3 Program Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi serta janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih Muchtar Ali Yusuf sebagai Bupati Bulukumba dan H. A. Edy Manaf. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Bupati terdapat 12 Program Nyata yang akan menjadi arahan dalam menetapkan program prioritas, yaitu :

1. Memberikan intensif kepada guru mengaji, imam mesjid dan berkontribusi dalam pembangunan pesantren serta meningkatkan kesadaran toleransi beragama
2. Penataan Birokrasi secara Profesional, peningkatan Kualitas Pelayanan publik seperti mempermudah Kepengurusan E-KTP yang ditempatkan di Kantor Kecamatan dan mempermudah Kepengurusan perijinan Badan Usaha serta menambah Insentif Honorer.
3. Pengadaan Bibit unggul Gratis, Pupuk Bersubsidi secara merata, mesin pengeringan Gabah, Pembangunan Embung-embung, pengadaan air bersih dan sumur bor pada daerah strategis serta revitalisasi Irigasi.
4. Gerakan 1000 Rumpon Sepanjang Pesisir, Penyediaan Dermaga dan Kolam perlindungan perahu nelayan serta pembangunan sentra tempat pelelangan ikan (TPI)
5. Memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi serta pelaksanaan festival budaya lokal
6. Pencegahan dan penanggulangan Pandemi *COVID-19* (Pembagian Masker, dan Hand sanitizer) serta Pembangunan Rumah sakit Tipe C untuk pelayanan Masyarakat.
7. Destinasi Agrobisnis dan Penataan tempat wisata serta Festival Tahunan Berskala Nasional-Internasional.
8. Pembangunan dan Revitalisasi jalur transportasi daerah dan desa (Jalan dan Jembatan).
9. Peningkatan Koperasi & UMKM, Peningkatan ekonomi kreatif (Start Up), Peningkatan Industri Rumahan untuk pemberdayaan Perempuan, dan Pembangunan Industri Pengelolaan Kopi serta pembangunan pasar tradisional.
10. Mencetak Atlet Profesional dan Revitalisasi Stadion Mini serta Pembangunan Sirkuit Permanen Balapan Motor.
11. Mendorong Produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) demi Terwujudnya Desa Mandiri.
12. Bantuan dan Advokasi hukum Terhadap Masyarakat Kecil serta Penguatan Kemitraan Pertahanan dan Keamanan antar Institusi.

Selain itu, berdasarkan arahan Permendagri 86 Tahun 2017, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan, antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2. Pencapaian SDGs.
3. Pengentasan kemiskinan.
4. Pencapaian NSPK dan SPM.
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
6. Pengembangan daerah terisolir.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Selain kedua pertimbangan diatas, program prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021 -2026 juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Pembangunan sumber daya manusia
- 2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
- 3. Pemantapan reformasi birokrasi
- 4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
- 5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
- 6. Pelestarian lingkungan hidup
- 7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
- 8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
- 9. Peningkatan kemandirian desa
- 10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Proyek prioritas strategis daerah merupakan upaya menjawab isu isu pembangunan daerah melalui pelaksanaan pembangunan, khususnya pada kegiatan yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek prioritas strategis daerah Kabupaten Bulukumba dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional melalui sinergitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan menerapkan prinsip kolaborasi sumber pendanaan yaitu APBN, APBD, Bantuan Keuangan Provinsi, dan APBD Desa.

Tabel VI-3
Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022-2026

No	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran					Tahun Pelaksanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		APBN	APBD	KPBU	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD DESA		
Sasaran 1 Meningkatkan Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama								
1	Insentif Guru TKA/ TPA		√			√	2022-2026	Sekretariat Daerah
2	Insentif Imam Mesjid		√			√	2022-2026	Sekretariat Daerah
Sasaran 2 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan								
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		√				2022-2026	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
2	Nilai SAKIP		√				2022-2026	Sekretariat Daerah
Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi								
1	Layanan Integrasi Data menuju Layanan Online Single Submission (OSS) dan Smart City		√	√			2022-2024	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian/ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	Sarana dan Prasarana E-KTP di Kantor Kecamatan		√				2023-2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran 4 Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian								
1	Pengadaan Bibit Unggul untuk Pertanian, Pupuk Bersubsidi secara merata, mesin pengeringan Gabah, Pembangunan Embung-embung, pengadaan air bersih dan sumur bor pada daerah strategis serta revitalisasi Irigasi.	√	√		√		2022-2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Pengadaan Bibit Unggul untuk Peternakan	√	√		√		2022-2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sasaran 5 Meningkatkan Produksi hasil Perikanan								
1	Pengadaan Rumpon	√	√		√		2022-2026	Dinas Perikanan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran					Tahun Pelaksanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		APBN	APBD	KPBU	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD DESA		
2	Pembangunan Kolam Tambat Labuh	√	√	√	√		2022-2024	Dinas Perikanan
3	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	√	√	√	√		2026	Dinas Perikanan
Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan								
1	Pembangunan/ Rehabilitasi Pendidikan PAUD		√				2022	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Bantuan Beasiswa Pendidikan		√				2022-2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Generasi Emas (Asesmen dalam penentuan minat bakat peserta didik)		√				2022-2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 7 Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat								
1	Pembangunan Rumah Sakit Tipe C		√	√			2024-2026	Dinas Kesehatan
2	Insentif Dokter dan Paramedis		√				2022-2026	Dinas Kesehatan
3	Digitalisasi Rumah Sakit dan Puskesmas		√				2024-2026	Dinas Kesehatan
Sasaran 8 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara								
1	Pembangunan Pintu Masuk Kawasan Bira		√				2023	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	Pembangunan Wisata Kahayya (Integrasi Danau, Air Terjun Na'na dan Perbukitan)	√	√	√			2023-2026	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	Pelaksanaan Festival Wisata dan Budaya		√				2022-2026	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Sasaran 9 Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah								
1	Revitalisasi Drainase dalam kota dengan sistem Panel Knock Down	√	√				2022	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Lanjutan Pembangunan Mall Pelayanan Publik		√				2022	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Pembangunan Gedung Perkantoran 1 atap yang terintegrasi dengan Tribun lapangan Pemuda (terkoneksi dengan Lapangan Pemuda)		√	√			2022-2023	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Pembangunan Kawasan Pantai Merpati (perbaikan parsial untuk pusat kuliner)		√				2022-2023	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Pembangunan Pintu Masuk Bulukumba		√				2022	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Rehab Total jaringan perpipaan Air Bersih PDAM di 3 kecamatan (Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari-Bira)		√	√			2022 - 2024	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	Pembangunan Convention Center Bira (untuk 1000 orang)		√	√			2024	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	√	√		√		2022-2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Daerah Irigasi	√	√		√		2022-2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Jembatan Bialo		√				2022-2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Pembangunan dan perintisan	√	√		√		2023-2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran					Tahun Pelaksanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		APBN	APBD	KPBU	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD DESA		
	jalan Kawasan Lemo-lemo Bira/Poros Tanetang- Buleng (Santa Monika dan Hawaii sebagai Studi kasus)							
12	Teras Tanjung Bira		√		√		2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Perluasan dan Peningkatan jalan Ruas Mattiro Deceng-Tabboakkang (Kahaya)	√	√		√		2023-2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Perluasan/Lanjutan Perluasan Lokasi TPA		√				2022-2023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15	Pembangunan/Rehabilitasi Bundaran Phinisi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya		√				2023-2025	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 10 Meningkatkan perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi								
1	Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Ekonomi Kreatif (Start Up), Peningkatan Industri Perumahan Untuk pemberdayaan perempuan dan pembangunan industri, Pengolahan Kopi serta pembangunan pasar tradisional		√				2022-2026	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Lanjutan Pembangunan Pasar Seni Bira		√		√		2022	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Sentral Bulukumba, Pasar Kalimporo, Pasar Tanete dan Pasar lainnya		√	√			2022-2026	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 11 Meningkatkan Produktivitas Generasi Muda								
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga		√				2022-2026	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	Revitalisasi Stadion Mini		√				2022	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	Pembangunan Kawasan Sirkuit Motor	√	√	√			2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
4	Pembangunan Sport Centre Bulukumba	√	√	√			2024-2026	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Sasaran 12 Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan								
1	Penyusunan Dokumen Kawasan Ekonomi Pedesaan		√			√	2022-2026	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Digitalisasi Desa		√			√	2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sasaran 13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman								
1	Fasilitasi Bantuan dan Advokasi Hukum		√				2022-2026	Sekretariat Daerah
2	Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah/Bupati		√				2022-2026	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana		√				2022-2026	BPBD/ Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba akan dijabarkan dalam program-program pembangunan. Program pembangunan berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada sub bab ini akan disajikan program pembangunan daerah, yaitu program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Bulukmba 2021-2026 disajikan per misi yang sudah mempertimbangkan rekomendasi hasil KLHS RPJMD dan selanjutnya dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasaran masing-masing. Lebih detail mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel VI-4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
	Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat																		
	Tujuan 1 Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	n/a	n/a	70		71		71		72		72		72			
	Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	2 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	%	77,5	77,5	77,5	270.000.000	77,5	750.000.000	77,5	3.600.000.000	77,5	305.000.000	77,5	350.000.000	77,5	5.275.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	%	15	15	15	200.000.000	15	1.000.000.000	15	3.500.000.000	15	290.000.000	15	300.000.000	15	5.290.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama.	%	100	100	100	2.122.944.852	100	2.122.944.852	100	2.152.944.852	100	2.242.944.852	100	2.842.944.852	100	11.484.724.260	Sekretariat Daerah	
	Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik																		
	Tujuan 2 Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	3 Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC	CC		CC		B		B		B		B			
	Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	4 Skor LPPD/Kategori	Skor	n/a	n/a	3,5095		3,5260		3,5415		3,5560		3,5695		3,57			
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	%	100	100	100	392.933.600	100	392.933.600	100	427.933.600	100	482.933.600	100	782.933.600	100	2.479.668.000	Sekretariat Daerah	
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan	%	100	100	100	2.066.923.509	100	2.012.396.030	100	2.028.695.199	100	2.057.446.931	100	3.140.319.336	100	11.305.781.005	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	90,22	90,58	92,22	202.550.040.933	93,51	233.726.495.494	93,75	237.584.722.683	94,35	246.348.243.507	95,5	262.220.310.641	95,5	1.182.429.813.258	BPKPD	
		Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa	%	0,23	0,22	0,42		0,62		0,82		1,02		1,22		1,22		BPKPD	

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Penetapan APBD (Tepat Waktu)	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		BPKPD	
		Persentase SILPA terhadap APBD	%	3,83	3,5	3,25		3		2,75		2,5		2,25		2,25		BPKPD	
		Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	32	21	21,2		21,4		21,6		21,8		22		22		BPKPD	
		Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	18,84	19,04	19,24		19,44		19,64		19,84		20,04		20,04		BPKPD	
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		WDP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPKPD	
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	11,39	11,72	10,81	3.907.559.899	11,76	4.042.270.925	11,37	4.075.586.044	11,41	4.133.073.863	11,4	4.217.554.561	11,4	20.376.045.292	BPKPD	
5	Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	%	42	42	42	1.522.500.000	45	1.509.000.000	60	1.459.000.000	65	1.482.000.000	80	1.459.000.000	80	7.431.500.000	BKPSDM	
6	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	%	0,3	0,3	0,3	4.578.953.560	0,3	3.629.610.000	0,3	3.646.110.000	0,3	3.629.110.000	0,3	3.692.771.560	0,3	19.176.555.120	BKPSDM	
7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK	%	100	100	100	3.094.288.500	100	3.275.820.950	100	3.737.703.704	100	4.280.805.079	100	4.865.500.000	100	19.254.118.233	Inspektorat Daerah	
		Persentase Pelanggaran Pegawai	%	17	17	17		15		15		12		11		11		Inspektorat Daerah	
8	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persenatse Tindak Lanjut Temuan	%	45	45	45	1.263.878.800	50	1.451.584.200	60	1.536.547.348	65	1.690.202.083	65	2.060.894.701	65	8.003.107.132	Inspektorat Daerah	
	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	5 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	2,51-3,25	2,51-3,25	2,51-3,25		3,26-4,00		3,26-4,00		3,26-4,00		3,26-4,00		3,26-4,00			
1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)	%	100	100	100	712.104.900	100	712.104.900	100	719.510.000	100	728.510.000	100	729.510.000	100	3.601.739.800	Dinas Sosial	
		Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial	
		Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial	

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	%	100	100	99,5	635.214.190	100	1.235.214.190	100	1.235.214.190	100	1.535.214.190	100	1.235.214.190	100	5.876.070.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	%	85	85	85	1.489.697.200	90	1.489.697.200	90	1.489.697.200	95	1.489.697.200	95	1.489.697.200	95	7.448.486.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah	%	100	100	100	1.385.270.050	100	1.316.446.242	100	1.258.767.158	100	1.200.748.496	100	1.139.828.900	100	6.301.060.846	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
5	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yag terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	%	100	100	100	4.700.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	0	100	0	100	10.700.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	%	100	100	100	323.788.165	100	323.788.165	100	323.788.165	100	323.788.165	100	323.788.165	100	1.618.940.825	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
7	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor																		
	Tujuan 3 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	6 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,80	23,47	22,76		22,28		22,04		22,02		22,24		22,24			
	Sasaran 4 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	7 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	-0,77	-0,42	1,52		2,85		3,77		4,69		5,60		5,60			
1	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina	%	100	100	100	534.000.000	100	535.000.000	100	535.000.000	100	530.000.000	100	530.000.000	100	2.664.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	%	72	72	73	12.017.952.206	75	5.926.643.063	76	6.278.411.705	78	6.268.958.091	80	16.432.848.231	80	46.924.813.296	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan	%	15	17	18	4.338.384.075	20	2.390.000.000	22	2.700.000.000	25	2.885.000.000	28	5.700.000.000	28	18.013.384.075	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	%	80	80	80	3.974.500.000	80	7.125.000.000	90	7.085.000.000	90	7.110.000.000	90	7.335.000.000	90	32.629.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	%	36	36	45	55.000.000	45	55.000.000	45	53.000.000	45	50.000.000	45	40.000.000	45	253.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	%	71,18	26,25	26,25	442.500.000	19	442.500.000	19	442.500.000	19	442.500.000	19	443.500.000	19	2.213.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Kelompok Tani yang dibina	%	85	55	56	200.000.000	57	175.000.000	59	200.000.000	60	200.000.000	61	365.000.000	61	1.140.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	%	50	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	200.000.000	50	600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional																		
	Tujuan 4 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	8 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	11,94	12,52	12,86		13,21		13,55		13,89		14,24		14,24			
	Sasaran 5 Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	9 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	-1,93	3,54	5,14		6,75		7,66		10,22		13,52		13,52			
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan	%	11,94	12,52	12,86	28.675.499.684	13,21	26.325.499.684	13,55	26.325.499.684	13,89	8.675.499.684	14,24	58.675.499.684	14,24	148.677.498.420	Dinas Perikanan	
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	66	66	66		66,5		67		67,5		68		68		Dinas Perikanan	
		Produksi Perikanan Tangkap	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perikanan	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	%	100	100	100	1.512.766.160	100	1.512.766.160	100	1.512.766.160	100	1.512.766.160	100	1.512.766.160	100	7.563.830.800	Dinas Perikanan	
		Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	68	68	68		68,5		69		70		71		71		Dinas Perikanan	
3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	%	92	92	92	72.337.105	93	72.337.105	94	72.337.105	90	72.337.105	91	72.337.105	91	361.685.525	Dinas Perikanan	
	Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal																		
	Tujuan 5 Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	10 Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,99	69,70	70,39		71,09		71,81		72,53		73,26		73,26			
	Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11 Indeks Pendidikan	Angka	62,15	63,00	64,06		65,13		66,21		67,31		68,42		68,42			

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	%	95	100	100	95.255.294.300	100	95.975.294.300	100	95.475.294.300	100	95.475.294.300	100	95.475.294.300	100	477.656.471.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belummenyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	94	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	%	67	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah		1:9	1:9	1:8	1.570.000.000	1:7	570.000.000	1:7	570.000.000	1:6	570.000.000	1:6	570.000.000	1:6	3.850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	92	98	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat																		
	Tujuan 6 Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	12 Indeks Kesehatan	Angka	73,72	74,32	74,94		75,62		76,36		77,15		77,99		77,99			
	Sasaran 7 Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	Tahun	67,92	68,30	68,71		69,15		69,63		70,14		70,69		70,69			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM)	%	73	100	100	190.474.637.129	100	190.548.667.393	100	230.503.480.864	100	357.912.264.258	100	295.493.186.427	100	1.264.932.236.071	Dinas Kesehatan	
		Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM)	%	86	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	79	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan	%	50	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	2	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	4	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	31	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	8	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	63	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentase orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	41	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	91	91	91		93		95		97		99		100		Dinas Kesehatan	
		Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75	75	75		80		85		90		95		95		Dinas Kesehatan	
		Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk		1,42	1,42	1,42		1,5		1,57		1,63		1,7		1,7		Dinas Kesehatan	
		Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		0,8	0,8	0,8		0,8		1,1		1,1		1,1		1,1		Dinas Kesehatan	
		Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,002	0,002	0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		Dinas Kesehatan	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai	%	75	75	75	4.423.880.080	80	4.549.924.088	85	4.881.982.792	90	5.125.506.932	95	5.381.124.778	0,95	24.362.418.670	Dinas Kesehatan	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar	%	70	70	70	290.726.865	75	305.245.199	80	320.526.089	85	336.552.676	90	353.380.310	0,9	1.606.431.139	Dinas Kesehatan	

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	%	90	90	90		90		92		95		95		0,95		Dinas Kesehatan	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS	%	61	61	61	777.625.615	66	819.219.744	71	859.057.617	78	898.142.998	82	939.162.648	0,82	4.293.208.622	Dinas Kesehatan	
	Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara																		
	Tujuan 7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,60	2,74	2,88		3,05		3,26		3,51		3,79		3,79			
	Sasaran 8 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	15 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	1,31	4,52	5,37		6,11		6,76		7,34		7,86		7,86			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	80	80	80	4.281.656.621	85	10.431.490.201	90	17.751.162.555	95	17.321.788.431	100	111.615.265.526	100	161.401.363.334	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	80	80	80	933.386.200	85	1.080.055.510	90	1.321.847.656	95	1.297.668.441	100	1.427.435.285	100	6.060.393.092	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,6	1,6	1,6	711.991.951	1,64	1.047.591.553	1,66	1.190.403.834	1,68	1.112.610.283	1,7	1.223.871.311	1,7	5.286.468.932	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat																		
	Tujuan 8 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	16 Gini Rasio/ Indeks Gini	Angka	0,371	0,364	0,365		0,366		0,366		0,367		0,367		0,367			
	Sasaran 9 Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	17 Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	85	86	88		90		92		94		95		95			
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik	%	100	100	100	11.745.000.000	100	22.553.996.252	100	10.745.000.000	100	14.745.000.000	100	10.745.000.000	100	70.533.996.252	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5	%	97	97	98,93		100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	%	100	100	100	62.100.000.000	100	62.450.000.000	100	81.990.000.000	100	125.940.000.000	100	172.240.000.000	100	504.720.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		80,79	80,79	80,79	32.635.031.943	81,7	30.876.445.150	82,61	59.343.860.826	83,52	88.745.424.401	84,43	215.686.665.358	84,43	427.287.427.678	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	100	100	100	29938539010	100	16628539010	100	17628539010	100	12438539010	100	13438539010	100	90.072.695.050	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	85	85	85	13.696.687.750	85	4.696.687.750	92.00	8.696.687.750	100	3.196.687.750	100	3.196.687.750	100	33.483.438.750	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
6	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	54	100	60	114299750	100	114299750	100	114299750	100	114299750	100	114299750	100	571.498.750	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
7	Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman	%	97	97	97	35369872990	98	19951312990	99	21951312990	100	14951312990	100	14951312990	100	107.175.124.950	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	69	69	72		74		77		80		83		83		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	2	2,06	8,67	61615519400	20,44	11353089400	37,37	13853089400	59,46	8353089400	86,71	8353089400	86,71	103.527.877.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	%	49	49	68	-	88	1000000000	100	1000000000	100	-	100	-	100	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
10	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	%	100	100	100	7013165296	100	8798455495	100	9790704134	100	13992121412	100	9398074468	100	48.992.520.804	Dinas Lingkungan Hidup dan	
11	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya, Fungsi Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan	%	80	80	80	1933628831	85	2123124456	90	3005393653	95	4309722231	100	1800000000	100	13.171.869.172	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah																		

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
	Tujuan 9 Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	18 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23,44	24,05	24,47		24,91		25,36		25,83		26,32		26,32			
	Sasaran 10 Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	19 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	-4,85	11,33	11,08		10,84		10,63		10,42		10,24		10,24			
1	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100	100	100	59.391.700	100	59.391.700	100	59.391.700	100	59.391.700	100	59.391.700	100	296.958.500	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	%	100	100	100	31.200.000	100	31.200.000	100	31.200.000	100	31.200.000	100	31.200.000	100	156.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	%	2	2	2,2	536.332.126	2,3	1.084.332.126	3,2	1.084.332.126	3,7	1.084.332.126	4,2	1.036.332.126	4,2	4.825.660.630	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
4	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	2,2	2,2	2,2	278.500.000	2,7	278.500.000	100	278.500.000	100	278.500.000	100	278.500.000	100	1.392.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	50	50	50	84.481.888.980	50	8.481.888.980	50	8.481.888.980	50	10.981.888.980	50	11.981.888.980	50	124.409.444.900	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	7	7	7	1.868.487.010	8	2.368.487.010	8	2.368.487.010	8	2.368.487.010	9,15	2.368.487.010	9,15	11.342.435.050	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
7	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	30	30	30	337.116.950	35	337.116.950	40	337.116.950	45	337.116.950	50	337.116.950	50	1.685.584.750	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Misi 10 Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme																		
	Tujuan 10 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	20 Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	n/a	55,11	56,6		58,38		59,94		61,57		63,24		63,24			

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
	Sasaran 11 Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	21 Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	n/a	18	18		27		27		36		36		36			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator	%	100	100	100	776.960.300	100	776.960.300	100	783.756.700	100	783.756.700	100	806.627.000	100	3.928.061.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	%	100	100	100	7.745.766.000	100	1.732.541.000	100	11.777.161.000	100	39.149.121.000	100	26.228.598.000	100	86.633.187.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	1.050.000.000	100	13.504.840.001	100	6.718.940.001	100	1.564.619.528	100	1.408.940.001	100	24.247.339.531	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	
	Misi 11 Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat																		
	Tujuan 11 Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	22 Indeks Desa Membangun	Angka	0,70	0,72	0,74		0,76		0,78		0,80		0,82		0,824			
	Sasaran 12 Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	23 Persentase Desa Mandiri	%	0	0,92	1,83		2,75		4,59		6,42		9,17		9,17			
1	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	%	28	28	28	25.750.000	50	30.000.000	60	70.000.000	70	50.000.000	80	100.000.000	80	275.750.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	%	89	100	100	58.000.000	100	60.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	418.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	%	98	100	100	1.603.841.000	100	891.835.001	100	1.100.834.000	100	1.415.000.000	100	2.770.000.000	100	7.781.510.001	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100	100	100	381.013.000	100	381.013.001	100	435.000.000	100	435.000.000	100	435.000.000	100	2.067.026.001	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Tujuan 12 Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	24 Indeks Rasa Aman	Angka	14	15	15		15		15		15		15		15			
	Sasaran 13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	25 Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	83,13	88,02	88,56		89,11		89,66		90,20		90,75		90,75			
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	100	1.326.923.488	100	1.380.749.591	100	1.437.650.037	100	1.495.862.968	100	2.581.435.976	100	8.222.622.060	BPBD	

No	Misi /Tujuan / Sasaran /Program Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		BPBD	
		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		BPBD	
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	3.073.180.570	100	3.114.719.000	100	3.114.719.000	100	3.114.719.000	100	3.123.256.000	100	15.540.593.570	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Satpol PP, Damkar, Penyelamatan	
		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibt dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Satpol PP, Damkar, Penyelamatan	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	%	0,75	75	75	1.030.000.000	75	1.500.000.000	75	4.032.000.000	75	1.030.000.000	75	1.040.000.000	75	8.632.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	100	100	70.000.000	100	76.860.000	100	84.392.280	100	92.662.723	100	60.000.000	100	383.915.003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
5	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	305.494.000	100	305.101.950	100	308.152.970	100	314.316.029	100	323.745.510	100	1.556.810.459	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	75	75	75	292.954.000	77	301.742.620	80	304.760.046	83	310.855.247	90	320.180.905	90	1.530.492.818	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	

BAB VII

**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan periode RPJMD Kabupaten Bulukumba. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kabupaten Bulukumba selama 5 (lima) tahun ke depan tergambar pada Tabel VIII.1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan tabel VIII.1 tersebut mengalami pertumbuhan positif, hal ini dipengaruhi oleh proyeksi pendapatan yang mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dimana pada tahun 2026 pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba diproyeksi sebesar Rp.2.500.848.369.269, mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 54,3 % dibanding dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp.1.620.914.651.948. Dari sisi belanja, pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.2.450.848.369.269 atau juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 34,5% jika dibanding dengan tahun 2022 sebesar Rp.1.820.914.651.948. Berdasarkan hasil target pendapatan dan belanja daerah tersebut, dapat dirumuskan kerangka pendanaan keuangan daerah Bulukumba untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Kerangka pendanaan ini menyajikan hasil penghitungan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Bulukumba.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Tabel VII-1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba , Tahun 2022- 2026

Kode	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5	BELANJA	1.820.914.651.948	1.735.894.191.603	1.886.467.467.536	2.097.647.649.966	2.450.848.369.269
5.01	BELANJA OPERASI	1.066.629.923.348	1.106.383.054.117	1.139.996.638.710	1.182.926.319.287	1.245.750.887.448
5.01.01	Belanja Pegawai	697.131.490.830	731.988.065.371	753.947.707.332	791.645.092.699	847.060.249.188
5.01.02	Belanja Barang	348.627.986.158	338.524.542.386	351.614.760.518	358.647.055.728	369.406.467.400
5.01.03	Belanja Bunga	-	13.000.000.000	10.000.000.000	6.700.000.000	3.350.000.000
5.01.04	Belanja Hibah	18.434.170.860	19.434.170.860	19.434.170.860	20.434.170.860	20.434.170.860
5.01.05	Belanja Bantuan Sosial	2.436.275.500	3.436.275.500	5.000.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
5.02	BELANJA MODAL	555.992.710.728	415.030.847.292	524.696.035.943	680.819.292.473	951.973.376.481
5.02.01	Belanja Tanah	5.255.565.080	5.255.565.080	5.255.565.080	5.255.565.080	5.255.565.080
5.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	111.464.779.509	111.464.779.509	111.464.779.509	121.464.779.509	141.464.779.509
5.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	298.510.900.224	208.510.900.224	295.026.948.478	415.876.512.059	630.406.292.141
5.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.307.207.705	84.345.344.269	107.494.484.666	132.768.177.615	169.392.481.541
5.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.454.258.210	5.454.258.210	5.454.258.210	5.454.258.210	5.454.258.210
5.03	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.03.01	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.04	BELANJA TRANSFER	196.292.017.873	204.480.290.194	211.774.792.883	223.902.038.206	243.124.105.341
5.04.01	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	12.433.197.218	14.795.622.719	18.125.178.804	24.370.952.619	34.708.484.735
5.4.01.01	<i>Bagi Hasil Pajak</i>	7.361.508.729	8.811.046.968	10.780.167.537	14.012.366.749	19.605.605.262
5.4.01.02	<i>Bagi Hasil Retribusi</i>	5.071.688.489	5.984.575.751	7.345.011.267	10.358.585.871	15.102.879.474
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	183.858.820.655	189.684.667.475	193.649.614.079	199.531.085.587	208.415.620.605
	<i>BDD</i>	<i>110.535.651.000</i>	<i>110.535.651.000</i>	<i>110.535.651.000</i>	<i>110.535.651.000</i>	<i>110.535.651.000</i>
	<i>ADD</i>	<i>73.323.169.655</i>	<i>79.149.016.475</i>	<i>83.113.963.079</i>	<i>88.995.434.587</i>	<i>97.879.969.605</i>

Sumber : BPKD Kabupaten Bulukumba, 2021

Peningkatan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, disamping itu juga diharapkan dari pelampauan target pendapatan berupa optimalisasi PAD, peningkatan dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai dampak efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/ non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

7.2 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bulukumba terpilih;
- 2) berbasis pada target pencapaian dalam indikator sasaran;
- 3) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atau SPM;
- 4) penerapan sub urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026 berjumlah program yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja daerah sebagaimana telah tertuang dan dianalisis pada Bab III dokumen ini.

Kerangka pendanaan pembangunan Daerah tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel VII.1. Adapun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel VII.2.

Tabel VII 2

Indikasi Rencana Program, Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung		
							2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Grand Total					1.820.914.651.948		1.735.894.191.603		1.886.467.467.536		2.097.647.649.966		2.450.848.369.269		9.991.772.330.322	
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					554.388.817.090		476.683.747.719		562.486.126.180		743.539.020.072		852.820.470.337		3.189.918.181.397	
1	01		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					96.875.294.300		96.595.294.300		96.145.294.300		96.145.294.300		96.145.294.300		481.906.471.500	
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	95%	100%	100%	95.255.294.300	100%	95.975.294.300	100%	95.475.294.300	100%	95.475.294.300	100%	95.475.294.300	100%	477.656.471.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belummenyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan	94%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	67%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:9	1:9	1:8	1.570.000.000	1:7	570.000.000	1:7	570.000.000	1:6	570.000.000	1:6	570.000.000	1:6	3.850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	92%	98%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	45%	45%	45%	50.000.000	50%	50.000.000	75%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					195.966.869.689		196.223.056.424		236.565.047.362		364.272.466.864		302.166.854.163		1.295.194.294.502	
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM)	73%	100%	100%	190.474.637.129	100%	190.548.667.393	100%	230.503.480.864	100%	357.912.264.258	100%	295.493.186.427	100%	1.264.932.236.071	Dinas Kesehatan
				Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasvankes) (SPM)	86%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	79%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	50%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	2%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	4%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	31%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	8%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentas orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	63%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			Dinas Kesehatan	
				Persentase orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)	41%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			Dinas Kesehatan	
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91%	91%	91%		93%		95%		97%		99%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	75%		80%		85%		90%		95%		95%	Dinas Kesehatan	
				Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	1,42	1,42	1,42		1,5		1,57		1,63		1,7		1,7	Dinas Kesehatan	
				Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,8	0,8	0,8		0,8		1,1		1,1		1,1		1,1	Dinas Kesehatan	
				Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,002	0,002	0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		0,002	Dinas Kesehatan	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	75%	75%	75%	4.423.880.080	80%	4.549.924.088	85%	4.881.982.792	90%	5.125.506.932	95%	5.381.124.778	0,95	24.362.418.670	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar	70%	70%	70%	290.726.865	75%	305.245.199	80%	320.526.089	85%	336.552.676	90%	353.380.310	0,9	1.606.431.139	Dinas Kesehatan
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	90%	90%	90%		90%		92%		95%		95%		0,95	Dinas Kesehatan	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS	61%	61%	61%	777.625.615	66%	819.219.744	71%	859.057.617	78%	898.142.998	82%	939.162.648	0,82	4.293.208.622	Dinas Kesehatan
1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				235.697.667.342		167.108.086.802		208.808.506.226		267.475.069.801		437.716.310.758		1.316.805.640.929		
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,79	80,79	80,79	32.635.031.943	81,7	30.876.445.150	82,61	59.343.860.826	83,52	88.745.424.401	84,43	215.686.665.358	84,43	427.287.427.678	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	85%	85%	84,89%	29.938.539.010	84,96%	16.628.539.010	85,02%	17.628.539.010	87,08%	12.438.539.010	88,08%	13.438.539.010	100%	90.072.695.050	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
				Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	118%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	49%	49%	68%	-	88%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	-	100%	-	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik (SPM)	118%	100%	100%	1.721.087.000	100%	1.721.087.000	100%	1.721.087.000	100%	1.721.087.000	100%	1.721.087.000	100%	8.605.435.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik	100%	100%	100%	11.745.000.000	100%	22.553.996.252	100%	10.745.000.000	100%	14.745.000.000	100%	10.745.000.000	100%	70.533.996.252	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
				Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	97%	97%	98,93%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman	96,70%	96,70%	96,70%	35.369.872.990	97,89%	19.951.312.990	98,90%	21.951.312.990	100%	14.951.312.990	100%	14.951.312.990	100%	107.175.124.950	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Pemukiman Yang Tertata	69%	69%	71,57%		74,46%		77,36%		80,25%		83,15%		83,15%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	2,00	2,06	8,67	61.615.519.400	20,44	11.353.089.400	37,37	13.853.089.400	59,46	8.353.089.400	86,71	8.353.089.400	86,71	103.527.877.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100%	100%	100%	62.100.000.000	100%	62.450.000.000	100%	81.990.000.000	100%	125.940.000.000	100%	172.240.000.000	100%	504.720.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja trampil yang bersertifikat	100%	100%	100%	97.000.000	100%	98.000.000	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	505.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Jumlah dokumen penataan ruang yang dihasilkan	100%	100%	100%	475.617.000	100%	475.617.000	100%	475.617.000	100%	475.617.000	100%	475.617.000	100%	2.378.085.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					14.375.784.500		5.175.784.500		9.175.784.500		3.675.784.500		3.675.784.500		36.078.922.500	
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	54%	100%	60%	114.299.750	100%	114.299.750	100%	114.299.750	100%	114.299.750	100%	114.299.750	100%	571.498.750	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
				Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	93%	93%	93,50%	13.696.687.750	93,84%	4.696.687.750	94,14%	8.696.687.750	94,42%	3.196.687.750	94,66%	3.196.687.750	100%	33.483.438.750	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pemukiman Yang Tertata	65,00%	68,67%	71,57%	564.797.000	74,46%	364.797.000	77,36%	364.797.000	80,25%	364.797.000	83,15%	364.797.000	100%	2.023.985.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					8.297.904.058		8.383.268.591		8.446.899.493		8.513.810.307		9.607.920.315		43.249.802.764	
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	3.073.180.570	100%	3.114.719.000	100%	3.114.719.000	100%	3.114.719.000	100%	3.123.256.000	100%	15.540.593.570	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
				Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	100%	3.882.800.000	100%	3.872.800.000	100%	3.872.800.000	100%	3.872.800.000	100%	3.872.800.000	100%	19.374.000.000	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
				Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100%	100%	100%	1.326.923.488	100%	1.380.749.591	100%	1.437.650.037	100%	1.495.862.968	100%	2.581.435.976	100%	8.222.622.060	BPBD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPBD
				Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPBD
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah aparaturnya yang mengikuti tanggap bencana (Fasilitasi Petugas Reviter dan Tsunami)	80%	80%	80%	15.000.000	85%	15.000.000	90%	21.730.456	95%	30.428.339	100%	30.428.339	100%	112.587.134	Dinas Perhubungan
			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				3.175.297.200		3.198.257.101		3.344.594.300		3.456.594.300		3.508.306.300		16.683.049.201		
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	92%	92%	92%	442.315.000	94%	452.315.000	96%	452.315.000	98%	490.315.000	100%	495.315.000	100%	2.332.575.000	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	90%	100%	100%	712.104.900	100%	712.104.900	100%	719.510.000	100%	728.510.000	100%	729.510.000	100%	3.601.739.800	Dinas Sosial
				Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial
				Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	41%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial
				Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Jumlah PMKS yang Tervalidasi dalam data terpadu DTKS dan SIKS-NG	92%	92%	92%	1.048.108.000	95%	1.111.067.901	97%	1.225.000.000	98%	1.260.000.000	100%	1.295.000.000	100%	5.939.175.901	Dinas Sosial
				Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	97%	97%	98,42%		99,69%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100%	100%	100%	730.307.000	100%	730.307.000	100%	750.307.000	100%	760.307.000	100%	771.019.000	100%	3.742.247.000	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara	100%	100%	100%	242.462.300	100%	192.462.300	100%	197.462.300	100%	217.462.300	100%	217.462.300	100%	1.067.311.500	Dinas Sosial
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				45.163.782.436		64.547.910.451		70.448.436.464		99.411.984.127		85.890.227.121		365.462.340.599		
2	07		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				900.502.221		900.502.221		900.502.221		900.502.221		900.502.221		4.502.511.105		
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertama	100%	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	50.000.000	Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
				Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	0,38%	0,28%	0,15%		0,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	0,52%	0,71%	0,75%	747.500.000	0,79%	747.500.000	0,83%	747.500.000	0,87%	747.500.000	0,91%	747.500.000	0,91%	3.737.500.000	Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	1,00%	1,75%	1,94%	83.610.521	2,09%	83.610.521	2,24%	83.610.521	2,36%	83.610.521	2,47%	83.610.521	2,47%	418.052.605	Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100%	100%	100%	59.391.700	100%	59.391.700	100%	59.391.700	100%	59.391.700	100%	59.391.700	100%	296.958.500	Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
2	08		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				1.258.448.000		1.281.544.570		1.294.360.016		1.320.247.216		1.359.854.633		6.514.454.435		
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD	45%	45%	45%	120.000.000	50%	121.500.000	55%	122.715.000	60%	125.169.300	65%	128.924.379	65%	618.308.679	Dinas PPKB, PPPA
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	305.494.000	100%	305.101.950	100%	308.152.970	100%	314.316.029	100%	323.745.510	100%	1.556.810.459	Dinas PPKB, PPPA
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga	20%	20%	20%	230.000.000	25%	233.900.000	30%	236.239.000	35%	240.963.780	40%	248.192.693	40%	1.189.295.473	Dinas PPKB, PPPA
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Sistem Data Gender / Data Terpilah	45%	45%	45%	80.000.000	50%	82.400.000	55%	83.224.000	60%	84.888.480	65%	87.435.134	65%	417.947.614	Dinas PPKB, PPPA
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	600 Nilai	600 Nilai	600 Nilai	230.000.000	650 Nilai	236.900.000	700 Nilai	239.269.000	750 Nilai	244.054.380	800 Nilai	251.376.011	800 Nilai	1.201.599.391	Dinas PPKB, PPPA
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	75%	75%	75%	292.954.000	77%	301.742.620	80%	304.760.046	83%	310.855.247	90%	320.180.905	90%	1.530.492.818	Dinas PPKB, PPPA
2	09		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				1.717.000.000		1.718.000.000		1.718.000.000		1.708.000.000		1.696.894.488		8.557.894.488		
2	09	02	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina	100%	100%	100%	534.000.000	100%	535.000.000	100%	535.000.000	100%	530.000.000	100%	530.000.000	100%	2.664.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	4.026,36 Kkal/ Kap/ Hr	4.026,36 Kkal/ Kap/ Hr	4.026,36 Kkal/ Kap/ Hr	865.000.000	4.207,57 Kkal/ Kap/ Hr	865.000.000	4.291,72 Kkal/ Kap/ Hr	865.000.000	4.377,56 Kkal/ Kap/ Hr	865.000.000	4.465,11 Kkal/ Kap/ Hr	863.894.488	4.465,11 Kkal/ Kap/ Hr	4.323.894.488	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	98,71 Gram/ Kap/ Hr	98,71 Gram/ Kap/ Hr	98,71 Gram/ Kap/ Hr		100,69 Gram/ Kap/ Hr		102,70 Gram/ Kap/ Hr		104,70 Gram/ Kap/ Hr		106,85 Gram/ Kap/ Hr		106,85 Gram/ Kap/ Hr	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	389,13%	100%	100%	263.000.000	100%	263.000.000	100%	265.000.000	100%	263.000.000	100%	263.000.000	100%	1.317.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	36%	36%	45%	55.000.000	45%	55.000.000	45%	53.000.000	45%	50.000.000	45%	40.000.000	45%	253.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				1.160.000.000		13.654.840.001		6.828.940.001		1.674.619.528		1.518.940.001		24.837.339.531		
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	250.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	100%	100%	1.050.000.000	100%	13.504.840.001	100%	6.718.940.001	100%	1.564.619.528	100%	1.408.940.001	100%	24.247.339.531	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah	86%	86%	86%	60.000.000	90%	100.000.000	95%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	340.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung	
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				10.432.163.694		11.830.367.736		13.811.596.775		21.907.061.531		11.978.430.884		69.959.620.620		
2	11	02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	80%	80%	80%	750.000.000	85%	75.000.000	90%	100.000.000	95%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	1.125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota	26%	26%	25,20%	396.140.416	24,30%	434.962.177	23,51%	477.588.470	22,81%	3.024.392.140	22,16%	395.356.416	22,16%	4.728.439.619	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	80%	80%	80%	1.933.628.831	85%	2.123.124.456	90%	3.005.393.653	95%	4.309.722.231	100%	1.800.000.000	100%	13.171.869.172	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	87%	87%	94,88%	47.994.800	100%	52.698.290	100%	57.862.723	100%	63.533.270	100%	30.000.000	100%	252.089.083	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3	80%	80%	80%	42.385.751	85%	72.891.555	90%	80.034.927	95%	87.878.350	100%	30.000.000	100%	313.190.584	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan Hidup	80%	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun	80%	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	08 Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Lingkungan Hidup	Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat	100%	100%	100%	150.000.000	100%	164.700.000	100%	180.840.600	100%	198.562.979	100%	140.000.000	100%	834.103.579	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	28.848.600	100%	31.675.763	100%	34.779.988	100%	38.188.426	100%	25.000.000	100%	158.492.777	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11 Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100%	100%	100%	7.013.165.296	100%	8.798.455.495	100%	9.790.704.134	100%	13.992.121.412	100%	9.398.074.468	100%	48.992.520.804	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	100%	100%	70.000.000	100%	76.860.000	100%	84.392.280	100%	92.662.723	100%	60.000.000	100%	383.915.003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				2.313.437.130		2.913.437.130		2.913.437.130		3.213.437.130		2.913.437.130		14.267.185.650		
2	12	02 Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	100%	100%	99,50%	635.214.190	100%	1.235.214.190	100%	1.235.214.190	100%	1.535.214.190	100%	1.235.214.190	100%	5.876.070.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03 Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	85%	85%	85%	1.489.697.200	90%	1.489.697.200	90%	1.489.697.200	95%	1.489.697.200	95%	1.489.697.200	95%	7.448.486.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah saluran sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	3 Buah	3 Buah	3 Buah	182.025.990	3 Buah	182.025.990	3 Buah	182.025.990	4 Buah	182.025.990	4 Buah	182.025.990	17 Buah	910.129.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Pesentase buku agregat kependudukan yang diterbitkan per tahun	100%	100%	100%	6.499.750	100%	6.499.750	100%	6.499.750	100%	6.499.750	100%	6.499.750	100%	32.498.750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				2.068.604.000		1.362.848.002		1.705.834.001		2.000.000.000		3.405.000.000		10.542.286.003		
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	28%	28%	28%	25.750.000	50%	30.000.000	60%	70.000.000	70%	50.000.000	80%	100.000.000	80%	275.750.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	89%	100%	100%	58.000.000	100%	60.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	418.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	98%	100%	100%	1.603.841.000	100%	891.835.001	100%	1.100.834.000	100%	1.415.000.000	100%	2.770.000.000	100%	7.781.510.002	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	100%	100%	381.013.000	100%	381.013.001	100%	435.000.000	100%	435.000.000	100%	435.000.000	100%	2.067.026.002	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				5.382.233.000		5.382.233.000		5.382.233.000		5.382.233.000		5.382.233.000		26.911.165.000		
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Parameter Dan Proyeksi Penduduk)	100%	100%	100%	117.259.750	100%	122.310.460	100%	122.310.460	100%	117.310.860	100%	107.310.860	100%	586.502.390	Dinas PPKB, PPPA
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi Dan Kelembagaan Jaringan KB	100%	100%	100%	4.487.256.950	100%	5.036.206.240	100%	5.036.206.040	100%	5.041.205.640	100%	5.051.205.640	100%	24.652.080.510	Dinas PPKB, PPPA
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Jumlah Kecamatan terkait Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	100%	100%	100%	777.716.300	100%	223.716.300	100%	223.716.500	100%	223.716.500	100%	223.716.500	100%	1.672.582.100	Dinas PPKB, PPPA
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				2.057.119.803		14.943.685.457		15.385.444.753		16.470.740.403		24.889.269.205		73.746.259.621		
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	70%	75%	80%	2.057.119.803	80%	14.943.685.457	85%	15.385.444.753	90%	16.470.740.403	95%	24.889.269.205	95%	73.746.259.621	Dinas Perhubungan
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				6.085.270.050		4.316.446.242		4.258.767.158		1.200.748.496		1.139.828.900		17.001.060.845		
2	16	02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah	100%	100%	100%	1.385.270.050	100%	1.316.446.242	100%	1.258.767.158	100%	1.200.748.496	100%	1.139.828.900	100%	6.301.060.845	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	100%	100%	100%	4.700.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	-	100%	-	100%	10.700.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				1.660.086.126		2.208.086.126		2.208.086.126		2.208.086.126		2.160.086.126		10.444.430.630		
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	100%	100%	100,0%	31.200.000	100,0%	31.200.000	100,0%	31.200.000	100,0%	31.200.000	100,0%	31.200.000	100%	156.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan	74%	74%	73,7%	72.500.000	74,4%	72.500.000	75,1%	72.500.000	76,1%	72.500.000	76,8%	72.500.000	76,8%	362.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/ Usp Koperasi	Persentase Koperasi Kategori Sehat	72%	72%	72,3%	136.250.000	74,3%	136.250.000	76,3%	136.250.000	78,3%	136.250.000	80,3%	136.250.000	80,3%	681.250.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan perkoperasian	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan	40%	40%	40,0%	390.304.000	55,0%	390.304.000	65,0%	390.304.000	75,0%	390.304.000	85,0%	390.304.000	85,0%	1.951.520.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi	99%	99%	98,5%	215.000.000	98,8%	215.000.000	99,0%	215.000.000	99,3%	215.000.000	99,5%	215.000.000	100%	1.075.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2	17	07	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	2%	2%	2,2%	536.332.126	2,3%	1.084.332.126	3,2%	1.084.332.126	3,7%	1.084.332.126	4,2%	1.036.332.126	4,2%	4.825.660.630	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	2%	2%	2,2%	278.500.000	2,7%	278.500.000	100,0%	278.500.000	100,0%	278.500.000	100,0%	278.500.000	100%	1.392.500.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				843.028.265		843.028.265		843.028.265		843.028.265		843.028.265		4.215.141.325		
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	20%	20%	20%	54.764.600	20%	54.764.600	20%	54.764.600	20%	54.764.600	20%	54.764.600	20%	273.823.000	Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)				79.830.000		79.830.000		79.830.000		79.830.000		79.830.000		399.150.000	Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
				PMA	1 Investor	1 Investor	1 Investor		1 Investor	1 Investor	1 Investor		1 Investor	1 Investor		1 Investor	5 Investor		Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
				PMDN	75 Investor	75 Investor	75 Investor		75 Investor	75 Investor	75 Investor		75 Investor	75 Investor		75 Investor	375 Investor		Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	100%	100%	100%	323.788.165	100%	323.788.165	100%	323.788.165	100%	323.788.165	100%	323.788.165	100%	1.618.940.825	Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)				374.645.500		374.645.500		374.645.500		374.645.500		374.645.500		1.873.227.500	Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
				PMA	500000 Dollar	500000 Dollar	500000 Dollar		500000 Dollar	500000 Dollar	500000 Dollar		500000 Dollar	500000 Dollar		500000 Dollar	2500000 Dollar		Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
				PMDN	500Rp (M)	500Rp (M)	500Rp (M)		500Rp (M)	500Rp (M)	500Rp (M)		500Rp (M)	500Rp (M)		500Rp (M)	2500 Rp (M)		Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
				Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)															Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
				PMA	1 Investor	1 Investor	1 Investor		1 Investor	1 Investor	1 Investor		1 Investor	1 Investor		1 Investor	5 Investor		Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
				PMDN	75 Investor	75 Investor	75 Investor		75 Investor	75 Investor	75 Investor		75 Investor	75 Investor		75 Investor	375 Investor		Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	100%	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	50.000.000	Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				8.622.726.300		2.609.501.300		12.660.917.700		40.032.877.700		27.135.225.000		91.061.248.000		
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator	100%	100%	100%	776.960.300	100%	776.960.300	100%	783.756.700	100%	783.756.700	100%	806.627.000	100%	3.928.061.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	100%	100%	100%	7.745.766.000	100%	1.732.541.000	100%	11.777.161.000	100%	39.149.121.000	100%	26.228.598.000	100%	86.633.187.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
21904	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Jumlah gugus pramuka yang berprestasi di tingkat nasional	100%	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
220	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					25.000.000		27.500.000		25.000.000		26.250.000		27.562.500		131.312.500	
22002	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	25.000.000	100%	26.250.000	100%	27.562.500	100%	131.312.500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
221	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					20.000.000		22.000.000		23.100.000		24.255.000		25.467.750		114.822.750	
22102	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	23.100.000	100%	24.255.000	100%	25.467.750	100%	114.822.750	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
222	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					350.000.000		255.000.000		205.000.000		205.000.000		205.000.000		1.220.000.000	
22202	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	40%	40%	40%	100.000.000	65%	105.000.000	70%	105.000.000	75%	105.000.000	75%	105.000.000	75%	520.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22203	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan	30%	30%	30%	50.000.000	45%	50.000.000	50%	50.000.000	60%	50.000.000	60%	50.000.000	60%	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22205	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	35%	35%	35%	200.000.000	50%	50.000.000	60%	50.000.000	65%	50.000.000	65%	50.000.000	65%	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22206	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Benda koleksi daerah yang terverifikasi					10%	50.000.000							10%	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
223	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					177.770.016		184.880.817		188.393.553		194.227.873		204.468.582		949.740.841	
22302	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,98	0,98	0,98	173.671.416	0,98	180.618.273	0,98	184.050.022	0,98	189.571.523	0,99	198.223.098	0,99	926.134.332	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Presentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,98	0,98	0,98		0,98		0,98		0,98		0,99		99%		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Jumlah KCKR daerah yang dihimpun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22303	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnya	100%	100%	100%	4.098.600	100%	4.262.544	100%	4.343.531	100%	4.656.350	100%	6.245.484	100%	23.606.509	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasa	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
224	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					90.393.831		94.009.584		95.795.766		100.669.638		104.998.435		485.867.254	
22402	Program Pengelolaan Arsip	Pesentase Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	100%	100%	100%	58.881.474	100%	61.236.733	100%	62.400.231	100%	64.272.237	100%	67.035.943	100%	313.826.618	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Presentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	100%	100%	100%	31.512.357	100%	32.772.851	100%	33.395.535	100%	36.397.401	100%	37.962.492	100%	172.040.636	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan				146.564.037.742		68.229.972.184		79.081.657.889		63.203.338.655		222.410.203.242		579.489.209.711		
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				30.260.602.949		27.910.602.949		27.910.602.949		10.260.602.949		60.260.602.949		156.603.014.745		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan	11,94%	12,52%	12,86%	28.675.499.684	13,21%	26.325.499.684	13,55%	26.325.499.684	13,89%	8.675.499.684	14,24%	58.675.499.684	14,24%	148.677.498.420	Dinas Perikanan
				Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	66%	66%	66%		66,50%		67%		67,50%		68%		68%	Dinas Perikanan	
				Persentase Produksi Perikanan Tangkap	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Perikanan	
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	100%	100%	100%	1.512.766.160	100%	1.512.766.160	100%	1.512.766.160	100%	1.512.766.160	100%	1.512.766.160	100%	7.563.830.800	Dinas Perikanan
				Cakupan Bina Kelompok Perikanan	68%	68%	68%		68,50%		69%		70%		71%		71%	Dinas Perikanan	
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	92%	92%	92%	72.337.105	93%	72.337.105	94%	72.337.105	90%	72.337.105	91%	72.337.105	91%	361.685.525	Dinas Perikanan
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang				5.927.034.772		9.559.137.264		20.263.414.044		19.732.067.155		114.266.572.122		169.748.225.357		
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	80%	80%	80%	4.281.656.621	85%	7.431.490.201	90%	17.751.162.555	95%	17.321.788.431	100%	111.615.265.526	100%	158.401.363.334	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	80%	80%	80%	933.386.200	85%	1.080.055.510	90%	1.321.847.656	95%	1.297.668.441	100%	1.427.435.285	100%	6.060.393.091	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,6%	1,6%	1,6%	711.991.951	1,64%	1.047.591.553	1,66%	1.190.403.834	1,68%	1.112.610.283	1,70%	1.223.871.311	1,70%	5.286.468.931	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				22.178.336.281		16.934.143.063		17.555.911.705		17.731.458.091		31.701.348.231		106.101.197.371		
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	71,69%	72,00%	73,00%	12.017.952.206	75,00%	5.926.643.063	76,00%	6.278.411.705	78,00%	6.268.958.091	80,00%	16.432.848.231	80,00%	46.924.813.296	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan	15,30%	16,90%	18,00%	4.338.384.075	20,00%	2.390.000.000	22,00%	2.700.000.000	25,00%	2.885.000.000	28,00%	5.700.000.000	28,00%	18.013.384.075	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	80%	80%	80%	3.974.500.000	80%	7.125.000.000	90%	7.085.000.000	90%	7.110.000.000	90%	7.335.000.000	90%	32.629.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	80%	80%	83%	295.000.000	85%	295.000.000	87%	295.000.000	89%	295.000.000	90%	295.000.000	90%	1.475.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	71,18%	26,25%	26,25%	442.500.000	19,00%	442.500.000	19,00%	442.500.000	19,00%	442.500.000	19,00%	443.500.000	19,00%	2.213.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase Kelompok Tani yang dibina	85%	55%	56%	200.000.000	57%	175.000.000	59%	200.000.000	60%	200.000.000	61%	365.000.000	61%	1.140.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	14,76%	15,45%	15,44%	810.000.000	13,94%	480.000.000	12,44%	455.000.000	10,94%	430.000.000	9,44%	930.000.000	9,44%	3.105.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	50%	50%	50%	100.000.000	50%	100.000.000	50%	100.000.000	50%	100.000.000	50%	200.000.000	50%	600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan					916.383.800		2.044.408.968		1.570.049.250		1.197.530.520		900.000.000		6.628.372.538	
3	28	04 Program Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana	100%	100%	100%	916.383.800	100%	2.044.408.968	100%	1.570.049.250	100%	1.197.530.520	100%	900.000.000	100%	6.628.372.538	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					85.194.793.930		9.194.793.930		9.194.793.930		11.694.793.930		12.694.793.930		127.973.969.650	
3	30	03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	50%	50%	50%	84.481.888.980	50%	8.481.888.980	50%	8.481.888.980	50%	10.981.888.980	50%	11.981.888.980	50%	124.409.444.900	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3	30	04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	23,25%	23,25%	23,25%	194.110.000	25,58%	194.110.000	27,90%	194.110.000	30,23%	194.110.000	32,55%	194.110.000	33%	970.550.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3	30	05 Program Pengembangan Ekspor	Promosi Komoditi Ekspor	100%	100%	100%	181.678.000	100%	181.678.000	100%	181.678.000	100%	181.678.000	100%	181.678.000	100%	908.390.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3	30	06 Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	30,00%	30,00%	30,00%	337.116.950	35,00%	337.116.950	40,00%	337.116.950	45,00%	337.116.950	50,00%	337.116.950	50%	1.685.584.750	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang perindustrian					2.086.886.010		2.586.886.010		2.586.886.010		2.586.886.010		2.586.886.010		12.434.430.050	
3	31	02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	7,14%	7,14%	7,14%	1.868.487.010	7,79%	2.368.487.010	8,03%	2.368.487.010	8,29%	2.368.487.010	9,15%	2.368.487.010	9%	11.342.435.050	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3	31	03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	80%	80%	80%	50.000.000	85%	50.000.000	90%	50.000.000	95%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	250.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3	31	04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	83,33%	83,33%	83,33%	168.399.000	83,33%	168.399.000	83,33%	168.399.000	83,33%	168.399.000	83,33%	168.399.000	83%	841.995.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
4		Unsur Pendukung Urusan					14.742.382.135		16.035.185.814		16.999.990.666		17.535.506.128		21.163.131.172		86.476.195.915	
4	01	Sekretariat Daerah					3.781.456.612		4.481.456.612		4.744.019.448		5.074.019.448		6.929.536.764		25.010.488.884	
4	01	02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama.	100%	100%	100%	3.038.424.512	100%	3.738.424.512	100%	3.858.424.512	100%	4.058.424.512	100%	5.208.424.512	100%	19.902.122.560	Sekretariat Daerah
			Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
			Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
4	01	03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing.	100%	100%	100%	743.032.100	100%	743.032.100	100%	885.594.936	100%	1.015.594.936	100%	1.721.112.252	100%	5.108.366.324	Sekretariat Daerah
			Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
			Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana.	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
4	02	Sekretariat DPRD					10.960.925.523		11.553.729.202		12.255.971.218		12.461.486.680		14.233.594.408		61.465.707.031	
4	02	02 Program Dukungan Pelaksana Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase PROLEGDA yang Terealisasi	100%	100%	100%	10.960.925.523	100%	11.553.729.202	100%	12.255.971.218	100%	12.461.486.680	100%	14.233.594.408	100%	61.465.707.031	Sekretariat DPRD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%		Sekretariat DPRD	
				Persentase Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	100%	100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%		Sekretariat DPRD	
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				217.835.150.692		247.548.160.879		251.435.874.225		260.311.428.580		278.156.900.191		1.255.287.514.567		
5	01		Perencanaan				4.011.201.364		3.373.889.524		3.403.560.562		3.452.106.274		5.300.368.493		19.541.126.216		
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	100%	100%	1.944.277.855	100%	1.361.493.494	100%	1.374.865.363	100%	1.394.659.343	100%	2.160.049.157	100%	8.235.345.212	Bappelitbangda
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100%	100%	100%		100%		100%		100%	100%		100%		Bappelitbangda	
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan	100%	100%	100%	2.066.923.509	100%	2.012.396.030	100%	2.028.695.199	100%	2.057.446.931	100%	3.140.319.336	100%	11.305.781.005	Bappelitbangda
5	02		Keuangan				207.306.481.942		238.617.647.529		242.509.189.837		251.330.198.480		267.286.746.312		1.207.050.264.100		
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	90,22%	90,58%	92,22%	202.550.040.933	93,51%	233.726.495.494	93,75%	237.584.722.683	94,35%	246.348.243.507	95,50%	262.220.310.641	95,50%	1.182.429.813.258	BPKPD
				Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa	0,23%	0,22%	0,42%		0,62%		0,82%		1,02%		1,22%		1,22%	BPKPD	
				Penetapan APBD (Tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	BPKPD	
				Persentase SILPA terhadap APBD	3,83%	3,50%	3,25%		3,00%		2,75%		2,50%		2,25%		2,25%	BPKPD	
				Persentase Belanja Pendidikan (20%)	32,00%	21,00%	21,20%		21,40%		21,60%		21,80%		22,00%		22,00%	BPKPD	
				Persentase Belanja Kesehatan (10%)	18,84%	19,04%	19,24%		19,44%		19,64%		19,84%		20,04%		20,04%	BPKPD	
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	BPKPD	
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset	91,22%	93,22%	93,42%	848.881.110	93,62%	848.881.110	93,82%	848.881.110	94,02%	848.881.110	94,22%	848.881.110	94,22%	4.244.405.550	BPKPD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	11,39%	11,72%	10,81%	3.907.559.899	11,76%	4.042.270.925	11,37%	4.075.586.044	11,41%	4.133.073.863	11,40%	4.217.554.561	11,40%	20.376.045.292	BPKPD
5	03		Kepegawaian				1.522.500.000		1.509.000.000		1.459.000.000		1.482.000.000		1.459.000.000		7.431.500.000		
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	42,0%	42,0%	42,0%	1.522.500.000	45,0%	1.509.000.000	60,0%	1.459.000.000	65,0%	1.482.000.000	80,0%	1.459.000.000	80%	7.431.500.000	BKPSDM
5	04		Pendidikan Dan Pelatihan				4.578.953.560		3.629.610.000		3.646.110.000		3.629.110.000		3.692.771.560		19.176.555.120		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	0,33%	0,33%	0,33%	4.578.953.560	0,33%	3.629.610.000	0,33%	3.646.110.000	0,33%	3.629.110.000	0,33%	3.692.771.560	0,33%	19.176.555.120	BKPSDM
5	05		Penelitian Dan Pengembangan				416.013.826		418.013.826		418.013.826		418.013.826		418.013.826		2.088.069.130		
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	416.013.826	100%	418.013.826	100%	418.013.826	100%	418.013.826	100%	418.013.826	100%	2.088.069.130	Bappelitbangda
				Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bappelitbangda	
				Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bappelitbangda	
				Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah Penerapan Sida	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bappelitbangda	
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				4.358.167.300		4.727.405.150		5.274.251.052		5.971.007.162		6.926.394.701		27.257.225.366		
6	01		Inspektorat Daerah				4.358.167.300		4.727.405.150		5.274.251.052		5.971.007.162		6.926.394.701		27.257.225.366		
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK	100%	100%	100%	3.094.288.500	100%	3.275.820.950	100%	3.737.703.704	100%	4.280.805.079	100%	4.865.500.000	100%	19.254.118.233	Inspektorat Daerah
				Persentase Pelanggaran Pegawai	17%	17%	17%		15%		15%		12%		11%		11%	Inspektorat Daerah	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persenatse Tindak Lanjut Temuan	45%	45%	45%	1.263.878.800	50%	1.451.584.200	60%	1.536.547.348	65%	1.690.202.083	65%	2.060.894.701	65%	8.003.107.132	Inspektorat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Rencana Capaian RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7			Unsur Kewilayahan				24.574.686.601		25.274.812.827		25.535.261.901		26.084.689.931		27.761.083.465		129.230.534.726		
7	01		Kecamatan				24.574.686.601		25.274.812.827		25.535.261.901		26.084.689.931		27.761.083.465		129.230.534.726		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	100%	100%	22.500.000	100%	40.195.000	100%	23.226.500	100%	23.922.945	100%	56.640.360	100%	166.484.805	Seluruh Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	24.544.186.601	100%	25.226.377.827	100%	25.503.548.201	100%	26.051.766.986	100%	27.694.943.105	100%	129.020.822.720	Seluruh Kecamatan
7	01	04	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	8.000.000	100%	8.240.000	100%	8.487.200	100%	9.000.000	100%	9.500.000	100%	43.227.200	Seluruh Kecamatan
8			Unsur Pemerintahan Umum				1.850.000.000		4.525.000.000		17.632.000.000		1.980.000.000		2.053.000.000		28.040.000.000		
8	01		Kesatuan Bangsa Dan Politik				1.850.000.000		4.525.000.000		17.632.000.000		1.980.000.000		2.053.000.000		28.040.000.000		
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi	100%	100%	100%	100.000.000	100%	625.000.000	100%	4.000.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	4.935.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	75%	75%	75%	1.030.000.000	75%	1.500.000.000	75%	4.032.000.000	75%	1.030.000.000	75%	1.040.000.000	75%	8.632.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	85%	85%	85%	250.000.000	85%	650.000.000	85%	2.500.000.000	85%	250.000.000	85%	258.000.000	85%	3.908.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	77,5%	77,5%	77,5%	270.000.000	77,5%	750.000.000	77,5%	3.600.000.000	77,5%	305.000.000	77,5%	350.000.000	77,5%	5.275.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	15%	15%	15%	200.000.000	15%	1.000.000.000	15%	3.500.000.000	15%	290.000.000	15%	300.000.000	15%	5.290.000.000	Badan Kesbangpol
x			Penunjang Urusan Pemerintahan				811.437.627.952		828.321.996.580		857.573.869.159		879.610.675.312		953.666.959.040		4.330.611.128.044		
x	xx	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%	811.437.627.952	100%	828.321.996.580	100%	857.573.869.159	100%	879.610.675.312	100%	953.666.959.040	100%	4.330.611.128.044	Semua Perangkat Daerah

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) pada akhir periode masa jabatan.

8.1 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah yang terdiri dari Indikator Makro, IKU, dan IKK.

8.1.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

- 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 2. Tingkat Kemiskinan
- 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi
- 5. PDRB Perkapita ADHB
- 6. Rasio Gini
- 7. Penurunan Emisi GRK

Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VIII-1
Penetapan Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Rencana Capaian (2021)	Target Tahun ke -					Kondisi Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	68,99	69,71	70,11	70,61	71,17	71,70	72,17	72,17
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,10	7,04	6,62	6,18	6,10	6,05	6,00	6,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,42	3,40	3,33	3,27	3,23	3,17	3,11	3,11
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	0,43	3,20	3,85	4,25	4,83	5,45	6,00	6,00
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	34,43	37,43	39,15	40,92	42,83	45,04	46,75	46,75
6	Gini Rasio/ Indeks Gini	Angka	0,371	0,364	0,356	0,349	0,342	0,334	0,327	0,327
7	Penurunan Emisi GRK	Gg Co2-Eq	464.809,63	463.880,01	462.952,25	462.026,34	461.102,29	460.180,08	459.259,72	459.259,72

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

Penyelarasan indikator Makro Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dimaksudkan untuk menjamin sinergi program prioritas pemerintah daerah yang selaras dengan program prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan program perangkat daerah dengan indikator kinerja program yang selaras dan mendukung program prioritas nasional, serta dapat menuangkan menjadi indikator pembangunan di daerah. Adapun penyelarasan indikator makro, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Tabel VIII-2

Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba 2021-2026, Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dan RPJMN 2020-2024

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023				Indikator Pembangunan	RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026						
		Target						Target					Kondisi Awal	Rencana Capaian	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,3	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,7	4,10-5,55	4,62-5,98	5,04-6,52	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,43	3,20	3,20-3,85	3,85-4,25	4,25-4,83	4,83-5,45	5,45-6,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)					6,0-7,0	Tingkat Kemiskinan (%)	8,99	8,7	8,1	7,45	Tingkat Kemiskinan (%)	7,10	7,04	6,62	6,18	6,10	6,05	6,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					3,6-4,3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,31	6,08	5,9	5,69	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,42	3,4	3,33	3,27	3,23	3,17	3,11
4	Rasio Gini					0,360-0,374	Rasio Gini	0,38	0,382	0,381	0,381	Rasio Gini	0,371	0,364	0,356	0,349	0,342	0,334	0,327
5	Penurunan Emisi GRK (%)					27,3	Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO²Eq)	0,96	1,07	1,198	1,347	Penurunan Emisi GRK (Gg Co2-Eq)	464.809,63	463.880,01	462.952,25	462.026,34	461.102,29	460.180,08	459.259,72
6	Indeks Pembangunan Manusia					75,54	Indeks Pembangunan Manusia	71,9	72,2	72,57	73,05	Indeks Pembangunan Manusia	69	69,7	70,1	70,6	71,2	71,7	72,2

Sumber : Perpres RI No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024, diolah, Perda No. 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018 -2023, diolah

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Tabel VIII-3
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bulkukumba Tahun 2022-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Rencana Capaian 2021	Target					Kondisi Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	n/a	n/a	70	71	71	72	72	72
2	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC	CC	CC	B	B	B	B
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	n/a	n/a	3,5095	3,5260	3,5415	3,5560	3,5695	3,5695
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	2,51-3,25	2,51-3,25	2,51-3,25	3,26-4,00	3,26-4,00	3,26-4,00	3,26-4,00	3,26-4,00
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,80	23,47	22,76	22,28	22,04	22,02	22,24	22,24
7	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	-0,77	-0,42	1,52	2,85	3,77	4,69	5,60	5,60
8	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	11,94	12,52	12,86	13,21	13,55	13,89	14,24	14,24
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	-1,93	3,54	5,14	6,75	7,66	10,22	13,52	13,52
10	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,99	69,71	70,11	70,61	71,17	71,70	72,17	72,17
11	Indeks Pendidikan	Angka	62,15	63,00	64,06	65,13	66,21	67,31	68,42	68,42
12	Indeks Kesehatan	Angka	73,72	74,32	74,94	75,62	76,36	77,15	77,99	77,99
13	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,92	68,30	68,71	69,15	69,63	70,14	70,69	70,69
14	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,60	2,74	2,88	3,05	3,26	3,51	3,79	3,79
15	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	1,31	4,52	5,37	6,11	6,76	7,34	7,86	7,86
16	Gini Rasio/ Indeks Gini	Angka	0,371	0,364	0,356	0,349	0,342	0,334	0,327	0,327
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	85	86	88	90	92	94	95	95
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23,44	24,05	24,47	24,91	25,36	25,83	26,32	26,32
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	-4,85	11,33	11,08	10,84	10,63	10,42	10,24	10,24
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	n/a	55,11	56,6	58,38	59,94	61,57	63,24	63,24

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Rencana Capaian 2021	Target					Kondisi Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	n/a	18	18	27	27	36	36	36
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	0,82
23	Persentase Desa Mandiri	%	0	0,92	1,83	2,75	4,59	6,42	9,17	9,17
24	Indeks Rasa Aman	Angka	14	15	15	15	15	15	15	15
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	83,13	88,02	88,56	89,11	89,66	90,20	90,75	90,75

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masajabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Tabel VIII-4
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
1			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	1		Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,43	3,20	3,85	4,25	4,83	5,45	6,00	6,00
1	1	2	PDRB ADHK	Rp, Miliar	8.604,20	8.805,34	8.944,66	9.065,34	9.171,79	9.267,01	9.353,15	9.353,15
1	1	3	Laju inflasi	%	2,30	2,69	2,62	2,55	2,48	2,41	2,33	2,33
1	1	4	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	34,43	37,43	39,15	40,92	42,83	45,04	46,75	46,75
1	1	5	Indeks Gini	%	0,371	0,366	0,367	0,368	0,369	0,370	0,371	0,371
1	1	6	Persentase Penduduk miskin	%	7,10	6,83	6,61	6,41	6,22	6,05	5,89	5,89
1	2		Kesejahteraan sosial									
1	2	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,99	69,71	70,11	70,61	71,17	71,7	72,17	72,17
1	2	2	Angka Usia Harapan Hidup	angka	67,92	68,30	68,71	69,15	69,63	70,14	70,69	70,69
1	2	3	Angka Harapan Lama Sekolah	angka	13,17	13,47	13,84	14,28	14,79	15,37	16,02	16,02
1	2	4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	7,67	7,75	7,84	7,89	7,92	7,91	7,87	7,87
1	2	5	Pengeluaran Per Kapita Riil	Rp	10.513	10.570	10.617	10.657	10.693	10.725	10.754	10.754
1	2	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		68,26	68,81	70,16	71,50	72,84	74,19	75,53	75,53
1	2	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,42	3,44	3,47	3,49	3,52	3,53	3,55	3,55
1	2	8	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,015	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1			Seni Budaya Dan Olahraga									
1	3	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kali	1	5	5	5	7	8	9	34
1	3	2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	8,33	2,89	3,13	3,37	3,61	3,85	4,09	4,09
2			ASPEK PELAYANAN UMUM									
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									
2	1	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)									
			SD	%	112,49	113,70	114,15	114,54	114,89	115,19	115,47	115,47
			SMP	%	90,74	92,57	94,86	97,14	99,43	101,72	104,00	104,00
			SMA	%	89,22	86,48	87,74	89,00	90,26	91,52	92,79	92,79
2	1	2	Angka Partisipasi Murni (APM)									
			SD	%	98,32	98,65	98,67	98,69	98,70	98,72	98,73	98,73
			SMP	%	83,37	84,02	84,47	84,85	85,19	85,50	85,77	85,77
			SMA	%	65,78	66,14	66,23	66,32	66,39	66,45	66,51	66,51
2	1	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)									

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah			Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
			7-12 Tahun	%	98,80	98,87	98,87	98,87	98,87	98,87	98,86	98,86
			14-15 Tahun	%	91,91	92,29	92,27	92,24	92,22	92,21	92,19	92,19
			16-18 Tahun	%	74,37	75,27	75,58	75,85	76,09	76,31	76,50	76,50
2	1	4	Angka Putus Sekolah									
			SD	%	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SMP	%	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SMA	%	0,16	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
2	1	5	Angka Kelulusan									
			SD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			SMA	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	1	6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	92,08	97,95	100	100	100	100	100	100
2	1	7	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1:13	1:11	1:9	1:8	1:7	1:6	1:5	1:5
2	1	8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:9	1:9	1:8	1:7	1:7	1:6	1:6	1:6
2	1	9	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	90,3	91,61	91,57	91,53	91,50	91,47	91,44	91,44
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
2	2	1	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		7,53	6,58	5,24	4,57	4,00	3,78	3,20	3,20
2	2	2	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		7,98	10,05	9,99	9,94	9,89	9,84	9,78	9,78
2	2	3	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		6,65	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	4	Angka Kematian Ibu		59,08	57,94	52,32	46,71	41,09	35,47	29,85	29,85
2	2	5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		23,54	24,35	27,14	29,92	32,70	35,49	38,27	38,27
2	2	6	Rasio Puskesmas Dan Pustu		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
2	2	7	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
2	2	8	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	2	9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		0,078	0,093	0,094	0,095	0,096	0,096	0,097	0,097
2	2	10	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		0,209	0,226	0,234	0,242	0,250	0,258	0,266	0,266
2	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	86,35	84,79	85,45	86,30	87,35	88,59	90,03	90,03
2	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	33,1	100	100	100	100	100	100	100
2	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	2	14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	39,4	47,1	44,2	41,3	38,5	35,6	32,7	32,7
2	2	15	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	79,07	108,83	101,325	93,82	86,315	78,81	71,305	71,305
2	2	16	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	3,2	3,9	3,23	2,56	1,89	1,22	0,55	0,55

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	2	17	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	2	18	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	1,19	2,68	1,46	0,24	0	0	0	0
2	2	19	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0,009	0,011	0,009	0,005	0	0	0	0
2	2	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	5,09	6,58	8,27	10,40	12,96	15,97	19,41	19,41
2	2	21	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	73,30	73,99	73,55	73,17	72,83	72,53	72,26	72,26
2	2	22	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	45,25	55,22	52,65	50,43	48,46	46,71	45,12	45,12
2	2	23	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	52,37	81,80	85,68	89,19	92,40	95,37	98,14	98,14
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
2	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,520	99,000	0,639	0,699	0,779	0,880	1,000	1,000
2	3	2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0,0032	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0028
2	3	3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	95,49	96,54	98,93	100	100	100	100	100
2	3	4	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	78,97	79,86	80,79	81,70	82,61	83,52	84,43	84,43
2	3	5	Rasio Jaringan Irigasi		0,18	0,16	0,21	0,19	0,17	0,18	0,19	0,19
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
2	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,236	0,247	0,248	0,249	0,250	0,251	0,252	0,252
2	4	2	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	65	68,67	71,57	74,46	77,36	80,25	83,15	83,15
2	4	3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	11,39	10,98	11,61	12,15	12,63	13,06	13,44	13,44
2	4	4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,35	93,39	93,76	94,08	94,37	94,62	94,85	94,85
2	4	5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	76,12	81,73	83,34	84,74	85,97	87,08	88,08	88,08
2	4	6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,4	84,82	84,89	84,96	85,02	85,07	85,11	85,11
2	4	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,09	0	0	0	0	0	0	0
2	4	8	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		2,97	2,06	8,67	20,44	37,37	59,46	86,71	86,71
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
2	5	1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29
2	5	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		100	100	100	100	100	100	100	100
2	5	3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		0,00284	0,00300	0,00303	0,00305	0,00307	0,00309	0,00311	0,00311
2	5	4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	100	100	100	100	100	100	100
2	5	5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
2	6	1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	13	13	13	12	12	12	11	11
2	6	2	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100,00	100	100	100	100	100	100	100
2	6	3	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	98,60	97,48	98,42	99,69	100	100	100	100
2	6	4	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	73,60	76,35	70,80	65,25	59,70	54,15	48,60	48,60
2	6	5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	74,00	91,49	91,66	91,82	91,96	92,08	92,19	92,19
2	6	6	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	74,10	84,36	82,73	81,32	80,08	78,96	77,95	77,95
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2	1	1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun		0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)		0,38	0,28	0,15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	3	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek		1	1,82	2,76	3,92	5,32	6,95	8,82	8,82
2	1	4	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan		1	1,75	1,94	2,09	2,24	2,36	2,47	2,47
2	1	5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		0,08	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21
2	1	6	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan		0,02	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
2	1	7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		0,52	0,71	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91	0,91
2	1	8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	758,83	717,48	741,80	762,88	781,46	798,09	813,13	813,13
2	1	9	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		49,68	69,24	78,34	86,22	93,18	99,40	100,00	100,00
2	1	10	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1	0,98	1,01	1,05	1,09	1,13	1,17	1,17
2	1	11	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,53	0,49	0,47	0,47	0,48	0,51	0,55	0,55
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
2	2	1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,00	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2
2	2	2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	20,00	22,00	24,00	26,36	29,07	32,15	35,58	35,58
2	2	3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	92,09	82,60	83,62	84,52	85,32	86,04	86,69	86,69
2	2	4	Rasio KDRT		0,003	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	2	5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97,07	96,81	96,91	97,00	97,10	97,20	97,30	97,30
2	2	6	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		100	100	100	100	100	100	100	100
2	2	7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit		21,74	44,7724	77,2511	100	100	100	100	100
2	2	8	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		100	100	100	100	100	100	100	100
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
2	3	1	Ketersediaan Pangan Utama	%	389,13	100	100	100	100	100	100	100
2	3	2	Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hr	4.026,36	4.026,36	4.026,36	4.207,57	4.291,72	4.377,56	4.465,11	4.465,11
2	3	3	Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hr	98,71	98,71	98,71	100,69	102,7	104,7	106,85	106,85
2	3	4	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	36	36	45	45	45	45	45	45
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
2	4	1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	24,12	25,40	26,67	28,06	29,56	31,18	32,92	32,92
2	4	2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	50	56,98	68,95	88,05	100,00	100,00	100,00	100,00
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
2	5	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		N/A	63,22	62,92	63,45	63,99	64,53	65,07	65,07
2	5	2	Indeks Kualitas Air		0,63	61,00	58,85	58,95	59,05	59,15	59,25	59,25
2	5	3	Indeks Kualitas Udara		88,30	84,64	84,74	84,84	84,94	85,04	85,14	85,14
2	5	4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		23,64	23,56	23,75	23,91	24,05	24,18	24,30	24,30
2	5	5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	68,62	95,93	100	100	100	100	100	100
2	5	6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	1
2	5	7	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	1
2	5	8	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	1
2	5	9	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	100	100	100	100	100	100
2	5	10	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	100	100	100	100	100	100
2	5	11	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	1
2	5	12	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan	Kelompok	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	5	13	Hidup Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	100	100	100	100	100	100
2	5	14	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	20,64	24,95	27,22	29,18	30,92	32,47	33,87	33,87
2	5	15	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	73,56	86,63	94,88	100	100	100	100	100
2	5	16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	0	26,24	25,20	24,30	23,51	22,81	22,16	22,16
2	5	17	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	25,13	35,00	38,36	41,28	43,85	46,15	48,23	48,23
2	5	18	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	1	1	2	2	2	2
2	5	19	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	23,64	29,86	32,00	33,85	35,49	36,95	38,27	38,27
2	5	20	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	25	32,36	34,64	36,62	38,37	39,93	41,34	41,34
2	5	21	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	0	0	0	0	0	0	1
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
2	6	1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,		1	1	1	1	1	1	1	1
2	6	2	Rasio bayi berakta kelahiran,		0,40	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2	6	3	Rasio pasangan berakta nikah,		0,05	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	6	4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100	100	100	100	100	100	100	100
2	6	5	Cakupan penerbitan KTP-el		99,99	100	100	100	100	100	100	100
2	6	6	Cakupan penerbitan akte kelahiran		49,74	80	80	80	80	80	80	80
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa									
2	7	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	7	2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk		146	146	146	146	146	146	146	146
2	7	3	Persentase Lsm Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	7	4	Persentase Pkk Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	7	5	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	7	6	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	100	100	100	100	100	100	100
2	7	7	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		93	93	93	93	93	93	93	93

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									
2	8	1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	0,57	0,55	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51
2	8	2	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,318	2,474	2,443	2,499	2,556	2,609	2,631	2,2631
2	8	3	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	61,11	67,83	73,59	78,58	82,98	86,92	90,48	90,48
2	8	4	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	8,33	8,33	14,99	26,42	42,62	63,57	89,29	89,29
2	8	5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	1	1	1	1	1	1
2	8	6	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB	1.Dinas DUK CAPIL 2.BAPPEDA 3.DIKNAS 4.DINKES 5.BPS 6.DPPKB
2	8	7	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas Pendidikan 2.IBI 3.PKBM
2	8	8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	20,39	19,40	18,19	16,85	15,37	13,75	11,99	11,99
2	8	9	Ratio Akseptor Kb	%	13,47	15,27	16,92	18,33	19,97	21,60	23,13	23,13 -
2	8	10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	74,97	75,50	75,16	74,86	74,59	74,36	74,15	74,15
2	8	11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		89,79	89,79	89,79	89,79	89,79	89,79	89,79	89,79
2	8	12	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,25	4,36	4,41	4,45	4,49	4,53	4,56	4,56
2	8	13	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,74	13,11	12,48	11,84	11,21	10,57	9,94	9,94
2	8	14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	18,51	35,29	37,32	39,09	40,64	42,04	43,29	43,29
2	8	15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	39,94	40,56	46,97	53,50	60,17	66,97	73,89	73,89

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	8	16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	80,97	83,06	92,61	100	100	100	100	100
2	8	17	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- KB	%	71,54	69,75	74,96	79,78	84,30	88,55	92,58	92,58
2	8	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB	%	71,88	72,11	81,76	91,16	100	100	100	100
2	8	19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	%	10	10	10	10	10	10	10	10
2	8	20	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	4,3	1,96	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,51
2	8	21	Cakupan PKB/PLKB Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdzng Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	8	22	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-KB Mandiri	%	0,15	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23
2	8	23	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	8	24	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	8	25	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	23,56	23,56	38,85	65,05	100	100	100	100
2	8	26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di setiap Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	8	27	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (IMS)	%	0,000	0	0	0	0	0	0	-
2	8	28	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	8	29	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	20,16	37,82	38,38	38,87	39,30	39,68	40,03	40,03
2	8	30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22	22,46	22,64	22,79	22,93	23,05	23,17	23,17
2	8	31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APD Des	%	0	0,0057	0,0065	0,0078	0,0095	0,0116	0,0141	0,0141
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
2	9	1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		3	3	3	3	3	3	3	3
2	9	2	Jumlah arus penumpang angkutan Umum		14.500	15.472	14.100	12.911	11.862	10.924	10.075	10.075
2	9	3	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,18	1,31	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1,03

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	9	4	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	86,80	76,1	92,4	100	100	100	100	100
2	9	5	Pemasangan Rambu-Rambu	%	59,00	66,70	66,01	68,66	71,77	74,68	76,08	76,08
2	9	6	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum		14.500	24.600	26.480	28.134	29.417	28.237	30.437	30.437
2	9	7	Rasio Ijin Trayek		0,005	0,006	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,016
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
2	10	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	0,00	82	87	91	95	99	102	102
2	10	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0,67	0,73	0,76	0,79	0,81	0,83	0,85	0,85
2	10	3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	0	83,20	83,90	84,60	85,30	86,00	86,70	86,70
2	10	4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	0	51,55	54,87	57,91	60,73	63,38	65,87	65,87
2	10	5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	0	81,79	86,90	91,33	95,24	98,74	100	100
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah									
2	11	1	Persentase koperasi aktif	%	72,66	74,18	74,73	75,21	75,63	76,00	76,34	76,34
2	11	2	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	98,04	98,20	98,43	98,97	99,50	99,65	99,85	99,85
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
2	12	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	58	63	66	69	72	74	76	76
2	12	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	1.225.838	906.912	763.915	780.755	797.595	814.435	831.275	831.275
2	12	3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	243	15	10	25	30	30	35	35
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga									
2	13	1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	85,71	87,14	88,93	90,71	92,50	94,28	96,07	96,07
2	13	2	Persentase wirausaha muda	%	2,59	2,89	3,13	3,37	3,61	3,85	4,09	4,09
2	13	3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	8,33	22,87	22,17	21,57	21,03	20,55	20,12	20,12
2	13	4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	25,86	31,38	36,20	41,03	45,86	50,69	55,51	55,51
2	13	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	35,93	43,69	48,43	52,30	55,30	57,43	58,68	58,68
2	13	6	Jumlah atlet berprestasi		3	18	18	19	19	19	20	20
2	13	7	Jumlah prestasi olahraga		1	3	3	3	3	3	3	3
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
2	14	1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	14	2	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
2	15	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
2	16	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		1	3	3	3	3	3	3	3

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	16	2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	58	58	58	59	59	60	61	61
2	16	3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2	2	2	2	2	2	2
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
2	17	1	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	9,55	42,97	38,52	34,67	31,27	28,23	25,48	25,48
2	17	2	Persentase Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	%	43,03	43,12	43,90	45,16	46,90	49,12	51,82	51,82
2	17	3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,95	1,14	1,43	1,79	2,21	2,71	3,28	3,28
2	17	4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun	Orang	35.925	58.584	63.322	69.007	75.968	84.714	96.069	96.069
2	17	5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	10.684	11.120	11.704	12.288	12.872	13.456	14.040	14.040
2	17	6	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	48,01	52,10	57,21	63,78	71,81	81,30	92,25	92,25
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
2	18	1	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	18	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	0	1,12	1,24	1,39	1,59	1,84	2,18	2,18
2			Urusan Pemerintahan Pilihan									
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan									
2	1	1	Cakupan Produksi perikanan	%	128	128	129	130	131	134	136	136
2	1	2	Perikanan tangkap	ton	53.860,1	55.075,8	56.098,1	57.120,4	58.142,7	59.165,0	60.187,3	60.187,30
2	1	3	Perikanan Budidaya	ton	5.171	5176	5176	5176	5176	5176	5176	5176
2	1	4	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	69,5	68,9	70,6	72,2	73,5	74,7	75,8	75,8
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
2	2	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	301.507	342.951	373.095	395.675	429.291	460.991	488.084	488.084
2	2	2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
2	2	3	PAD Sektor Pariwisata	%	1,74	4,52	5,37	6,11	6,76	7,34	7,86	7,86
2	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
2	3	1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		26.62	26,05	25,56	25,15	24,78	24,46	24,18	24,18
2	3	2	Cakupan bina kelompok tani	%	71,18	26,25	26,25	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	3	3	Jumlah Populasi Ternak									
			<i>Sapi Potong</i>	<i>Ekor</i>	76.797	78.048	78.729	79.324	79.853	80.329	80.762	80.762
			<i>Ayam Ras Pedaging</i>	<i>Ekor</i>	2.309.930	2.378.784	2.414.546	2.445.959	2.474.006	2.499.367	2.522.533	2.522.533
			<i>Ayam Ras Petelur</i>	<i>Ekor</i>	638.724	664.979	709.631	751.499	791.040	828.599	864.442	864.442
2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral									

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah			Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	4	1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	99.494	100.117	100.890	101.663	102.436	103.209	103.982	103.982
2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
2	5	1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,80
2	5	2	Jumlah Pasar	Unit	43	43	43	43	43	43	43	43
2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
2		1	Cakupan bina kelompok pengrajin		0,14	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,22
2			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
2	1		Sekretariat Daerah									
2	1	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		2,55	2,82	2,72	2,76	2,81	2,87	2,86	2,82
2	2		Sekretariat DPRD									
2	2	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	2	2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	2	3	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
2	1		Perencanaan									
2	1	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	1	3	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	1	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	108,47	100,33	100	100	100	100	100	100
2	1	6	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	2		Keuangan									
2	2	1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	2	2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3,83	0,67	0,57	0,49	0,43	0,38	0,38	0,38
2	2	3	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0	0	0	0	0	0	0

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	2	4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	32,00	28,02	27,35	26,77	26,24	25,77	25,77	25,77
2	2	5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	18,84	19,83	20,17	20,47	20,74	20,99	20,99	20,99
2	2	6	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	2	7	Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung		0,75:1							
2	2	8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,23	11,89	12,06	12,22	12,39	12,56	12,56	12,56
2	2	9	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,39	11,72	10,81	11,76	11,37	11,41	11,40	11,40
2	3		Kepegawaian									
2	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	96,77	88,71	89,03	89,35	89,67	89,99	90,31	90,31
2	3	3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	47,06	69,81	77,92	84,94	91,14	96,68	100,00	100,00
2	4		Pendidikan Dan Pelatihan									
2	4	1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	40	40	29	29	29	29	29	29
2	4	2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	2.297	2.063	1.837	1.703	1.564	1.441	1.275	1.275
2	5		Penelitian Dan Pengembangan									
2	5	1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	6,06	7,69	8,53	9,56	10,86	12,55	14,83	14,83
2	5		Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	12,12	10,58	11,29	12,06	12,93	13,91	15,05	15,05
2	5	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	12,12	10,58	11,29	12,06	12,93	13,91	15,05	15,05
2	5	3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	33,33	60,75	60,87	61,01	61,17	61,35	61,55	61,55
2			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
2	6		Inspektorat Daerah									
2	6	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	59,5	61,12	68,40	79,47	94,32	100	100	100
2	6	2	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,273	0,283	0,246	0,181	0,091	0,000	0,00	0,00
2	6	3	Jumlah temuan BPK	Temuan	9	8	7	6	5	4	3	3
2			Unsur Pemerintahan Umum									
2	7		Kesatuan Bangsa dan Politik									
2	7	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	0	n/a	70	70,5	71	71,5	72	72
2	7	2	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	7	3	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	0	5	5	5	5	5	5	5
3			ASPEK DAYA SAING DAERAH									
3			Kemampuan Ekonomi Daerah									
3	1	1	Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per Rumah Tangga		866.469	891.033	938.435	985.837	1.033.239	1.080.641	1.128.043	1.128.043
3	2	2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita		412.723	413.397	443.080	472.763	502.446	532.129	561.812	561.812

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No			Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Rencana Capaian (2021)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
3	3	3	Nilai Tukar Petani		103,25	103,47	104,02	104,83	105,90	107,22	108,80	108,80
3			Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
3	1	1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang	%	80	84	88	92	96	99	100	100
3			Iklim Berinvestasi									
3	1	1	Angka Kriminalitas yang tertangani		20,57	24,69	25,37	25,95	26,46	26,92	27,34	27,34
3			Sumberdaya Manusia									
3	1	1	Rasio Ketergantungan		42,59	40,88	39,05	37,22	35,39	33,56	31,73	31,73

8.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yangberhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melaluiPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i)pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii)perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii)penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv)pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiriatas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VIII-5
Capaian dan Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Bulukumba 2022-2026

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun 2020	Rencana Capaian Tahun 2021	Target Nasional	Target Kabupaten 2022-2026
1	PENDIDIKAN					
1.1	Pendidikan Dasar					
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	95	100	100	100
1.2	Pendidikan Kesetaraan					
2	Persentase WargaNegara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	94	100	100	100
1.3	Pendidikan anak usia dini					
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	67	100	100	100
2	KESEHATAN					
2.1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah					
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	%	73,31	100	100	100
2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin					
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	85,66	100	100	100
2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	79	100	100	100
2.4	Pelayanan kesehatan balita					
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	50,02	100	100	100
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun 2020	Rencana Capaian Tahun 2021	Target Nasional	Target Kabupaten 2022-2026
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	2,14	100	100	100
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif					
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	4,46	100	100	100
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	31,41	100	100	100
2.8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi					
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	7,88	100	100	100
2.9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus					
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100	100
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
13	Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	63,49	100	100	100
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis					
14	Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100	100
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
15	Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	40,63	100	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum seharihari	%	84,40	100	100	100
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic					
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	76,12	100	100	100
4	PERUMAHAN DA PEMUKIMAN					
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/k ota;					
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	54	100	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	%	0	100	100	100
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun 2020	Rencana Capaian Tahun 2021	Target Nasional	Target Kabupaten 2022-2026
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100	100	100	100
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana					
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100
6	SOSIAL					
6.1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti					
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	89,8	100	100	100
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti					
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	0	100	100	100
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti					
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	41,18	100	100	100
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	0	100	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota					
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100	100

8.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten.

Penetapan target tahun 2022 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026

Tabel VIII-6
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	TUJUAN 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	7,1	6,88	6,66	6,44	6,21	5,99	5,77	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	82,9	86,44	89,97	93,51	97,05	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	5,37	7,69	10,01	12,33	14,65	16,97	19,29	Dinas Sosial
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	74,1	92,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	13696	13011,20	12326,40	11641,60	10956,80	10272,00	9587,20	Dinas Sosial
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	86,4	87,31	88,21	89,12	90,02	90,93	91,83	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	96,19	97,15	98,11	99,08	100,00	100,00	101,96	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,63	64,95	65,28	65,60	65,92	66,25	66,57	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	84,40	85,24	86,09	86,93	87,78	88,62	89,46	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	36,90	50,18	63,47	76,75	90,04	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	89,43	93,01	96,58	100,16	103,74	107,32	110,89	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	75,47	80,75	86,04	91,32	96,60	101,88	107,17	Dinas Pendidikan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	63,94%	64,58%	65,23%	65,87%	66,51%	67,16%	67,80%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga	49747,0	44102,15	38457,30	32812,45	27167,60	21522,75	15877,90	Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	3	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	10	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Orang	345	379,50	414,00	448,50	483,00	517,50	552,00	Dinas Sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Orang	345	395,38	445,76	496,14	546,53	596,91	647,29	Dinas Sosial
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)									Dinas Sosial
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	500.000.000	375.000.000	250.000.000	125.000.000	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang	Persen	23,4	23,66	23,92	24,18	24,44	24,70	24,96	Dinas Sosial

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
	dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.									
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	25,46	26,22	26,99	27,75	28,52	29,28	30,04	Dinas Sosial
2	TUJUAN 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan									
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	10,90	9,27	7,63	6,00	4,36	2,73	1,09	Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Persen	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	8,27	7,44	6,62	5,79	4,96	4,14	3,31	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen	3,06	2,60	2,14	1,68	1,22	0,77	0,31	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	2,93	2,34	1,76	1,17	0,59	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	16,46	14,81	13,17	11,52	9,88	8,23	6,58	Dinas Kesehatan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	74	77,30	80,61	83,91	87,21	90,52	93,82	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	74,00	76,96	79,92	82,88	85,84	88,80	91,76	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	TUJUAN 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka	4	3,48	2,96	2,43	1,91	1,39	0,87	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	86,4	87,31	88,21	89,12	90,02	90,93	91,83	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	85,7	86,42	87,14	87,87	88,59	89,31	90,03	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	7,98	7,58	7,18	6,78	6,38	5,99	5,59	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	6,65	6,32	5,99	5,65	5,32	4,99	4,66	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	7,53	7,15	6,78	6,40	6,02	5,65	5,27	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	97,72	98,21	98,70	99,19	99,67	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	0,009	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Orang	122,54	121,31	120,09	118,86	117,64	116,41	115,19	Dinas Kesehatan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Orang	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	138	124,20	110,40	96,60	82,80	69,00	55,20	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen	0,24	0,22	0,19	0,17	0,14	0,12	0,10	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	7,46	7,25	7,04	6,83	6,61	6,40	6,19	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen	0,15	0,08	0,01	-0,07	-0,14	-0,21	-0,28	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	74,97	77,69	80,42	83,14	85,86	88,58	91,31	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Persen	18,51	22,02	25,53	29,04	32,55	36,07	39,58	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
										Perlindungan Anak
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	TFR	2,318	2,09	1,85	1,62	1,39	1,16	0,93	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Persen	68,62	71,54	74,47	77,39	80,31	83,23	86,16	Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persen	11,74	11,15	10,56	9,98	9,39	8,80	8,21	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Penduduk	348767	365887,44	383007,88	400128,32	417248,76	434369,21	451489,65	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	71,83	76,14	80,45	84,76	89,07	93,38	97,69	Dinas Kesehatan
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	44,93	41,54	38,15	34,77	31,38	27,99	24,60	Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi	Persen	0,368	0,68	1,00	1,32	1,63	1,95	2,27	Dinas Kesehatan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
	tenaga kesehatan.									
4	TUJUAN 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua									
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persen	90,00	91,80	93,60	95,40	97,20	99,00	100,00	Dinas Pendidikan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	90,29	96,22	100,00	100,00	100,00	119,93	125,86	Dinas Pendidikan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	71,43	75,72	80,00	84,29	88,57	92,86	97,14	Dinas Pendidikan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	112,49	112,60	112,71	112,83	112,94	113,05	113,16	Dinas Pendidikan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	90,74	95,28	99,81	104,35	108,89	113,43	117,96	Dinas Pendidikan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	7	7,91	8,82	9,73	10,64	11,55	12,46	Dinas Pendidikan
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	31,93	43,11	54,28	65,46	76,63	87,81	98,98	Dinas Pendidikan
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen	16	18,40	20,80	23,20	25,60	28,00	30,40	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen	104,81	106,91	109,00	111,10	113,19	115,29	117,39	Dinas Pendidikan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	99,53	99,63	99,73	99,83	99,93	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24	Persen	92,90	93,00	93,10	93,20	93,30	93,40	93,50	Dinas Pendidikan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
	tahun dan umur 15-59 tahun.									
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Persen	90,00	91,80	93,60	95,40	97,20	99,00	100,00	Dinas Pendidikan
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	46,80	50,54	54,29	58,03	61,78	65,52	69,26	Dinas Pendidikan
5	TUJUAN 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan									
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	4	4	5	5	6	6	6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	21,74	19,57	17,39	15,22	13,04	10,87	8,70	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	71	63,90	56,80	49,70	42,60	35,50	28,40	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12	Persen	22	19,80	17,60	15,40	13,20	11,00	8,80	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
	bulan terakhir.									
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	56,00	61,60	67,20	72,80	78,40	84,00	89,60	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	20,00	20,68	21,36	22,04	22,72	23,39	24,07	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	18,4	18,77	19,14	19,50	19,87	20,24	20,61	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan	Persen	11,74	11,15	10,56	9,98	9,39	8,80	8,21	Dinas Pengendalian

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).									Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	4,25	4,37	4,49	4,61	4,73	4,85	4,97	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persen	92,46	93,91	95,37	96,82	98,27	99,72	101,18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
6	TUJUAN 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	88,90	89,79	90,68	91,57	92,46	93,35	94,23	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	88,90	89,79	90,68	91,57	92,46	93,35	94,23	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	36,90	42,80	48,71	54,61	60,52	66,42	72,32	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	136	139	141	144	147	149,60	152,32	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	136	137	139	140	141	143	144	Dinas Kesehatan
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang	Desa	1,13	1,46	1,80	2,13	2,47	2,80	3,14	Dinas Perumahan,

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
	terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.									Kawasan Permukiman dan Pertanian
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	%	19	20,26	21,52	22,78	24,04	25,30	26,56	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	65	69,41	73,81	78,22	82,63	87,03	91,44	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sungai	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	TUJUAN 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua									
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
7.3.1*	Intensitas energi primer.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
8	TUJUAN 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	0,43	0,77	1,12	1,46	1,81	2,15	2,49	Badan Perencanaan Pembangunan,

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
										Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta	34,43	36,91	39,40	41,88	44,36	46,84	49,33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Persen	8,1	8,43	8,76	9,09	9,43	9,76	10,09	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen	0,22	0,26	0,31	0,35	0,40	0,44	0,48	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persen	44,75	44,90	45,04	45,19	45,33	45,48	45,63	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	35,26	35,66	36,06	36,46	36,86	37,27	37,67	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persen	10,68	12,75	14,83	16,90	18,98	21,05	23,13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	34.143	39605,88	45068,76	50531,64	55994,52	61457,40	66920,28	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Persen	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
										dan Tenaga Kerja
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen	38,09	41,90	45,71	49,52	53,33	57,14	60,94	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	293	424,85	556,70	688,55	820,40	952,25	1084,10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	278330	281113,30	283896,60	286679,90	289463,20	292246,50	295029,80	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	ATM	1	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Persen	33,61	37,78	41,95	46,12	50,29	54,46	58,64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	TUJUAN 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi									
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dermaga	2	8	13	19	24	30	36	Dinas Perhubungan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	7,47	7,63	7,80	7,96	8,12	8,29	8,45	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
										Menengah
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	5,4	5,45	5,51	5,56	5,62	5,67	5,72	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	94,46	95,40	96,35	97,29	98,24	99,18	100,13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	43,00	43,43	43,86	44,29	44,72	45,15	45,58	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
10	TUJUAN 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara									
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien	0,371	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	Dinas Sosial
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	7,1	6,86	6,62	6,38	6,14	5,90	5,66	Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	11	8,80	6,60	4,40	2,20	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	109	113	117	121	125	130	134	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	7,86	7,81	7,76	7,71	7,66	7,61	7,56	Dinas Sosial
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekda, Bagian Hukum dan HAM
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	5,369	7,69	10,01	12,33	14,65	16,97	19,29	Dinas Sosial
11	TUJUAN 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	92,3500	93,25	94,14	95,04	95,94	96,83	97,73	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Persen	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	40,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	500.000.000	375.000.000	250.000.000	125.000.000	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	73,56	75,03	76,50	77,97	79,44	80,92	82,39	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	TUJUAN 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan									
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	25,13	37,70	50,26	62,83	75,39	87,96	100,52	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	62,769	63,39	64,02	64,64	65,27	65,89	66,52	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	2	2	3	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	TUJUAN 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya									
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	TUJUAN 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan									
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan	Ton	53.860,10	54851,08	55842,07	56833,05	57824,03	58815,02	59806,00	Dinas Perikanan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
	yang berada dalam batasan biologis yang aman.									
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	867	910,35	953,70	997,05	1040,40	1083,75	1127,10	Dinas Perikanan
15	TUJUAN 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati									
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	TUJUAN 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		7	7	6	6	6	6	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	RT	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan	Orang	128	102,40	76,80	51,20	25,60	0,00	0,00	Dinas Pengendalian

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
	terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.									Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Orang	517	413,60	310,20	206,80	103,40	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen	91,51	92,43	93,34	94,26	95,17	96,09	97,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		WDP (50%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	61,14	64,29	67,45	70,60	73,75	76,91	80,06	Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	97,16	97,65	98,13	98,62	99,10	99,59	100,00	Sekda, Bagian Pembangunan
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	55,71	57,94	60,17	62,40	64,62	66,85	69,08	Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan,

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									Penelitian dan Pengembangan Daerah
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	20,00	20,68	21,36	22,04	22,72	23,39	24,07	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	15,00	25,65	36,30	46,95	57,60	68,25	78,90	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		75,12	79,63	84,13	88,64	93,15	97,66	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	78,00	78,78	79,56	80,34	81,12	81,90	82,68	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	ASN	1	2	2	3	3	4	4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setda, Bagian Hukum dan HAM
17	TUJUAN 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap	Rp	130.060.914.218	131.361.523.360	132.662.132.503	133.962.741.645	135.263.350.787	136.563.959.929	137.864.569.071	Badan Pengelola Keuangan dan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
	PDB menurut sumbernya.									Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	0,36	0,57	0,78	0,99	1,20	1,40	1,61	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	0,958	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	43,00	43,78	44,57	45,35	46,14	46,92	47,71	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	66,67	73,34	80,00	86,67	93,34	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

No	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Rencana Capaian 2021	Target Pencapaian					Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
										Daerah
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		6	8	10	12	14	15	17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Orang	7996	8591	9186	9782	10377	10972	11567	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Adapun KUA/PPAS berpedoman pada RKPD sebagai landasan penyusunan RAPBD setiap tahun anggaran.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya (2026-2031) dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Program-program pada tahun 2026 masa transisi tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap kepala Perangkat dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman untuk menyusun RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD. Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah;
- e. Bupati Bulukumba selaku kepala daerah menginstruksikan jajarannya untuk

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2026**

mempublikasikan dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Mengingat dokumen RPJMD merupakan dokumen yang masuk sebagai kategori informasi publik, sehingga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

Jalan Kenari No.1 Bulukumba Telp. (0413) 81011 Kode Pos 92511

Email : bappedablkbulukumba@gmail.com